

PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

LAPORAN KEGIATAN

**Bimbingan Teknis
Hukum Acara
Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum
Tahun 2024 bagi Partai
Gelombang Rakyat
Indonesia**

Bogor, 28 s.d. 31 Agustus 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pengurus dan anggota Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengenai konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Kegiatan ini dibuka oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, serta dihadiri oleh Ketua Bidang Hukum, HAM & Advokasi Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
A. PENDAHULUAN	1
A.1. Umum	1
A.2. Tujuan	3
B. PELAKSANAAN KEGIATAN	5
B.1. Nama Kegiatan	5
B.2. Waktu dan Tempat	5
B.3. Peserta Kegiatan	5
B.4. Akomodasi Peserta	7
B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat	7
B.6. Uraian Kegiatan	7
B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta	7
B.6.2. Penjelasan Teknis dan <i>Pre Test</i>	7
B.6.3. Acara Pembukaan	8
B.6.4. Penyampaian Materi	8
B.6.5. Acara Penutupan	10
C. HASIL EVALUASI KEGIATAN	11
C.1. Hasil <i>Pre Test</i> dan <i>Post Test</i>	11
C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner	11
D. HAMBATAN	20
E. PENUTUP	21
F. LAMPIRAN	22

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Kegiatan
2. Jadwal Kegiatan
3. Booklet Penyelenggaraan Kegiatan
4. Bahan Penjelasan Teknis
5. Panduan Penggunaan SIMULTAN
6. Panduan Moderator
7. Panduan Narasumber
8. Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta
9. Kumpulan Materi Narasumber
10. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas
11. Surat Tugas Narasumber
12. Surat Perjanjian Kerjasama
13. Daftar Hadir Peserta
14. Informasi dan ketentuan Tugas Praktek
15. Penilaian Hasil Praktek Peserta
16. Daftar Pertanyaan Peserta
17. Tata Tertib Peserta
18. Alur Kegiatan *Offline*
19. Laporan Keuangan
20. Data Peserta Dari Panitia
21. Data Peserta Registrasi

PENDAHULUAN



PELAKSANAAN KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA

Senin s.d. Kamis, 28 s.d. 31 Agustus 2023

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) pengkhianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 yang akan dilakukan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, MK memiliki tanggungjawab terhadap suksesnya keseluruhan proses pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari kewenangan MK yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Sesuai amanat Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak diselenggarakan di tahun 2024. Pemilu ini akan menjadi pemilihan yang terbesar dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Pemilu ini akan memperebutkan 84 Dapil DPR RI, 272 Dapil DPRD Provinsi, dan 2.206 Dapil DPRD Kabupaten dan Kota di 38 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota diseluruh wilayah Indonesia.

Melihat kondisi obyektif tersebut, berbagai pemangku kepentingan yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini (KPU, Bawaslu, Aparatur Penegak Hukum baik MA dan lembaga peradilan di bawahnya, Kepolisian, termasuk para kontestan dan para Advokat/Pengacara) harus mempersiapkan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini dengan lebih matang dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya.

Sebagai lembaga peradilan terkait politik, MK dengan kewenangan yang dimilikinya tentu tidak dapat menyelesaikan seluruh pelanggaran-pelanggaran Pemilu, terutama yang berupa tindak pidana maupun pelanggaran administratif lainnya, karena pelanggaran ini berada dalam wilayah kewenangan badan peradilan lain. Oleh karenanya, peran MK dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berkeadilan sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi lembaga ataupun dukungan berbagai pihak, khususnya para *stakeholder*, yakni penyelenggara Pemilu, dan peserta Pemilu itu sendiri.

Dalam praktiknya, pengetahuan dan kemampuan para *stakeholder* kelak akan sangat mempengaruhi kualitas dan efektifitas jalannya persidangan. Sebab, seringkali para pihak yang berperkara di MK masih kurang mengetahui, memahami, dan menguasai seluk beluk berperkara di MK. Mulai dari yang bersifat mendasar atau teknis hingga yang sangat berkaitan dengan hal-hal prinsip, seperti kemampuan menyusun dan merumuskan substansi pokok permohonan beserta argumentasinya agar mudah dimengerti dan langsung pada inti persoalan atau sengketa. Hal ini dapat dimaklumi karena memang hukum acara di MK tidak sama persis dengan persidangan pada umumnya, seperti yang berlaku di Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya.



Beberapa hal yang perlu diketahui para pihak adalah berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, khususnya hukum acara MK. Jika para *stakeholder* belum memiliki gambaran ataupun pengetahuan mendasar dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden di MK, akibatnya bisa saja berdampak terhambatnya persidangan yang seharusnya digelar secara cepat (*speedy trial*). Di samping itu, para *stakeholder* juga sangat perlu untuk mengetahui perkembangan putusan-putusan MK yang beberapa di antaranya menjadi rujukan dalam mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan. Hal ini diperlukan agar proses peradilan cepat benar-benar dapat dilaksanakan oleh MK dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Dengan demikian, kebutuhan akan informasi dan pengetahuan akan seluk beluk perkara di MK, khususnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden bagi *stakeholder*, menjadi penting untuk diselenggarakan. Selain demi terwujudnya peradilan yang cepat, juga harapannya akan membuat persidangan di MK akan berjalan lebih efektif dan efisien sehingga tercipta pemilu yang demokratis dan berkeadilan dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Atas dasar pemikiran ini, Mahkamah Konstitusi melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia sebagai pihak yang kemungkinan menjadi pemohon maupun pihak terkait pada sengketa Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Para peserta kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi sahabat MK, *friends of court*, *amicus curiae*, yang dapat mempermudah akses masyarakat terhadap peradilan (*Access to Court*) dan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan (*Access to Justice*). Kondisi ini tentu saja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya cita negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democratic state*).

A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;



- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- e. Meningkatkan keterampilan beracara di Mahkamah Konstitusi mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.





PELAKSANAAN KEGIATAN



B. PELAKSANAAN KEGIATAN

B.1. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia”.

B.2. Waktu dan Tempat

Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Senin s.d. Kamis, 28 s.d. 31 Agustus 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor.

B.3. Peserta Kegiatan

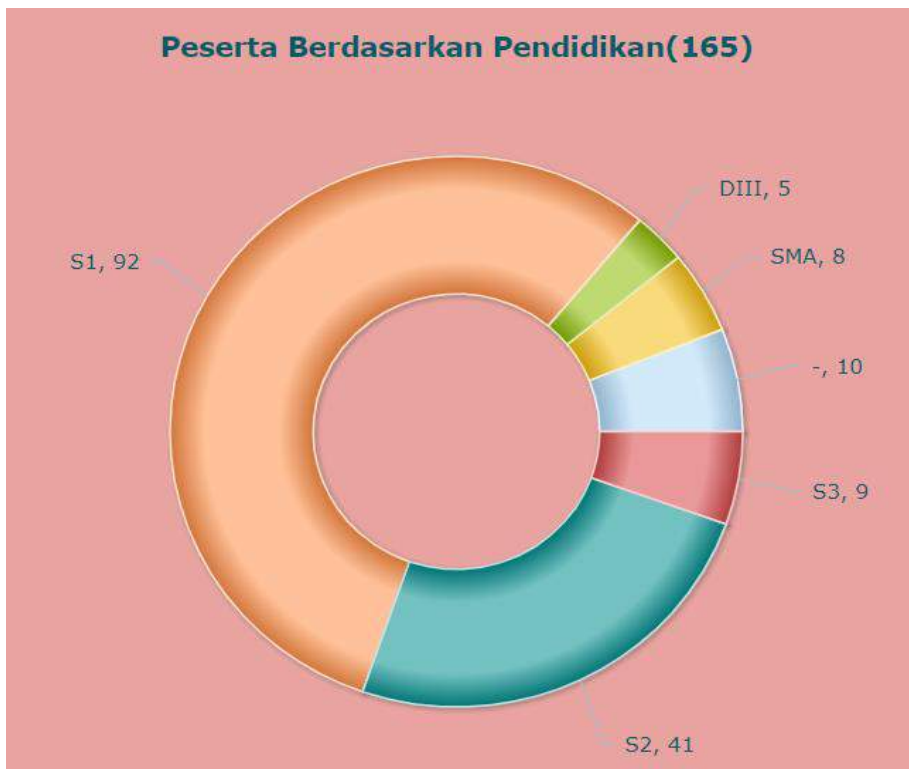
Peserta kegiatan sebanyak 165 orang pengurus dan/atau anggota Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Seluruh peserta mengikuti kegiatan luring di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Berikut adalah grafik sebaran peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia:

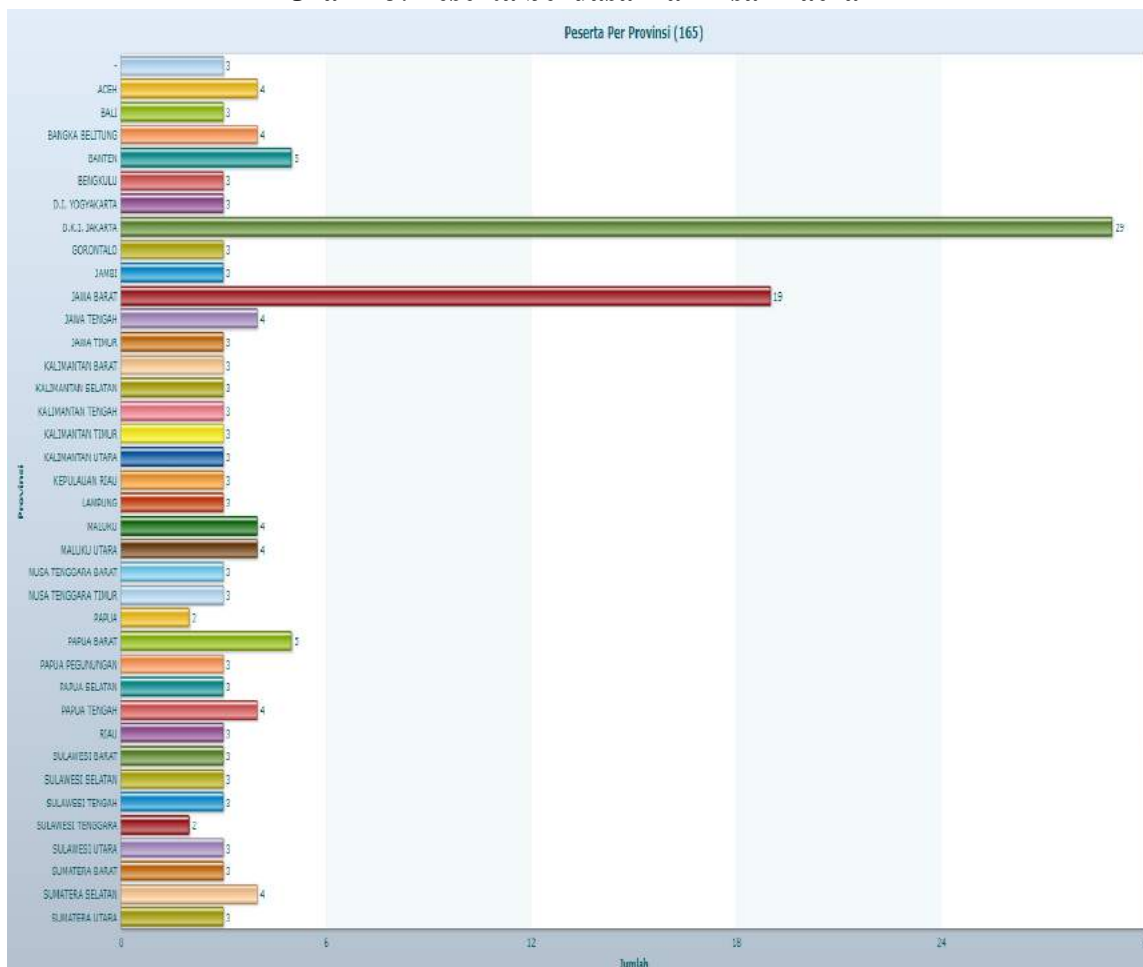
Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan



Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah



B.4. Akomodasi Peserta

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
 - Sandal kamar
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan mendapatkan *seminar kits*, yang meliputi:
 - 1) Tas;
 - 2) *Id card*;
 - 3) Buku saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*soft file*);
 - 4) *Booklet* panduan kegiatan (*soft file*);
 - 5) *Block Note* dan pulpen;
 - 6) Modul/makalah/*hand out* materi dari narasumber (*soft file*);
 - 7) Baju/kaos.
- b. E- Sertifikat
 - 1) Peserta diberikan e-Sertifikat keikutsertaan kegiatan;
 - 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh panitia.

B.6. Uraian Kegiatan

B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta

Kegiatan pendaftaran/registrasi peserta dilaksanakan pada Senin, 28 Agustus 2023 pukul 10.00 – 12.00 WIB. Ketika para peserta melakukan registrasi, peserta juga akan langsung diberikan *seminar kits* oleh panitia.

B.6.2. Penjelasan Teknis dan *Pre Test*

Penjelasan teknis disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan, Bapak Nanang Subekti pada hari Senin, 28 Agustus 2023 pukul 14.30 s.d. 15.30 WIB. Setelah sesi Penjelasan teknis, peserta dipandu oleh panitia untuk melaksanakan *Pre Test* melalui akun SIMULTAN masing-masing peserta.



B.6.3. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. pada Senin, 28 Agustus 2023 pukul 16.30 WIB di aula Grha Konstitusi 3 Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Sebelum acara resmi dibuka, Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bapak Nanang Subekti, menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan kegiatan, serta dilanjutkan sambutan oleh Ketua Bidang Hukum, HAM & Advokasi Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Bapak Amin Fahrudin, S.H., M.H.. Susunan acara yaitu terlebih dahulu dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan Naskah Pancasila, Mars Mahkamah Konstitusi, Mars Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Laporan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Sambutan Ketua Bidang Hukum, HAM & Advokasi Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi, menyanyikan Hymne Mahkamah Konstitusi, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.

B.6.4. Penyampaian Materi

1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas Hakim Konstitusi, Panitera Muda MK, Panitera Pengganti MK, Asisten Ahli Hakim Konstitusi serta Tim IT MK dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

Tabel 1. Materi dan Narasumber

NO.	MATERI	NARASUMBER
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	1. YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum. 2. YM Dr. Wahiduddin Adams, SH. MA
2.	Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.
3.	Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.



NO.	MATERI	NARASUMBER
4.	Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	1. Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I. 2. Jamaludin Salam
5.	Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Saiful Anwar, S.H., M.H.
6.	Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	1. Dr. Abdul Ghoffar, S.H., M.H. 2. Alboin Pasaribu, S.H., M.H. 3. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H., M.H. 4. Dr. Agusniwan Etra, S.H., M.H.
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	1. Ery Satria Pamungkas, S.H. 2. Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H. 3. Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H. 4. M. Lutfi Chakim, S.H., LL.M.

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah oleh narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator yang mengatur lalu lintas sesi diskusi. Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi yang telah disiapkan oleh narasumber berupa *slide powerpoint*, diupload oleh panitia ke laman *microsite pusdik.mkri.id* sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan permohonan perkara PHPU dan keterangan pihak terkait di Mahkamah Konstitusi dengan bantuan narasumber praktik dan moderator. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam mengajukan permohonan perkara PHPU dan keterangan pihak terkait. Dalam mengerjakan praktek ini didampingi oleh narasumber dari Panitia Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi yang berpengalaman di bidangnya.



Praktik ini menghasilkan dokumen permohonan perkara PHPU dan keterangan pihak terkait dari peserta. Setelah itu panitia akan memfasilitasi forum untuk presentasi dan diskusi khusus dimana peserta terpilih membacakan hasil kerjanya di hadapan semua peserta. Di dalam forum ini, peserta dapat bertanya, menyampaikan pemikiran, memberi kritik, saran, maupun tanggapan atas hasil kerja yang dibacakan peserta lain. Di akhir sesi, narasumber akan memberikan evaluasi terhadap keseluruhan hasil pelaksanaan praktik oleh peserta.

B.6.5. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup pada pukul 10.30 WIB pada hari Kamis, 31 Agustus 2023 oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.





HASIL EVALUASI KEGIATAN



C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 10 (sepuluh) *item*. Peserta diminta mengerjakan soal yang telah disiapkan oleh panitia dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Tingkat pemahaman peserta dihitung dengan menggunakan Uji T. Hasil Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 10,15 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (*confidence level*) 95% pada df 132 menunjukkan nilai sebesar 1,65648. T-hitung lebih besar dari T-tabel, sehingga analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian hasil penghitungan Gap nilai (*post test* – *pre test*) diperoleh skor **1,68**. Adapun skala likert yang digunakan dalam tingkat pemahaman ini menggunakan *range* sebagai berikut (0-0,24: kurang); (0,25-0,74: cukup); (0,75-1,24: baik); dan (1,25-2: sangat baik). Hasil perhitungan nilai gap di atas menunjukkan tingkat pemahaman peserta termasuk dalam kategori **sangat baik**. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan **berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta**.

C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam hal aspek substansi Pusdik telah melakukan pengukuran dengan soal *pre test* dan *post test*, sedangkan untuk aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas materi, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan



keuangan. Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan di Pusdik. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Untuk menilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan, Pusdik Pancasila dan Konstitusi menyusun 2 instrumen penilaian yaitu kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0).

Pertama, peserta diminta dengan sukarela memberikan penilaian terhadap kualitas narasumber yang dihadirkan di setiap sesi dengan cara mengisi kuesioner evaluasi narasumber setelah suatu sesi materi berakhir. Kualitas setiap narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Hasil kuesioner evaluasi kegiatan ini yang nantinya akan memunculkan nilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Ada dua kategori yang dijadikan basis untuk mengukur tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan serta layanan keuangan.

C.2.1. Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan

Nilai tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan didapatkan dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

- 1) Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar

Variabel ini menilai penyajian materi yang diberikan oleh narasumber dengan berbagai media dan teknik penyajian. Peserta menilai kemudahan memahami materi yang diberikan, manfaat informasi yang ada dalam materi, dan kualitas bahan ajar yang disajikan. **Nilai persepsi atas kualitas materi/bahan ajar mendapatkan nilai 3,58 yang tergolong kategori Baik.**



2) Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator

Menilai kualitas penyampaian materi oleh narasumber dan kualitas moderator dalam memandu jalannya sesi materi. Peserta menilai penguasaan narasumber terhadap materi pembelajaran dan penyampaian materi secara komunikatif, serta kemampuan moderator dalam memandu setiap sesi. Pada variabel ini peserta juga memilih narasumber dan moderator yang paling menarik. Penilaian ini digunakan sebagai salah satu dasar evaluasi kualitas narasumber. **Nilai persepsi atas kualitas narasumber dan moderator mendapatkan nilai 3,57 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan

Menilai kualitas metode penyelenggaraan pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai terkait menariknya penyelenggaraan kegiatan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan. **Nilai persepsi atas kualitas metode penyelenggaraan mendapatkan nilai 3,57 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara

Variabel ini menilai performa petugas penyelenggara selama kegiatan pendidikan berlangsung. Peserta menilai terkait sikap petugas dalam memberikan pelayanan apakah petugas informatif dan komunikatif, cepat dan tepat, serta ramah dan rapi penampilannya. **Nilai persepsi atas kualitas petugas penyelenggara mendapatkan nilai 3,67 yang tergolong kategori Baik.**

Hasil penilaian dari 4 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan nilai 3,60 dengan kategori Baik.** Hal ini berarti bahwa mayoritas peserta setuju bahwa kualitas materi yang disampaikan, narasumber dan moderator yang dihadirkan, menariknya metode penyelenggaraan, dan sikap petugas penyelenggara telah memberikan pelayanan penyelenggaraan dengan baik sehingga pembelajaran yang diberikan dapat dipahami oleh para peserta.



C.2.2. Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan

Nilai tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan diperoleh dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

1) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi

Pada variabel ini peserta menilai kualitas kebersihan kamar dan kelengkapan fasilitas kamar yang tersedia. **Nilai persepsi atas kualitas layanan akomodasi mendapatkan nilai 3,46 yang tergolong kategori Baik.**

2) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi

Peserta pendidikan juga menilai terkait kualitas layanan konsumsi selama mengikuti pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai variasi menu pada makanan yang dihidangkan dan ketepatan waktu dalam menghidangkan makanan dan *snack*. **Nilai persepsi atas kualitas layanan konsumsi mendapatkan nilai 3,36 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan

Peserta menilai kebersihan ruang aula dan kelas serta sarana penunjang proses pembelajaran. Sarana penunjang tersebut juga termasuk videotron yang digunakan di aula Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas kualitas layanan sarana pendidikan mendapatkan nilai 3,65 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan

Pusdik Pancasila dan Konstitusi selalu berupaya untuk menjaga lingkungan agar selalu aman. Pada variabel ini peserta menilai kualitas keamanan selama berada di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, serta sikap dan perilaku petugas keamanan. **Nilai persepsi atas layanan keamanan yaitu 3,68 yang tergolong kategori Baik.**

5) Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan

Variabel ini menilai kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan dan kecepatan akses jaringan Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas sistem informasi pendidikan mendapatkan nilai yaitu 3,60 yang tergolong kategori Baik.**

6) Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan

Pada variabel ini peserta memberikan penilaian administrasi terkait layanan keuangan yang diberikan oleh penyelenggara. **Nilai persepsi atas layanan**



keuangan mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,79 yang tergolong kategori Sangat Baik.

Hasil penilaian dari 6 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan dengan nilai 3,59 dengan kategori Baik**. Ini berarti mayoritas peserta setuju bahwa layanan akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan keuangan telah mampu diberikan dengan baik kepada peserta.

Hasil dari seluruh pengukuran Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan, digabungkan menjadi **nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan skor 3,59 yang tergolong kategori Baik**.

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Materi/Bahan Ajar			
1	Materi yang diberikan mudah dipahami	3,51	Baik
2	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat	3,65	Baik
3	Kualitas bahan ajar yang disajikan menggunakan bahasa yang komunikatif dan lengkap	3,58	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar		3,58	Baik
Kualitas Narasumber dan Moderator			
4	Narasumber menguasai materi pembelajaran	3,61	Baik
5	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif	3,54	Baik
6	Moderator mampu memandu setiap sesinya	3,56	Baik
	Narasumber yang paling menarik	1. YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum..	



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
		2. Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	
	Moderator yang paling menarik	1. Santhy Kustrihardiani 2. Angga Putri Gardina	
Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator		3,57	Baik
Kualitas Metode Penyelenggaraan			
7	Penyelenggaraan kegiatan bimtek menarik	3,56	Baik
8	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tepat waktu	3,58	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan		3,57	Baik
Kualitas Petugas Penyelenggara			
9	Penyelenggara informatif dan komunikatif	3,66	Baik
10	Penyelenggara memberikan pelayanan dengan yang cepat dan tepat	3,64	Baik
11	Penyelenggara ramah dan berpenampilan rapi	3,71	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara		3,67	Baik
Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan		3,60	Baik
Kualitas Layanan Akomodasi			
12	Kebersihan kamar terjaga	3,54	Baik
13	Kelengkapan fasilitas kamar tersedia	3,37	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi		3,46	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Layanan Konsumsi			
14	Hidangan makanan memiliki variasi menu	3,25	Baik
15	Hidangan makanan dan <i>snack</i> tersedia tepat waktu	3,46	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi		3,36	Baik
Kualitas Layanan Sarana Pendidikan			
16	Kebersihan ruang aula dan kelas	3,66	Baik
17	Sarana penunjang proses pembelajaran (termasuk videotron)	3,63	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan		3,65	Baik
Layanan Keamanan			
18	Keamanan selama berada di Pusdik	3,71	Baik
19	Sikap dan perilaku petugas keamanan	3,64	Baik
Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan		3,68	Baik
Sistem Informasi Pendidikan			
20	Kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan	3,65	Baik
21	Kecepatan akses jaringan internet Pusdik	3,56	Baik
Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan		3,60	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Layanan Keuangan			
	Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan	3,79	Sangat Baik
	Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan	3,59	Baik
	Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	3,59	Baik

Dari hasil kedua penilaian di atas, maka didapatkan nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Bimtek PHPU bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Indeks ini diukur dengan menggunakan “*Kirckpatrick four levels evaluation model*” yaitu level pertama *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour*, level keempat - *Result*.

Dari **keempat** level pengukuran di atas level evaluasi yang bisa dilakukan untuk saat ini hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*. Level pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti, sedangkan level kedua *learning* (pembelajaran) yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan} + \text{Tingkat Pemahaman})}{n}$$

Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dengan nilai 1,68 untuk skala 2 jika dikonversi ke skala 4 menjadi 3,36. Selanjutnya untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan memiliki nilai sebesar 3,59 sehingga Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran yaitu $(3,59+3,36)/2 = 3,48$.

Hasil dari penghitungan **Indeks Peningkatan Peserta Pembelajaran diperoleh skor sebesar 3,48**; dengan skala likert penilaian yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0); artinya bahwa penyelenggaraan kegiatan ini berhasil dalam memberikan pemahaman kepada para peserta kegiatan dengan kategori **Baik**.

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, dan sistem



informasi tergolong baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- **Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan**
 - a) Perbanyak praktik;
 - b) Diperlihatkan jawaban *pre test* dan *post test* yang benar dan yang mana yang salah;
 - c) Perlu adanya materi simulasi persidangan sehingga peserta mendapat gambaran yang mendekati suasana riil dan mengetahui sekiranya apa yang perlu disiapkan;
 - d) Menambah materi yang menggunakan video tutorial;
 - e) Dibuatkan *game* untuk menjalin keakraban;
 - f) 1 narasumber IT untuk lebih komunikatif;
 - g) Dialog dengan narasumber harus berujung pada *problem solving*;
 - h) Perlu mengundang para mantan ketua MK sebagai narasumber;
 - i) Bimtek hukum dan konstitusi bagi partai politik perlu diselenggarakan minimal sekali setahun;
 - j) Perlu ditambah jadwal *trip* ke Puncak Pass dan kebun teh;
 - k) Praktik dapat langsung dilaksanakan di ruang sidang Mahkamah Konstitusi;
 - l) Panitia dapat mengarahkan peserta untuk foto bersama per daerah, per materi, dan foto bersama rekan-rekan seluruh Indonesia;
 - m) Jadwal bisa dimulai hari Selasa agar peserta bisa datang sejak hari Senin dan tidak terjebak sistem buka tutup jalur Puncak;
 - n) Moderator harus selalu mengingatkan peserta untuk mengisi daftar hadir.

- **Terkait Sarana dan Pelayanan**
 - a) Kebersihan kamar dan kamar mandi ditingkatkan;
 - b) Konsumsi sering kurang/kehabisan;
 - c) Sarana olahraga diperbanyak dan diadakan kolam renang;
 - d) Perlu diperhatikan terkait penggantian handuk;
 - e) Diadakan lapangan badminton;
 - f) Buah dapat diperbanyak;
 - g) Podium di aula dibuat lebih tinggi;
 - h) Perlu ada *laundry* di dalam lingkungan Pusdik;
 - i) Perbanyak colokan listrik di dalam kamar;



- j) Kualitas wifi dapat ditingkatkan;
- k) Wifi di Grha 4 tidak menjangkau kamar yang berada di ujung;
- l) Menu makanan dapat lebih menarik dan enak;
- m) Makanan jangan pedas;
- n) Perlu ada tempat cuci tangan di tempat makan;
- o) Musholla dapat diperluas;
- p) Menu makanan lebih khas lokal Bogor;
- q) Perlu ada TV di dalam kamar;
- r) Kuantitas air panas di kamar mandi dapat ditingkatkan;
- s) Perlu tambahan sabun mandi;
- t) Menu *snack* dapat menggunakan olahan makanan lokal terutama rebusan untuk mengurangi gorengan;
- u) Disediakan *smoking area*.

Selain dari hasil evaluasi penyelenggaraan yang menilai dari berbagai aspek, tingkat kelulusan peserta juga menjadi salah satu penentu keberhasilan kegiatan. E-sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan, yaitu sebanyak 136 orang dari 165 orang peserta yang melakukan registrasi pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

- a) Peserta belum sepenuhnya tertib mengikuti kegiatan sesuai waktu yang tertera di jadwal kegiatan;
- b) Terdapat beberapa peserta yang tidak mengumpulkan tugas praktik.



E. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Mengetahui,

Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

Teguh Wahyudi
NIP. 19640415 198502 1 001

Bogor, 07 September 2023

Kepala Bidang Program dan
Penyelenggaraan

Nanang Subekti
NIP. 19741118 200604 1 002



DOKUMENTASI KEGIATAN



Penjelasan Teknis yang disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik Pancasila dan Konstitusi.



Kegiatan dibuka secara resmi oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, dan dihadiri Ketua Bidang Hukum, HAM & Advokasi Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.



Penyampaian materi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum. dan YM Dr. Wahiduddin Adams, SH. MA.



Penyampaian materi Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan oleh Bapak Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.



Penyampaian materi Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Bapak Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.



Penyampaian materi Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik oleh tim IT Mahkamah Konstitusi.



Penyampaian materi Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 oleh Bapak Saiful Anwar, S.H., M.H.



Materi Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 disampaikan oleh 4 narasumber yang dibagi dalam 4 kelas kecil.



Materi Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 disampaikan oleh 4 narasumber yang dibagi dalam 4 kelas kecil.



Kegiatan ditutup secara resmi oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.



Peserta melakukan senam pagi.

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis, 28 s.d. 31 Agustus 2023
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor
Peserta : Pengurus dan Anggota Partai Gelombang Rakyat Indonesia

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 28 Agustus 2023	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Pusdik
	12.00 – 14.30 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Pusdik
	15.30 – 16.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Pusdik
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Mars Partai Gelombang Rakyat Indonesia 5. Laporan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 	Kabid Program dan Penyelenggaraan Pusdik Ketua Bidang Hukum, HAM & Advokasi Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Pusdik

		6. Sambutan Ketua Bidang Hukum, HAM & Advokasi Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelombang Rakyat Indonesia 7. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 8. Hymne Mahkamah Konstitusi 9. Pembacaan Doa	YM Ketua MK	
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	21.00 WIB	Istirahat		Pusdik
KEDUA				
Selasa, 29 Agustus 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik

	15.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KETIGA				
Rabu, 30 Agustus 2023	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi		Pusdik
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KEEMPAT				
Kamis, 31 Agustus 2023	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 10.30 WIB	<i>Post-Test</i> dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Pusdik

	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Sambutan Penutupan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Pembacaan Doa	Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan	Pusdik
	12.00 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA

Bogor, 28 s.d. 31 Agustus 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia dapat diselenggarakan.

Panduan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia ini memuat informasi tentang latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, kurikulum, pembiayaan, ketentuan penyelenggaraan, sistem informasi peserta serta hal-hal lain yang menyangkut teknis penyelenggaraan kegiatan.

Kegiatan ini diselenggarakan bagi pengurus dan/atau anggota Partai Gelombang Rakyat Indonesia yang terdiri dari pengurus dan/atau anggota Dewan Pimpinan Pusat dan pengurus dan/atau anggota Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi.

Panduan ini berfungsi sebagai acuan bagi peserta, panitia, dan pihak lain yang berkepentingan. Semoga kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar serta dapat mewujudkan misi Mahkamah Konstitusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara.

Bogor, Agustus 2023

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Teguh Wahyudi



Digital Signature
mk146765930230821105819

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	1
I SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI	2
1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....	2
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	3
3. Visi dan Misi	3
4. Profil Hakim Konstitusi	4
5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal	8
II PANDUAN KEGIATAN.....	9
1. Latar Belakang	9
2. Tujuan Kegiatan	10
3. Nama Kegiatan	10
4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan	10
5. Peserta Kegiatan	12
6. Materi dan Garis Besar Kurikulum	12
7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat	14
8. Akomodasi	14
9. Konsumsi	14
10. Pembiayaan	14
11. Biaya Transportasi	15
12. Lain-lain	16
13. Kontak	16
III TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI, DAN ZONA INTEGRITAS	17
IV HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI	27
V INFORMASI MENGENAI PUSDIK.....	29
1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.....	29
2. Sarana dan Prasarana.....	31
3. Fasilitas Ramah Disabilitas.....	34

BAB I

SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang diadopsi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tahap ketiga, yang disahkan pada 9 November 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yang merupakan hasil perubahan tahap keempat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tanggal 15 Agustus 2003, menetapkan sembilan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya, yang terdiri dari Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. serta Sudharsono, S.H. (yang diajukan oleh Mahkamah Agung), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. serta Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, S.H. (yang diajukan oleh DPR), Prof. H. A.S. Natabaya, S.H. dan Dr. Harjono, S.H., M.CL. serta Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (yang diajukan oleh Presiden). Pada 16 Agustus 2003, sembilan Hakim Konstitusi periode pertama tersebut mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden bertempat di Istana Negara Jakarta. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pertama.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara konstitusi dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai berlangsungnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan UUD 1945.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - 1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
 - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
 - 3) Memutus pembubaran partai politik;
 - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- c. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

3. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengemban visi “Menegakkan Konstitusi melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya”. Adapun misi Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi.
- b. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara.
- c. Meningkatkan Kualitas Putusan.

4. Profil Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota hakim konstitusi. Berikut adalah profil singkat Hakim Konstitusi pada periode ini:

a. Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.



- Jabatan : Ketua Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Bima, 31 Desember 1956
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta
S2 – Program Studi Hukum STIH IBLAM
S3 – Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada
- Karir :
 - Kepala Badan Litbangdiklat Kumdil MA
 - Kepala Biro Kepegawaian MA
 - Hakim Pengadilan Negeri Lumajang (1991)

b. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.



- Jabatan : Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Paninggahan, 20 Agustus 1968
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Andalas
S2 – Institute of Postgraduate Studies and Research
Universitas Malaya, Malaysia
S3 – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Karir :
 - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas
 - Ketua Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas
 - Komisaris Utama PT Semen Padang

c. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Semarang, 3 Februari 1956
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum
Universitas Airlangga
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro
- Karir :
 - Anggota Tim Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi – Kemdikbud RI
 - Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
 - Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
 - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

d. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Pangkal Pinang, 27 Juni 1962
- Pendidikan :
 - S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1981)
 - S-2 Hukum Tata Negara Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (1995)
 - S-3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2005)
- Karir :
 - Guru Besar Bidang Hukum Universitas Gadjah Mada
 - Kepala Badan Pembinaan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM.

e. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Palembang, 17 Januari 1954
- Pendidikan : S1 – Ilmu Peradilan Islam Fakultas Syariah
IAIN Syarif Hidayatullah
- S1 – Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
- S2 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
- S3 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
- Karir : • Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta
- Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM

f. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Sleman, 15 November 1959
- Pendidikan : S1 – Universitas Islam Indonesia
- S2 – Universitas Tarumanegara
- S3 – Universitas Jayabaya
- Karir : • Hakim Pengadilan Negeri Bekasi
- Ketua Pengadilan Negeri Pontianak
- Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

g. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Tarutung, 8 Desember 1953
- Pendidikan : S1 – Universitas Sumatera Utara
- S2 – Universitas Sumatera Utara
- S3 – Universitas Sumatera Utara
- Karir : • Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin

h. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Kupang, 15 Desember 1964
- Pendidikan : S1 – Ilmu HTN UNDANA Kupang (1990)
S2 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (1995)
S3 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (2005)
- Karir : • Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
• Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

i. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Makassar, 8 Januari 1965
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
S2 – Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran
S3 – Ilmu Hukum Universitas Airlangga
- Karir : • Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
• Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
• Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat P4TIK).
• Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrasi Mahkamah Konstitusi.

Berikut profil singkat Sekretaris Jenderal dan Panitera Mahkamah Konstitusi:

a. Heru Setiawan, S.E., M.Si.



Jabatan : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : 9 Juni 1969
Karir :

- Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
- Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

b. Muhidin, S.H., M.Hum.



Jabatan : Panitera Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : Sukabumi, 18 Agustus 1961
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum
Universitas Jakarta
S2 – Program Pasca Sarjana Hukum
Bisnis
Karir :

- Kementerian Hukum dan HAM
- Dosen Sekolah Tinggi Litigasi
- Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi

BAB II

PANDUAN KEGIATAN

1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan umum.

Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan suatu perhelatan pesta demokrasi yang serentak. Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini rencananya akan digabung dengan pemilihan gubernur, bupati dan walikota secara serentak di 541 wilayah, baik itu provinsi, kota dan kabupaten. Dalam perhelatan ini tentu diperlukan suatu perencanaan yang baik, terukur dan sistematis. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal demokrasi ikut memiliki tanggung jawab terhadap suksesnya proses pemilihan tersebut. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari fungsi Mahkamah Konstitusi yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Dalam rangka pelaksanaan tugas menyelesaikan perselisihan perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024 diperlukan dukungan konkret dari berbagai kalangan kepada Mahkamah Konstitusi, pemahaman terhadap hukum acara secara utuh sangat diperlukan bagi pemangku kepentingan. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan cepat (*speedy trial*) benar-benar dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Salah satu *target group* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2023 adalah partai politik peserta pemilihan umum. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, khususnya proses penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. *Output* dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi dan juga membantu para pihak dalam menyusun permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu. Dengan adanya permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu yang baik, secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Konstitusi, sistem penyelenggaraan negara, hak konstitusional, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
- Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Meningkatkan kemampuan penyusunan permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

3. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia”.

4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin s.d. Kamis, 28 s.d. 31 Agustus 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat. Adapun jadwal kegiatan sebagai berikut:

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI
PERTAMA		
Senin, 28 Agustus 2023	09.30 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check In</i>
	12.00 – 14.30 WIB	ISHOMA
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis
	15.30 – 16.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Tranparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan : <ol style="list-style-type: none"> Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Pembacaan Teks Pancasila Mars Mahkamah Konstitusi Mars Partai Gelora Laporan Sekretaris Jenderal MK Sambutan Ketua Umum Partai Gelora Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi Hymne Mahkamah Konstitusi Pembacaan Doa

	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
KEDUA		
Selasa, 29 Agustus 2023	06.00 – 07.30 WIB	Sarapan
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
KETIGA		
Rabu, 30 Agustus 2023	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi
	07.30 – 08.30 WIB	Sarapan
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
KEEMPAT		
Kamis, 31 Agustus 2023	06.00 – 08.00 WIB	Sarapan
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
	10.00 – 10.30 WIB	Evaluasi Kegiatan dan <i>Post-Test</i>

	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 2. Laporan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Sambutan Penutupan Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 4. Pembacaan Doa
--	-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Peserta Kegiatan

Peserta sejumlah 150 (seratus lima puluh) orang pengurus dan/atau anggota Partai Gelombang Rakyat Indonesia, yang terdiri dari:

- a. 36 orang Pengurus Dewan Pimpinan Pusat; dan
- b. 114 orang Pengurus Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi.

6. Materi dan Garis Besar Kurikulum

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun kurikulum yang digunakan sebagai dasar bagi narasumber untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berikut adalah kurikulum pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia :

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> a. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD b. Para Pihak c. Objek Permohonan d. Pengajuan Permohonan e. Permohonan f. Alur Penarikan Kembali Permohonan g. Jawaban Termohon h. Keterangan Pihak Terkait i. Keterangan Bawaslu j. Jenis Alat Bukti k. Manajemen Penanganan Perkara dan Persidangan l. Putusan a. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi 	120 menit
2.	Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi	<ol style="list-style-type: none"> a. Fungsi dan Kewenangan MK b. Struktur dan Mekanisme Kerja MK c. Asas-Asas Hukum Acara MK d. Perkembangan dan Dinamika Penanganan PHPU di MK 	120 menit
3.	Mekanisme dan Tahapan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> a. Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan PHPU 2024 b. Mekanisme Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya secara Langsung dan daring c. Mekanisme Penanganan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak 	120 menit

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
		Lainnya, termasuk Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan d. Registrasi Saksi dan Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait e. Penjadwalan Sidang dan Persidangan Jarak Jauh f. Pengucapan Putusan dan Tindakanlanjut Pasca Putusan	
4.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	a. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik b. <i>Case Tracking</i> (Penelusuran Perkara) c. Persidangan Jarak Jauh, Streaming, dan <i>Video Conference</i> g. Fitur-Fitur lainnya (<i>Website, Click MK, Media Sosial, dll</i>)	120 menit
5.	Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	a. Dasar Hukum; b. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD; c. Termohon, Pihak Terkait dan Pemberi Keterangan; d. Objek Perkara; e. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu; f. Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon; g. Permohonan Pemohon; h. Penyusunan Permohonan Pemohon dalam Penyelesaian PHPU DPR dan DPRD; i. Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait; j. Penyusunan Keterangan Pihak Terkait dalam Penyelesaian PHPU DPR dan DPRD.	90 menit
6.	Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	Setiap Peserta Melakukan Praktek Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD.	120 menit
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	Perwakilan Peserta Memaparkan Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait untuk Mendapat Tanggapan dan Koreksi dari Narasumber/Fasilitator.	120 menit

Proses Pembelajaran

1. Tahap Pencairan

Sebelum pelatihan dimulai, perlu dilakukan proses pencairan. Proses pencairan dilakukan melalui kegiatan penjelasan teknis penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Tujuannya untuk: membangun komitmen belajar agar peserta siap mengikuti pelatihan, membuat kesepakatan tentang norma yang akan dipakai selama pelatihan dan membuat kontrak belajar.

2. Tahap Pembekalan Materi

Pada tahap ini peserta didik dibekali pengetahuan selama masa pendidikan. Materi yang diberikan lebih dititikberatkan pada peningkatan pemahaman, kemampuan mempraktekkan, dan mengaplikasikan. Teknik penyampaian dalam pembekalan materi menggunakan metode ceramah diikuti tanya jawab, diskusi kelompok, games, studi kasus, *sharing*, dll.

3. Tahap Konsolidasi

Merupakan tahap internalisasi komprehensif dari pengetahuan yang diterima pada tahap pembekalan. Pada tahap ini peserta didik diberikan tugas untuk memecahkan suatu kasus/permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pendidikan yang telah didapat.

7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan materi pembelajaran dan e-sertifikat yang dapat diunduh melalui Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).
- b. Ketentuan e-sertifikat:
Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengumpulkan seluruh tugas yang diberikan.

8. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut).
 - Sandal kamar.
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

9. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta *snack* selama kegiatan berlangsung.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.

10. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan/materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

11. Biaya Transportasi

a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

b. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transportasi peserta adalah:**

- 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
- 2) *Boarding Pass* kedatangan;
- 3) Tiket Datang (bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut dan kereta api);
- 4) Tiket Pulang (bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut dan kereta api);
- 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti struk bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transportasi darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat registrasi**.

c. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.

d. ***Boarding pass***

Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

e. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat**

- 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
- 2) Tiket Pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
- 3) Tanggal Tiket Datang paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
- 4) Tanggal Tiket Pulang paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
- 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
- 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
- 7) Biaya Perubahan/*Rescheduling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
- 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.

f. **Transportasi Darat/Laut**

- 1) Transportasi Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/Tiba (PP) dan Transportasi Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah.

- 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk).
 - 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
 - 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
- g. Penggantian biaya transportasi akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.

12. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

13. Kontak

- a. Nomor telepon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.

BAB III

TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI PESERTA, DAN ZONA INTEGRITAS

1. Tata Tertib

- a. Peserta wajib melapor pada petugas keamanan di pos keamanan Pusdik.
- b. Peserta wajib melakukan registrasi di ruang registrasi peserta.
- c. Peserta wajib menjaga kebersihan dan kerapihan seluruh lingkungan Pusdik.
- d. Peserta wajib menjaga semua fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- e. Apabila peserta akan meninggalkan lingkungan Pusdik, diharapkan melapor ke bagian keamanan.
- f. Menghilangkan kunci kamar akan dikenakan denda penggantian kunci sebesar Rp. 150.000.
- g. Peserta dilarang membawa tamu ke kamar asrama, menerima tamu hanya diperbolehkan di ruang tamu setiap loby asrama.
- h. Jam kunjungan tamu maksimal pukul 22.00 WIB.
- i. Peserta dilarang keluar lingkungan Pusdik di atas pukul 22.00 WIB.
- j. Peserta dilarang merusak dan/atau membawa fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- k. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara di lingkungan Pusdik.
- l. Peserta wajib melapor pada petugas pada waktu *check out*.

2. Sistem Informasi

a. Fungsi Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan (SIMULTAN)

- 1) Pengisian daftar hadir (presensi) peserta dalam bentuk digital;
- 2) *Pre-test* dan *Post-test* secara *online*;
- 3) Kuesioner evaluasi narasumber setiap materi dan evaluasi kegiatan (di akhir kegiatan) secara *online*;
- 4) Panduan kegiatan (*Booklet*) dan Materi (Bahan Paparan) dalam bentuk *softfile*;
- 5) Mengunduh e-sertifikat setelah kegiatan berakhir.

b. Pedoman Penggunaan

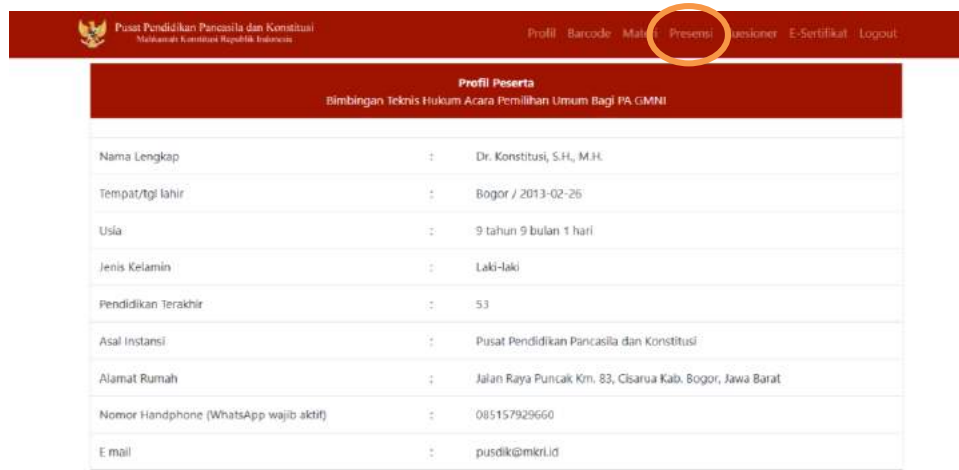
1. Akses laman *pusdik.mkri.id*. Pada halaman beranda, klik *Login* Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).



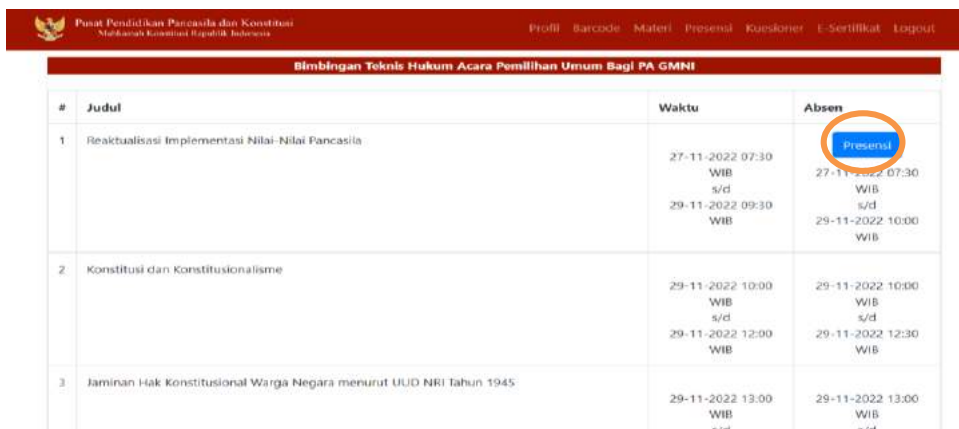
2. Login menggunakan *Username* dan *Password* yang telah diberikan oleh panitia.



3. Pada halaman profil peserta, klik menu Presensi untuk mengisi daftar hadir setiap sesi.



4. Klik Presensi pada sesi materi berjalan (sesuai jadwal) untuk mengisi daftar pada setiap sesi materi kegiatan.



5. Klik menu *Kuesioner* untuk mengisi *Pre-test*, *Post-test*, dan Evaluasi Kegiatan.



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Absensi **Kuesioner** E-Sertifikat Logout

Bimbingan Teknis Pilkada


SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
Nilai Pre Test				: 6
Nilai Post Test				: 0

6. Pada halaman *Pre-test* dan *Post-test*, pilih jawaban yang menurut anda paling tepat. Soal *Pre-test* dan *Post-test* masing-masing sebanyak 15 nomor. Waktu mengerjakan *Pre-test* dan *Post-test* maksimal 20 menit.



Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali...

Badan Pengawas Pemilu

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

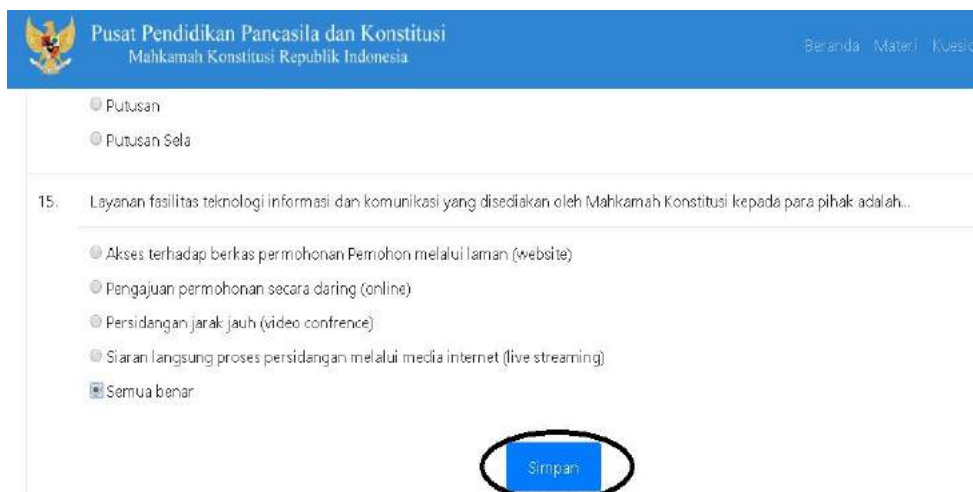
Komisi Pemilihan Umum

Mahkamah Konstitusi

Pemantau Pemilu

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

7. Setelah mengisi *Pre-test* dan *Post-test*, klik Simpan untuk menyimpan hasilnya.



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Kuesioner

Putusan

Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)

Pengajuan permohonan secara daring (online)

Persidangan jarak jauh (video conference)

Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)

Semua benar

Simpan

8. Mengisi evaluasi kegiatan

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

9. Klik *Isi Kuesioner* yang berada di samping kanan halaman untuk mengisi kuesioner evaluasi narasumber setiap sesi atau materi.

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Penutupan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 14:00 s/d 13-03-2020 15:30	Isi Kuesioner
2	Tanda Terima Sertifikat dan Pin Alumni Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 15:30 s/d 13-03-2020 16:00	Isi Kuesioner
3	Wawasan Kebangsaan		11-09-2020 00:00 s/d 11-09-2020 23:00	Isi Kuesioner

10. Klik menu *Materi* untuk mengunduh panduan kegiatan (*booklet*) dan materi (bahan paparan)

#	Judul	Pemateri	File
1	Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mahkamah Konstitusi	File
2	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
3	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
4	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU	Mahkamah Konstitusi	File
5	Pembagian Kelas - Bimtek PUU bagi PERADI	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	File

3. Zona Integritas

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas, Pusat Pendidikan Pancasila menyediakan berbagai jenis layanan pengaduan untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, diantaranya sebagai berikut:

- *Media Offline:*
 1. Meja pengaduan
 2. Pohon saran
 3. Kotak saran dan pengaduan
- *Media Online (pusdik.mkri.id)*
 1. Pengaduan masyarakat
 2. Benturan kepentingan
 3. Gratifikasi
 4. *Whistle Blowing System*
 5. Saran/masukan

4. Standar Pelayanan

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyusun Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pedoman standar pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan panduan bagi pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1

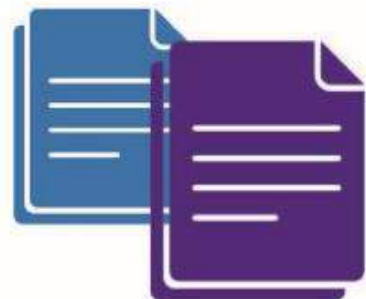
Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.

5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan,
Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



BAB IV**HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI****Hymne Mahkamah Konstitusi***Syair : Taufiq Ismail**Lagu : Dwiki Dharmawan*

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

---Music---

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

Mars Mahkamah Konstitusi

Syair : Taufiq Ismail

Lagu : Dwiki Dharmawan

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

---Music---

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

BAB V

INFORMASI MENGENAI PUSDIK

1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 16 (enam belas) pegawai dimana terdiri dari 6 (enam) pejabat struktural, 1 (satu) pejabat fungsional, dan 10 (sepuluh) pelaksana. Berikut adalah biodata singkat mengenai pejabat struktural di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:



Teguh Wahyudi, S.Sos.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi



Nanang Subekti, S.E., M.S.E

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan



Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.

Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana



Melati Kusuma Wardani, S.IP., M.A.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusdik



Ardiansyah Salim, S.Sos., M.Si.

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi



Santhy Kustrihardiani, S.Psi.

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan

*Contact Center Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi: **085157929660**

2. Sarana dan Prasarana di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 7 unit gedung yang masing-masing dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun ketujuh gedung tersebut adalah sebagai berikut:



a. Grha Konstitusi 1



Grha Konstitusi 1 dimanfaatkan sebagai rumah istirahat bagi para hakim dan narasumber. Terdiri dari 12 rumah dimana di dalamnya terdapat masing-masing 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar mandi, ruang tamu, ruang makan dan dapur. Selain untuk narasumber dan hakim, gedung ini juga dipergunakan sebagai rumah istirahat bagi Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

b. Grha Konstitusi 2

Gedung ini memiliki 2 lantai dimana lantai 2 adalah ruangan kantor untuk pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Di lantai 1 terdapat ruang poliklinik.

c. Grha Konstitusi 3

Merupakan gedung utama yang dipergunakan untuk kegiatan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Terdiri dari 2 lantai yang masing-masing dapat difungsikan sebagai ruang pendidikan. Pada lantai 1 terdapat 8 (delapan) kelas kecil yang dapat menampung peserta sebanyak 24 orang. Kelas-kelas kecil tersebut dapat dialihkan menjadi 4 kelas besar yang dapat menampung sebanyak 48 peserta. Di lantai 2 adalah aula utama gedung yang bisa menampung peserta hingga 160 orang.

d. Grha Konstitusi 4 dan Grha Konstitusi 5

Dua gedung di atas dimanfaatkan sebagai kamar bagi para peserta selama kegiatan berlangsung. Masing-masing gedung terdiri dari 2 (dua) lantai. Tiap gedung terdiri dari 48 (empat puluh delapan) kamar. Setiap kamar dapat ditempati oleh 2 (dua) orang peserta.

e. Grha Konstitusi 6

Gedung yang dipergunakan untuk rumah jabatan eselon 3 hingga eselon 4 ini terdiri dari 2 (dua) lantai. Terdiri dari 2 (dua) rumah untuk eselon 3 dan 4 (empat) rumah untuk eselon 4.

f. Grha Konstitusi 7 dan Musholla

Gedung ini memiliki 1 (satu) ruang besar yang digunakan sebagai ruang makan bagi peserta. Terdapat pula musholla di bagian belakang gedung ini.

g. Fasilitas Wifi

Semua area Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan fasilitas *free wifi*. Adapun pemanfaatan fasilitas *wifi* dengan menggunakan *username* dan *password* sebagai berikut:

1. *Username: pusklat_MKRI, password: pusklatmk*, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
2. *Username: gk3_pusklat, password: pusklatmkri*, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
3. *Username: MK-TAMU, password: Konstitusi123*, untuk digunakan keperluan bebas di semua Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (kecuali Grha Konstitusi 3).

3. Fasilitas Ramah Disabilitas

Pusat Pendidikan Pancasila juga meningkatkan fasilitas pendukung yang ramah dengan kaum disabilitas sebagai berikut:

1. Parkir Prioritas Disabilitas;
2. *Elevator (Lift)*;
3. Kamar Prioritas Disabilitas; dan
4. Jalur Ramah Disabilitas.



PENJELASAN TEKNIS

Bimbingan Teknis Hukum Acara
Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Tahun 2024 bagi Partai
Gelombang Rakyat Indonesia

PANCASILA KONSTITUSI

Senin, 28 Agustus 2023



SELAMAT DATANG DI

ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA & KONSTITUSI

**MENUJU WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM)**

“ MEWUJUDKAN PERUBAHAN
UNTUK PELAYANAN YANG
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS ”



www.mkri.id



[mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[@officialMKRI](https://twitter.com/officialMKRI)



[@mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)

www.mkri.id

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih,
Bantu Kami
Menjaga Integritas
dengan
tidak memberi Uang
atau
pemberian apapun

**Integritas Kami
Tak akan Anda Bisa Beli.**

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
upg@mkri.id

UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI





MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA.

MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS.

BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

M. GUNTUR HAMZAH

PAKTA INTEGRITAS



Pusdik Pancasila dan Konstitusi:

- ❖ Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Menyediakan tempat kegiatan, bahan ajar, dan narasumber.
- ❖ Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.



Peserta:

- ❖ Hadir tepat waktu di ruang pembelajaran.
- ❖ Tidak memberikan tip dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



Narasumber:

- ❖ Menyampaikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Tidak menerima tip dalam bentuk apapun.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1 Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif Tanpa dikenakan biaya/tarif.



5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan,
Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



4

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



5

Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda !



**Kuesioner
Online**



**Masukan dan Saran
di Microsite
pusdik.mkri.id**



Kotak Saran



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Mitigasi Bencana

“Jika terjadi bencana gempa bumi, secepatnya masuk ke kolong meja. Setelah gempa bumi selesai, secara tertib menuju titik kumpul.”



Struktur Organisasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



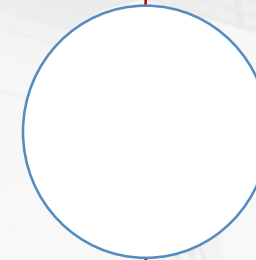
Teguh Wahyudi
Kepala Pusdik
Pancasila dan
Konstitusi



Nanang Subekti
Kabid Program
dan
Penyelenggaraan



Nanda Adityansyah
Jabatan Fungsional
(Pranata Komputer)



Kabag Umum



**Ardiansyah
Salim**
Kasubid
Program dan
Evaluasi



**Santhy
Kustrihardiani**
Kasubid
Penyelenggaraan



**Melati Kusuma
W**
Kasubag Tata
Usaha



**Bambang
Sukmadi**
Kasubag
Sarana dan
Prasarana



Tim Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Bangkit Panji Anarogo



Edwin Aditya Irawan



Fazlur Rahman El Islamy



Suhardi



Muhlis Nova



Angga Putri Gardina



Hadian Taofik Rohman



Chafid Sugianto



Yahya Amarullah Taufik



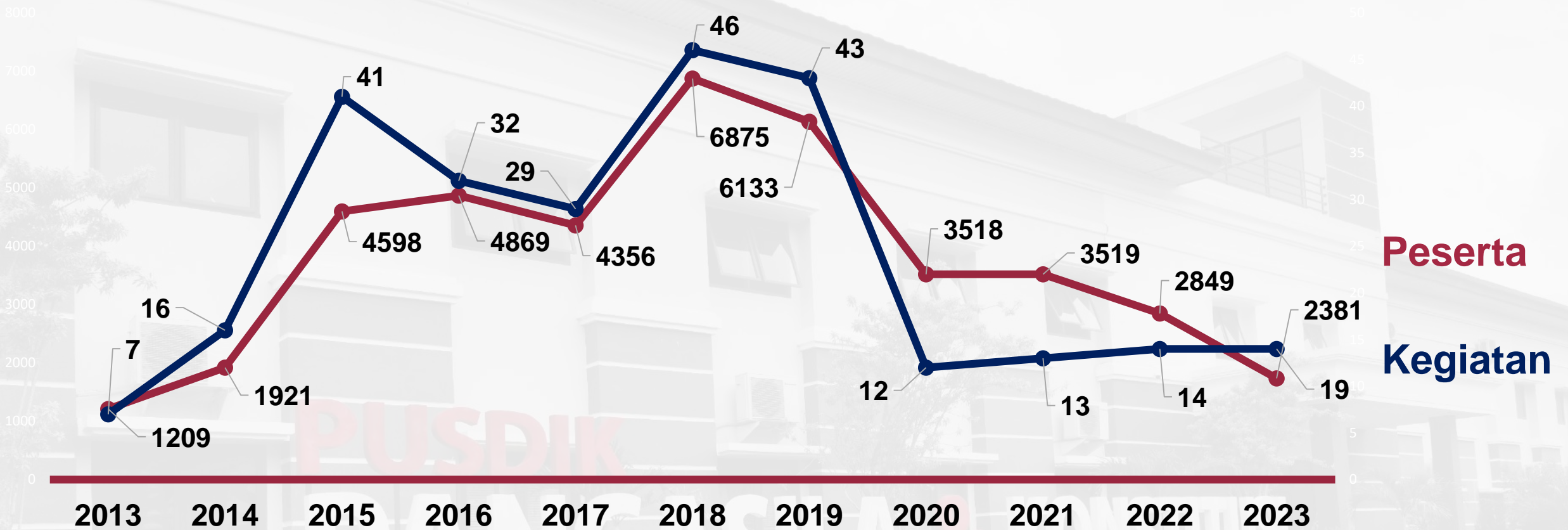
Edwin Rivano

KURIKULUM KEGIATAN

1. Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
2. Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
3. Mekanisme dan Tahapan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
4. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
5. Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
6. Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
7. Evaluasi Hasil Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024



KEGIATAN DAN ALUMNI



Total alumni Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebanyak **29.660** orang

Total alumni kegiatan sebanyak **37.236** orang

PELAKSANAAN KEGIATAN

- **Waktu** : Senin s.d. Kamis
28 s.d. 31 Agustus 2023
- **Tempat** :
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jalan Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor,
Jawa Barat

JADWAL KEGIATAN

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Senin, 28 Agustus 2023	09.30 – 14.30 WIB	Registrasi Peserta
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis
	15.30 – 16.00 WIB	Pre-Test
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi dan Mars Partai Gelora 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Sambutan Ketua Umum Partai Gelora 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan Kegiatan oleh Ketua MK 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Narasumber: YM Hakim Konstitusi Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A. & YM Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Selasa, 29 Agustus 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Narasumber: Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Narasumber: Panitera Muda II – Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA
	18.00 – 21.00 WIB	Makan Malam
	21.00 WIB	Istirahat

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Rabu, 30 Agustus 2023	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi
	07.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Saiful Anwar, S.H., M.H.
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam
	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Kamis, 31 Agustus 2023	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	10.00 – 10.30 WIB	Evaluasi Kegiatan dan Post-Test
	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Perwakilan Peserta 2. Sambutan dan Penutupan Kegiatan oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Pembacaan Doa



PESERTA KEGIATAN

- ✓ Peserta sebanyak 150 orang pengurus dan/anggota Partai Gelombang Rakyat Indonesia, terdiri dari:
 - 36 orang pengurus dan/anggota Dewan Pimpinan Pusat; serta
 - 114 orang pengurus dan/anggota Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi.
- ✓ Membawa Surat Tugas dari DPP Partai yang ditandatangani oleh Presiden atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- ✓ Peserta wajib membawa laptop untuk keperluan kegiatan selama di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- ✓ Bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

KETENTUAN UMUM

- ❖ Acara dilaksanakan selama 4 hari 3 malam.
- ❖ Peserta wajib hadir tepat waktu di tiap sesi dan melakukan presensi.
- ❖ Daftar hadir disediakan pada tiap sesi materi dan diakses secara *online*.
- ❖ Peserta diwajibkan mengisi kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan melalui sistem informasi.
- ❖ Peserta akan melakukan Pre-Test dan Post-Test secara *online* untuk mengukur kemampuan umum peserta pada alamat **pusdik.mkri.id**
- ❖ Peserta wajib membawa laptop untuk digunakan dalam sesi praktik.
- ❖ Peserta dihimbau membawa kartu BPJS Kesehatan atau Kartu Asuransi Kesehatan lainnya.

KONSTITUSI

BAHAN MATERI DAN E-SERTIFIKAT

❖ Peserta akan mendapatkan seminar kits, yang meliputi:

- ✓ Tas
- ✓ Buku Saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*Soft File*)
- ✓ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 dalam Bentuk *Soft File*.
- ✓ Block Note dan Pulpen
- ✓ Modul/Makalah/Hand out Materi dari Narasumber (*Soft File*)
- ✓ Panduan Kegiatan

❖ e-Sertifikat

- ✓ Peserta akan diberikan e-sertifikat (digital) keikutsertaan kegiatan
- ✓ Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) serta mengerjakan dan mengumpulkan tugas praktik yang diberikan
- ✓ Apabila peserta tidak bisa mengikuti rangkaian kegiatan karena sakit, maka wajib ke Poliklinik untuk dicatat dan ditangani
- ✓ Apabila peserta ada kepentingan lain sehingga peserta harus meninggalkan kegiatan sebelum acara penutupan, peserta yang bersangkutan wajib mendapat persetujuan dari panitia DPP Partai Gelombang Rakyat Indonesia



AKOMODASI

- ❖ Peserta wajib tinggal di mess Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- ❖ Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- ❖ Fasilitas dalam kamar peserta, meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut;
 - Sandal kamar; serta
 - Gula, kopi, teh dan air mineral.

KONSUMSI

- ❖ Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam serta *snack* selama kegiatan berlangsung.
- ❖ Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.

PEMBIAYAAN

- ❖ Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi.
- ❖ Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- ❖ Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- ❖ Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.



MEKANISME PENGgantian BIAYA TRANSPORTASI

- ❖ Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- ❖ **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**
 - 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
 - 2) *Boarding pass* kedatangan;
 - 3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin, bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transportasi darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi**.
- ❖ Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.



MEKANISME PENGGANTIAN BIAYA TRANSPORTASI

❖ **Boarding pass**

Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

❖ **Tiket Datang dan Tiket Pulang Pesawat**

- 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
- 2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
- 3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
- 4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
- 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
- 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
- 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
- 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.



MEKANISME PENGGANTIAN BIAYA TRANSPORTASI

❖ Transportasi Darat/Laut

- 1) Transportasi Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transportasi Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah.
- 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk).
- 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
- 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.

❖ Penggantian transportasi akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PESERTA LANGSUNG DAN TRANSPARAN (SIMULTAN)

pusdik.mkri.id

- ❖ Registrasi dan Absensi
- ❖ *Pre Test* dan *Post Test*
- ❖ Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Evaluasi Kegiatan
- ❖ *Softcopy* materi kegiatan
- ❖ e-Sertifikat



LAYANAN WI-FI

Nama Wi-Fi : ***Pusdiklat_MKRI***

Password : ***pusdikmk***

Nama Wi-Fi : ***GK3_PUSDIKLAT***

Password : ***pusdikmkri***

Nama Wi-Fi : ***MK-TAMU***

Password : ***Konstitusi123***





**FASILITAS
DI PUSAT
PENDIDIKAN
PANCASILA
DAN
KONSTITUSI**

Grha Konstitusi 1



- Rumah Istirahat bagi para Hakim, Narasumber, dan Tamu VIP
- Terdiri dari 12 Ruangan

Grha Konstitusi 2



- Gedung Kantor Administrasi
- Poliklinik
- Kantin Kejujuran
- Souvenir



Grha Konstitusi 3

- Gedung Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran yang terdiri dari 2 Lantai
- Terdapat *Roof Top* di Atas Gedung

KONSTITUSI

Grha Konstitusi 3



- Aula Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran dengan Kapasitas 150 Peserta dan Dilengkapi dengan Videotron



- 4 Ruang Kelas Besar dengan Kapasitas 40 Orang per Kelas
- Dapat Dibagi Menjadi 8 Kelas Kecil dengan Kapasitas 20 Orang



Grha Konstitusi 4



Grha Konstitusi 5



Gedung yang digunakan sebagai tempat istirahat para peserta kegiatan

Kamar Peserta di Grha Konstitusi 4 dan 5



Grha Konstitusi 7



Tempat Makan Peserta

Mushola



Di Samping Grha Konstitusi 7

Fasilitas di Dalam Grha Konstitusi 7



Fasilitas Lainnya



Ruang Registrasi dan Ruang Tunggu Peserta di Grha Konstitusi 2

Fasilitas Lainnya



Parkir Khusus Disabilitas
di Depan Grha Konstitusi 4



Lift
di Lobby Grha Konstitusi 2



Ruang Laktasi
di Grha Konstitusi 4



Fasilitas Lainnya



Poliklinik
di Grha Konstitusi 2



Pojok Digital
di Grha Konstitusi 2



**T
E
R
I
M
A**

**K
A
S
I
H**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PENGGUNAAN SIMULTAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

SIMULTAN
(Sistem Informasi Manajemen Peserta
Langsung dan Transparan)



LAYANAN WI-FI

Nama Wi-Fi : *Pusdiklat_MKRI*

Password : *pusdikmk*

Nama Wi-Fi : *GK3_PUSDIKLAT*

Password : *pusdikmkri*

Nama Wi-Fi : *MK-TAMU*

Password : *Konstitusi123*



FUNGSI SIMULTAN



Pre & Post Test

Mengerjakan *Pre Test* dan *Post Test* secara *online* dengan login sesuai ID peserta



Evaluasi Narasumber dan Kegiatan

Mengisi *Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Kuesioner Evaluasi Kegiatan* (di akhir kegiatan) secara *online*



Booklet & Materi

Mengunduh pedoman kegiatan dan bahan paparan narasumber



Daftar Hadir

Daftar hadir/presensi kami sediakan dalam bentuk digital



E-Sertifikat

Mengunduh e-Sertifikat setelah kegiatan berakhir



Login ke dalam Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN)



**Untuk Login ke dalam
Akun Sistem Informasi
Peserta (SIMULTAN),
Peserta Scan QR Code
yang Ada pada Tanda
Peserta (ID Card
Peserta)**

Akses laman pusdik.mkri.id pada *browser*

The screenshot shows a web browser displaying the homepage of PusdikMK. The browser's address bar shows the URL 'pusdik.mkri.id'. The website features a dark blue header with the PusdikMK logo on the left and a navigation menu on the right. The main content area has a blue background with a large white text block and a circular image of the building. A green button is visible on the left side of the main content area.

PusdikMK

[Beranda](#) [Tentang Pusdik](#) [Simultan](#) [Kegiatan](#) [Alumni](#) [Zona Integritas](#) [Informasi Publik](#) [Kontak](#)

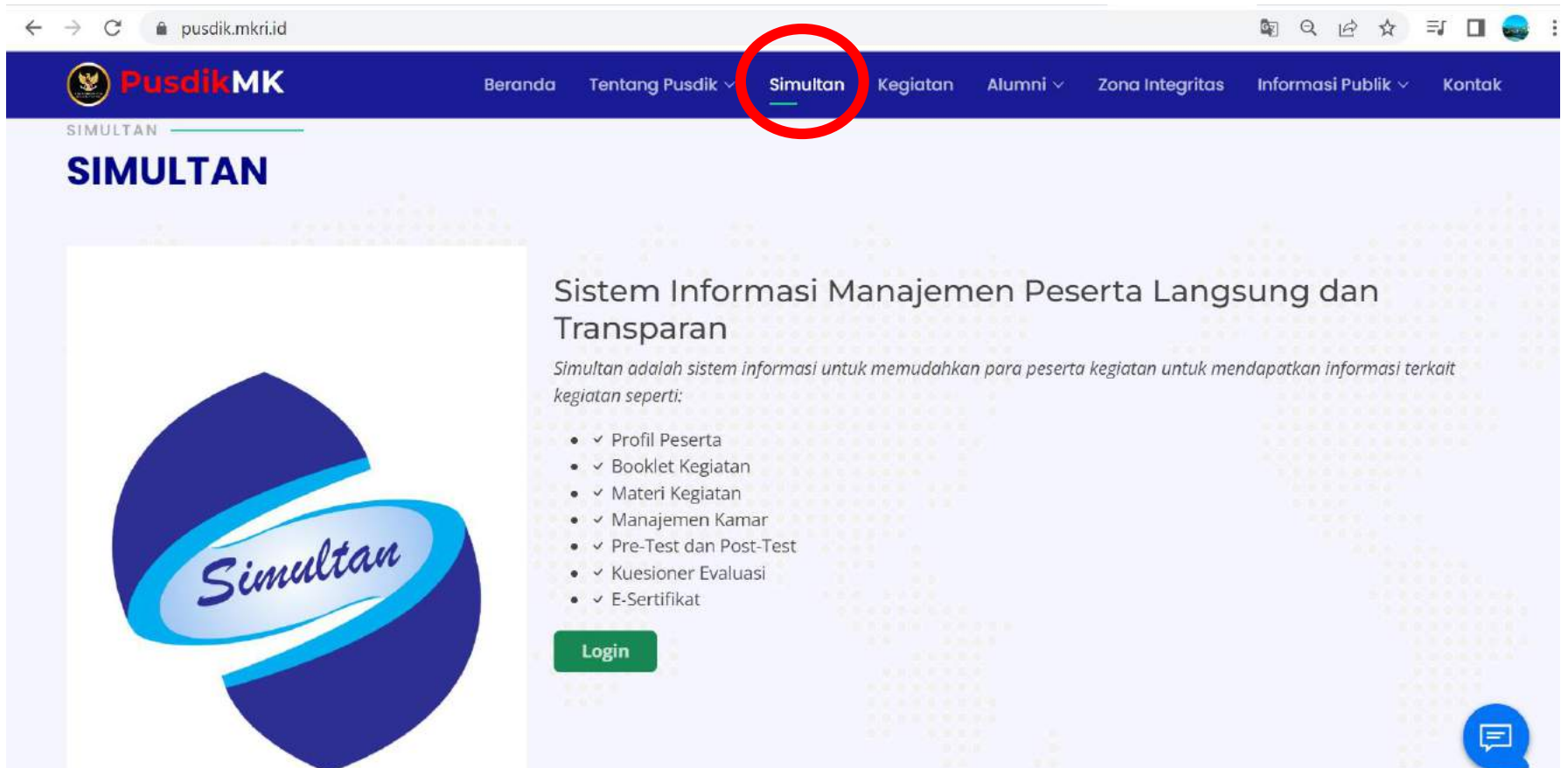
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Sejarah Singkat](#)

**PUSDIK
PANCASILA & KONSTITUSI**

Klik LOGIN pada bagian SIMULTAN



The screenshot shows the PusdikMK website interface. The browser address bar displays 'pusdik.mkri.id'. The navigation menu includes 'Beranda', 'Tentang Pusdik', 'Simultan', 'Kegiatan', 'Alumni', 'Zona Integritas', 'Informasi Publik', and 'Kontak'. The 'Simultan' menu item is highlighted with a red circle. Below the navigation bar, the page title 'SIMULTAN' is displayed. The main content area features a large graphic of the 'Simultan' logo on the left and a text block on the right. The text block describes the system as a direct and transparent participant management information system, listing various features such as participant profiles, activity booklets, activity materials, room management, pre-test and post-test, evaluation questionnaires, and e-certificates. A green 'Login' button is positioned below the list.

PusdikMK

Beranda Tentang Pusdik **Simultan** Kegiatan Alumni Zona Integritas Informasi Publik Kontak

SIMULTAN

SIMULTAN

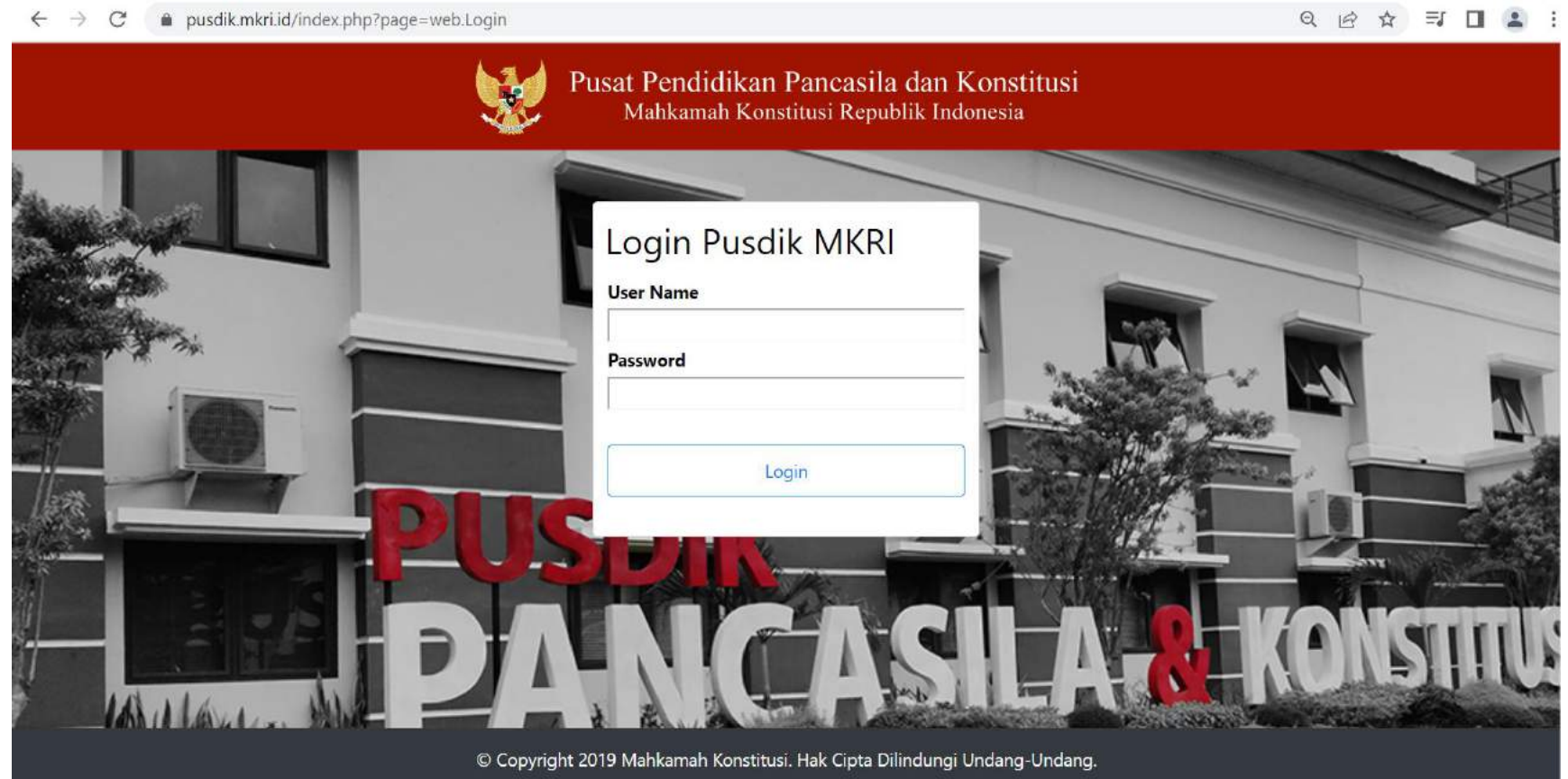
Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan

Simultan adalah sistem informasi untuk memudahkan para peserta kegiatan untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan seperti:


- ✓ Profil Peserta
- ✓ Booklet Kegiatan
- ✓ Materi Kegiatan
- ✓ Manajemen Kamar
- ✓ Pre-Test dan Post-Test
- ✓ Kuesioner Evaluasi
- ✓ E-Sertifikat

Login

Masukan Username dan Password



← → ↻ pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Login 🔍 📄 ☆ ☰ 👤 ⋮

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Login Pusdik MKRI

User Name

Password

[Login](#)

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.



Profil Peserta

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Nama Lengkap	:	Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	:	Bogor / 2013-02-26
Usia	:	9 tahun 9 bulan 1 hari
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	:	S3
Asal Instansi	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	:	Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	085157929660
E mail	:	pusdik@mkri.id

Profil Peserta

Meng-edit Profil Peserta



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Profil](#) [Barcode](#) [Materi](#) [Presensi](#) [Kuesioner](#) [E-Sertifikat](#) [Logout](#)



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-26
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

Edit Profile

Klik “Edit Profile”

Catatan:

Nama Lengkap dan Gelar yg tercantum pada Profil Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN) yg akan Dicetak pada e-Sertifikat

Edit Profil Peserta
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya

NIK * :

Gelar Depan * :

Nama Lengkap * : Safira Putri Purnama
Usulkan Perbaikan Nama :
Usulan Perbaikan Nama (Isiah Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih.

Gelar Belakang * : S.Kim

Tempat/Tanggal Lahir * : Jakarta | 1985-09-26

Jenis Kelamin * : Perempuan

Pendidikan * : S2

Instansi * : Mahkamah Konstitusi RI

Jabatan * : Programmer Utama

Alamat * :

Desa/Kelurahan * : Desa Satriamekar

Provinsi * : D.K.I. JAKARTA

Kabupaten/Kota * : KOTA JAKARTA TIMUR

HP * :

Email * :

[Update Data](#)

Meng-edit Profil Peserta


Peserta Dapat:

1. Revisi Nama Lengkap (Perlu Persetujuan Pusdik MK melalui Sistem);
2. Tambahkan Gelar; dan
3. Lengkapi Data yg Masih Kosong.

Selanjutnya, klik “Update Data” pada Bagian Bawah Laman.

Meng-edit Profil Peserta

Profil Peserta
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom <small>(Usulan Perbaikan Nama (Ishak Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih.)</small>
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-20
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

[Edit Profile](#)

Setelah peserta Klik “Update Data” pada Laman sebelumnya, maka Peserta akan kembali ke Laman Profil Peserta.

Apabila peserta merevisi Nama Lengkap, akan ada notifikasi “Usulan Perbaikan Nama menunggu persetujuan panitia. Terima kasih.”



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Pemateri	File
1	Eksistensi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	Mahkamah Konstitusi	File
2	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	File
3	Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Mahkamah Konstitusi	File
4	BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM	MAHKAMAH KONSTITUSI	File

Mendownload Materi atau Bahan Paparan Narasumber



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Presensi 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

Klik tombol “Presensi” yang berwarna biru

*Tombol “Presensi” berwarna biru hanya akan muncul ketika materi dimulai sesuai jadwal hingga 30 menit setelah materi selesai sesuai jadwal.

*Presensi dilakukan pada setiap sesi Materi



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Sudah Absen 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d



Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0


Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

Klik pada tulisan
“**SOAL PRE TEST**”

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

☰

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia

SOAL PRE TEST

No	Judul	Pemateri
1	Penjelasan Teknis Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia	



SOAL PRE TEST BIMTEK PHPU 2019

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali....

- Badan Pengawas Pemilu
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- Komisi Pemilihan Umum
- Mahkamah Konstitusi
- Pemantau Pemilu

Halaman

“Lembar *Pre Test* & *Post Test*”

*Waktu mengerjakan soal *Pre test* dan *Post test* : **20 menit**



- Putusan
- Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

- Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- Pengajuan permohonan secara daring (online)
- Persidangan jarak jauh (video conference)
- Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- Semua benar

Simpan

Isi

Isi lembar kerja **Pre Test** dan **Post Test** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai 10 soal** klik “**simpan**”

Hasil *Pre Test* dan *Post Test*



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

11

Nilai Post Test

:

14





Nilai Pre Test	-	11
Nilai Post Test	:	14

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila		29-11-2022 07:30 s/d 29-11-2022 09:30	Isi Kuesioner
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme		29-11-2022 10:00 s/d 29-11-2022 12:00	Isi Kuesioner
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945		29-11-2022 13:00 s/d 29-11-2022 15:00	Isi Kuesioner

Mengisi Kuesioner Evaluasi Narasumber



Kuesioner Evaluasi Narasumber Oleh Peserta

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Penilaian oleh Peserta

NO	Penilaian Pelaksanaan Kegiatan	Sangat Buruk	Buruk	Baik	Sangat Baik
1.	Kemampuan Menyajikan Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Sistematika Penyajian Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Interaksi Dengan Peserta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Penggunaan Bahasa Lisan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Halaman

“Kuesioner Evaluasi Narasumber”

***Mohon diisi setelah atau menjelang setiap sesi materi berakhir**



Saran dan Perbaikan

1.

2.

Simpan

Isi

Isi lembar **Kuesioner Evaluasi Narasumber** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai** klik “**simpan**”

* **Seluruh penilaian wajib diisi**, kecuali kolom saran dan perbaikan



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

Mengisi Evaluasi kegiatan



Kuesioner Evaluasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Alokasi waktu masing-masing materi telah sesuai	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Materi yang disajikan merupakan isu yang problematis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Materi meningkatkan keterampilan analisis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Materi yang paling menarik

Pilih Materi





Secara umum berikan pendapat anda mengenai keseluruhan hasil pelayanan kami (skor 1-100)

Saran dan Perbaikan

1.

2.

3.

Simpan



Bimbingan Teknik atau PPHKWN

[E-Sertifikat](#)

Mengunduh e-Sertifikat



622ae73b0c0f7.pdf

1 / 2



54%



Klik Tanda Panah Bawah untuk Mengunduh (*Download*)

TERIMA KASIH

PANDUAN MODERATOR SESI MATERI

A. Pembukaan/*Greetings*

- a) Mengucapkan Salam;
- b) Menyampaikan selamat datang di Pusdik Pancasila dan Konstitusi dan memberikan pesan kepada peserta tetap menjaga protokol kesehatan.

B. Sesi Materi

- a) Menyapa Narasumber;
- b) Meminta izin untuk memulai kegiatan (batas toleransi terlambat masuk sesi materi kurang lebih 5 s.d. 10 menit);
- c) Perkenalan diri sebagai moderator;
- d) Menjelaskan Sesi Materi secara singkat (*outcome* yang ingin dicapai peserta);
- e) Memperkenalkan narasumber, membacakan cv singkat kepada peserta;
- f) Memperkenalkan peserta dan profil singkat peserta kepada narasumber:
 - Jumlah total peserta;
 - Asal organisasi peserta;
 - Asal daerah peserta.

C. Alokasi waktu

- a) Pembagian alokasi waktu pemaparan;
- b) Pembagian alokasi waktu sesi diskusi/tanya jawab.

D. Mengingatkan untuk mengisi daftar hadir melalui link yang diberikan, mengisi kuesioner dan mengunduh materi.

E. Mempersilakan narasumber untuk memulai paparan materi.

F. Narasumber selesai memaparkan materi

- a) Menyimpulkan isi materi narasumber secara singkat;
- b) Memandu jalannya tanya jawab.

G. Penutup

- a) Menutup sesi Materi
 - Mengucapkan terima kasih kepada narasumber;
 - Mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi aktifnya;
 - Harapan setelah mendapatkan materi ini.
- b) Memberikan informasi untuk sesi berikutnya
 - Waktu dimulainya sesi berikutnya;
 - Materi apa dan siapa pematernya;
 - Mengingatkan untuk *ontime* dalam sesi berikutnya.

**PANDUAN NARASUMBER SESI PRAKTEK
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SESI PRAKTEK

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Para peserta telah diarahkan/diminta untuk menyusun draf Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Keterangan Pihak Terkait pada akhir Sesi Teknik Penyusunan.
- b) Soal dan *template* penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Keterangan Pihak Terkait telah diunggah ke *microsite*, dan peserta telah diarahkan untuk mengunduhnya serta menyusun draf tugas praktek sesuai *template* dimaksud.

2. Mekanisme/Alur Sesi Praktek

- a) Di awal, narasumber menjelaskan secara singkat terkait struktur Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan/atau Keterangan Pihak Terkait sesuai *template*, mulai dari identitas sampai dengan petitum; serta memberikan penegasan terhadap poin-poin yang perlu di-*highlight* dari *template*.
- b) Selanjutnya, narasumber mengajak para peserta untuk mereviu draf Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan/atau Keterangan Pihak Terkait yang telah disusun oleh peserta secara bergantian.
- c) Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat mereviu dan menerima pertanyaan/konsultasi dari peserta: mengatur lalu lintas pertanyaan/konsultasi dari peserta; mengondisikan peserta yang sedang konsultasi dalam menampilkan draf tugas praktek yang disusun (*slide show*) apabila diperlukan.

**PANDUAN NARASUMBER SESI EVALUASI
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SESI EVALUASI & PRESENTASI

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Melakukan revidu sekaligus memberikan nilai terhadap hasil tugas praktek para peserta pada kelas yang akan diampu, dengan mengisi form evaluasi dan form penilaian.
- b) Narasumber akan diberikan akses kepada alamat *e-mail* pengiriman tugas peserta beserta *password*-nya.
- c) Narasumber menentukan 2 (dua) peserta untuk mempresentasikan hasil tugas prakteknya dan 2 (dua) peserta sebagai cadangan, apabila dari 2 (dua) peserta pertama tidak bersedia untuk mamaparkan hasil pengerjaan tugas praktek.
- d) Narasumber disilahkan menggunakan pertimbangan tertentu dalam menentukan peserta yang presentasi, narasumber dapat memilih tugas praktek yang paling bagus ataupun yang paling banyak catatan, sehingga dapat diberikan evaluasi.

2. Mekanisme/Alur Sesi Evaluasi & Presentasi

- a) Narasumber mempersilahkan 2 (dua) peserta yang telah dipilih sebelumnya untuk melakukan presentasi hasil tugas prakteknya secara bergantian.
- b) Masing-masing peserta diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan tugas prakteknya.
- c) Moderator akan membantu dalam mengondisikan peserta yang presentasi dengan menampilkan hasil tugas praktek (*slide show*).
- d) Setelah presentasi selesai, narasumber memberikan catatan terhadap hasil tugas praktek kedua peserta yang presentasi, serta dilanjutkan dengan menyampaikan hasil revidu keseluruhan atas tugas praktek para peserta.
- e) Kemudian, sesi tanya jawab. Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat Tanya jawab berlangsung: mengatur lalu lintas pertanyaan dari peserta.
- f) Setelah sesi evaluasi berakhir, narasumber kami harapkan memastikan peserta yang mengirimkan tugas prakteknya ke email, serta diharapkan pada hari yang sama sudah mengirimkan form penilaian dan form evaluasi kepada Pusdik MK melalui email masing-masing, untuk kami proses sebagai dasar pemberian sertifikat bagi peserta.

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Gelora
Senin s.d. Kamis, 28 s.d. 31 Agustus 2023**

YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. & YM Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	lanjutkan
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Materi baiknya disajikan dalam bentuk power point/animasi
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	pemateri sangat jelas dan faham terhadap materi yg disampaikan
7	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	61	3,81	Pokoke JUOSSS Muantabb
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	62	3,88	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Semangat selalu YM... semoga teguh untuk menata konstitusi negeri ini
10	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	8	60	3,75	--- ----
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Perlu tambahan contoh Permohonan yang lengkap utk berpekara di MK
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
13	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Hny waktu yg kurang utk mendapatkan ilmu Lbh wktnya agar materi dan pengalaman kasus bisa berimbang diterima kita sbg peserta bimtek mk
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
16	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	50	3,13	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	63	3,94	
19	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	mudah dipahami jd tidak ada catatan untuk materi pembicara interaktif
20	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	8	59	3,69	
21	4	4	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	8	55	3,44	
22	4	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	9	56	3,50	
23	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	7	53	3,31	
24	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	7	54	3,38	
25	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	8	59	3,69	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	8	62	3,88	
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	KEREN SUKSES TERUS
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sudah baik waktu saja yang ditambah
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	waktu pemateri perlu ditambah sesinya siang atau sore
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
31	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	8	60	3,75	
32	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	8	57	3,56	Perlu tanyakan jawab yang lebih
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	bagus n excellent
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Waktunya kurang lama.
35	3	4	3	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	8	55	3,44	
36	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	8	54	3,38	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	63	3,94	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	63	3,94	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	8	60	3,75	Pertahankan
40	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	8	60	3,75	Pertahankan
41	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	8	60	3,75	Pertahankan Tingkatkan
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
43	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	8	52	3,25	
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Lebih banyak ditambah contoh
45	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	8	60	3,75	
46	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	8	57	3,56	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	9	62	3,88	
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	MK is the best
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantap Lanjutkan
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	61	3,81	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	63	3,94	
54	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	7	53	3,31	Boboti materi lebih akurat secara terperinci
55	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	8	57	3,56	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	7	52	3,25	Nara sumber ada dua, tetapi kuesioner cuma satu. Mestinya disesuaikan dgn jumlah nara sumber
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	7	61	3,81	
59	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	51	3,19	
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
61	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	8	62	3,88	Secara umum sudah cukup baik, namun terdapat beberapa hal yg mungkin perlu diperbaiki al : penjelasan terkait penggantian biaya perlu di jelaskan batas plafon biaya maupun alternatif penggunaan transportasi yang diperbolehkan (karena adanya rental mobil yang tidak termasuk dalam penghitungan)
62	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	8	53	3,31	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
65	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	8	55	3,44	Oke Oke
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
67	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	8	62	3,88	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
71	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat baik sangat baik
73	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	9	53	3,31	
74	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	8	55	3,44	
75	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	9	53	3,31	Acara pembukaan yang penuh Inspirasi perlu lebih banyak interaksi 2 arah
76	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	
77	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	60	3,75	sudah mantap sudah mantap
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	DIPERTAHANKAN SUDAH BAGUS, TIDAK KEBELET WAKTU DAN TIDAK TERLALU KETAT
80	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	None
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Terima kasih Terima kasih
82	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	9	59	3,69	
83	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	baiknya materi diberikan dalam kelas2 kecil sehingga ada diskusi mendalam
84	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	0	61	3,81	
85	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	3	4	3	3	0	54	3,38	Mohon di tingkatkan dan terus mengabdikan bagi bangsa dan negara dan menjadi konstitusi yg baik dan transparan dan terbuka bagi siapa saja.
86	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
87	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	8	55	3,44	Semoga tahun depan bisa laksanakan diklat kembali, sehingga kami peserta pemilu sangat paham dalam bersengketa hasil pemilihan
88	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Terus berikan yang terbaik buat bangsa Terus tingkatkan kemampuan
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sukses selalu Pusdik MK RI
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
92	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	8	59	3,69	Penyajian dan penyampaian materi, bisa di jabarkan dgn detail
93	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	61	3,81	Contoh kasus diperbanyak Contoh kasus diperbanyak
94	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	9	60	3,75	
95	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	16	1,00	Lebih ditambah hari diklatnya Lebih byk materinya
96	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	4	3	8	55	3,44	
97	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Salam Gelora
	3,75	3,70	3,71	3,70	3,62	3,62	3,62	3,61	3,73	3,69	3,74	3,64	3,61	3,48	3,72	3,70			3,67	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Gelora
Senin s.d. Kamis, 28 s.d. 31 Agustus 2023

Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Terus semangat, sukses selalu
2	3	3	2	3	3	3	2	3	4	4	4	3	3	3	3	3	7	49	3,06	ngantuk.. boring pembicara harus sedikit memodifikasi penyampaian kepada peserta agar tidak berat dan boring
3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	59	3,69	- -
4	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	59	3,69	- -
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	63	3,94	sesinya sudah cocok pagi baik
6	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	8	56	3,50	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
8	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	8	53	3,31	
9	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	2	3	3	7	50	3,13	konsisten dengan bahan materi.
10	4	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4	9	56	3,50	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	8	60	3,75	Sdh
12	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	3	8	55	3,44	Kerenn Kerennn
13	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	8	60	3,75	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
15	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	7	51	3,19	
16	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4	3	3	3	8	53	3,31	Materi dan kasus tdk berimbang Baiknya perimbangan agar materi alurnya dpt dicerna opeh peserta
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Pemateri sangat faham dan jelas dalam menyampaikan, alur penyampaianya runut Dipertahankan dan ditambah sharing dan sejarah dinamika MK di Indonesia dan negara lain
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
20	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	8	56	3,50	
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
22	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	8	60	3,75	
23	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	8	51	3,19	
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	
25	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	59	3,69	
26	2	2	2	3	2	2	2	2	4	3	2	2	2	2	3	3	4	38	2,38	Penyampaian materi sangat monoton dan tidak hidup suasananya sehingga sangat efektif
27	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	8	58	3,63	
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
29	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	7	50	3,13	
30	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	7	43	2,69	agar lebih dimateri yg dibagikan
31	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	7	43	2,69	agar lebih dimateri yg dibagikan
32	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	56	3,50	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	9	62	3,88	
34	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	8	53	3,31	
35	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	7	52	3,25	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
37	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	52	3,25	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
39	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	8	53	3,31	Oke Oke
40	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	8	59	3,69	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Semangat Indonesia!
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
43	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	8	54	3,38	
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	8	52	3,25	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Kayak kuliahn Praktek berbeda
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	terus ditingkatkan
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat baik sangat baik
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
56	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	mantab bagus	
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Ok Ok	
60	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81		
61	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	8	60	3,75		
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
63	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	9	57	3,56		
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
65	3	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	0	55	3,44		
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	8	62	3,88	None	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00		
69	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	7	53	3,31		
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00		
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sukses selalu para pemateri Pusdik MK RI	
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tetap jaga kualitas agar ttp baik dlm memberi materi Tidak ada perbaikan	
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00		
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	8	62	3,88		
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
77	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00		
78	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	16	1,00	Cukup puas, boleh lebih dipuaskan	
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
80	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Salam Gelora	
	3,43	3,39	3,35	3,46	3,29	3,38	3,44	3,45	3,55	3,53	3,53	3,40	3,44	3,26	3,40	3,40				3,42	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Gelora
Senin s.d. Kamis, 28 s.d. 31 Agustus 2023**

Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	- -
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
8	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	
9	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	57	3,56	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Penyampaian materinya baik runut dan jelas, pemateri menjelaskan dengan baik setiap tahapan penanganan perkara
14	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	2	2	3	3	3	7	46	2,88	Bahan materi sebaiknya dalam satu kesatuan file yang sistimatis dg pdf, agar ringan di Hp
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
17	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	0	51	3,19	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat baik dalam penyampaian materi
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	Sangat teknis Bagus lanjutkan
21	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	9	53	3,31	
22	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	8	60	3,75	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
24	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	8	57	3,56	
25	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	58	3,63	
26	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	8	61	3,81	cukup
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat baik kualitasnya Dipertahankan tau ditimhkatkan
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	lanjutkan
30	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
32	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	9	54	3,38	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Baik waktu ditambah
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Terus di lanjutkan dan di tingkatkan
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Luar biasa
36	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	8	51	3,19	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	SARAN AGAR NARASUMBER JUGA BISA DIPANGGIL SEPERTI MANTAN KETUA MK MEMBERIKAN MATERI DALAM BIMTEK INI
38	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	8	52	3,25	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
40	4	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	9	57	3,56	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
42	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	8	61	3,81	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat baik sangat baik
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
46	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	61	3,81	- -
47	4	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	8	57	3,56	
48	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	60	3,75	
49	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	7	57	3,56	
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	8	52	3,25	
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	8	52	3,25	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Ok Ok
55	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	8	57	3,56	
56	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	9	57	3,56	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
58	4	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	3	0	56	3,50	
59	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	8	57	3,56	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	7	61	3,81	None
61	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	7	51	3,19	
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	materi baiknya diberikan dlm kelas2 kecil, tdk hanya praktek
64	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	9	53	3,31	
65	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	6	54	3,38	tidak hanya sekali dalam pelaksanaan diklat untuk peserta pemilu untk bisa laksanakan setiap tahun, sehingga peserta sangat memahami dalam berperkara
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sukses selalu para pemateri Pusdik MK RI
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	63	3,94	
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
74	4	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	52	3,25	
75	4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	8	53	3,31	
76	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	16	1,00	Cukup puas
77	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Sudah bagus dan mantab
78	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
79	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Salam Gelora
	3,63	3,56	3,62	3,54	3,51	3,52	3,57	3,61	3,57	3,62	3,62	3,52	3,52	3,49	3,62	3,62			3,57	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Gelora
Senin s.d. Kamis, 28 s.d. 31 Agustus 2023**

Nanda Adyriansyah, S.Kom., M.T.I. & Jamaludin Salam

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Lanjutkan
3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	2	2	3	7	54	3,38	
4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	--
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat baik sangat baik
9	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
11	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	8	51	3,19	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	64	4,00	cukup
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	ajikan materinya, terutama praktik input data PPHU Per
18	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	8	53	3,31	kuis lebih banyak
19	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	8	53	3,31	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
22	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	8	57	3,56	--
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	emateri nya dalam menyampaikan agak terlalu cepet...
24	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	8	58	3,63	
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
28	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	8	54	3,38	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantap Lanjutkan
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	oke aja sih... meski mumet...
32	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Ok Ok
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat baik Pertahankan dan di tingkatkan
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
39	4	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	9	58	3,63	
40	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	8	56	3,50	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	waktu ditambah baik
46	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	3	8	54	3,38	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Bagus Ilmu ini. perlu di perluas
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
50	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	9	54	3,38	Perlu adanya video di dalam materi agar variatif
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	adiah, jadi membuat peserta lebih semangat di awal h
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
53	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	7	52	3,25	
54	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	54	3,38	
55	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	4	7	60	3,75	None
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
57	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	16	1,00	
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	8	52	3,25	
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
61	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	8	52	3,25	
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sukses selalu para pemateri Pusdik MK RI
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
65	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	8	56	3,50	
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
68	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	60	3,75	Penyampaian materi kadang terlalu cepat
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
71	4	3	4	3	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	8	54	3,38	
72	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	16	1,00	Puas
73	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Salam Gelora
	3,53	3,49	3,50	3,46	3,47	3,49	3,38	3,47	3,45	3,50	3,49	3,53	3,43	3,47	3,43	3,45			3,47	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Gelora
Senin s.d. Kamis, 28 s.d. 31 Agustus 2023**

Saiful Anwar, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -
3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	8	52	3,25	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
6	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	
7	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	59	3,69	ok
8	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	7	50	3,13	Sebaiknya dalam paparan juga ditampilkan PMK no 2 2023, karena semua ada dalam PMK ini, khususnya di lampirannya.
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Penyampainnya cukup jelas dan rinci
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
12	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	61	3,81	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Ok Ok
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	oke
20	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	8	54	3,38	
21	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	- -
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
24	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	9	53	3,31	
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
29	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	waktu ditambah interaksi ditingkatkan
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Keeren
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat baik sangat baik
35	4	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	7	54	3,38	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Puas Sangat baik di pertahankan
37	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	3	8	55	3,44	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
39	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	2	3	3	8	44	2,75	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Bagus dan excellent
43	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	9	59	3,69	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
46	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	0	57	3,56	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Terlalu banyak teori Lebih di contohkan praktek di lapangan
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
50	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	8	58	3,63	
51	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	7	59	3,69	None
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	materi bisa diberikan dlm kelas2 kecil, agar lebih fokus
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
57	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	8	57	3,56	
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
59	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	4	9	54	3,38	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
60	4	3	4	3	4	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	8	55	3,44	tidak hanya sekali dalam pelaksanaan diklat untuk peserta pemilu untk bisa laksanakan setiap tahun, sehingga peserta sangat memahami dalam berperkara
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sukses selalu para pemateri Pusdik MK RI
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
66	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	8	55	3,44	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
74	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	16	1,00	Puas
75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Salam Gelora
	3,53	3,53	3,48	3,52	3,44	3,47	3,48	3,52	3,55	3,52	3,52	3,51	3,51	3,47	3,53	3,53			3,51	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Gelora
Senin s.d. Kamis, 28 s.d. 31 Agustus 2023**

Dr. Abdul Ghoffar, S.H., M.H., Alboin Pasaribu, S.H., M.H., I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H., M.H., & Dr. Agusniwan Etra, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	3	3	8	55	3,44	baik
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -
6	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	8	55	3,44	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	8	49	3,06	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	terimakasih
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat baik sangat baik
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	8	63	3,94	baik baik
16	4	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	7	54	3,38	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat baik Baik
19	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	61	3,81	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
22	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	8	58	3,63	
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
25	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	8	59	3,69	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
29	4	3	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	9	59	3,69	Materi sudah sangat baik dan relevan dengan kegiatan Saya mengikuti acara secara penuh namun lupa absensi secara online. Kalau absensi secara Offline sudah dan sudah mengirim tugas
30	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	59	3,69	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
33	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	8	59	3,69	
34	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	57	3,56	Ok Ok
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
36	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	3	9	53	3,31	
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantap Lanjutkan
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
42	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	57	3,56	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
45	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	61	3,81	None
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Teruskan
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
53	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	7	53	3,31	
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sukses selalu para pemateri Pusdik MK RI
57	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	9	58	3,63	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	8	51	3,19	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Materi yg disampaikan jelas dan runut
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
69	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	16	1,00	Puas
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	7	49	3,06	
71	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Salam Gelora
	3,49	3,49	3,51	3,49	3,51	3,55	3,46	3,58	3,55	3,58	3,56	3,54	3,51	3,52	3,59	3,58			3,53	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Gelora
Senin s.d. Kamis, 28 s.d. 31 Agustus 2023**

Ery Satria Pamungkas, S.H., Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H., Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H., & M. Lutfi Chakim, S.H., LL.M.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
2	3	4	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	7	54	3,38	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	--
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
10	4	3	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	60	3,75	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	59	3,69	- -
14	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	8	56	3,50	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantap detail Sangat jelas
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
21	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	7	58	3,63	None
22	4	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	4	8	58	3,63	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Materi dan penjelasa mantap serta contoh kasus jd pengalaman ilmu kami
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	materi jg diberikan dalam kelas kecil agar lebih fokus
30	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	8	56	3,50	
31	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	8	53	3,31	Mohon rekaman minimal suara dari yang disampaikan pemateri, karena sifatnya kasus2
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	8	63	3,94	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Lanjutkan
34	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	8	56	3,50	
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
36	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	8	62	3,88	tambah waktu sarana layar posisinya kurang nyaman untuk sebagian peserta
37	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	9	53	3,31	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
39	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	9	53	3,31	
40	4	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	3	9	55	3,44	tidak hanya sekali dalam pelaksanaan diklat untuk peserta pemilu untk bisa laksanakan setiap tahun, sehingga peserta sangat memahami dalam berperkara
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat jelaaaaasssss
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat baik dan terimah kasi waktu dan pembelajaran nya sagat luar biasa
45	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	8	56	3,50	
46	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	8	58	3,63	Terkait Pengajaran di Kelas sangat Baik tetapi dia aula sangata kurang interaktif para pemberi Materi sehingga mambuat kita nge lag/ ngatuk
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sukses selalu para pemateri Pusdik MK RI
49	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	9	57	3,56	
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Lebih ditingkatkan lagi Lebih ditingkatkan lagi
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
58	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
59	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	8	55	3,44	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Pemateri menyampaikan baik dan jelas
66	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	9	59	3,69	
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
70	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	61	3,81	
71	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	16	1,00	Puas
72	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	3	3	3	9	53	3,31	Kegiatan sudah bagus dan bervariasi
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Salam Gelora
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
	3,63	3,56	3,56	3,53	3,49	3,56	3,53	3,52	3,59	3,57	3,57	3,55	3,57	3,55	3,55	3,57			3,56	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Senin s.d. Kamis, 28 s.d 31 Agustus 2023

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
1	4	4	4	12	4	4	3	11	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	3	4	4	11	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	78	3,71	Saran : Kebersihan kamar dan kamar mandi di tingkatkan
2	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
3	3	4	3	10	3	3	3	9	Dr. Agusniwan Etra, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	73	3,48	
4	4	4	4	12	4	4	4	12	Saiful Anwar, S.H., M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	4	3	4	11	3	3	6	3	4	7	4	4	8	4	3	7	4	4	8	77	3,67	
5	3	4	4	11	4	3	4	11	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	3	4	11	3	2	5	2	2	4	4	4	8	4	4	8	4	4	8	74	3,52	Konsumsi sering kurang
6	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	4	4	11	4	4	8	3	3	6	4	4	8	3	3	6	3	3	6	69	3,29	Terima kasih Terima kasih Terima kasih
7	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	pokoke JUOSSS tenan bravo psudiklat MK RI Lanjutkeun
8	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Bangkit Panji Anarogo	4	3	7	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	
9	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	Pusdik pacasila dan konstitusi TOP Semoga konstitusi selalu terbaik dlm demokrasi
10	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
11	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Tempat dan sarana dan prasarana bimtek sangat memadai terus ditingkatkan Pelayanan sangat baik dan ramah Pemateri dan narasumber sangat berkompeten
12	3	3	4	10	4	4	3	11	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	2	4	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3,76	
13	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	
14	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	sarana olahraga diperbanyak, kolam renang perbanyak praktikum
15	3	3	3	9	3	4	3	10	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Edwin Aditya Irawan	3	4	7	4	3	4	11	4	3	7	2	4	6	4	4	8	4	3	7	4	2	6	71	3,38	
16	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	
17	4	4	4	12	4	4	4	12	Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	4	4	8	83	3,95	
18	3	4	3	10	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	2	5	63	3,00	
19	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	2	3	5	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	62	2,95	perlu diperhatikan penggantian handuk
20	3	4	4	11	4	4	4	12	Dr. Abdul Ghoffar, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	
21	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
22	3	3	3	9	4	4	3	11	M. Lutfi Chakim, S.H., LL.M.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	
23	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	4	4	4	12	4	3	7	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	3	7	78	3,71	soal post-test diperlihatkan yg mana jawaban yg benar dan yg mana jawaban peserta yg salah

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
24	3	3	3	9	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	4	7	4	4	4	12	3	3	6	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	77	3,67	Terima kasih atas ilmu dan pelayanan nya
25	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Angga Putri Gardina	4	3	7	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	saran., semua yang disiapkan oleh pusdik Pancasila sudah sangat baik.,kalau bisa di tambahkan tempat olahraga seperti badminton,supaya peserta dapat berolahraga dengan beberapa fasilitas olahraga yang disiapkan
26	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Terbaik Istimewah Mantul
27	3	3	3	9	3	2	2	7	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	3	7	3	4	7	68	3,24	bagus bila ada pembelajaran melalui simulasi persidangan atau prosesi gugatan dan semua proses terkait., sehingga peserta mendapat persepsi yang mendekati suasana ril dan mengetahui kekira apa yang perlu disiapkan dll
28	4	3	3	10	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	78	3,71	Menambah materi pelatihan dg video tutorial Menambah sosialisasi bukan hanya pd parpol peserta pemilu tapi juga pd stake holder pelaksana pemilu lain Memberi edukasi ttg mahkamah konstitusi melalui video2 di kanal medsos
29	4	4	3	11	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	4	7	4	4	8	3	3	6	3	3	6	76	3,62	
30	4	4	4	12	4	4	4	12	Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Mantap Fariasi kegiatannya di pertahankan Buat game utk menjalin keakraban
31	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	81	3,86	
32	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
33	3	3	3	9	4	3	4	11	YM Hakim Konstitusi - Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Ardiansyah Salim	3	3	6	4	4	4	12	3	3	6	2	4	6	3	3	6	4	3	7	3	4	7	70	3,33	untuk Nara sumber Bpk Jamal hrs lbh komunikatif. untuk konsumsi, hrp diperhatikan suplai makanannya jgn sampai telat waktu mengisi yg kosong, dan diperhatikan umur peserta dan disesuaikan, dan hrp diperbanyak buahnya, terutama pagi dan malam secara umum ok
34	3	4	4	11	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	4	3	7	4	3	4	11	4	3	7	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3,76	
35	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	3	4	7	4	3	7	4	4	8	4	4	8	81	3,86	SARANA KAMAR PSERTA DI TINGKATKAN FODIUM AULA KALU BISA LEBIH TINGGI LAGI KALAU BISA ADA LOUNDRY DI DALAM PUSDIK
36	3	3	3	9	3	3	3	9	Saiful Anwar, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
37	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	
38	4	3	3	10	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	78	3,71	Menambah materi pelatihan dg video tutorial Menambah sosialisasi bukan hanya pd parpol peserta pemilu tapi juga pd stake holder pelaksana pemilu lain Memberi edukasi ttg mahkamah konstitusi melalui video2 di kanal medsos

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
39	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.		4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Perlu lebih penyelesaian Problem solving Latihan di berikan dengan contoh yang up to date Ada contoh stimulasi gugatan ke MK
40	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Semuanya ok
41	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.		4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Perlu lebih penyelesaian Problem solving Latihan di berikan dengan contoh yang up to date Ada contoh stimulasi gugatan ke MK
42	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	0	4	4	80	3,81	
43	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	kelengkapan kamar : minimal 3 colokan di kamar variasi makanan : menu buah-buahan ditambah
44	3	4	4	11	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	
45	4	3	4	11	3	3	3	9	Alboin Pasaribu, S.H., M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	3	7	4	4	4	12	3	3	6	4	3	7	3	3	6	3	3	6	3	3	6	70	3,33	Saran dari saya luar biasa mudah mudahan apa yang kami dapat materi ini bermanfaat Dari saya melalui kegiatan ini keluarga besar partai Gelora menjadi kuat menuju 5 besar Dunia Akhir kata saya menyampaikan banyak berterima kasih semoga lain waktu bisa jumpa kembali
46	3	4	4	11	4	3	4	11	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.		4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	81	3,86	Wi-fi di kamar Graha 4 tidak masuk di kamar ujung Lebih baik lagi kalau dialog yg berujung problem solving lebih ditanamkan, lebih fokus
47	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	3	4	7	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	64	3,05	Semakin ditingkatkan lagi biar bertahan nilai A Semoga makin bagus Semoga makin sempurna
48	3	3	3	9	3	2	3	8	Saiful Anwar, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	4	3	10	3	3	6	2	4	6	4	4	8	4	4	8	3	2	5	66	3,14	INTERNET SERING BLANK MAKANAN LEBIH MENARIK DAN ENAK
49	3	3	3	9	3	3	3	9	Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	4	3	7	3	3	6	3	3	6	4	4	8	3	3	6	66	3,14	Saran agar ada pemateri mantan ketua MK
50	3	4	4	11	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Suhardi	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	
51	3	4	4	11	4	4	3	11	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	
52	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Abdul Ghoffar, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Makanan jangan pedas
53	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	di tempat makan perlu ada tempat cuci tangan
54	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
55	3	3	3	9	3	3	4	10	I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	4	3	7	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	65	3,10	Terus menjaga integritas marwa Mahkamah konstitusi, dan menganga pusat pendidikan ini degan baik dan di kelola degan benar agak terus di lakukan kegiatan2 kunsultasi hukum di tahun2 yang akan datang lagi. Salam hormat dan salam kompak selalu..
56	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
57	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	terimah kasi atas bimtek nya sangat baik sangat baik
58	4	4	3	11	3	3	3	9	Ery Satria Pamungkas, S.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	3	3	6	4	4	8	4	4	8	3	3	6	75	3,57	banyak ilmu yang kami dapat terimakasih MK

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
59	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
60	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	terimah kasi atas bimbingan nya luar biasa sekali sangat bagus
61	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Abdul Ghoftar, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
62	4	4	3	11	3	3	3	9	Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	74	3,52	
63	4	4	4	12	3	3	3	9	Nanda Adyiansyah, S.Kom., M.T.I.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	77	3,67	
64	3	4	4	11	3	3	4	10	YM Hakim Konstitusi - Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Angga Putri Gardina	3	4	7	3	3	4	10	4	3	7	3	3	6	4	3	7	3	3	6	4	4	8	72	3,43	
65	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	Best MK...kultur melayani sudah terbentuk, semoga dipertahankan dan lebih lagi, tapi yg ini sudah the best.
66	3	4	4	11	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	2	3	5	3	3	6	3	3	6	3	2	5	63	3,00	
67	3	4	3	10	4	3	4	11	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Fazlur Rahman El Islamy	3	4	7	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	3	3	6	74	3,52	
68	4	4	4	12	4	4	4	12	Nanda Adyiansyah, S.Kom., M.T.I.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	
69	3	3	3	9	3	3	3	9	Nanda Adyiansyah, S.Kom., M.T.I.	Bambang Sukmadi	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
70	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	3	4	4	11	3	3	6	3	3	6	3	4	7	4	4	8	3	4	7	77	3,67	Kegiatan Bimtek Hukum dan Konstitusi bagi Bidang Hukum, HAM dan Advokasi Parpol sebaiknya diselenggarakan minimal sekali setahun dan tidak hanya terkait PHPU melainkan juga terkait hal-hal lainnya yang berkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan.
71	3	3	3	9	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	3	3	6	4	4	8	3	2	5	74	3,52	Internet sering putus
72	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Agusniwan Etra, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
73	4	4	4	12	4	4	4	12	Saiful Anwar, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Sdh mantap
74	4	4	4	12	4	3	3	10	Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	67	3,19	
75	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Terbaik Istimewah Lanjutkan
76	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
77	3	4	4	11	3	4	3	10	Dr. Abdul Ghoftar, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	4	3	3	10	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	69	3,29	
78	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Lanjutkan Teruskan Nikmati
79	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
80	4	4	3	11	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	4	3	7	4	4	8	4	3	7	4	4	8	4	3	7	72	3,43	Mushollah d perluas
81	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	65	3,10	Sudah sangat disiplin perlu ditingkatkan lagi Menu makanan lebih khas lokal bogor Pertahankan capaian yg ada. Agar Semua lebih mantap lagi

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
82	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Ardiansyah Salim	3	2	5	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	62	2,95	Lebih ditingkatkan fasilitas kamar tidur (TV, handuk dan pemanas air)
83	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Angga Putri Gardina	3	4	7	3	3	3	9	4	3	7	3	3	6	3	3	6	4	3	7	3	3	6	66	3,14	
84	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	Jika dimungkinkan bisa diadakan TV dikamar, pemanas air dan sabun mandi menu snack jika boleh kami usulkan olahan makanan lokal terutama yg rebusan/kukus. mengurangi gorengan ;)
85	3	4	3	10	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Bambang Sukmadi	3	4	7	4	3	4	11	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	3	7	4	4	8	72	3,43	Disediakan smoking area, agar tetap terjaga kebersihan lingkungan
86	3	3	4	10	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	Masukkan di jadwal kegiatan trip ke puncak Pass dan kebun teh Praktik sidang langsung di ruang sidang Mahkamah Konstitusi Sesi foto bareng peserta di arahkan panitia supaya bisa teratur per daerah, per materi dan foto bareng se Indonesia. 4. Jadwal kegiatan peserta di mulai hari selasa sehingga peserta bisa datang hari senen untuk menghindari buka tutup jalan jalur puncak. Terima kasih
87	4	4	4	12	4	4	4	12	Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
88	3	3	3	9	3	3	3	9	Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.	Bambang Sukmadi	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Sudah mantab dan Bagus untuk di berikan edukasi kepada para DPD diseluruh Indonesia
89	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Kalau bsa di tambahkan sarana olahraga lain seperti badmintonnya
90	3	4	4	11	4	3	3	10	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	3	3	6	71	3,38	
91	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	Terima kasih atas pelaksanaan kegiatan ini. Sangat bermanfaat. Pertahankan
92	3	4	3	10	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Bambang Sukmadi	3	4	7	3	3	4	10	4	3	7	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	3	7	68	3,24	Mantap...
93	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	3	7	4	4	8	4	4	8	82	3,90	tingkatkan sarana kamar peserta Panggung aula lebih tinggi lagi Pengadaan sarana musholla
94	1	1	1	3	1	1	1	3	YM Hakim Konstitusi - Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Fazlur Rahman El Islamy	1	1	2	1	1	1	3	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	21	1,00	Ditingkatkan
95	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	cukup baik
96	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
97	4	4	3	11	3	3	3	9	I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	3	7	3	3	4	10	3	3	6	3	4	7	3	3	6	4	4	8	4	4	8	72	3,43	
98	3	4	4	11	4	3	4	11	Dr. Agusniwan Etra, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Ada baiknya setiap Moderator mengingatkan selalu para Peserta untuk Presensi secara Online, karena terkadang kelupaan buat Presensi
99	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	2	5	62	2,95	Salam Gelora

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
100	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
	3,51	3,65	3,58	3,58	3,61	3,54	3,56	3,57			3,56	3,58	3,57	3,66	3,64	3,71	3,67	3,54	3,37	3,46	3,25	3,46	3,36	3,66	3,63	3,65	3,71	3,64	3,68	3,65	3,56	3,60	78,67	3,57	



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**TATA BERACARA DALAM PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR dan DPRD TAHUN 2024**

**Oleh:
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN 2023**

DASAR HUKUM

- ❑ **UNDANG-UNDANG DASAR 1945**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 tentang PERUBAHAN KETIGA atas UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 tentang MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 tentang PEMILIHAN UMUM** sebagaimana telah diubah dengan **PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 tentang PEMILIHAN UMUM**
- ❑ **PMK NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD

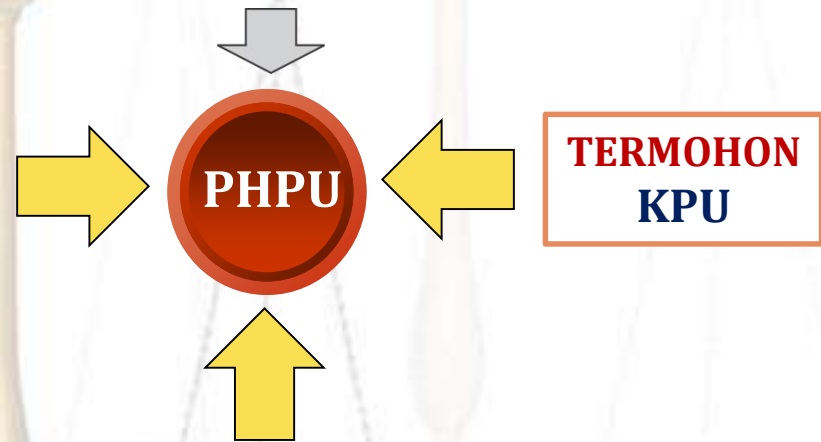


PARA PIHAK (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

PEMOHON

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK.
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya

PEMBERI KETERANGAN BAWASLU



PIHAK TERKAIT

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan;
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;

OBJEK PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

**Penetapan
perolehan suara
hasil Pemilu Anggota
DPR dan DPRD secara
nasional oleh KPU**

yang memengaruhi

**Perolehan kursi
Pemohon dan/atau
terpilihnya
anggota
DPR dan/atau DPRD
di suatu daerah
pemilihan**

PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Pengajuan Permohonan:
 - a. paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon
 - b. secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*).
2. Pengajuan Permohonan secara daring (*online*), berkas Permohonan asli diserahkan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan
3. Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. permohonan;
 - b. dalam hal permohonan diajukan oleh perseorangan, harus melampirkan surat persetujuan secara tertulis yang asli dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol atau Parpol Lokal yang bersangkutan;
 - c. fotokopi Surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon;
 - d. fotokopi KTP atau Identitas Pemohon; dan
 - e. Surat kuasa disertai fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.

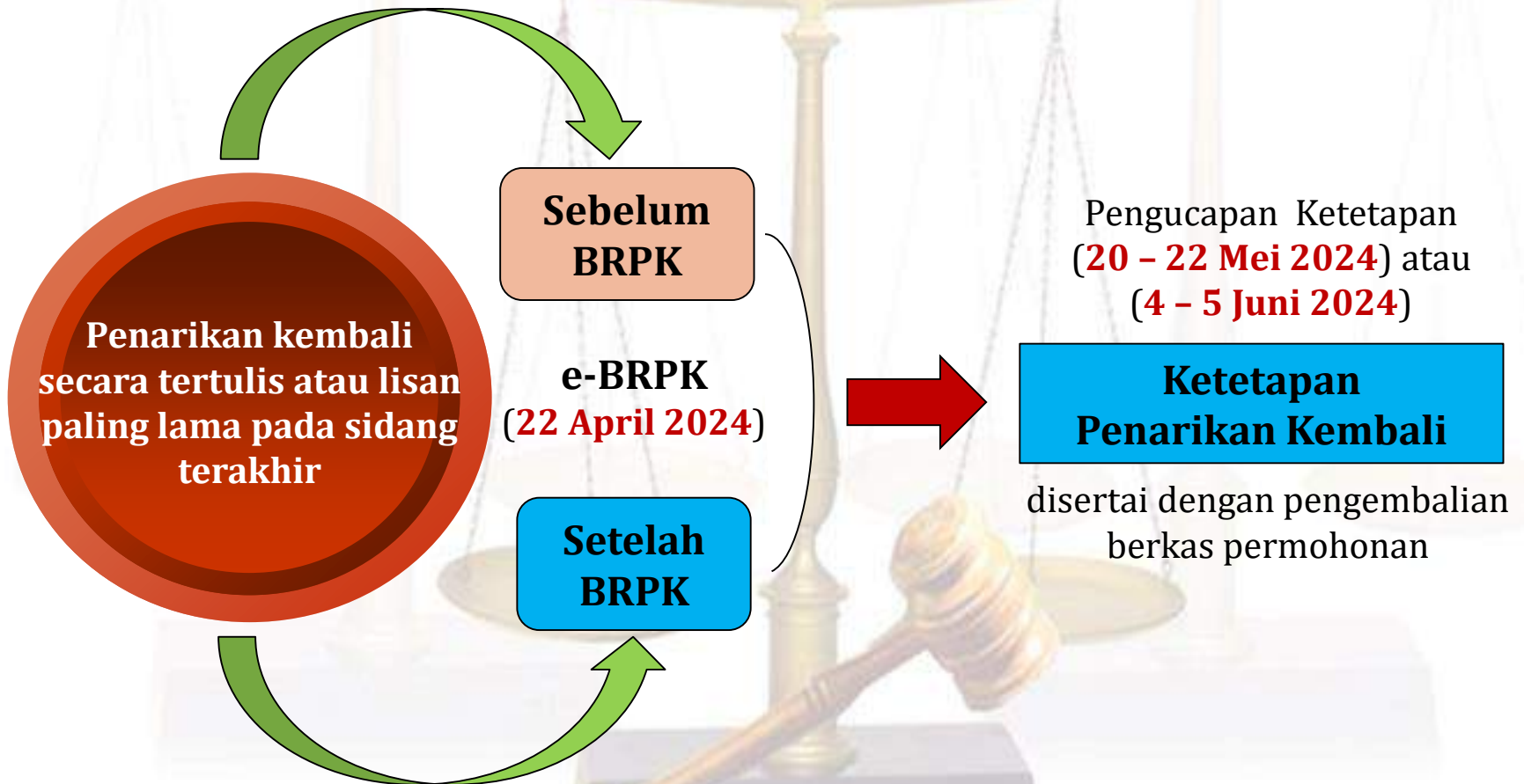
PERMOHONAN

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum sebanyak 4 (empat) rangkap
2. Permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum, ditandatangani oleh kuasa hukum
3. Permohonan memuat:
 - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
 - b. Uraian yang jelas mengenai:
 - b.1 kewenangan Mahkamah
 - b.2 kedudukan hukum Pemohon
 - b.3 tenggang waktu pengajuan permohonan
 - b.4 pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
 - b.5 *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon

Lanjutan ...

4. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
6. Alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
8. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan Permohonan Pemohon serta daftar alat bukti dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format word (.docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk*.
9. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan salinan dalam bentuk digital (*softcopy*) dengan format word (.docx) dan pdf.
10. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*), Mahkamah menggunakan Permohonan dalam dokumen fisik.

PENARIKAN KEMBALI PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD



JAWABAN TERMOHON

JAWABAN
TERMOHON

diajukan paling lama

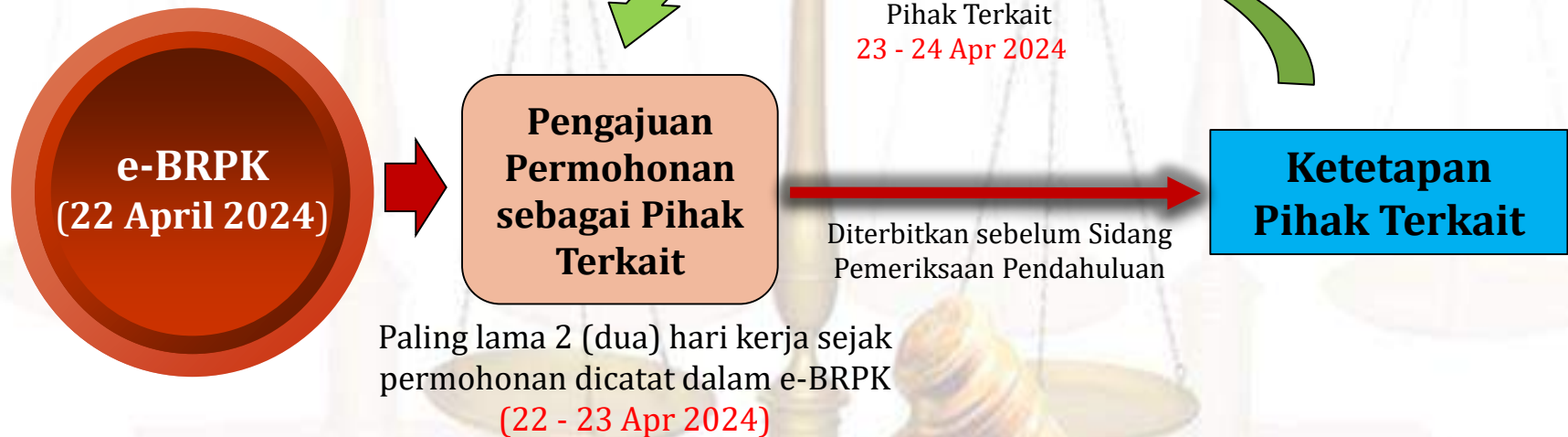
1 hari kerja
sebelum sidang
Pemeriksaan
Persidangan

1. Jawaban Termohon diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Termohon/kuasa hukum
2. Jawaban Termohon diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli,
3. Jawaban Termohon memuat:
 - a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap:
 1. kewenangan Mahkamah
 2. kedudukan hukum Pemohon
 3. tenggang waktu pengajuan permohonan
 4. Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon; dan
 5. *petitum* mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Jawaban Termohon dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan, sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Penyerahan Jawaban Termohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan Jawaban Termohon serta daftar alat bukti dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Termohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Penyerahan Jawaban Termohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan salinan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/.docx) dan pdf.
10. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*), Mahkamah menggunakan Jawaban Termohon dalam dokumen fisik.

PERMOHONAN PIHAK TERKAIT



KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Keterangan
Pihak Terkait

diajukan paling lama

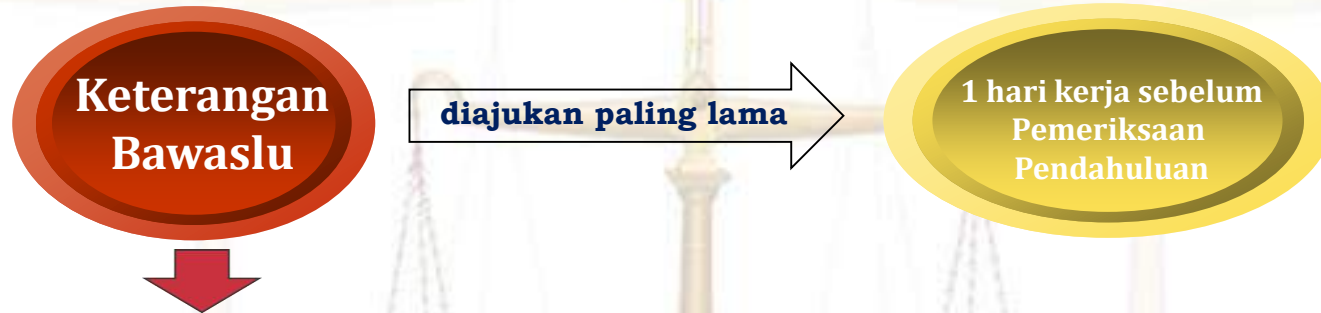
1 hari kerja sebelum
Pemeriksaan
Persidangan

1. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum
2. Keterangan Pihak Terkait diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli
3. Keterangan Pihak Terkait memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai Pihak Terkait merupakan Partai Politik Peserta Pemilu atau perseorangan Peserta Pemilu dari Partai Politik yang sama;
 - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
 - d. *Petitum*, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Penyerahan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Pihak Terkait untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Penyerahan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan Salinan dan daftar alat bukti diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/.docx) dan pdf.
10. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*), Mahkamah menggunakan Keterangan Pihak Terkait dalam dokumen fisik.

KETERANGAN BAWASLU



1. Keterangan Bawaslu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Bawaslu/kuasa hukum
2. Keterangan Bawaslu diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli
3. Keterangan Bawaslu memuat:
 - a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai pelaksanaan pengawasan, meliputi:
 1. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan;
 2. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon;
4. Keterangan Bawaslu dapat dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan dan daftar alat bukti sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Penyerahan Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Bawaslu untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Penyerahan Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/.docx) dan pdf.
10. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*), Mahkamah menggunakan Keterangan Bawaslu dalam dokumen fisik



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**TATA BERACARA DALAM PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR dan DPRD TAHUN 2024**

**Oleh:
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN 2023**

DASAR HUKUM

- ❑ **UNDANG-UNDANG DASAR 1945**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020** tentang **PERUBAHAN KETIGA** atas **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** tentang **MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM** sebagaimana telah diubah dengan **PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022** tentang **PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM**
- ❑ **PMK NOMOR 2 TAHUN 2023** TENTANG **TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

PERSIDANGAN



- Dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Jadwal hari sidang Mahkamah dapat diketahui dan diakses melalui Laman Mahkamah
- Mahkamah dapat menyelenggarakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference* atau fasilitas media elektronik pada Mahkamah
- Persidangan jarak jauh diselenggarakan atas inisiatif Mahkamah atau berdasarkan permintaan para pihak setelah memperoleh persetujuan dari Mahkamah

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Pemeriksaan Pendahuluan

Sidang yang dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Pemohon, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, mengesahkan alat bukti Pemohon.

- Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan **paling cepat 5 (lima) hari kerja** sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK
- Pemberitahuan sidang pertama disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu **paling lama 1 (satu) hari kerja** setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK atau **paling lama 3 (tiga) hari kerja** sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Calon Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan gugur**
- Permohonan yang dinyatakan gugur, Mahkamah menerbitkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

Pemeriksaan Pendahuluan

Sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa permohonan Pemohon, memeriksa Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu, mengesahkan alat bukti, memeriksa alat bukti tertulis, mendengar keterangan saksi/ahli, memeriksa alat bukti lain, memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan bukti petunjuk.

- Pemeriksaan Persidangan diselenggarakan setelah sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon/kuasa hukum, Pihak Terkait/kuasa hukum, dan Bawaslu, saksi/ahli, serta pemberi keterangan hadir dalam Pemeriksaan Persidangan.
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan tidak dapat diterima**.
- Permohonan yang dinyatakan **tidak dapat diterima**, Mahkamah menjatuhkan putusan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

JENIS ALAT BUKTI

1. surat atau tulisan;
2. keterangan para pihak;
3. keterangan saksi;
4. keterangan ahli;
5. keterangan pihak lain;
6. alat bukti lain; dan/atau
7. petunjuk.

ALAT BUKTI (PHPU ANGGOTA DPR dan DPRD) (Surat atau Tulisan)

1. Keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR dan DPRD
2. Keputusan Termohon tentang penetapan peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD peserta Pemilu beserta lampirannya
3. Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD beserta lampirannya
4. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya:
 - a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN)
 - a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
 - b. KPU/KIP kabupaten/kota
 - c. KPU/KIP provinsi; dan/atau
 - d. KPU
5. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
6. Dokumen tertulis lainnya.

Lanjutan ...

Alat bukti keterangan para pihak (jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu) yang disampaikan dalam persidangan

Alat bukti keterangan saksi:

- a. keterangan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon dan PT.
- b. keterangan saksi yang berasal dari Pemantau Pemilihan yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu; dan
- c. saksi lain.

Alat bukti keterangan ahli dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan PT.

- Ahli terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.
- Mahkamah dapat memanggil ahli untuk didengar keterangannya

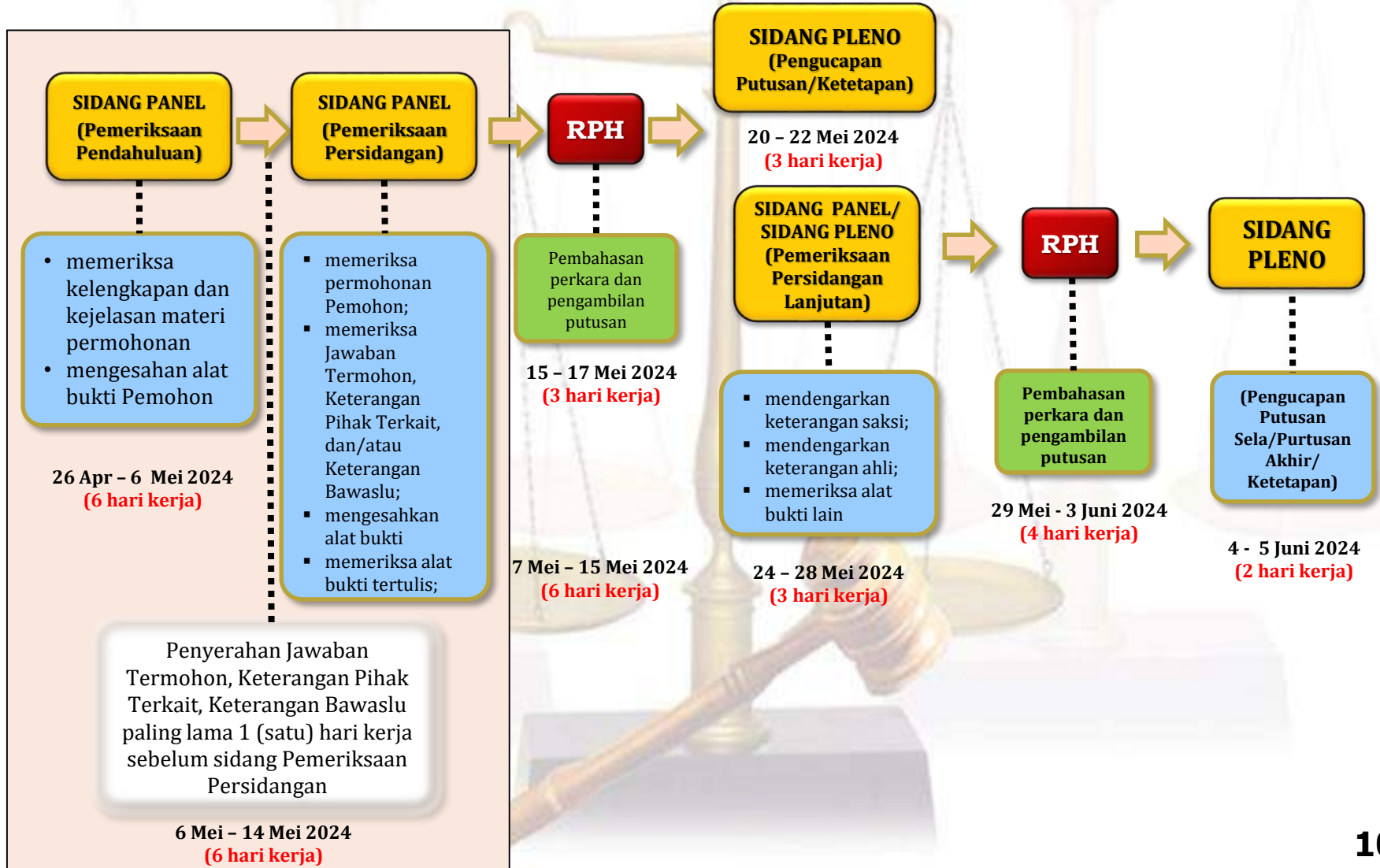
Lanjutan ...

Alat bukti keterangan pihak lain, merupakan keterangan yang disampaikan oleh pihak lain yang dipandang perlu oleh Mahkamah

Alat bukti lain, berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu

Alat bukti petunjuk, merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan Alat bukti lain

PERSIDANGAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR dan DPRD



PUTUSAN MAHKAMAH

Perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD diputus Mahkamah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK

Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan

Putusan Mahkamah, vonis majelis hakim untuk menyelesaikan suatu perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD yang diajukan oleh Pemohon dan telah dicatat dalam e-BRPK, diperiksa dan diputuskan dalam RPH, serta diucapkan dalam Sidang pleno terbuka untuk umum, termasuk ketetapan

Putusan Sela Mahkamah:

- berisi perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan
- Mahkamah dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan Putusan Sela sebagai dasar dan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan

Lanjutan ...

Amar Putusan:

- Permohonan tidak dapat diterima (apabila tidak memenuhi syarat)
- Menolak Permohonan Pemohon (apabila tidak beralasan menurut hukum)
- Mengabulkan Permohonan Pemohon (apabila beralasan menurut hukum)

Ketetapan Mahkamah:

- Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah
- Pemohon menarik kembali Permohonan
- Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan

Amar Ketetapan:

- Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon
- Permohonan Pemohon ditarik kembali
- Permohonan Pemohon gugur

PENGUCAPAN DAN PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN

- Pengucapan Putusan Mahkamah dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden atau Pemerintah, Bawaslu, dan Partai Politik Peserta Pemilu dalam jangka waktu **paling lama 2 (dua) hari kerja sejak** pengucapan putusan
- Penyampaian salinan Putusan Mahkamah dapat dilakukan secara elektronik
- Putusan Mahkamah dimuat dalam Laman Mahkamah



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



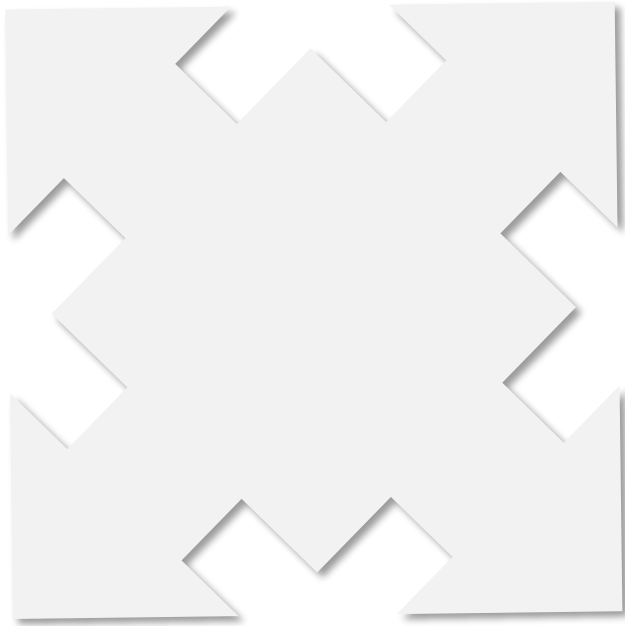
MAHKAMAH
KONSTITUSI



DINAMIKA PENANGANAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

Dr. Fajar Laksono Suroso

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI



1

MENGUJI UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD 1945

2

MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA

3

MEMUTUS PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

4

MEMUTUS PERSELISIHAN TENTANG HASIL PEMILU

5

MEMBERIKAN PUTUSAN ATAS PENDAPAT DPR MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN

MENGAPA MK?

PERADILAN DIPERCAYA BERPERAN SIGNIFIKAN MEMBENAHAI SISTEM POLITIK, KARENA KEMAMPUANNYA MELINDUNGI DEMOKRASI
(AUSTRALIA, JERMAN, UKRAINA, MEKSIKO, AS, DLL)

DALAM PEMILU TERKANDUNG HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA YANG DILINDUNGI KONSTITUSI: HAK MEMILIH DAN HAK DIPILIH ADALAH HAK KONSTITUSIONAL SENGKETA DISELESAIKAN BERDASAR HUKUM DAN PRINSIP KONSTITUSI

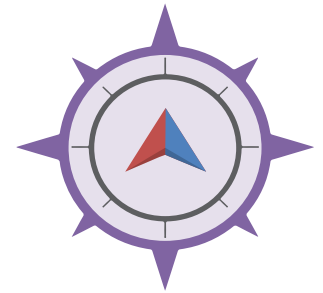
HISTORISITAS:

- BURUKNYA WAJAH PEMILU MASA LALU
- PERMASALAHAN PEMILU DITUTUPI, TIDAK MUNCUL KE PERMUKAAN
- PEMILU 1955, 1971, TIDAK ADA SENGKETA: TAKUT ATAU DITEKAN
- PEMILU 1977, 1982, 1987, 1992, 1997: TIDAK ADA PENYELESAIAN DEMOKRATIS
- PEMILU 1999: ADA SENGKETA YANG DIAJUKAN 27 DARI 48 PARPOL PESERTA PEMILU, DIANGGAP SAH OLEH PANWASLU, DIAJUKAN KE MA, TAPI DINYATAKAN MA PANWASLU BERWENANG MENENTUKAN SAH TIDAKNYA HASIL PEMILU

RAGAM MOTIF BERPERKARA DI MK

1. IDEALISME TINGGI
2. TIDAK SIAP DAN 'MENOLAK' KALAH
3. INGIN KALAH 'TERHORMAT', BERJUANG HINGGA TITIK PENGHABISAN
4. TAK SERIUS ATAU 'COBA-COBA'
5. 'GERTAKAN' UNTUK MENINGGIKAN NILAI TAWAR POLITIK DI MATA RIVAL
6. DORONGAN/TEKANAN PARA PENDUKUNG/TIM SUKSES

REKAPITULASI PUTUSAN MK



JENIS PUTUSAN	JUMLAH PUTUSAN	KABUL	TOLAK	TIDAK DITERIMA	DITARIK KEMBALI	GUGUR	TIDAK BERWENANG
PUU	1.613	297	610	500	167	25	14
SKLN	29	1	2	18	7	-	1
PHPU LEGISLATIF	671	53	423	148	13	34	-
PHPU PRESIDEN/ WAKIL PRESIDEN	5	-	5	-	-	-	-
PHP KADA	1.136	83	495	509	35	7	7

Keterangan: Belum ada perkara terkait dengan (1) pembubaran partai politik dan (2) *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden



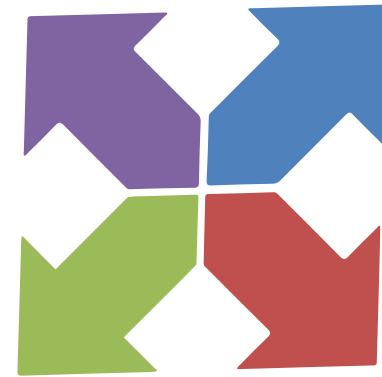
PUTUSAN PUU TERKAIT PEMILU

- KTP/PASPOR UNTUK MEMILIH BAGI YANG TIDAK TERDAFTAR DI DPT
- SISTEM PEMILU DARI NOMOR URUT MENJADI SUARA TERBANYAK
- AMBANG BATAS PARPOL DI PARLEMEN (*ELECTORAL & PARLIAMENTARY THRESHOLD*)
- AMBANG BATAS PENGAJUAN CAPRES (*PRESIDENTIAL THRESHOLD*)
- VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
- PILPRES DENGAN DUA PASANGAN CALON

- **LANJUTAN:**
 - SYARAT TIDAK PERNAH DIPIDANA UNTUK CALON LEGISLATIF
 - SOLUSI TERHADAP CALON TUNGGAL KEPALA DAERAH
 - HAK PILIH BAGI PENDERITA GANGGUAN JIWA
 - SYARAT MENJADI ANGGOTA KPU
 - PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK
 - SYARAT CALON ANGGOTA DPD
 - PENGADILAN KHUSUS PEMILU/PILKADA
 - JEDA 5 TAHUN UNTUK MANTAN TERPIDANA
 - DIFERENSIASI VERIFIKASI PARPOL
 - DLL



PARA PIHAK DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILU



PEMOHON:

PEMILU PRESIDEN:

PASANGAN CALON PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN

PEMILU LEGISLATIF

DPR/DPRD:

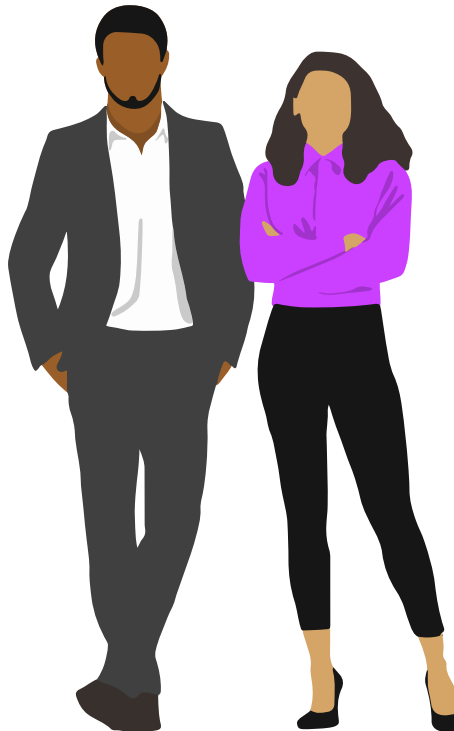
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU.
BAGAIMANA DENGAN CALEG?

DPD: PERSEORANGAN CALON
ANGGOTA DPD

PEMILU KEPALA DAERAH:

PASANGAN CALON KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH

PEMANTAU PEMILU TERAKREDITASI
(APABILA CALON TUNGGAL)



TERMOHON:

1. KPU PUSAT
2. KPU PROVINSI
3. KPU KABUPATEN/KOTA

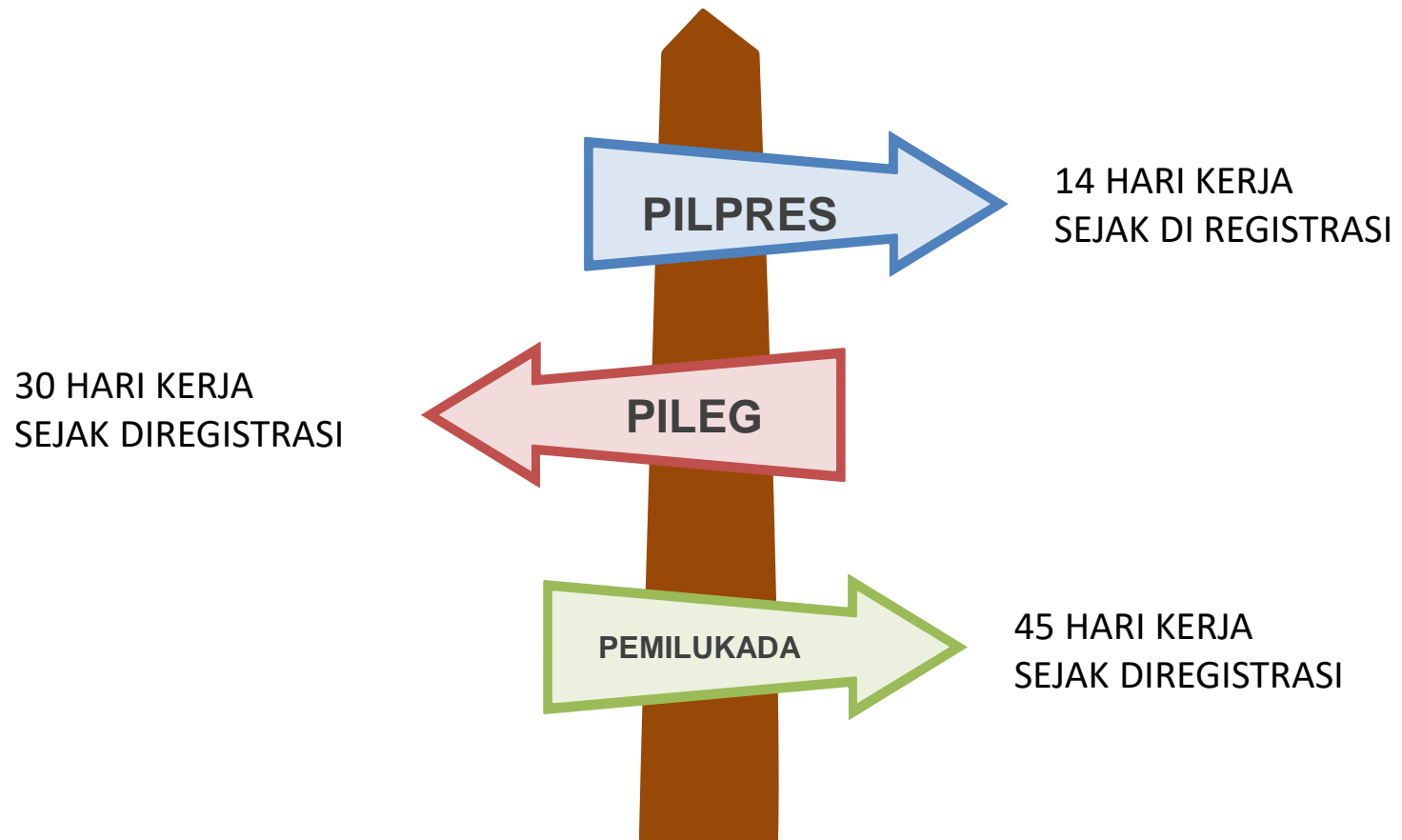
PIHAK TERKAIT

PASANGAN CALON LAIN (YANG
MENDAPATKAN SUARA TERBANYAK
BERDASARKAN REKAPITULASI KPU)

PEMBERI KETERANGAN

BAWASLU

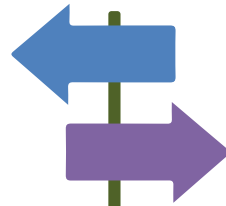
RENTANG WAKTU PENYELESAIAN PERKARA



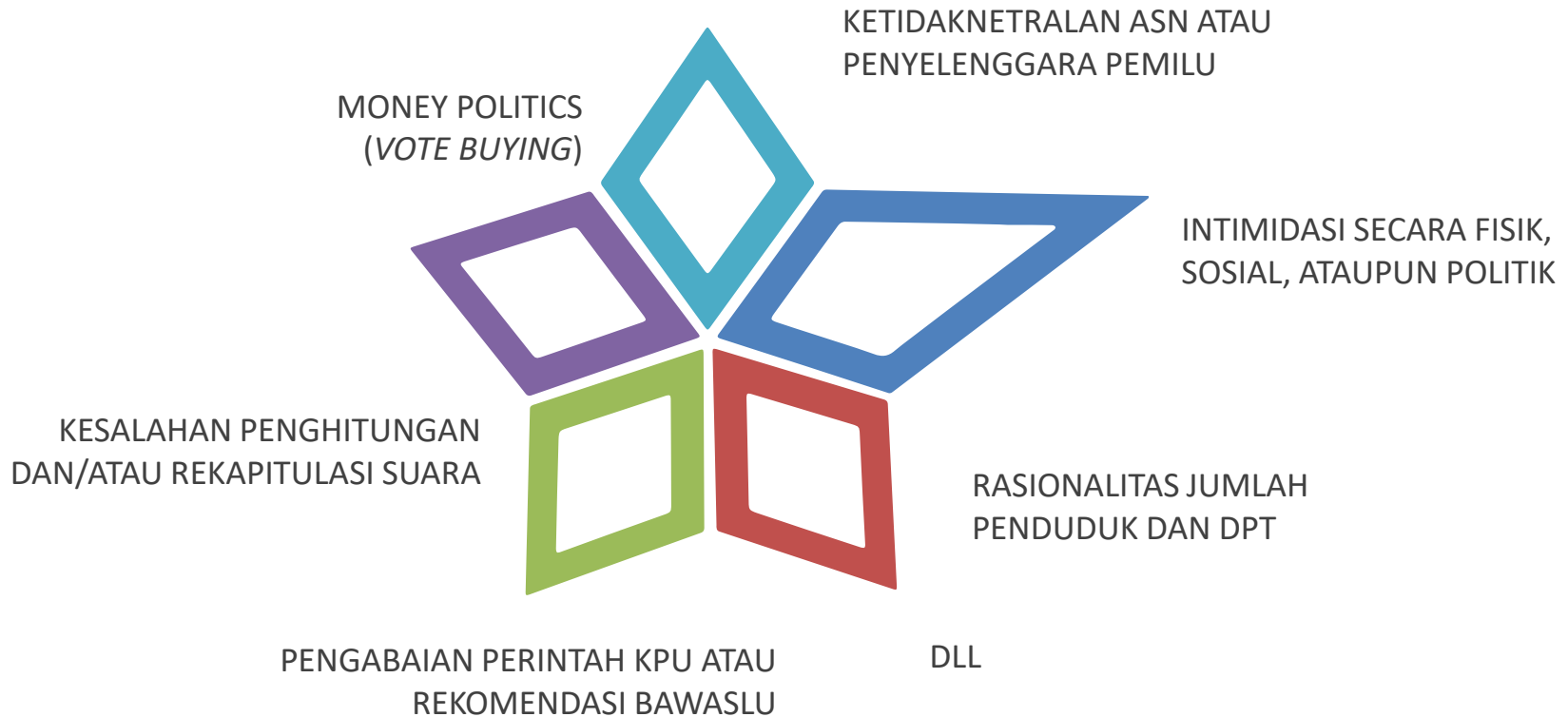
PERGESERAN PARADIGMA PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU

KEADILAN PROSEDURAL

KEADILAN SUBSTANTIF



CONTOH JENIS PELANGGARAN PEMILU



PELANGGARAN TSM DAN SIGNIFIKAN

TERSTRUKTUR

PELANGGARAN MELIBATKAN ATAU DILAKUKAN APARATUR NEGARA, PENYELENGGARA PEMILU, ATAU TIM PEMENANGAN SECARA BERJENJANG

SISTEMATIS

PELANGGARAN DILAKUKAN SECARA TERENCANA DAN TELAH DIPERSIAPKAN SEBELUMNYA

MASIF

PELANGGARAN DILAKUKAN SECARA MELUAS, TIDAK SPORADIS ATAU TUNGGAL

SIGNIFIKAN

PELANGGARAN ATAU KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA DAPAT MENGUBAH PEROLEHAN KURSI ATAU KEMENANGAN PASANGAN CALON



AMAR PUTUSAN: PSU

TIDAK DITERIMA | MENOLAK | MENGABULKAN

PENGHITUNGAN SUARA ULANG

APABILA TERJADI KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA ATAU PELANGGARAN DALAM PROSES REKAPITULASI SUARA, MK MEMERINTAHKAN AGAR DILAKUKAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG PADA TPS ATAU WILAYAH TERTENTU

PEMUNGUTAN SUARA ULANG

APABILA TERBUKTI TERJADI PELANGGARAN YANG MENGAKIBATKAN TIDAK DAPAT DIGUNAKANNYA HASIL REKAPITULASI YANG ADA, MAKA MAHKAMAH MEMERINTAHKAN AGAR DILAKUKANNYA PEMUNGUTAN SUARA ULANG

PUTUSAN SELA



PUTUSAN AKHIR

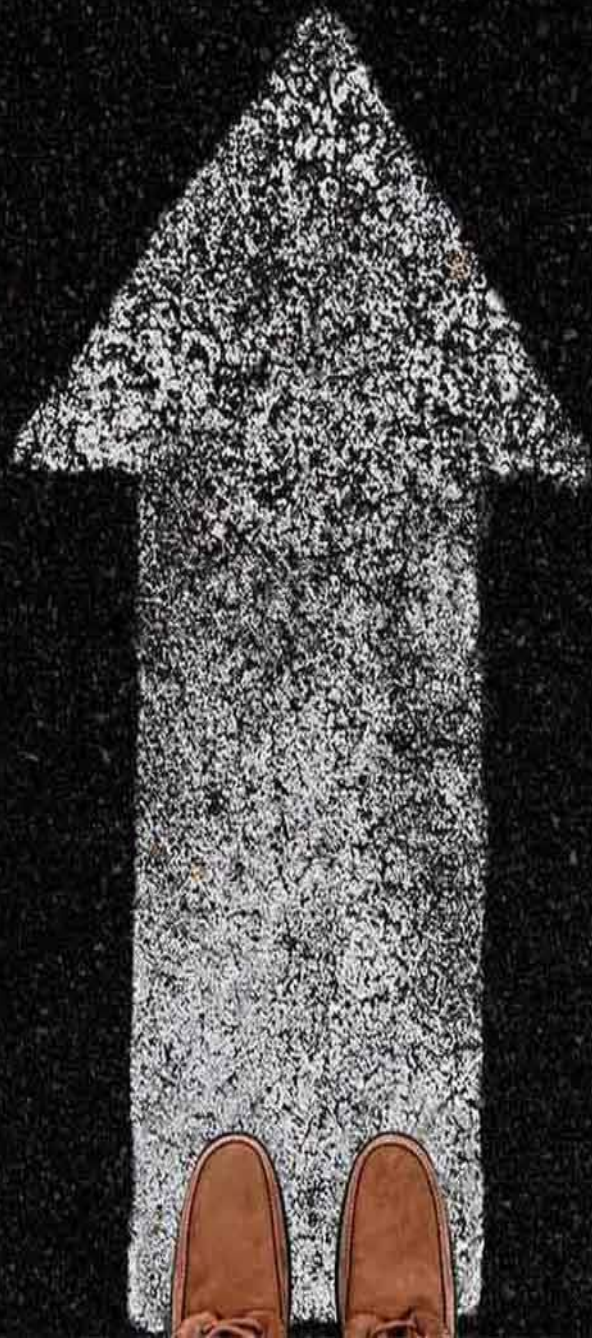
REKAPITULASI PUTUSAN PILEG DAN PILKADA

PHPU LEGISLATIF (DPR dan DPRD)

Tahun	Pemohon Parpol	Jumlah Perkara	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur/ T.B.
2004	23	44	15	13	16	0	0
2009	42	70	24	37	8	1	0
2014	14	296	1	291	2	2	0
2019	20	261	13	82	122	10	34

PHP KEPALA DAERAH

Tahun	Jumlah Pilkada	Jumlah Perkara	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur/ T.B.
2016	269	152	3	5	138	6	0
2017	101	60	3	7	50	0	0
2018	171	72	2	6	61	1	2
2020	270	136	19	10	99	6	2



TERIMA KASIH



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEMANFAATAN TIK DALAM PENANGANAN PERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

AKSES BERPERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI



1

Dasar Infrastruktur TIK,
Persidangan Jarak Jauh dan
Streaming Persidangan Mahkamah
Konstitusi

2

Sistem Informasi Penanganan
Perkara Elektronik
(simpler.mkri.id)

3

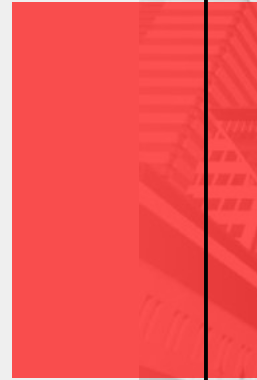
Website Mahkamah Konstitusi,
Case Tracking dan Case Retrieval

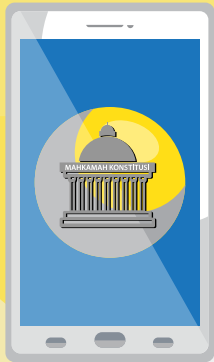
4

Click MK

PENDAHULUAN

“Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan Kemudahan Akses Para Pihak Dalam Berperkara di MK melalui administrasi lembaga peradilan yang **modern** dan **terpercaya**”.

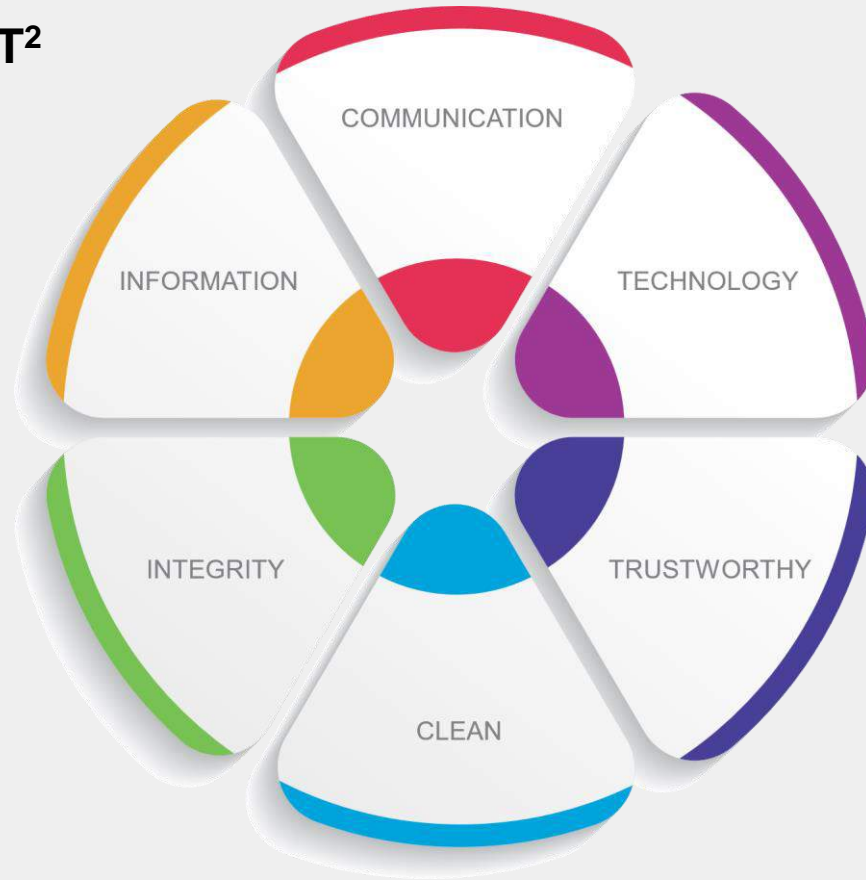




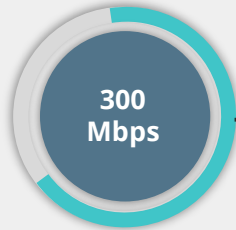
Peradilan modern adalah peradilan dengan sistem kerja berbasis **ICT (*information, communication, and technology*)**, memiliki *mindset* dan *cultureset* yang maju termasuk di dalamnya *committed* pada **ICT (*integrity, clean, and trustworthy*)**:

1. Peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT;
2. Peradilan dengan *mindset* maju; dan
3. Peradilan dengan *cultureset* yang memajukan.

PENGERTIAN ICT²



JARINGAN / KONEKSI INTERNET



300
Mbps

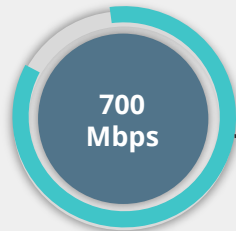
**Bandwith 300 Mbps
untuk jaringan Internasional**



Dukungan 24/7 dari CNI untuk keberlangsungan jaringan dan koneksi di MK



Support instalasi jaringan



700
Mbps

**Bandwith 700 Mbps
untuk jaringan lokal**



Menggunakan IP Transit agar koneksi Always ON. Memiliki fitur untuk memilih best path sehingga akses website menjadi lebih cepat.

SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI

1

PALOALTO (FIREWALL)

Sebagai pintu pertama pencegahan serangan ke dalam sistem jaringan

3

ANTI DDOS

Perangkat pencegah serangan DDOS yang menyebabkan *high traffic* pada Bandwidth

2

IRON PORT (EMAIL SECURITY)

Alat pengecekan dan *filtering email* MK Terhadap Malware, Virus, Spam dll

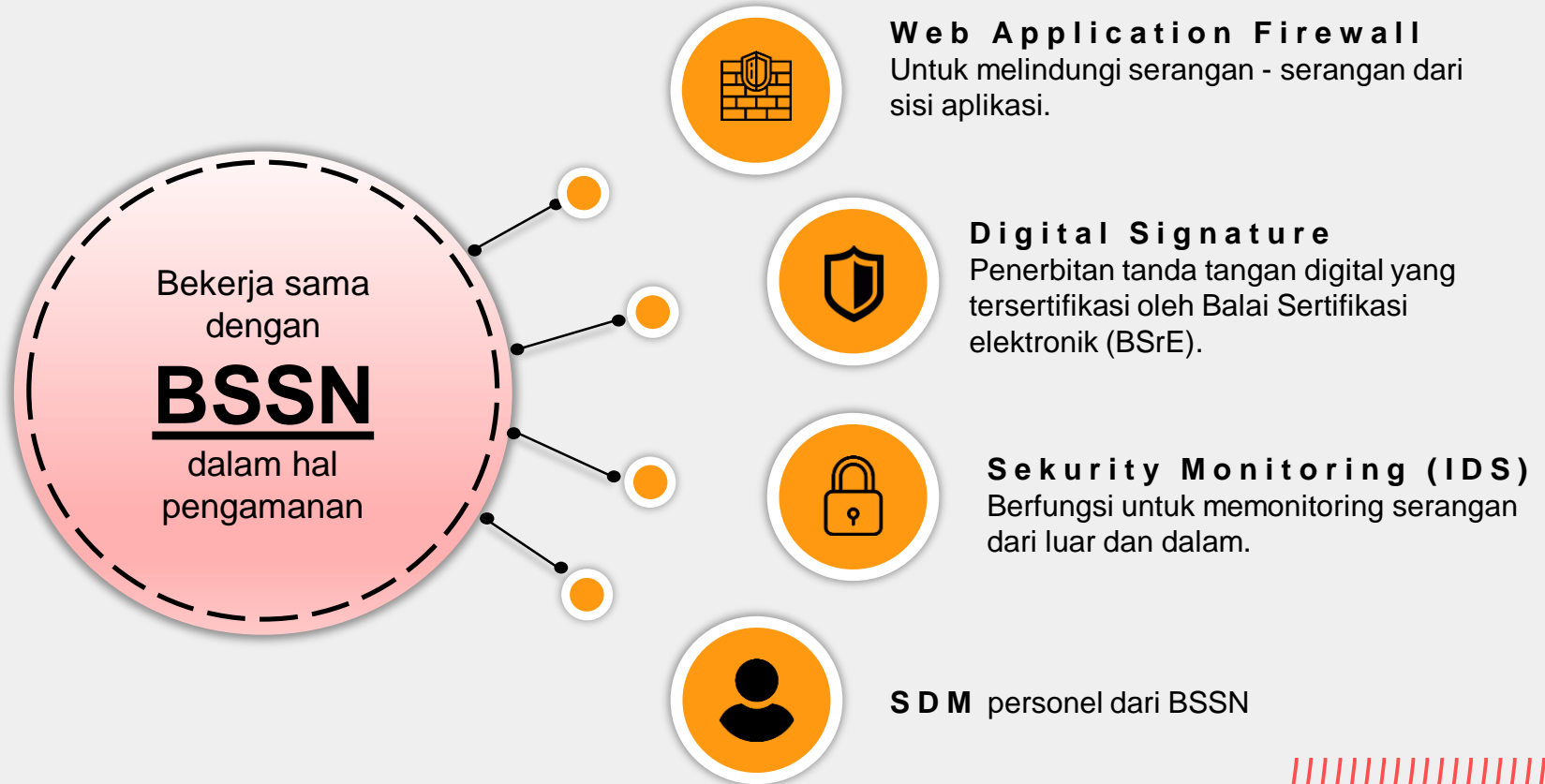
4

MIRRORING SERVER

Sistem back up server, untukantisipasi apabila Server utama *down* dapat segera digantikan Fungsinya oleh server backup



SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

MODEL PERSIDANGAN:

Persidangan MK dapat dilakukan secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*). Dalam hal persidangan secara daring tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peristiwa atau keadaan yang tidak memungkinkan, MK menetapkan persidangan diselenggarakan secara daring (*online*).

RUANG LINGKUP:

Persidangan Jarak Jauh adalah sidang yang dilakukan oleh MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi yang diajukan kepada MK dalam sidang panel atau sidang pleno dengan menggunakan aplikasi konferensi video (*video conference*) atau media elektronik lainnya yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat, mendengar, dan berkomunikasi dalam jaringan persidangan



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

TUJUAN:

- Kelancaran proses persidangan melalui sidang secara daring (*online*).
- Efisiensi biaya dan waktu bagi para pihak.
- Memenuhi ketentuan pelaksanaan persidangan secara daring (*online*), disebabkan persidangan secara luring (*offline*) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan.
- Memudahkan akses pencari keadilan pada pengadilan dan keadilan.

KEHADIRAN:

Persidangan jarak jauh dilaksanakan secara terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim secara luring (*offline*) dan para pihak secara daring (*online*) dan/atau secara luring (*offline*)



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

KEWAJIBAN PARA PIHAK:

- 1) Memastikan kelancaran koneksi jaringan internet dan intranet
- 2) Menyesuaikan pencahayaan ruangan dan/atau media elektronik yang digunakan
- 3) Memastikan berada di dalam ruangan, dan perangkat elektronik berada dalam mode sunyi atau tanpa gangguan suara, kecuali perangkat elektronik yang digunakan untuk kepentingan Persidangan Jarak Jauh
- 4) Menggunakan latar belakang yang sepiantasnya.

SAKSI DAN AHLI:

Saksi dan/atau ahli yang akan didengar keterangannya di Persidangan Jarak Jauh diambil sumpah atau janji yang dipandu oleh Hakim dari Ruang Sidang Mahkamah.



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

ALAT BUKTI:

Dalam hal terdapat keterangan tambahan dan/atau dokumen atau data lainnya yang disampaikan pada saat pelaksanaan Persidangan Jarak Jauh, keterangan dimaksud harus diperlihatkan atau ditayangkan yang selanjutnya dikirimkan secara daring (*online*) atau media media elektronik lainnya ke MK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah sidang.

PERKEMBANGAN ICT:

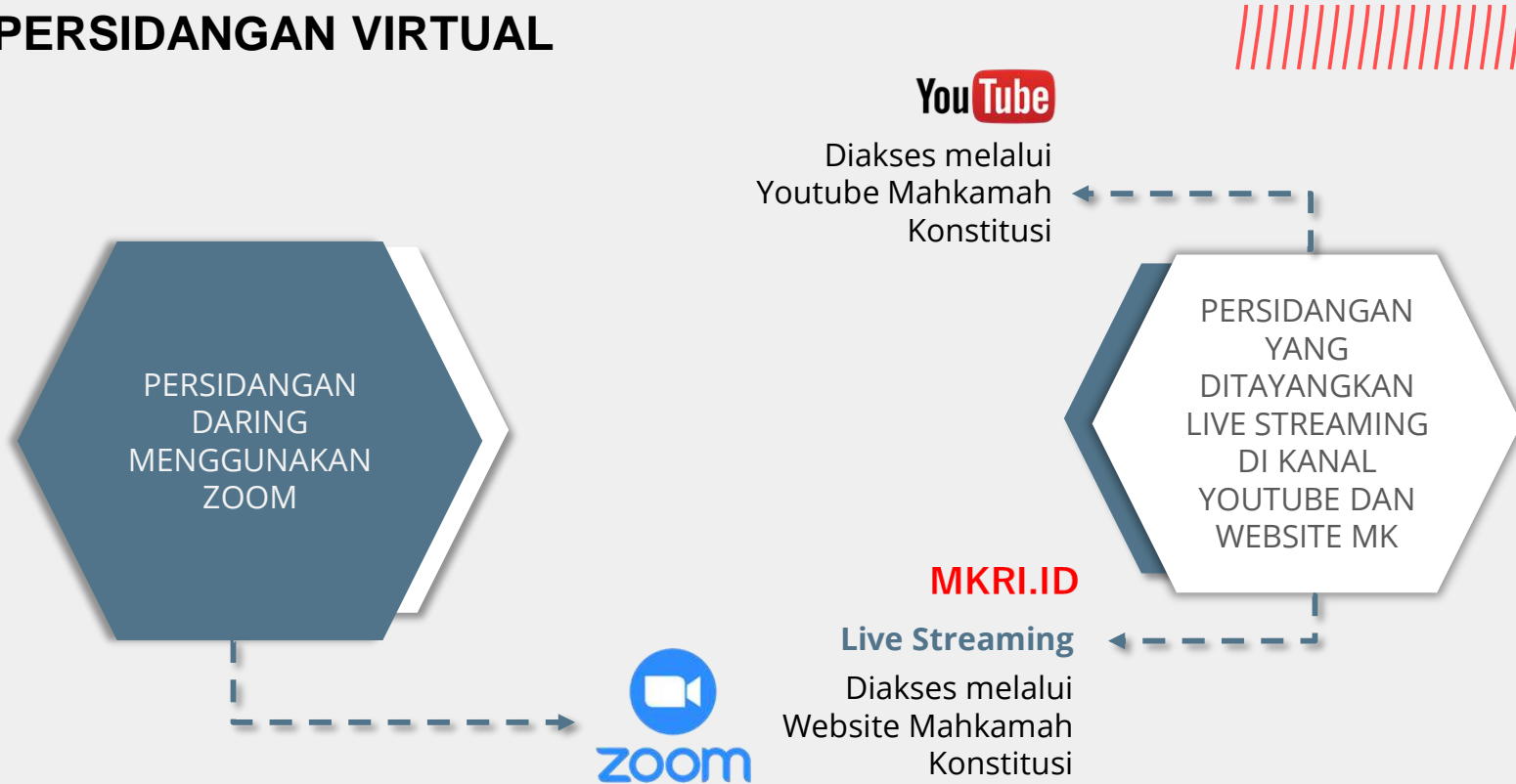
Penerapan penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh disesuaikan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi.

LAIN-LAIN:

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.



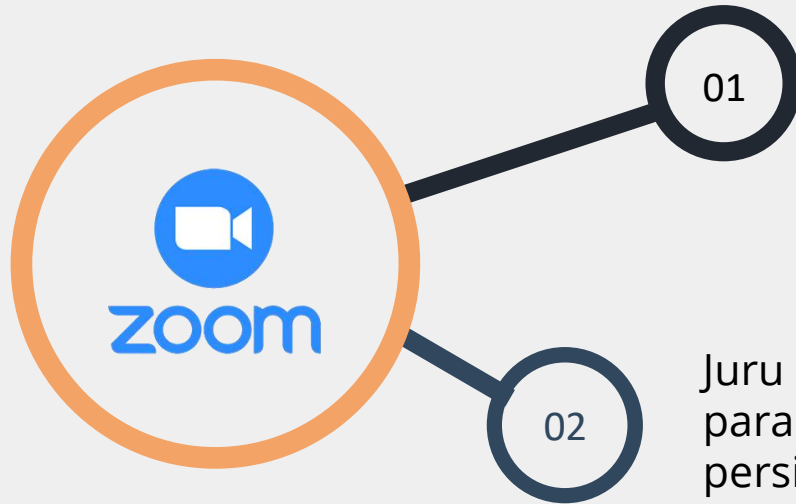
PERSIDANGAN VIRTUAL



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING



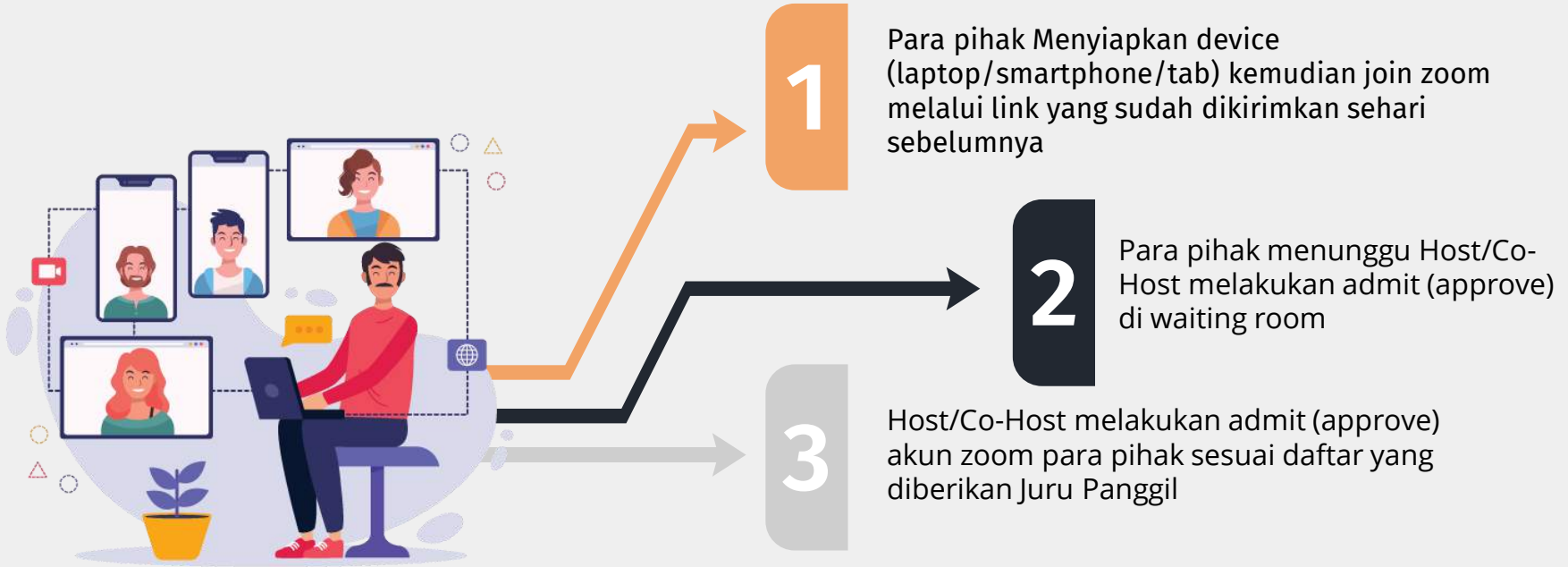
TAHAP PERSIAPAN



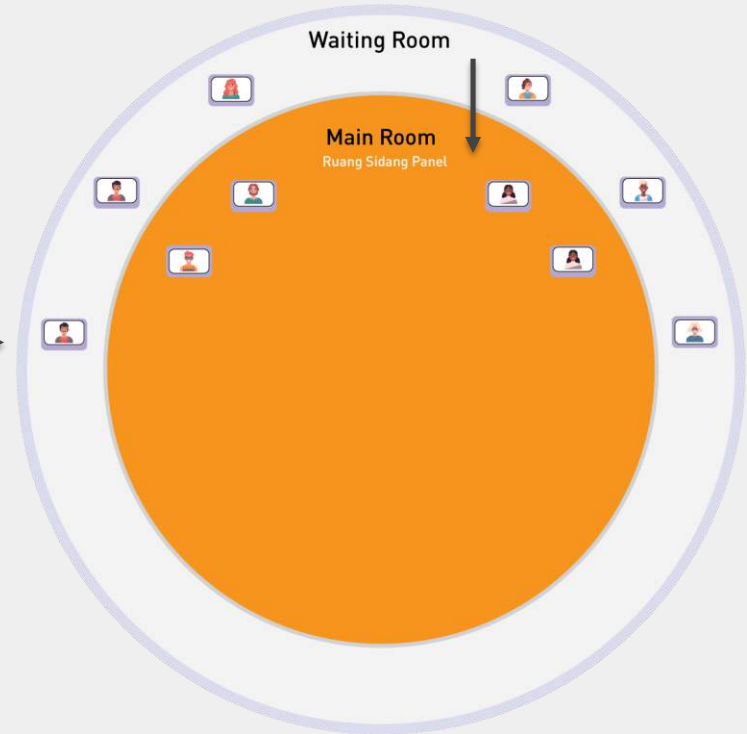
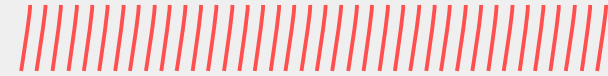
01 IT membuat link zoom sesuai jadwal persidangan dari Kepaniteraan

02 Juru Panggil mengirimkan link zoom kepada para pihak minimal satu hari sebelum persidangan

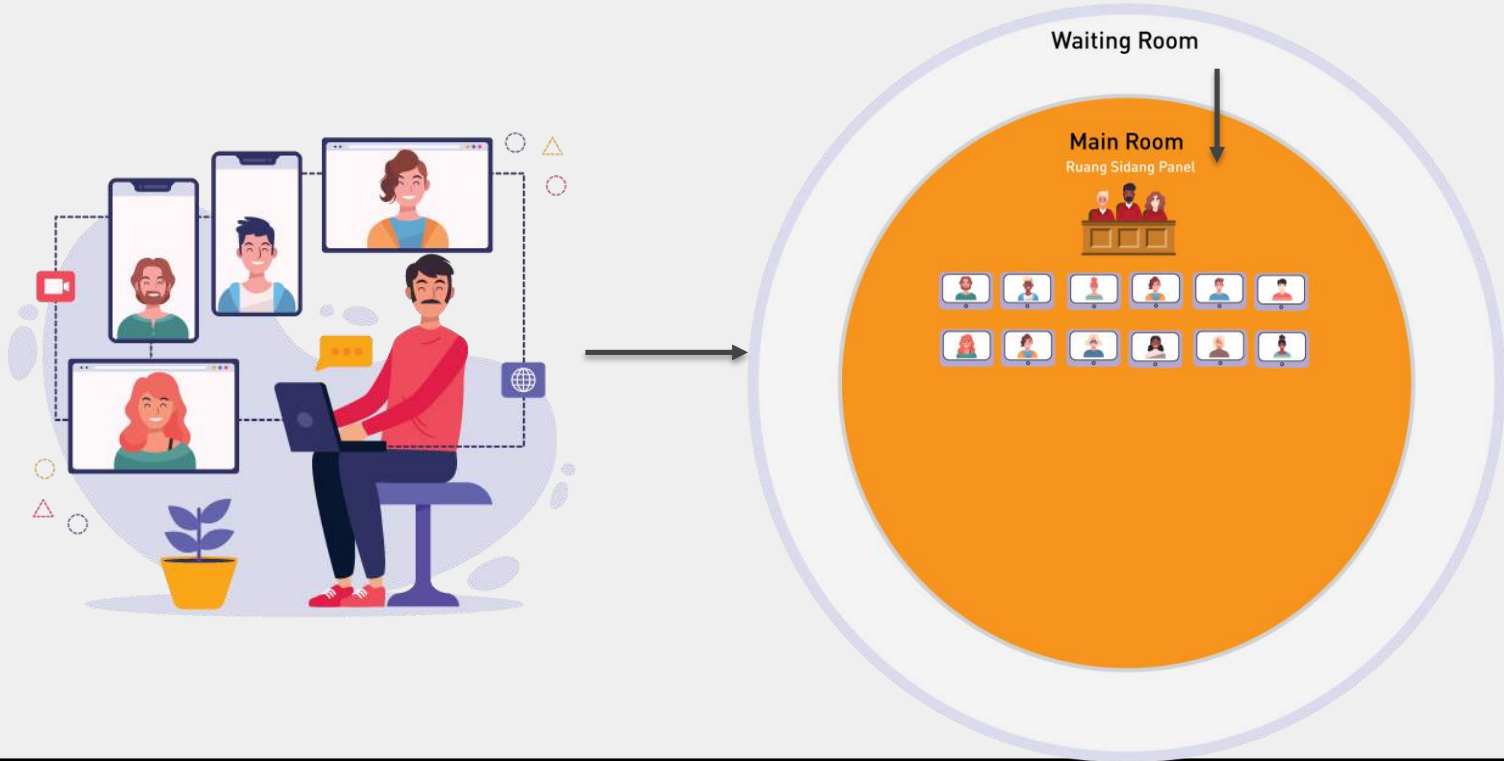
ALUR PERSIDANGAN DARING



- Setelah di admit (approve) para pihak berada pada **Main Room (Ruang Sidang)**
- Kemudian akan dilakukan test **Audio** dan **Video** kepada seluruh para pihak, serta diperiksa kelengkapan para pihak baik itu **Format Nama, Pakaian, dll.**



Selanjutnya di dalam **Main Room (Ruang Sidang) Majelis Hakim** melakukan proses persidangan



SMARTBOARD DI 53 LOKASI MINI COUTROOM



VIEWSONIC - IFP6550-3



VPC15-WP-3
Windows Slot-in PC for
ViewBoard®

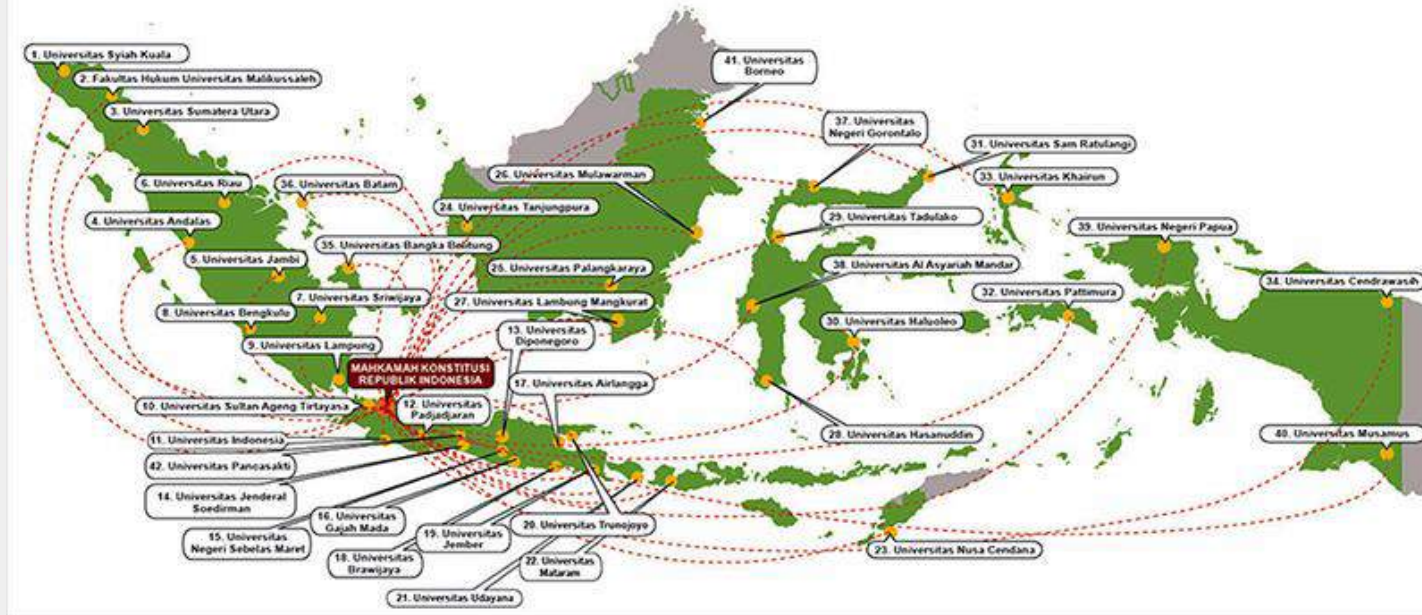


VB-STND-001
Rolling Trolley Cart Stand for
ViewSonic ViewBoard®



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI

LOKASI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI DI PERGURUAN TINGGI SELURUH INDONESIA



NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur
2	Fakultas Hukum Universitas Andalas	Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat
3	Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	Kampus Terpadu, Balunjuk, Merawang-Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	Fakultas Hukum Universitas Batam	Jl. Abulyatama no 5 Batam Center
5	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A
6	Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan	Jl. Amal Lama Nomor 1, Kelurahan Pantai Amal, Kota Tarakan Kalimantan Utara 77123
7	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Jl. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 65145 Jawa Timur
8	Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih	JL. Pendidikan II - Gedung Fakultas Hukum, Kampus Uncen Abepura
9	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214 Jawa Tengah
10	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur 55281 Yogyakarta
11	Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo	Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari, Sulawesi Tenggara 93232
12	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea
13	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat
14	Fakultas Hukum Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat-Jambi, 36361
15	Fakultas Hukum Universitas Jember	Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 Jawa Timur
16	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman	Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122
17	Fakultas Hukum Universitas Khairun	Jl. Jusuf Abdurahman Kampus II Gambesi Kota Ternate Selatan. Kotak Pos 53 Ternate 97719
18	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat	Jl. Brigjend H. Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123 Kalimantan Selatan
19	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145
20	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh	Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa - Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141 - Provinsi Aceh
21	Fakultas Hukum Universitas Mataram	Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat
22	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119
23	Fakultas Hukum Universitas Musamus	Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke Papua 99611
24	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo
25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur



25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur
26	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
27	Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya	Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah
28	Fakultas Hukum Universitas Pancasakti	Jl. Halmahera KM.1 - Kota Tegal
29	Fakultas Hukum Universitas Pattimura	Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon
30	Fakultas Hukum Universitas Riau	Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau
31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi	Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115
32	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret	Jl. Ir. Sutami N0.36 A, Ketingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126
33	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	FH UNSRI Palembang, Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang
34	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Jl. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163)
35	Fakultas Hukum Universitas Samatera Utara	Medan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155
36	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	Jl.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam
37	Fakultas Hukum Universitas Tadulako	Kampus Bumi Tadulako, Jl. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
38	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura	Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi (Jenderal Achmad Yani) 78124, Kalimantan Barat (Pontianak)
39	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo	Jl. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura
40	Fakultas Hukum Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali
41	Universitas Al Asyariah Mandar	Jl. Budi Utomo No.2 Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 91315
42	Universitas Papua	Jl. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314
43	Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung	Jl. Zainal Abidin. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142
44	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo	Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60118
45	Fakultas Hukum Universitas Gorontalo	Jl. Abdul Wahab (Eks. Jln. Jend. Sudirman) No.247, Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211
46	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584
47	Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana	Jl. Diponegoro No.52-60, Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711
48	Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia	Jl. Urip Sumoharjo No.5, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
49	Univ. Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng	Jalan Ahmad Yani 10 Manggarai NTT Tenda, Watu, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Tim. 86511
50	Univ. Islam Negeri Maulana Malik	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144
51	Nagari Pasie Laweh	Jl.Raya Bukittinggi-Medan KM 26 Palimbangan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos : 26151
52	Desa Balla' Barakkaka ri Galesong	Baruga Appaka Sulapa' di Komplek Kampung Adat & Budaya Balla'Barakkaka Ri Galesong (BBrG) Desa Galesong Kabupaten Takalar
53	Desa Bangbang	Banjar Bangbang, Desa Bangbang, KecamatanTembuku, Kabupaten Bangli, Bali



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM YANG AKAN BEKERJASAMA DI 10 LOKASI TAHUN 2023

NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Universitas Muhammadiyah Bima	Jl. Anggrek, Nae, Kec. Rasanae Bar., Kab. Bima, Nusa Tenggara Bar. 84111
2	Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Jl. Kaligawe Raya No.Km.4, Terboyo Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah 50112
3	Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta	Jl. Timoho No.317, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225
4	Universitas Islam Kediri	Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128
5	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Jl. Kapten Mughtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238
6	Universitas Balikpapan	Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114
7	Universitas Teuku Umar Meulaboh	Jl. Alue Peunyareng, Gunong Kleng, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681
8	Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar	Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
9	Kampung Wasur Kabupaten Merauke , Papua Selatan	Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, Indonesia
10	Desa Mekar Sari, Kubu Raya, Kalimantan Barat	Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Indonesia



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING



Persidangan Daring Pengujian UU Cipta Kerja



PEMANFAATAN LAIN DARI FASILITAS *VIDEO CONFERENCE* PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI



Kuliah Umum / General Lecture dan
Symposium Nasional / International



PERSIDANGAN LIVE YOUTUBE CHANNEL MAHKAMAH KONSTITUSI RI

youtube.com/user/mahkamahkonstitusi

76TH INDONESIA TANGGUH INDONESIA TUMBUH

BERSAMA #MengawalKonstitusi NEGERI

Mahkamah Konstitusi RI 94.5K subscribers

CUSTOMIZE CHANNEL MANAGE VIDEOS

HOME VIDEOS PLAYLISTS COMMUNITY CHANNELS ABOUT

Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi RI

43,920 views · 7 years ago

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk pada 13 Agustus 2014 sebagai amanat dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Uploads PLAY ALL

rum : Dr. Suharto, Sidang Pengucapan Putusan Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor

1:25:45 3:08:10 14:15 19:16 19:15 1:41:05

https://studio.youtube.com/channel/UCX-BUwN07LAvqk15LFgxw/editing/images



PERMOHONAN ELEKTRONIK

“Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik (**Permohonan Elektronik / *Electronic Filing***), dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi”.

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2)

“Permohonan elektronik (***electronic filing***), selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah”

PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3)

“Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.”



PERMOHONAN ELEKTRONIK

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang
"TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG"

Pasal 9 Ayat (1):

Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah:

- a. Secara Luring (offline) atau;
- b. Secara Daring (Online) atau melalui media elektronik lainnya.

Pasal 11 Ayat (1):

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanpa kuasa hukum dapat diajukan secara luring (offline) atau daring (online)

Pasal 12 Ayat (1):

Dalam hal pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan wajib diajukan secara daring (online).



SIMPEL.MKRI.ID (SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ELEKTRONIK)



SIMPEL merupakan media elektronik berupa sebuah Sistem Informasi Manajemen untuk penerimaan permohonan secara elektronik.

SIMPEL memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (permohonan online).

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)

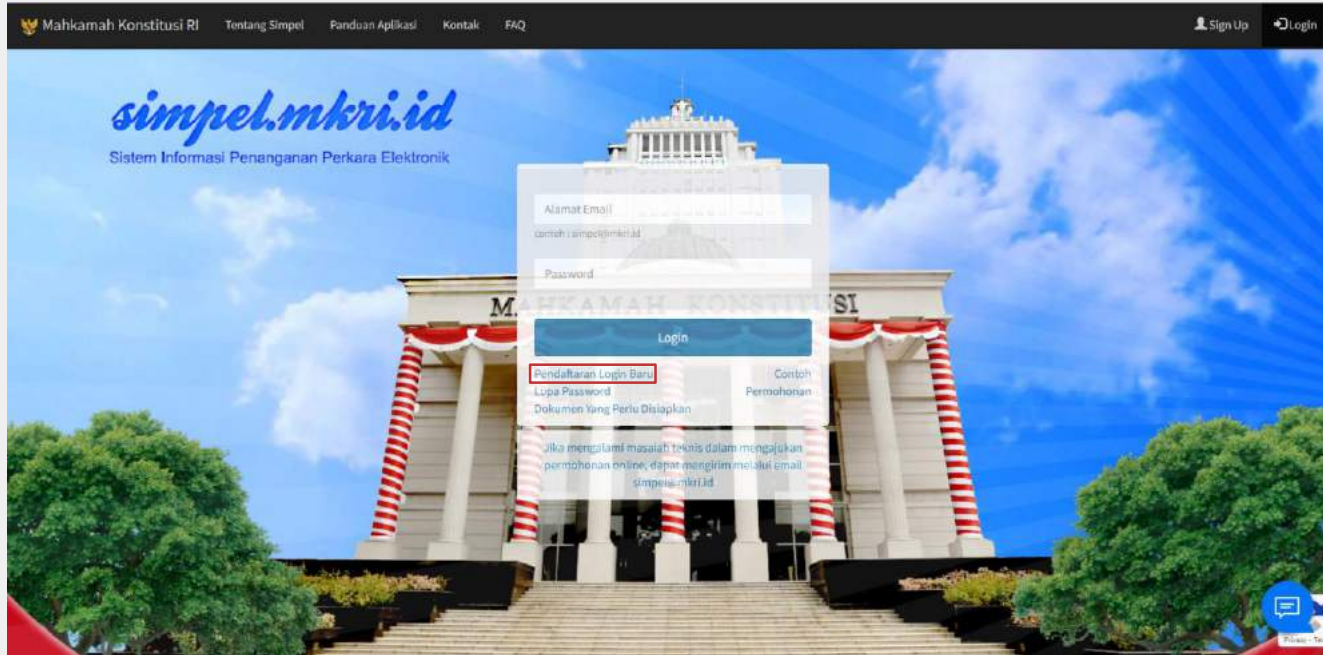
"Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik, selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik"

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



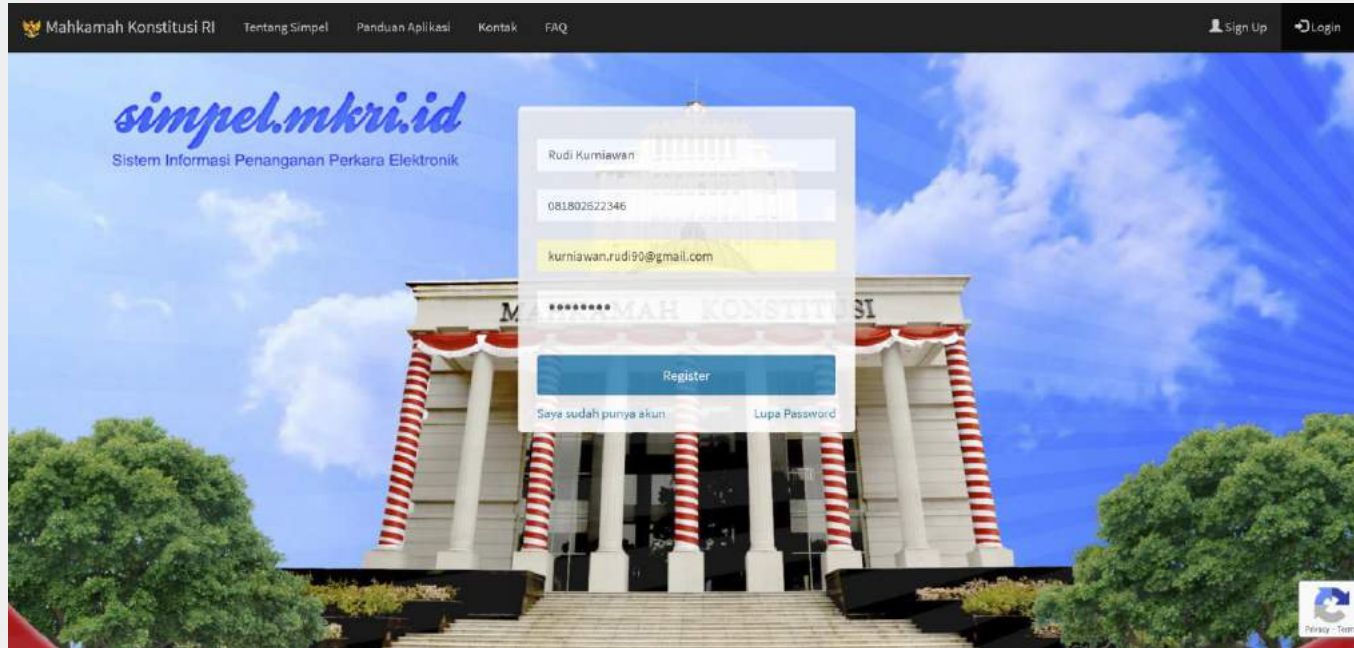
Permohonan Online (simpler.mkri.id) Mahkamah Konstitusi adalah aplikasi berbasis web untuk menerima permohonan elektronik secara online dan real-time (seketika), sehingga saat permohonan elektronik sudah diajukan melalui laman simpler.mkri.id, maka pada saat itu juga permohonan elektronik telah masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



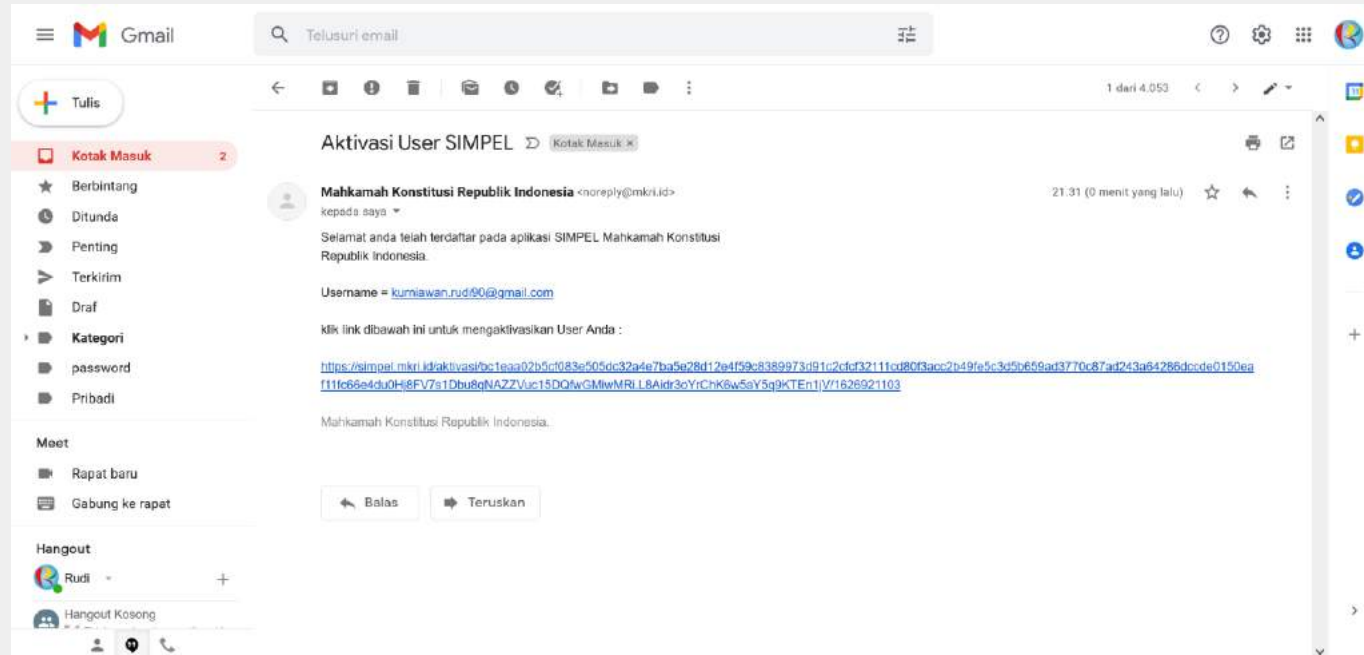
Untuk mengajukan permohonan melalui aplikasi SIMPEL, terlebih dahulu membuat akun dengan meng-klik “Pendaftaran Login Baru”

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



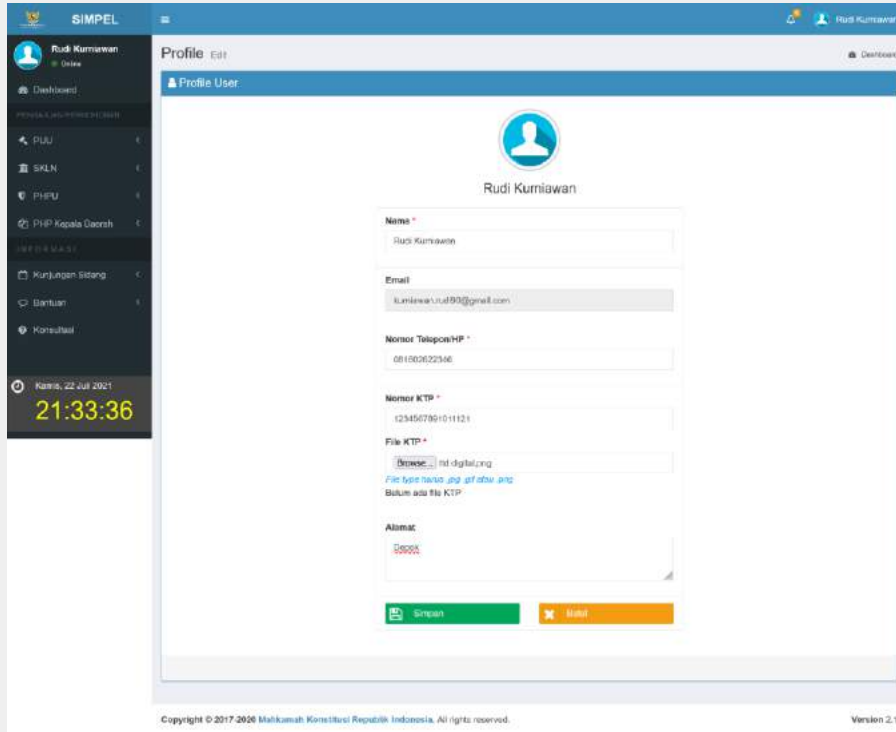
Isi data sesuai form pendaftaran akun kemudian klik tombol "Register"
Kemudian cek email untuk mengaktifkan akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Klik link yang diberikan oleh system untuk aktifasi akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Setelah login untuk pertama kali user akan diarahkan ke halaman profil untuk melengkapi data akun.

Setelah data akun sudah lengkap maka langkah selanjutnya untuk pengajuan permohonan baru dapat diakses

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot displays the SIMPEL.MKRI.ID dashboard for user Rudi Kurniawan. The dashboard is organized into several sections:

- Permohonan (Applications):** A grid of four application categories, each with a count and a 'Selengkapnya' (More) button:
 - 1 Pengajuan Undang-Undang (PUU)
 - 0 Bimbingan Konsultasi Lembaga Negara (SKLN)
 - 0 Peradilan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden/Wakil Presiden
 - 0 Peradilan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif (DPR, DPRD, DPD)
- Peradilan Hasil Pemilihan Kepala Daerah:** A section for 'PHPU Gubernur, Bupati, dan Walikota' with a count of 0 and a 'Selengkapnya' button.
- Kalender Sidang (Meeting Calendar):** A calendar for July 2021 showing meeting dates. The calendar includes a legend for 'Sidang' (Meeting), 'Publik' (Public), 'Khususnya' (Particularly), and 'Ubur' (Ubur).

At the bottom of the dashboard, there is a copyright notice: "Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved." and the version number "Versi 2.1".

Setelah data akun atau profil selesai maka akan diarahkan ke halaman dashboard.

Kemudian klik menu PUU atau SKLN atau PHPU atau PHP Kepala Daerah untuk pengajuan permohonan sesuai jenis permohonan yang hendak diajukan.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL (Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik) web application. The user is logged in as Rudi Kurniawan. The main page is titled "Permohonan Online - PUU (Pengujian Undang-Undang)". It features a navigation menu on the left with options like Dashboard, Info Permohonan, Permohonan PUU, SKLN, P-IPU, P-IP Kepala Daerah, and Informasi. The main content area is divided into three tabs: "Proses Pengisian Pokok Permohonan" (selected), "Proses Pengisian Data Permohonan dan Kuasa", and "Proses Upload Dokumen". Under the selected tab, there is a form titled "Permohonan" with a text area for "Uraian Pokok Permohonan" containing the example text: "Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945". Below the text area is a list of required documents: "KTP Pemohon (dalam format .jpg)", "Email Pemohon", "KTP Kuasa (dalam format .jpg) **", "Email Kuasa **", "Surat Kuasa (dalam format .pdf) **", "File KTABAS (bagi advokat) **", "Permohonan (dalam format .pdf)", "Permohonan (dalam format .doc/.docx)", "Daftar alat bukti (dalam format .doc)", and "Alat/dokumen bukti". A "Keterangan:" section notes that "** Jika menggunakan kuasa pemohon". At the bottom of the form are "Batal" and "Simpan" buttons. The footer contains the copyright notice "Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved." and "Version 2.1".

Step 1 : Mengisi Pokok Permohonan

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)

Dashboard > Permohonan Online > Permohonan PUU

SIMPTEL

Rudi Kurniawan
Online

Dashboard

PENGAJUAN PERMORONAN

- PUU
- Info Permohonan
- Permohonan PUU
- SKLN
- PHPU
- PHP Kepala Daerah

INFORMASI

- Kunjungan Sidang
- Bantuan
- Konsultasi

Kamis, 22 Juli 2021

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved.

Version 2.1

Proses Pengisian Pokok Permohonan | Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa | Proses Upload Dokumen

Permohonan PUU(Pengujian Undang-Undang)

Edit Pokok permohonan :
Contoh Pengujian Materilil Undang-undang No ... Tentang

Data Pemohon [+ Tambah Pemohon](#)

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	#
1	Rudi Kurniawan	Depok	1234567891011121	kurniawan.rudi90@gmail.com		081802622346	

Data Kuasa [+ Tambah Kuasa](#)

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	Nama Organisasi	Nomor KTA	#
1	Kuasa Hukum 1	Jakarta	1231231231231231	pengacara@mkri.id	1	081818181818	-	-	

Batal (Hapus Permohonan) Simpan Sementara Lanjutkan Upload Dokumen

Step 2 : Melengkapi identitas Pemohon dan Kuasa Hukum

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL web application interface. The user is logged in as Rudi Kurniawan. The main content area is titled "Permohonan Online" and "PUU(Pengujian Undang-Undang)". It features a progress bar with three stages: "Proses Pengisian Pokok Permohonan", "Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa", and "Proses Upload Dokumen". Below this is a section titled "Berkas Permohonan" containing a table with 5 rows of document requirements. Each row includes a number, a description of the document, a status indicating it has not been uploaded, and a "Browse..." button. At the bottom of the table is a "Tambah Berkas" button. Below the table are four action buttons: "Kembali (Edit Permohonan)", "Batal (Hapus Permohonan)", "Simpan Sementara", and "Kirim Permohonan". The footer contains copyright information for the Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia and the version number "Version 2.1".

NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA	AKSI
1	Permohonan (pdf)	File Permohonan (pdf) Belum di Upload Browse... No file selected.	
2	Permohonan (doc/docx)	File Permohonan (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
3	Surat Kuasa	File Surat Kuasa Belum di Upload Browse... No file selected.	
4	Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx)	File Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
5	Alat Bukti	File Alat Bukti Belum di Upload Browse... No file selected.	

Step 3 : Melengkapi Dokumen Terkait

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110-Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

TANDA TERIMA PENGAJUAN PERMOHONAN *ONLINE*

Nomor Online : /PAN.ONLINE/2020

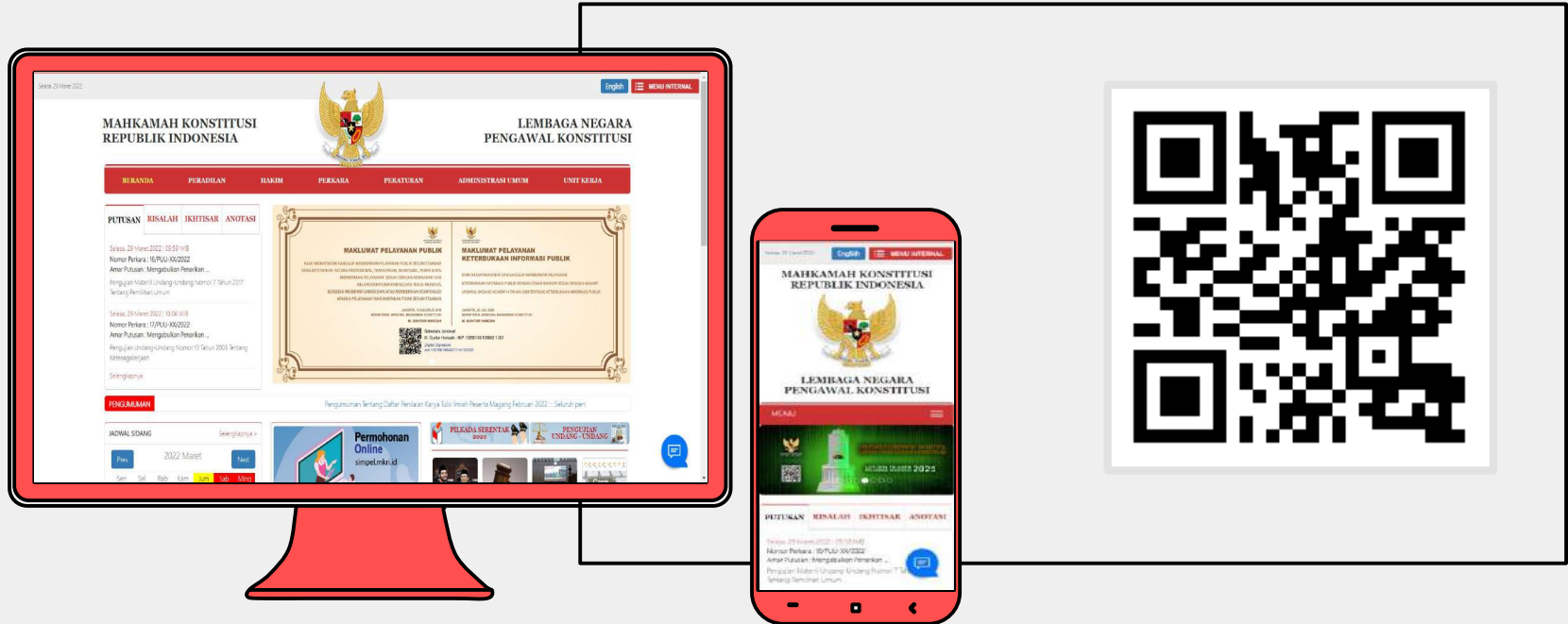
Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020
Pemohon : H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dan H. UU Ruzhanul Ulum, S.E.
Kuasa Pemohon : -
Tanggal : 01 Oktober 2020, Pkl 13:54



NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1	Permohonan	ADA
2	Daftar Alat / Dokumen Bukti	ADA
3	Alat Bukti	ADA
4	SK KPU	ADA

TTPO (Tanda Terima Pengajuan Permohonan Online)

WEBSITE MK (MKRI.ID)



MENU WEBSITE



Selasa, 29 Maret 2022

English MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA PERADILAN HAKIM PERKARA PERATURAN ADMINISTRASI UMUM UNIT KERJA

PUTUSAN RISALAH IKHTISAR ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB
Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB
Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARENT, AKUNTABEL, TAMBAH BAYAR, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERUBAHAN SECARA TERUS-MENERUS, BERSEDIA MENEMPAH SANGGUP MEMBERIKAN KONSULING APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2019
SUHARTO, JENDRAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH

**MAKLUMAT PELAYANAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**
KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN TERANG BANYAK, SESUAI DENGAN ANAKAT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 21 JULI 2020
SUHARTO, JENDRAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH

Sekretaris Jenderal
M. Guntur Hanzah - NIP. 192001051000021001
Zuhair Zuhair
nip.1970081904201114100335

PENGUMUMAN Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 :: Seluruh perni

JADWAL SIDANG Selengkapnya >
Prev 2022 Maret Next
Sen Sel Rab Kam **Jum** Sab Ming

Pemohonan Online
simplm.kri.id

PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG - UNDANG



PUTUSAN, RISALAH, IKHTSAR, ANOTASI



Selasa, 29 Maret 2022

English

MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA
PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA

PERADILAN

HAKIM

PERKARA

PERATURAN

ADMINISTRASI UMUM

UNIT KERJA

PUTUSAN RISALAH IKHTSAR ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB
Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB
Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARENT, AKUNTABEL, TAMBAH BAYAR, BERKEMASAN PISYOKANAN, SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERSEKUTUAN SECARA TERBUKA-TERBUKA, BERSEKUTUAS BERSAMA SAMA SANGGUP DAN SANGGUP MEMBERIKAN KEMERDEKAAN APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 21 AGUSTUS 2019
SUHARTO, JENDRAL MAJAHARAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH



Sekretaris Jenderal
M. Guntur Hanzah - NIP. 12020125 100002 1 001
Zuhair Zuhair
021-121788 1004221114 102333

**MAKLUMAT PELAYANAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN TERBUKA BANYAK, SESUAI DENGAN ANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 21 AGUSTUS 2019
SUHARTO, JENDRAL MAJAHARAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH

PENGUMUMAN

Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 :: Seluruh per...

JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

Prev

2022 Maret

Next

Sen Sel Rab Kam Jum Sab Ming



JADWAL SIDANG

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)



BERITA INFO PUBLIK PUBLIKASI

- Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan
- Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-
- Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendidarnya Bahwa Dewan Kehormatan

PILKADA SERENTAK 2020 PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

- Hakim Konstitusi
- Putusan
- Streaming dan Video Conference
- Case Tracking
- Informasi Anggaran
- AACC
- LPSE MKRI
- JDIH
- Pusdik MKRI
- Perpustakaan
- Pusat Sejarah Konstitusi
- Gedung MK
- Majalah Konstitusi
- Jurnal Konstitusi
- Jurnal Consvrev
- SP4N-LAPOR!



BERITA, INFO PUBLIK, PUBLIKASI

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)



simpel.mkri.id

BERITA | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

PILKADA SERENTAK 2020 | **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

Hakim Konstitusi | Putusan | Streaming dan Video Conference | Penelusuran Perkara

Informasi Anggaran | AACC | LPSE MKRI | JDIH

Pusdik MKRI | Perpustakaan | Pusat Sejarah Konstitusi | Gedung MK

Majalah Konstitusi | Jurnal Konstitusi | Jurnal Consvrev | SP4N-LAPOR!

Agenda Sidang | Siaran Pers | Berlangganan

ILM | Konsultasi | Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



PORTAL PUU DAN PILKADA 2020

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)



Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang | Siaran Pers | Berlangganan

ILM | Konsultasi | Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

PILKADA SERENTAK 2020 | **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

Hakim Konstitusi | Putusan | Streaming dan Video Conference | Penelusuran Perkara

Informasi Anggaran | AACC | LPSE MKRI | JDIH

Pusdik MKRI | Perpustakaan | Pusat Sejarah Konstitusi | Gedung MK

Majalah Konstitusi | Jurnal Konstitusi | Jurnal Consvrev | SP4N-LAPOR!

Selengkapnya >>



MENU DAN PORTAL PILIHAN

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)



Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendidriannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang | Siaran Pers | Berlangganan

ILM | Konsultasi | Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



PILKADA SERENTAK 2020 | **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

Hakim Konstitusi | Putusan | Streaming dan Video Conference | Penelusuran Perkara

Informasi Anggaran | AACC | LPSE MKRI | JDIH

Pusdik MKRI | Perpustakaan | Pusat Sejarah Konstitusi | Gedung MK

Majalah Konstitusi | Jurnal Konstitusi | Jurnal Consrev | SP4N-LAPOR!

LIVE STREAMING PERSIDANGAN





Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlangganan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas MK: Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-



ILM



Konsultasi



Dewan Etik

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas MK: Mahkamah Konstitusi (MK) Menegaskan Rendirannya Bahwa Dewan Kehormatan



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Sejarah Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi



Jurnal Constrev



SP4N-LAPOR!

Mahkamah Konstitusi


Selengkapnya >>



Sidang Pengucapan Putusan / Ketetapan, Selasa...




Sidang Perkara Nomor 21/PUU-XX/2022, Selasa...



Sidang Perkara Nomor 23/PUU-XX/2022, Senin...



Sidang Perkara Nomor 20/PUU-XX/2022, Senin...



Sidang Perkara Nomor 47/PUU-XX/2021, Senin...



Stadium General Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

 **2352-9000**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat 10110
Fax: 021-3520177, Email: office@mkri.id

KIRIM SURAT



TANYA-JAWAB



WHISTLEBLOWING



HUBUNGI MK



MEDIA SOSIAL



PENGUNJUNG



CASE TRACKING



JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock icon)

Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang | Siaran Pers | Berlangganan

ILM | Konsultasi | Dewan Etik

PILKADA SERENTAK 2020 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Hakim Konstitusi | Putusan | Streaming via Video Conference | **Case Tracking**

INFORMASI ANGGARAN | AACC | LPSE MKRI | JDIH


Pusdik MKRI | Perpustakaan | Pusat Sejarah Konstitusi | Gedung MK

Majalah Konstitusi | Jurnal Konstitusi | Jurnal Consvrev | SP4N-LAPOR!



CASE TRACKING



Q Cari

CASE TRACKING

MKRI **PUU** **SKLN** **PHPU** **PHPKADA**

Jenis dokumen

- Putusan
- Anotasi
- Ikhtisar Putusan
- Risalah Persidangan

Jenis perkara

- Semua jenis perkara
- PUU
- SKLN
- PHPU
- PHPU.A
- PHPU.C
- PHPU.D
- PHRGUB

Amar putusan

- Semua amar putusan
- Tidak dapat diterima
- Dikabulkan
- Dikabulkan sebagian
- Ditolak
- Ketetapan

12/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

[Case tracking](#)

11/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

[Case tracking](#)

10/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

CLICK MK



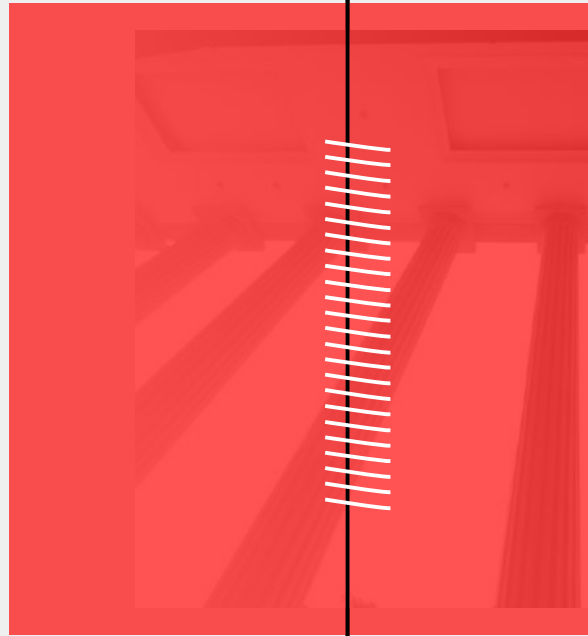
CLICK MK



CLICK MK



TERIMA KASIH





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**TEKNIK PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON DAN
KETERANGAN PIHAK TERKAIT
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2024**

**Oleh:
KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DISAMPAIKAN DALAM
"BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024"
CISARUA – 30 Agustus 2023**

PARA PIHAK DALAM PPHU ANGGOTA DPR DAN DPRD

A. Pemohon

- 1) Parpol/Parpol lokal peserta Pemilu
- 2) Perseorangan calon anggota DPR & DPRD dalam satu Parpol/Parpol lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol/Parpol lokal yang bersangkutan.

B. Termohon

Penyelenggara Pemilu

C. Pihak Terkait

Pihak yang berkepentingan terhadap permohonan:

- 1) Parpol/Parpol lokal peserta Pemilu
- 2) Perseorangan calon anggota DPR & DPRD dalam satu Parpol/Parpol lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol/Parpol lokal yang bersangkutan;

OBJEK PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD

Objek dalam perkara **PHPU anggota DPR dan DPRD** adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON & PIHAK TERKAIT

PERMOHONAN PEMOHON

1. Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.
2. Permohonan diajukan per provinsi.
3. Permohonan hanya dapat diajukan satu kali.

PERMOHONAN & KETERANGAN PIHAK TERKAIT

- 1) Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan kepada Mahkamah paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK.
- 2) Penyerahan Keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan.

PENGUMUMAN HASIL PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2024

Tenggang waktu pengajuan
permohonan ke MK
paling lama **3 x 24 jam**
sejak diumumkan



Pengumuman Hasil Pemilu
Serentak Tahun 2024
15 Feb - 20 Mar 2024

Pengumuman: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

**Rabu 20 Mrt 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Kamis 21 Mrt 2024,
10.00 WIB**

2 x 24
jam

**Jumat 22 Mrt 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam

**Sabtu 23 Mrt 2024,
10.00 WIB**

SISTEMATIKA PERMOHONAN PEMOHON

A. Identitas Pemohon (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)

B. Identitas Termohon

C. Uraian mengenai:

1. Kewenangan Mahkamah;
2. Kedudukan hukum Pemohon;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
4. Pokok permohonan Pemohon;
5. Petitum Pemohon.

SISTEMATIKA KETERANGAN PIHAK TERKAIT

- A. Identitas Pihak Terkait (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)
- B. Uraian mengenai:
 - 1) Pihak Terkait merupakan Parpol peserta Pemilu; atau
 - 2) Perseorangan merupakan peserta Pemilu dari Parpol yang sama
- C. Tanggapan terhadap:
 - 1. Kewenangan Mahkamah;
 - 2. Kedudukan hukum Pemohon;
 - 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
 - 4. Pokok permohonan Pemohon;
- D. Petitum

Identitas Pemohon & Termohon

Identitas Pemohon memuat:

- a. nama dan alamat Pemohon;
 - b. nomor telepon/seluler;
 - c. alamat surat elektronik (*email*); dan
- *) jika Pemohon menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Selain identitas Pemohon, Permohonan Pemohon juga memuat **identitas Termohon** memuat:

- a. nama Termohon;
- b. alamat Termohon.

Teknik Penyusunan Identitas Pemohon (Parpol)

1. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum/Presiden (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email
-
2. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email

Teknik Penyusunan Identitas Pemohon (Perseorangan)

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email.....

Sebagai perseorangan calon Anggota DPR,
DPRD Provinsi/DPRA, DPRD
Kabupaten/Kota/DPRK dari partai politik ...
Daerah Pemilihan

Teknik Penyusunan Identitas Kuasa Hukum Pemohon

Jika menggunakan Kuasa Hukum:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP...
email: ... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Teknik Penyusunan Identitas Termohon

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat
di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta
Pusat,
selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Identitas Pihak Terkait

Identitas Pihak Terkait memuat:

a. nama dan alamat Pihak Terkit;

b. nomor telepon/seluler;

c. alamat surat elektronik (*email*);

*) jika Pihak Terkait menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Teknik Penyusunan Identitas Pihak Terkait (Parpol)

1. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum/Presiden (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email
-
2. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email

Teknik Penyusunan Identitas Pihak Terkait (Perseorangan)

Nama :

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat Kantor :

nomor telepon/HP.....

email.....

Sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRRA,
DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK dari partai politik ...
Daerah Pemilihan ... yang telah memperoleh
persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan
sekretaris jenderal atau sebutan lainnya (terlampir).

Teknik Penyusunan Identitas Kuasa Hukum Pihak Terkait

Jika menggunakan Kuasa Hukum:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP...
email: ... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Uraian Kewenangan Mahkamah

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. dasar hukum kewenangan Mahkamah untuk mengadili perkara PHPU anggota DPR dan DPRD, yaitu:
 - Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;
 - Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009 tntg Kekuasaan Kehakiman;
 - Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu;
 - Pasal 5 PMK 2/2023
- b. objek permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD, yaitu surat keputusan KPU mengenai hasil rekapitulasi perolehan suara secara nasional.
- c. pernyataan Pemohon bahwa Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD.

Teknik Penyusunan Kewenangan Mahkamah

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 PMK 2/2023, objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal...2024 [Bukti P-...];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

Uraian Kedudukan Hukum Pemohon

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan hukum Pemohon, yaitu:
 - Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK;
 - Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2023.
- b. penjelasan sebagai parpol/parpol lokal atau perseorangan calon anggota DPR/DPRD peserta Pemilu yang didasarkan keputusan Termohon dan nomor urut parpol/parpol lokal atau perseorangan calon anggota DPR/DPRD.
- c. pernyataan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

Teknik Penyusunan Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal..., Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut... [Bukti P-...];

Jika permohonan diajukan perseorangan:

- b. *Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);*
- c. *Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal...2024, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Nomor Urut ... dari partai politik ... [Bukti P-...];*
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal... 2024;

Uraian Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mengatur tenggang waktu, yaitu:
 - Pasal 74 ayat (3) UU MK;
 - Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu;
 - Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023;
- b. hari, tanggal, dan jam pengumuman Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
- c. hari, tanggal, dan jam pengajuan permohonan;
- d. pernyataan bahwa pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.

Teknik Penyusunan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... pada tanggal...2024, pukul... WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal...2024, pukul ... WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Uraian Pokok Permohonan

Hal-hal yang harus diuraikan:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan
- b. Hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Teknik Penyusunan Pokok Permohonan (Parpol)

Pemohon Parpol:

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara. Pengurangan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 2. Penambahan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara. Penambahan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 3. dst.*

Teknik Penyusunan Pokok Permohonan (Perseorangan)

Pemohon Perseorangan:

Pemohon menyangdingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara. Pengurangan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 2. Penambahan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara. Penambahan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 3. dst.*

Keterangan Pihak Terkait

Keterangan Pihak Terkait memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. eksepsi (jika diperlukan dan bersifat alternatif) terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan serta eksepsi lainnya seperti terkait dengan Permohonan Pemohon kabur;
- b. tanggapan Pihak Terkait mengenai dalil Pemohon dalam pokok permohonan dan penjelasan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon telah benar

Teknik Penyusunan Eksepsi Pihak Terkait

DALAM EKSEPSI (*jika diperlukan dan bersifat alternatif*)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan ...

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan ...

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal..., pukul..., Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal..., pukul..., sampai dengan tanggal..., pukul...,
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal..., pukul...,
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan ...

V. Eksepsi lainnya (*jika ada*)

Teknik Penyusunan Tanggapan Pihak Terkait

DALAM POKOK PERMOHONAN

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...]*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].*
- 3. dst.*

Teknik Penyusunan Tanggapan Pihak Terkait

DALAM POKOK PERMOHONAN

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...]*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].*
- 3. dst.*

Uraian Petitum

Hal-hal yang harus disebutkan:

- a. permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;
- b. permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Teknik Penyusunan Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal... 2024 untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan ... (sesuai dengan dalil dalam posita permohonan);
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Daerah Pemilihan, sebagai berikut (**Pemohon Parpol**):

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.
2.
3.

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan ...dari partai politik ..., sebagai berikut (**Pemohon Perseorangan**):

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara
1.
2.
3.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Uraian Petitum Pihak Terkait

Petitum memuat permintaan kepada Mahkamah untuk:

a. menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima;

b. menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

Teknik Penyusunan Petitum Pihak Terkait

DALAM EKSEPSI (*jika mengajukan eksepsi*)

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang, bertanggal ...2024.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain,
mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Alasan-alasan Permohonan Tidak Jelas

Putusan tidak dapat diterima, salah satunya karena permohonan tidak jelas/kabur antara lain dengan pertimbangan:

1. Adanya ketidaksesuaian posita dan petitum;
2. Dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya;
3. Tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (termasuk hanya mencantumkan tabel persandingan perolehan suara tanpa adanya penjelasan)
4. Petitum kontradiktif karena tidak memberikan alternatif.
5. Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi hanya sepanjang yang didalilkan;
6. Petitum tidak meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon;
7. Salah dalam penulisan (rincian rincian-rincian kehilangan suara, nama desa, dan nama kecamatan).



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1665/DK.06.00/08/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

22 Agustus 2023

Kepada,
YM. Hakim Mahkamah Konstitusi
Ibu Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia** yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 s.d. 31 Agustus 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 28 Agustus 2023
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1491642745230822101957

Lampiran I

Nomor : 1665/DK.06.00/08/2023

Tanggal : 22 Agustus 2023

**JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA**

Hari, Tanggal : Senin, 28 Agustus 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Senin, 28 Agustus 2023	19.00 – 21.00	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: - YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum. - YM. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M. Hum





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1680/DK.06.00/08/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

23 Agustus 2023

Kepada,
YM. Hakim Mahkamah Konstitusi
Bapak Dr. Wahiduddin Adams, SH. MA.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia** yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 s.d. 31 Agustus 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 28 Agustus 2023
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-892422369230823112128

Lampiran I

Nomor : 1680/DK.06.00/08/2023

Tanggal : 23 Agustus 2023

**JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA**

Hari, Tanggal : Senin, 28 Agustus 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Senin, 28 Agustus 2023	19.00 – 21.00	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: - YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum. - YM. Dr. Wahiduddin Adams, SH. MA





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1657/DK.06.00/08/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

22 Agustus 2023

Kepada Yth,
Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
Bapak Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia** yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 s.d. 31 Agustus 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 29 Agustus 2023
Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan PHPU di
Mahkamah Konstitusi

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1736131775230822011949



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1658/DK.06.00/08/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

22 Agustus 2023

Kepada Yth.,
Panitera Muda II
Bapak Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia** yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 s.d. 31 Agustus 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 29 Agustus 2023
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I dan III.



Digital Signature
mk-1107010786230822102342



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1683/DK.06.00/08/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

24 Agustus 2023

Kepada Ykh. Saudara:

1. Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.

2. Jamaludin Salam

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia** yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 s.d. 31 Agustus 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 29 Agustus 2023
Waktu : 13.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : **Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik**

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.



Digital Signature
mk857768186230824092002



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1659/DK.06.00/08/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

22 Agustus 2023

Kepada Yth,
Saudara Saiful Anwar, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia** yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 s.d. 31 Agustus 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dan koordinator sesi praktik dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 30 Agustus 2023
Waktu : 08.30 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : - Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
- Koordinator sesi Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III.



Digital Signature
mk276070051230822102511



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1717/DK.06.00/08/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

30 Agustus 2023

Kepada Ykh. Saudara/i:

- 1. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa**
 - 2. Agusniwan Etra**
 - 3. Abdul Ghoftar**
 - 4. Alboin Pasaribu**
- di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024** bagi **Partai Gelombang Rakyat Indonesia** yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 s.d. 31 Agustus 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 30 Agustus 2023
Waktu : 08.30 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan;
5. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan.



Digital Signature
mk818310044230830061145



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1718/DK.06.00/08/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

30 Agustus 2023

Kepada Ykh. Saudara:

- 1. Ery Satria Pamungkas**
- 2. Syamsudin Noer**
- 3. Irfan Nur Rachman**
- 4. M. Lutfi Chakim**

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024** bagi **Partai Gelombang Rakyat Indonesia** yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 s.d. 31 Agustus 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 31 Agustus 2023
Waktu : 08.00 s.d. 10.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan
Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan;
5. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan.



Digital Signature
mk-74127375230829111856



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1656/DK.06.00/08/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Koordinator
Evaluasi**

22 Agustus 2023

Kepada Yth.,
Panitera Muda III
Ibu Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia** yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 s.d. 31 Agustus 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Ibu untuk menjadi koordinator sesi evaluasi dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 31 Agustus 2023
Waktu : 08.00 s.d. 10.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I dan II.



Digital Signature
mk-1205768148230822102913



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 97/DK.06.00/01/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Memberikan Sambutan**

18 Januari 2023

Kepada Yth.

Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)

Bapak H. Muhammad Anis Matta, Lc., M.A

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia** yang akan diselenggarakan pada tanggal 1 s.d. 4 Mei 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan sekaligus memberikan sambutan pada:

Hari, tanggal : Senin, 1 Mei 2023

Waktu : 15.30 –17.30 WIB

Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,

Imam Margono

Tembusan:

Yth. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1542534607230118100112

Lampiran I

Nomor : 97/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 18 Januari 2023

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia

Hari, Tanggal : **Senin, 1 Mei 2023**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Pengurus dan Anggota Partai Gelombang Rakyat Indonesia

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 1 Mei 2023	15.30 – 17.30 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Sambutan Ketua Partai Politik 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Ketua Partai Politik Plt. Kapusdik	Pusdik
	17.30 WIB	Istrahat	Panitia	





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 98/DK.06.00/01/2023
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

18 Januari 2023

Kepada Yth.

Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)

Bapak H. Muhammad Anis Matta, Lc., M.A

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia** yang akan diselenggarakan pada tanggal 1 s.d. 4 Mei 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **150 (seratus lima puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Gelombang Rakyat Indonesia yang membidangi Hukum/Advokasi sebagai peserta kegiatan dimaksud, yang terdiri dari 36 orang dari Dewan Pimpinan Pusat dan 114 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi. Kami juga mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **2 (dua)** orang dari Dewan Pimpinan Pusat untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 17 April 2023**. (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1786343512230118093229

Lampiran I

Nomor : 98/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 18 Januari 2023

KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta sebanyak **150 (seratus lima puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Gelombang Rakyat Indonesia yang terdiri dari:
 - 36 orang dari Dewan Pimpinan Pusat
 - 114 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi
- b. Membawa Surat Tugas dari DPP Partai yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. DPP Partai Gelombang Rakyat Indonesia memberikan daftar nama peserta sebanyak **150 (seratus lima puluh)** orang paling lambat pada tanggal **17 April 2023**.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:



- Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
- Sandal kamar
- Gula, kopi, teh, dan air mineral.

4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. Biaya Transportasi

- a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya, dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- b. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**
 - 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
 - 2) *Boarding Pass* kedatangan;
 - 3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api) ;
 - 4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transport darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi**.

- c. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.

d. *Boarding pass*

Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

e. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat:**

- 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
- 2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
- 3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
- 4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
- 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
- 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
- 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
- 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.



f. Transport Darat/Laut

- 1) Transport Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transport Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transport sesuai dengan standar biaya pemerintah.
 - 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk)
 - 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
 - 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
- g. Penggantian transport akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.

6. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

7. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 98/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 18 Januari 2023

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia

Hari, Tanggal : **Senin s.d. Kamis, 1 s.d. 4 Mei 2023**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Pengurus dan Anggota Partai Gelombang Rakyat Indonesia

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 1 Mei 2023	09.30 – 11.30 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Pusdik
	11.30 – 13.30 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.30 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Pusdik
	14.30 – 15.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Pusdik
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	15.30 – 17.30 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi	YM Ketua MK Ketua Partai Politik Plt. Kapusdik	Pusdik



		<ul style="list-style-type: none"> 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Sambutan Ketua Partai Politik 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa 		
	17.30 WIB	Istrahat	Panitia	
KEDUA				
Selasa, 2 Mei 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi I: Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi II: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istrahat	Panitia	Pusdik
KETIGA				
Rabu, 3 Mei 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik



	07.30 – 09.30 WIB	Sesi IV: Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi V: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VI: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istrahat	Panitia	Pusdik
KEEMPAT				
Kamis, 4 Mei 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi VII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan dan Pesan Peserta 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi	Sekjen MK Plt. Kapusdik	Pusdik



		7. Pembacaan Doa		
	12.00 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik



Lampiran III

Nomor : 98/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 18 Januari 2023

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua DPW	Jl. Konstitusi , Bogor	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										
...										
...										
120										



Lampiran IV

Nomor : 98/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 18 Januari 2023

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat Indonesia menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.			
2.			
3.			
...			
150.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis
1 s.d. 4 Mei 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
DPP Partai Gelombang Rakyat Indonesia
ttd
Ketua Umum/Sekretaris Jenderal





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 160/DK.00/01/2023

09 Januari 2023

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat Persiapan Bimbingan Teknis
Hukum Acara Penyelesaian
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Kepada Yth.

Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)

Bapak H. Muhammad Anis Matta, Lc., M.A

di Jakarta

Dalam rangka persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024**, di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Sehubungan dengan persiapan kegiatan yang dimaksud kami mengundang Bapak atau pengurus yang lain untuk dapat menghadiri koordinasi persiapan kegiatan tersebut pada:

Hari, Tanggal : Senin, 16 Januari 2023

Waktu : 09.00 WIB

Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (*link* rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan Sdr. Bangkit Panji Anarogo yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **081281373942**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Imam Margono

Tembusan Yth:

1. Panitera Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;



Digital Signature
mk-930057574230109035612



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1316/DK.06.00/07/2023
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

25 Juli 2023

Kepada Yth.

Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)

Bapak H. Muhammad Anis Matta, Lc., M.A

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia** yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 s.d. 31 Agustus 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **150 (seratus lima puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Gelombang Rakyat Indonesia yang membidangi Hukum/Advokasi sebagai peserta kegiatan dimaksud, yang terdiri dari 36 orang dari Dewan Pimpinan Pusat dan 114 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi. Kami juga mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **2 (dua)** orang dari Dewan Pimpinan Pusat untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 14 Agustus 2023**. (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk801258421230725020718

Lampiran I

Nomor : 1316/DK.06.00/07/2023

Tanggal : 25 Juli 2023

KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta sebanyak **150 (seratus lima puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Gelombang Rakyat Indonesia yang terdiri dari:
 - 36 orang dari Dewan Pimpinan Pusat
 - 114 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi
- b. Membawa Surat Tugas dari DPP Partai yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. DPP Partai Gelombang Rakyat Indonesia memberikan daftar nama peserta sebanyak **150 (seratus lima puluh)** orang paling lambat pada tanggal **14 Agustus 2023**.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
 - Sandal kamar
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.



4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. Biaya Transportasi

- a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya, dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- b. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**
 - 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
 - 2) *Boarding Pass* kedatangan;
 - 3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api) ;
 - 4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transport darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi**.

- c. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.
- d. **Boarding pass**
Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.
- e. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat:**
 - 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
 - 2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
 - 3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
 - 4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
 - 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
 - 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
 - 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
 - 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.
- f. **Transport Darat/Laut**
 - 1) Transport Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transport Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transport sesuai dengan standar biaya pemerintah.
 - 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk)



- 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
 - 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
- g. Penggantian transport akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.

6. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

7. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 1316/DK.06.00/07/2023

Tanggal : 25 Juli 2023

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia

Hari, Tanggal : **Senin s.d. Kamis, 28 s.d. 31 Agustus 2023**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Pengurus dan Anggota Partai Gelombang Rakyat Indonesia

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 28 Agustus 2023	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Pusdik
	12.00 – 14.30 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Pusdik
	15.30 – 16.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Pusdik
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	Sekjen MK	Pusdik



		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Mars Partai Gelombang Rakyat Indonesia 5. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Sambutan Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia 7. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 8. Hymne Partai Gelombang Rakyat Indonesia 9. Hymne Mahkamah Konstitusi 10. Pembacaan Doa 	Ketum Partai Gelombang Rakyat Indonesia YM Ketua MK	
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	21.00 WIB	Istirahat		Pusdik
KEDUA				
Selasa, 29 Agustus 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik



	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KETIGA				
Rabu, 30 Agustus 2023	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi		Pusdik
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik



	15.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KEEMPAT				
Kamis, 31 Agustus 2023	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 10.30 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Pusdik
	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan dan Pesan Peserta 4. Laporan Kapusdik 5. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	Kapusdik Sekjen MK	Pusdik
	12.00 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik



Lampiran III

Nomor : 1316/DK.06.00/07/2023

Tanggal : 25 Juli 2023

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua DPW	Jl. Konstitusi, Bogor	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										
...										
...										
120										



Lampiran IV

Nomor : 1316/DK.06.00/07/2023

Tanggal : 25 Juli 2023

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat Indonesia menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.			
2.			
3.			
...			
150.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis
28 s.d. 31 Agustus 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
DPP Partai Gelombang Rakyat Indonesia
ttd
Ketua Umum/Sekretaris Jenderal





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1626/DK.06.00/04/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemberitahuan Penundaan Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

14 April 2023

Kepada Yth.

Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
Bapak H. Muhammad Anis Matta, Lc., M.A
di Tempat

Dengan hormat, sehubungan dengan hasil koordinasi bersama panitia DPP Partai Gelombang Rakyat Indonesia dan mempertimbangkan padatnya situasi arus balik mudik lebaran pada minggu pertama bulan Mei Tahun 2023, dengan ini kami sampaikan bahwa kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia** yang sedianya akan diselenggarakan pada tanggal 2 s.d. 5 Mei 2023 diundur menjadi tanggal **15 s.d. 17 Mei 2023** di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat. (Jadwal Terlampir)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk891722136230414094726

Lampiran I

Nomor : 1626/DK.06.00/04/2023

Tanggal : 14 April 2023

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia

Hari, Tanggal : **Senin s.d. Rabu, 15 s.d. 17 Mei 2023**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Pengurus dan Anggota Partai Gelombang Rakyat Indonesia

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ MODERATOR
PERTAMA			
Senin, 15 Mei 2023	09.00 – 12.00 WIB	Check in dan Registrasi Peserta	Panitia
	12.00 – 14.00 WIB	ISHOMA	Panitia
	14.00 – 15.00 WIB	Penjelasan Teknis	Plt. Kepala Pusdik Pancasila dan Konstitusi
	15.00 – 15.30 WIB	Pre-Test	Panitia
	15.30 – 17.30 WIB	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Mars Partai Gelora 5. Laporan Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Sambutan Ketua Umum Partai Gelora	Plt. Sekjen Ketua MK Ketua Partai



		<p>7. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi</p> <p>8. Pengalungan Tanda Peserta secara Simbolis Oleh Ketua Mahkamah Konstitusi didampingi Ketua Umum/Presiden Partai Gelora</p> <p>9. Hymne Mahkamah Konstitusi</p> <p>10. Hymne Partai Gelora</p> <p>11. Pembacaan Doa</p>	
	17.30 – 19.00 WIB	ISHOMA	Panitia
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	Narasumber: Hakim Konstitusi
	21.00 WIB	Istirahat	Panitia
KEDUA			
Selasa, 16 Mei 2023	06.00 - 07.30 WIB	Makan pagi	Panitia
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan	Narasumber: Mahkamah Konstitusi
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA	Panitia
	13.00 – 14.00 WIB	Sesi IV: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi
	14.00 – 16.00 WIB	Sesi V: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi
	16.00 – 16.30 WIB	Coffe Break	Panitia



	16.30 – 18.00 WIB	Sesi VI: Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi
	18.00	Istirahat	
KETIGA			
Rabu, 17 Mei 2023	06.00 – 08.00 WIB	Sarapan Pagi	Panitia
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VII: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi
	10.30 – 11.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia
	11.00 – 13.00 WIB	ISHOMA	Panitia
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia
	15.30 – 16.00 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia
	16.00 – 18.00 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Laporan Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Sambutan Penutupan Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Pembacaan Doa	Plt. Kapusdik Plt. Sekjen
	18.00 WIB	Check Out	





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1541/DK.06.00/04/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemberitahuan Perubahan Waktu Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

05 April 2023

Kepada Yth.

Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)

Bapak H. Muhammad Anis Matta, Lc., M.A

di Tempat

Dengan hormat, sehubungan dengan ditetapkannya hari libur nasional tahun 2023 tanggal 1 Mei 2023 sebagai Hari Buruh Internasional serta untuk mengantisipasi situasi terkait kondisi tersebut, dengan ini kami sampaikan bahwa kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia** yang sedianya akan diselenggarakan pada tanggal 1 s.d. 4 Mei 2023 diundur menjadi tanggal **2 s.d. 5 Mei 2023** di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat. (Jadwal Terlampir)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,

Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk823482680230405012042

Lampiran I

Nomor : 1541/DK.06.00/04/2023

Tanggal : 05 April 2023

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia

Hari, Tanggal : Selasa s.d. Jumat, 2 s.d. 5 Mei 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Pengurus dan Anggota Partai Gelombang Rakyat Indonesia

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Selasa, 2 Mei 2023	09.30 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Lobby Grha Konstitusi 2
	12.00 – 14.30 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	15.30 – 16.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		



	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Sambutan Ketua Umum Partai Gelora 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Ketua Umum Partai Gelora Plt. Sekjen MK	Aula Grha Konstitusi 3
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	21.00 WIB	Istirahat		
KEDUA				
Rabu, 3 Mei 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7



	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	Aula Grha Konstitusi 3
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA		
	18.00 – 21.00 WIB	Makan Malam		Grha Konstitusi 7
	21.00 WIB	Istirahat		
KETIGA				
Kamis, 4 Mei 2023	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	
	07.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA		
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam		Grha Konstitusi 7
	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan		Grha Konstitusi 7



	21.00 WIB	Istirahat		
KEEMPAT				
Jumat, 5 Mei 2023	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	10.00 – 10.30 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Laporan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Sambutan Penutupan Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Pembacaan Doa	Plt. Sekjen MK Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik MK	Aula Grha Konstitusi 3
	12.00 WIB	Kegiatan Selesai		





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1666/DK.06.00/08/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Memberikan Sambutan**

22 Agustus 2023

Kepada Yth.

Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
Bapak H. Muhammad Anis Matta, Lc., M.A
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia** yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 s.d. 31 Agustus 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan sekaligus memberikan sambutan pada:

Hari, tanggal : Senin, 28 Agustus 2023

Waktu : 16.30 – 18.00 WIB

Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk947828208230822101746

Lampiran I

Nomor : 1666/DK.06.00/08/2023

Tanggal : 22 Agustus 2023

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia

Hari, Tanggal : **Senin, 28 Agustus 2023**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Pengurus dan Anggota Partai Gelombang Rakyat Indonesia

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 28 Agustus 2023	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Mars Partai Gelombang Rakyat Indonesia 5. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Sambutan Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia 7. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 8. Hymne Partai Gelombang Rakyat Indonesia 9. Hymne Mahkamah Konstitusi 10. Pembacaan Doa	Sekjen MK Ketum Partai Gelombang Rakyat Indonesia YM Ketua MK	Pusdik
	18.00 WIB	ISHOMA	Panitia	





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**SURAT TUGAS
NOMOR 672.1/ST.SPD/2000/08/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Mahkamah Konstitusi menugaskan kepada yang tersebut dibawah ini untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sebagai berikut:

Daftar Nama Terlampir

Dari : Gedung Mahkamah Konstitusi

Tempat, Kota Tujuan : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

Dalam rangka : Melaksanakan tugas sebagai Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 28 s.d. 31 Agustus 2023.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 28 Agustus 2023
an. Ketua Mahkamah Konstitusi,
Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi



Digital Signature
mk54570704230831100133

Lampiran Surat Tugas

Nomor : 672.1/ST.SPD/2000/08/2023

Tanggal : 28 Agustus 2023

**NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BAGI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA**

NO	NAMA	PENUGASAN	TANGGAL
1	Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.	Narasumber	28 Agustus 2023
2	Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Narasumber	28 Agustus 2023
3	Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Narasumber	28 Agustus 2023
4	Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.	Narasumber	29 Agustus 2023
5	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Narasumber	29 Agustus 2023
6	Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.	Narasumber	29 Agustus 2023
7	Jamaludin Salam	Narasumber	29 Agustus 2023
8	Saiful Anwar, S.H., M.H.	Narasumber	30 Agustus 2023
9	I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H., M.H.	Narasumber	30 Agustus 2023
10	Dr. Agusniwan Etra, S.H., M.H.	Narasumber	30 Agustus 2023
11	Dr. Abdul Ghoftar, S.H., M.H.	Narasumber	30 Agustus 2023
12	Alboin Pasaribu, S.H., M.H.	Narasumber	30 Agustus 2023
13	Ery Satria Pamungkas, S.H.	Narasumber	31 Agustus 2023
14	Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.	Narasumber	31 Agustus 2023
15	Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.	Narasumber	31 Agustus 2023
16	M. Lutfi Chakim, S.H., LL.M.	Narasumber	31 Agustus 2023
17	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Koordinator	31 Agustus 2023





KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA TENTANG BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA

NOMOR : 22/PK/2023

NOMOR : 15/MOU/DPN-GLR/VIII/2023

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **Delapan belas** bulan **Agustus**, tahun **Dua ribu dua puluh tiga** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Teguh Wahyudi**, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Amin Fahrudin**, Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelombang Rakyat Indonesia, berkedudukan di Jl. Minangkabau Barat Raya No. 28 F Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi – Jakarta Selatan 12970, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Partai Gelombang Rakyat Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia pada hari Senin s.d. Kamis, tanggal 28 s.d. 31 Agustus 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jalan Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

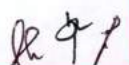
BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
 - b. Menyediakan ruangan belajar mengajar, bahan ajar, seminar kit, dan Narasumber.
 - c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta.
 - d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia.



(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang pengurus dan/atau anggota Partai Gelombang Rakyat Indonesia sebagai peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang terdiri dari:
 - 36 orang Dewan Pimpinan Pusat
 - 114 orang Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi
- b. Menjamin peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebelumnya.
- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia.
- d. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal **14 Agustus 2023**.

Bagian Kedua
Hak
Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **14 Agustus 2023**.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia.

BAB IV
BIAYA
Pasal 5

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya akomodasi, konsumsi, transportasi (PP), dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

f. g. h.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VI
BEA MATERAI DAN PAJAK
Pasal 7

- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.



PIHAK KESATU,
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI



Teguh Wahyudi

Teguh Wahyudi

Kepala Pusat

Shap Pendidikan Pancasila dan Konstitusi *f*

PIHAK KEDUA,
Partai Gelombang Rakyat Indonesia



Amin Fahrudin

Amin Fahrudin

Ketua Bidang Hukum dan Advokasi
Dewan Pimpinan Nasional



KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA TENTANG BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA

NOMOR : 22/PK/2023

NOMOR : 15/MOU/DPN-GLR/VIII/2023

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **Delapan belas** bulan **Agustus**, tahun **Dua ribu dua puluh tiga** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Teguh Wahyudi**, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Amin Fahrudin**, Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelombang Rakyat Indonesia, berkedudukan di Jl. Minangkabau Barat Raya No. 28 F Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi – Jakarta Selatan 12970, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Partai Gelombang Rakyat Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia pada hari Senin s.d. Kamis, tanggal 28 s.d. 31 Agustus 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jalan Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
 - b. Menyediakan ruangan belajar mengajar, bahan ajar, seminar kit, dan Narasumber.
 - c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta.
 - d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia.

f. 2023

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang pengurus dan/atau anggota Partai Gelombang Rakyat Indonesia sebagai peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang terdiri dari:
 - 36 orang Dewan Pimpinan Pusat
 - 114 orang Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi
- b. Menjamin peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebelumnya.
- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia.
- d. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal **14 Agustus 2023**.

Bagian Kedua
Hak
Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **14 Agustus 2023**.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia.

BAB IV
BIAYA
Pasal 5

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya akomodasi, konsumsi, transportasi (PP), dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

Alor

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VI
BEA MATERAI DAN PAJAK
Pasal 7

- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

/s/

PIHAK KESATU,
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI



Teguh Wahyudi
Kepala Pusat

Handwritten initials Pendidikan Pancasila dan Konstitusi *Handwritten mark*

PIHAK KEDUA,
Partai Gelombang Rakyat Indonesia



DEWAN PIMPINAN NASIONAL
**GELORA
INDONESIA**

Amin Fahrudin
Ketua Bidang Hukum dan Advokasi
Dewan Pimpinan Nasional

Penjelasan Teknis

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	H. JON AFRIZAL	28/08/2023 14:40:31 WIB
2	THARMIZI	28/08/2023 14:41:56 WIB
3	ERLIZAR	28/08/2023 14:43:34 WIB
4	H. FUADY	28/08/2023 14:44:07 WIB
5	DEDI HARYONO	28/08/2023 14:44:26 WIB
6	NOVI HERIYANTO	28/08/2023 14:45:18 WIB
7	MUHAMMAD SUFRI	28/08/2023 14:49:08 WIB
8	YUSWAR HIDAYATULLAH	28/08/2023 14:51:28 WIB
9	BAGUS ZUNTORO PUTRO	28/08/2023 15:15:43 WIB
10	UMAR ABDURRAHMAN	28/08/2023 15:31:37 WIB
11	SYAIFUL ARIFIN	28/08/2023 15:35:03 WIB
12	IKA SEKAR MUTIARA	28/08/2023 15:35:21 WIB
13	DIMYATI	28/08/2023 15:36:55 WIB
14	ARYO TYASMORO	28/08/2023 15:37:21 WIB

15 SELAMET	28/08/2023 15:37:49 WIB
16 H. ABDUL RAHMAN	28/08/2023 15:42:29 WIB
17 ADE PUTRA WINATA	28/08/2023 15:45:13 WIB
18 M. GUFRON SURATMAN	28/08/2023 15:45:30 WIB
19 INDRA RUKMONO	28/08/2023 15:46:00 WIB
20 ZAINUDDIN	28/08/2023 15:47:14 WIB
21 ARDIN ANGGAWIRYA KARUNDENG	28/08/2023 15:49:51 WIB
22 SARAH AZZAHRA	28/08/2023 15:50:18 WIB
23 SEPTANTRI FAZLURAHMAN	28/08/2023 15:51:04 WIB
24 FRIS DWI YULIANTO	28/08/2023 15:51:43 WIB
25 EKO GUNDARTO	28/08/2023 15:52:21 WIB
26 MUHAMMAD RIF'AT	28/08/2023 15:52:33 WIB
27 MAHYUDI	28/08/2023 15:52:35 WIB
28 SUDARSONO	28/08/2023 15:52:35 WIB
29 HERMAWAN TAUFIK LAMBOTOE	28/08/2023 15:52:36 WIB
30 TAUFIQ HIDAYAT	28/08/2023 15:52:44 WIB

31 DARWANTO	28/08/2023 15:52:54 WIB
32 ISKANDAR	28/08/2023 15:53:03 WIB
33 ELYAS	28/08/2023 15:53:04 WIB
34 JEFRY YOHANIS MAKALEGI	28/08/2023 15:53:09 WIB
35 AHMADI	28/08/2023 15:53:14 WIB
36 YUNUS KOGOYA	28/08/2023 15:53:38 WIB
37 TATO TRISETYA	28/08/2023 15:53:54 WIB
38 HISAN ANIS MATTA	28/08/2023 15:53:58 WIB
39 ANDHES TAN SATRISNA	28/08/2023 15:55:04 WIB
40 R. AKHMAD YANI SAEFUDDIN	28/08/2023 15:55:21 WIB
41 H. HAJRUL MALIK	28/08/2023 15:55:25 WIB
42 ABDUL KADIR	28/08/2023 15:55:38 WIB
43 MOHAMMAD SYAHFAN BADRI S.	28/08/2023 15:55:39 WIB
44 JUNEFS ISMALIYANTO	28/08/2023 15:55:45 WIB
45 SLAMET	28/08/2023 15:55:46 WIB
46 ANGGA SATRIA BIMA	28/08/2023 15:55:48 WIB

47 FAZRIN BASALAMAH	28/08/2023 15:55:50 WIB
48 MUSLIH	28/08/2023 15:55:54 WIB
49 MISBAKHUL MUNIR	28/08/2023 15:56:18 WIB
50 SUNARDI	28/08/2023 15:56:34 WIB
51 HENDRO KUSUMA JAYA	28/08/2023 15:56:52 WIB
52 ASWAR	28/08/2023 15:56:56 WIB
53 MUHAMMAD IKHLAS	28/08/2023 15:57:19 WIB
54 KUMALASARI KARTINI	28/08/2023 15:57:25 WIB
55 RISWANDI	28/08/2023 15:57:49 WIB
56 ACHMAD ZAIROFI	28/08/2023 15:58:11 WIB
57 AHMAD ZAINUDDIN	28/08/2023 15:58:13 WIB
58 MUHAMMAD BASUNI	28/08/2023 15:58:27 WIB
59 TEGUH WIBOWO MULYONO	28/08/2023 15:58:29 WIB
60 HARYANTO	28/08/2023 15:58:42 WIB
61 FERDIA PRAKARSA	28/08/2023 15:58:52 WIB
62 ANDI SAPUTRO	28/08/2023 15:59:08 WIB

63 AHMAD SULTHONI	28/08/2023 15:59:21 WIB
64 MUHAMMAD IKHLAS	28/08/2023 15:59:22 WIB
65 YUSRI ADDIN YUSUF	28/08/2023 15:59:57 WIB
66 AMIN TRIAWAN	28/08/2023 16:00:04 WIB
67 RATNO TIMUR	28/08/2023 16:00:14 WIB
68 SYAMSIR	28/08/2023 16:00:21 WIB
69 M. IMRON ROSADI	28/08/2023 16:00:24 WIB
70 KOMIRUDDIN	28/08/2023 16:00:25 WIB
71 MUSYafa AHMAD RAHIM	28/08/2023 16:00:26 WIB
72 AHMAD HAFIDZ	28/08/2023 16:00:28 WIB
73 FARIED DESEMBARDI	28/08/2023 16:00:29 WIB
74 AMRIL SUDIONO	28/08/2023 16:00:40 WIB
75 AMRIL SUDIONO	28/08/2023 16:00:40 WIB
76 MOHARRIADI	28/08/2023 16:00:42 WIB
77 FAUZI WAHYU MUNTORO	28/08/2023 16:01:05 WIB
78 AHMAD YANI	28/08/2023 16:01:10 WIB

79 IMAN HADI WALUYO	28/08/2023 16:01:34 WIB
80 GUNGUN GUNAWAN	28/08/2023 16:01:57 WIB
81 AKHMAD FARADIS	28/08/2023 16:02:05 WIB
82 HENDRO SULISTIYO	28/08/2023 16:02:19 WIB
83 HERI GUNAWAN	28/08/2023 16:02:36 WIB
84 H. RAIHAN ISKANDAR	28/08/2023 16:03:11 WIB
85 DICKY ARIANSYAH	28/08/2023 16:03:14 WIB
86 MUHAMAD HASYIM	28/08/2023 16:03:15 WIB
87 M. AGUS AWALUS SHOIM	28/08/2023 16:03:26 WIB
88 ROHMANI	28/08/2023 16:03:27 WIB
89 AGUS PURWANTO	28/08/2023 16:03:34 WIB
90 H. DODDY EKA PUTRA	28/08/2023 16:03:37 WIB
91 ARFAN ARIFIN	28/08/2023 16:03:57 WIB
92 AL HAKIM	28/08/2023 16:04:34 WIB
93 H. RIDWAN THALIB	28/08/2023 16:05:05 WIB
94 GAZALBA	28/08/2023 16:06:37 WIB

95 FAKIH ZATNIKA TAUFIK	28/08/2023 16:07:05 WIB
96 ENDY JUNAEDY K.	28/08/2023 16:07:26 WIB
97 TALIB SOUMENA	28/08/2023 16:07:32 WIB
98 H. ANDI SAMSUL BAHRI MADDUKELLENG	28/08/2023 16:08:18 WIB
99 SAMSANI SUDRADJAT	28/08/2023 16:08:20 WIB
100 NOVIS SUGIAWAN	28/08/2023 16:08:34 WIB
101 TINA H. TAMHER	28/08/2023 16:08:43 WIB
102 ONDANG SURJANA	28/08/2023 16:08:56 WIB
103 BUDI SANTOSO	28/08/2023 16:09:07 WIB
104 SUHARJITO	28/08/2023 16:09:11 WIB
105 ABDUSSATAR KHALIL	28/08/2023 16:09:11 WIB
106 AHMAD RIFAI RAHAWARIN	28/08/2023 16:09:16 WIB
107 H. BENNY JOVIAL	28/08/2023 16:09:17 WIB
108 ASTAFIED NUR ROHMAN	28/08/2023 16:09:18 WIB
109 JOHAN FRETS ELWARIN	28/08/2023 16:09:22 WIB
110 FATHUR ROHIM	28/08/2023 16:09:22 WIB

111 SYAFRUDIN GORAN TOKAN	28/08/2023 16:09:22 WIB
112 MUHAMAD YAMIN NOCH	28/08/2023 16:09:24 WIB
113 ZULKIFLI TAMBUNAN	28/08/2023 16:09:24 WIB
114 ARIES SUPRIADI	28/08/2023 16:09:30 WIB
115 ZUHRIA RAUF	28/08/2023 16:09:33 WIB
116 LALU PAHRURROZI	28/08/2023 16:09:33 WIB
117 H. MAHBUB	28/08/2023 16:09:52 WIB
118 H. MAHBUB	28/08/2023 16:09:54 WIB
119 RONALD ERWIN PATTIPAWAEJ	28/08/2023 16:09:54 WIB
120 MUH. JAFAR SODDING	28/08/2023 16:09:55 WIB
121 ALI IMRAN RAMADHAN	28/08/2023 16:10:05 WIB
122 ONESIMUS HELUKA	28/08/2023 16:10:27 WIB
123 HUDZAIFAH MUHIBULLAH	28/08/2023 16:10:33 WIB
124 FIRDAUS RENUAT	28/08/2023 16:11:19 WIB
125 YERMIA SILETTY	28/08/2023 16:11:29 WIB
126 ZADRAK ELWUAR	28/08/2023 16:12:05 WIB

127 SIMSON PAYAGE	28/08/2023 16:12:46 WIB
128 MUHAMMAD ZAINI BETAN	28/08/2023 16:13:45 WIB
129 ASNAWI	28/08/2023 16:15:08 WIB
130 H. NURDIN	28/08/2023 16:15:16 WIB
131 JEFFRY LEONARD P. TOBING	28/08/2023 16:19:24 WIB
132 NUR KHOSIM	28/08/2023 16:19:48 WIB
133 MUHDAR HASANAT	28/08/2023 16:21:01 WIB
134 YERMIAS PIGOME	28/08/2023 16:27:42 WIB
135 SAIFUL AHMAD	28/08/2023 16:32:16 WIB
136 ALIMIN MUHAMMAD	28/08/2023 16:32:49 WIB
137 TUMARUDDIN	28/08/2023 16:38:23 WIB
138 ABQARI MUHAMMAD AL FATIH	28/08/2023 17:33:51 WIB
139 H. SARWONO	28/08/2023 19:09:49 WIB
140 ARIF AWALUDIN	28/08/2023 19:11:33 WIB
141 JUNAIDI FAJRI	28/08/2023 19:11:54 WIB
142 SYAMSARI	28/08/2023 19:12:00 WIB

143 H. ZAINUDDIN TAMBUALA	28/08/2023 19:15:33 WIB
144 ANANTO PRATIKNO	28/08/2023 19:17:27 WIB
145 SURYA YUNIZA	28/08/2023 19:20:29 WIB
146 ROBBY ANDRIAN	28/08/2023 20:16:18 WIB
147 RENI ANGGRAINI	28/08/2023 20:24:09 WIB
148 SIGIT FAJAR ROHMAN	28/08/2023 20:28:05 WIB

Pembukaan Kegiatan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	SAIFUL AHMAD	28/08/2023 16:32:22 WIB
2	MUHAMMAD RIF'AT	28/08/2023 16:32:38 WIB
3	H. JON AFRIZAL	28/08/2023 16:35:35 WIB
4	DEDI HARYONO	28/08/2023 16:36:09 WIB
5	SLAMET	28/08/2023 16:36:10 WIB
6	SAMSANI SUDRADJAT	28/08/2023 16:36:25 WIB
7	THARMIZI	28/08/2023 16:37:02 WIB
8	TUMARUDDIN	28/08/2023 16:38:28 WIB

9 HARYANTO	28/08/2023 16:38:41 WIB
10 MUHAMMAD BASUNI	28/08/2023 16:39:01 WIB
11 TEGUH WIBOWO MULYONO	28/08/2023 16:39:52 WIB
12 YUSWAR HIDAYATULLAH	28/08/2023 16:40:04 WIB
13 UMAR ABDURRAHMAN	28/08/2023 16:40:34 WIB
14 NOVI HERIYANTO	28/08/2023 16:40:36 WIB
15 YUSRI ADDIN YUSUF	28/08/2023 16:42:27 WIB
16 H. HAJRUL MALIK	28/08/2023 16:43:10 WIB
17 H. DODDY EKA PUTRA	28/08/2023 16:45:17 WIB
18 SELAMET	28/08/2023 16:54:57 WIB
19 DARWANTO	28/08/2023 16:55:56 WIB
20 ERLIZAR	28/08/2023 16:56:34 WIB
21 MUHAMMAD SUFRI	28/08/2023 16:56:46 WIB
22 H. FUADY	28/08/2023 16:56:55 WIB
23 ELYAS	28/08/2023 16:57:03 WIB
24 ZULKIFLI TAMBUNAN	28/08/2023 16:57:13 WIB

25 FRIS DWI YULIANTO	28/08/2023 16:57:29 WIB
26 KUMALASARI KARTINI	28/08/2023 16:58:10 WIB
27 AMIN TRIAWAN	28/08/2023 16:58:39 WIB
28 DIMYATI	28/08/2023 16:58:40 WIB
29 H. ABDUL RAHMAN	28/08/2023 16:58:45 WIB
30 DIMYATI	28/08/2023 16:58:46 WIB
31 FAZRIN BASALAMAH	28/08/2023 16:59:21 WIB
32 NOVIS SUGIAWAN	28/08/2023 17:00:18 WIB
33 ABDUL KADIR	28/08/2023 17:00:32 WIB
34 YERMIAS PIGOME	28/08/2023 17:01:02 WIB
35 R. AKHMAD YANI SAEFUDDIN	28/08/2023 17:01:52 WIB
36 MUH. JAFAR SODDING	28/08/2023 17:03:38 WIB
37 ANDI SAPUTRO	28/08/2023 17:04:14 WIB
38 MUHAMMAD ZAINI BETAN	28/08/2023 17:04:58 WIB
39 MOHARRIADI	28/08/2023 17:05:46 WIB
40 FATHUR ROHIM	28/08/2023 17:07:06 WIB

41 H. NURDIN	28/08/2023 17:07:11 WIB
42 IMAN HADI WALUYO	28/08/2023 17:10:07 WIB
43 RATNO TIMUR	28/08/2023 17:12:30 WIB
44 ARYO TYASMORO	28/08/2023 17:17:46 WIB
45 FARIED DESEMBARDI	28/08/2023 17:17:59 WIB
46 HISAN ANIS MATTA	28/08/2023 17:19:55 WIB
47 AHMAD HAFIDZ	28/08/2023 17:21:42 WIB
48 SEPTANTRI FAZLURAHMAN	28/08/2023 17:23:17 WIB
49 GAZALBA	28/08/2023 17:23:34 WIB
50 AL HAKIM	28/08/2023 17:23:53 WIB
51 M. GUFRON SURATMAN	28/08/2023 17:29:44 WIB
52 ASTAFIED NUR ROHMAN	28/08/2023 17:31:17 WIB
53 ABQARI MUHAMMAD AL FATIH	28/08/2023 17:33:55 WIB
54 AHMADI	28/08/2023 17:42:00 WIB
55 FAKIH ZATNIKA TAUFIK	28/08/2023 17:45:22 WIB
56 TALIB SOUMENA	28/08/2023 17:55:53 WIB

57 JEFRY YOHANIS MAKALEGI	28/08/2023 17:56:24 WIB
58 LALU PAHRURROZI	28/08/2023 17:57:46 WIB
59 ONDANG SURJANA	28/08/2023 17:58:37 WIB
60 SYAMSIR	28/08/2023 17:58:42 WIB
61 EKO GUNDARTO	28/08/2023 17:59:06 WIB
62 SYAFRUDIN GORAN TOKAN	28/08/2023 17:59:12 WIB
63 IKA SEKAR MUTIARA	28/08/2023 17:59:55 WIB
64 ZAINUDDIN	28/08/2023 17:59:57 WIB
65 H. ANDI SAMSUL BAHRI MADDUKELLENG	28/08/2023 18:02:01 WIB
66 ISKANDAR	28/08/2023 18:02:21 WIB
67 MUSLIH	28/08/2023 18:57:53 WIB
68 ANDHES TAN SATRISNA	28/08/2023 18:58:34 WIB
69 AHMAD YANI	28/08/2023 18:59:19 WIB
70 YERMIAS PIGOME	28/08/2023 18:59:31 WIB
71 TATO TRISETYA	28/08/2023 19:00:39 WIB
72 NUR KHOSIM	28/08/2023 19:01:42 WIB

73 MUHAMAD YAMIN NOCH	28/08/2023 19:02:08 WIB
74 HUDZAIFAH MUHIBULLAH	28/08/2023 19:02:21 WIB
75 MUSYafa AHMAD RAHIM	28/08/2023 19:04:16 WIB
76 SUDARSONO	28/08/2023 19:05:02 WIB
77 KOMIRUDDIN	28/08/2023 19:06:23 WIB
78 FERDIA PRAKARSA	28/08/2023 19:07:04 WIB
79 YUNUS KOGOYA	28/08/2023 19:07:24 WIB
80 ARIES SUPRIADI	28/08/2023 19:08:47 WIB
81 RONALD ERWIN PATTIPAWAEJ	28/08/2023 19:09:03 WIB
82 BUDI SANTOSO	28/08/2023 19:09:08 WIB
83 JOHAN FRETS ELWARIN	28/08/2023 19:10:11 WIB
84 ASNAWI	28/08/2023 19:10:47 WIB
85 MAHYUDI	28/08/2023 19:11:07 WIB
86 ABDUSSATAR KHALIL	28/08/2023 19:11:11 WIB
87 BAGUS ZUNTORO PUTRO	28/08/2023 19:11:21 WIB
88 ANGGa SATRIA BIMA	28/08/2023 19:11:34 WIB

89 ARIF AWALUDIN	28/08/2023 19:11:41 WIB
90 ACHMAD ZAIROFI	28/08/2023 19:11:47 WIB
91 DICKY ARIANSYAH	28/08/2023 19:11:50 WIB
92 SLAMET	28/08/2023 19:11:54 WIB
93 JUNAIDI FAJRI	28/08/2023 19:11:57 WIB
94 H. BENNY JOVIAL	28/08/2023 19:11:58 WIB
95 AMRIL SUDIONO	28/08/2023 19:11:58 WIB
96 SYAMSARI	28/08/2023 19:12:05 WIB
97 MUHAMMAD IKHLAS	28/08/2023 19:12:12 WIB
98 HERI GUNAWAN	28/08/2023 19:12:17 WIB
99 AHMAD SULTHONI	28/08/2023 19:12:23 WIB
100 RISWANDI	28/08/2023 19:12:29 WIB
101 AHMAD ZAINUDDIN	28/08/2023 19:12:55 WIB
102 H. SARWONO	28/08/2023 19:12:59 WIB
103 HERMAWAN TAUFIK LAMBOTOE	28/08/2023 19:13:02 WIB
104 AKHMAD FARADIS	28/08/2023 19:13:03 WIB

105 MOHAMMAD SYAHFAN BADRI S.	28/08/2023 19:13:10 WIB
106 M. IMRON ROSADI	28/08/2023 19:13:11 WIB
107 AHMAD RIFAI RAHAWARIN	28/08/2023 19:13:23 WIB
108 ADE PUTRA WINATA	28/08/2023 19:13:26 WIB
109 H. MAHBUB	28/08/2023 19:13:46 WIB
110 SUNARDI	28/08/2023 19:14:14 WIB
111 HENDRO SULISTIYO	28/08/2023 19:14:36 WIB
112 MUHAMAD HASYIM	28/08/2023 19:14:47 WIB
113 TINA H. TAMHER	28/08/2023 19:14:51 WIB
114 AGUS PURWANTO	28/08/2023 19:14:56 WIB
115 H. ZAINUDDIN TAMBUALA	28/08/2023 19:15:38 WIB
116 MISBAKHUL MUNIR	28/08/2023 19:15:45 WIB
117 ALIMIN MUHAMMAD	28/08/2023 19:16:15 WIB
118 ASWAR	28/08/2023 19:17:00 WIB
119 ANANTO PRATIKNO	28/08/2023 19:17:31 WIB
120 ROHMANI	28/08/2023 19:17:48 WIB

121 INDRA RUKMONO	28/08/2023 19:20:16 WIB
122 SURYA YUNIZA	28/08/2023 19:20:34 WIB
123 HENDRO KUSUMA JAYA	28/08/2023 19:21:37 WIB
124 ENDY JUNAEDY K.	28/08/2023 19:21:46 WIB
125 FAUZI WAHYU MUNTORO	28/08/2023 19:22:16 WIB
126 YERMIA SILETTY	28/08/2023 19:23:49 WIB
127 ONESIMUS HELUKA	28/08/2023 19:27:21 WIB
128 JUNEf ISMALIYANTO	28/08/2023 19:27:52 WIB
129 YERMIAS PIGOME	28/08/2023 19:29:23 WIB
130 TAUFIQ HIDAYAT	28/08/2023 19:29:52 WIB
131 FIRDAUS RENUAT	28/08/2023 19:30:30 WIB
132 SYAIFUL ARIFIN	28/08/2023 19:45:57 WIB
133 ARFAN ARIFIN	28/08/2023 19:48:51 WIB
134 GUNGUN GUNAWAN	28/08/2023 19:58:45 WIB
135 ROBBY ANDRIAN	28/08/2023 20:16:01 WIB
136 RENI ANGGRAINi	28/08/2023 20:24:21 WIB

137 SIGIT FAJAR ROHMAN	28/08/2023 20:28:10 WIB
138 HENDRO SULISTIYO	28/08/2023 20:42:37 WIB
139 ALI IMRAN RAMADHAN	28/08/2023 21:05:12 WIB
140 ZADRAK ELWUAR	28/08/2023 21:07:10 WIB

Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	H. JON AFRIZAL	28/08/2023 19:00:04 WIB
2	DARWANTO	28/08/2023 19:00:13 WIB
3	THARMIZI	28/08/2023 19:00:14 WIB
4	DEDI HARYONO	28/08/2023 19:00:16 WIB
5	DIMYATI	28/08/2023 19:00:30 WIB
6	YUSRI ADDIN YUSUF	28/08/2023 19:00:32 WIB
7	MUHAMMAD SUFRI	28/08/2023 19:00:41 WIB
8	TATO TRISETYA	28/08/2023 19:00:46 WIB
9	YUSWAR HIDAYATULLAH	28/08/2023 19:00:53 WIB
10	UMAR ABDURRAHMAN	28/08/2023

	19:01:06 WIB
11 MUHAMMAD RIF'AT	28/08/2023 19:01:51 WIB
12 TUMARUDDIN	28/08/2023 19:01:57 WIB
13 ZULKIFLI TAMBUNAN	28/08/2023 19:02:02 WIB
14 MUHAMAD YAMIN NOCH	28/08/2023 19:02:15 WIB
15 NUR KHOSIM	28/08/2023 19:02:20 WIB
16 HUDZAIFAH MUHIBULLAH	28/08/2023 19:02:24 WIB
17 MUSLIH	28/08/2023 19:02:33 WIB
18 RATNO TIMUR	28/08/2023 19:04:13 WIB
19 MUHAMMAD BASUNI	28/08/2023 19:04:21 WIB
20 SUDARSONO	28/08/2023 19:05:10 WIB
21 SYAFRUDIN GORAN TOKAN	28/08/2023 19:05:50 WIB
22 JEFRY YOHANIS MAKALEGI	28/08/2023 19:06:11 WIB
23 GAZALBA	28/08/2023 19:06:12 WIB
24 H. ABDUL RAHMAN	28/08/2023 19:06:14 WIB
25 KOMIRUDDIN	28/08/2023 19:06:31 WIB
26 YUNUS KOGOYA	28/08/2023

	19:07:37 WIB
27 HARYANTO	28/08/2023 19:07:58 WIB
28 H. DODDY EKA PUTRA	28/08/2023 19:08:40 WIB
29 M. GUFRON SURATMAN	28/08/2023 19:08:49 WIB
30 BUDI SANTOSO	28/08/2023 19:09:16 WIB
31 RONALD ERWIN PATTIPAWAEJ	28/08/2023 19:09:18 WIB
32 ERLIZAR	28/08/2023 19:09:34 WIB
33 YUNUS KOGOYA	28/08/2023 19:09:46 WIB
34 JOHAN FRETS ELWARIN	28/08/2023 19:10:24 WIB
35 AHMAD YANI	28/08/2023 19:10:24 WIB
36 MUH. JAFAR SODDING	28/08/2023 19:10:42 WIB
37 ASTAFIED NUR ROHMAN	28/08/2023 19:10:53 WIB
38 ASNAWI	28/08/2023 19:10:57 WIB
39 ABDUSSATAR KHALIL	28/08/2023 19:11:17 WIB
40 MAHYUDI	28/08/2023 19:11:17 WIB
41 BAGUS ZUNTORO PUTRO	28/08/2023 19:11:26 WIB
42 EKO GUNDARTO	28/08/2023

	19:11:40 WIB
43 ANGGA SATRIA BIMA	28/08/2023 19:11:41 WIB
44 TALIB SOUMENA	28/08/2023 19:11:45 WIB
45 ANGGA SATRIA BIMA	28/08/2023 19:11:47 WIB
46 ARIF AWALUDIN	28/08/2023 19:11:51 WIB
47 H. FUADY	28/08/2023 19:11:51 WIB
48 ARYO TYASMORO	28/08/2023 19:11:52 WIB
49 DICKY ARIANSYAH	28/08/2023 19:11:54 WIB
50 JUNAIDI FAJRI	28/08/2023 19:12:00 WIB
51 JUNAIDI FAJRI	28/08/2023 19:12:00 WIB
52 AMRIL SUDIONO	28/08/2023 19:12:04 WIB
53 H. BENNY JOVIAL	28/08/2023 19:12:11 WIB
54 FARIED DESEMBARDI	28/08/2023 19:12:11 WIB
55 ACHMAD ZAIROFI	28/08/2023 19:12:12 WIB
56 ELYAS	28/08/2023 19:12:12 WIB
57 SYAMSARI	28/08/2023 19:12:12 WIB
58 MUHAMMAD IKHLAS	28/08/2023

	19:12:17 WIB
59 SELAMET	28/08/2023 19:12:18 WIB
60 SYAMSIR	28/08/2023 19:12:32 WIB
61 FRIS DWI YULIANTO	28/08/2023 19:12:33 WIB
62 ONDANG SURJANA	28/08/2023 19:12:34 WIB
63 SEPTANTRI FAZLURAHMAN	28/08/2023 19:12:35 WIB
64 FATHUR ROHIM	28/08/2023 19:12:36 WIB
65 AHMAD SULTHONI	28/08/2023 19:12:40 WIB
66 SLAMET	28/08/2023 19:12:43 WIB
67 HERI GUNAWAN	28/08/2023 19:12:45 WIB
68 AHMADI	28/08/2023 19:12:46 WIB
69 H. HAJRUL MALIK	28/08/2023 19:12:54 WIB
70 AMIN TRIAWAN	28/08/2023 19:12:55 WIB
71 TEGUH WIBOWO MULYONO	28/08/2023 19:12:57 WIB
72 SAMSANI SUDRADJAT	28/08/2023 19:13:01 WIB
73 H. SARWONO	28/08/2023 19:13:06 WIB
74 M. IMRON ROSADI	28/08/2023

	19:13:16 WIB
75 ZAINUDDIN	28/08/2023 19:13:16 WIB
76 LALU PAHRURROZI	28/08/2023 19:13:18 WIB
77 MOHAMMAD SYAHFAN BADRI S.	28/08/2023 19:13:18 WIB
78 HERMAWAN TAUFIK LAMBOTOE	28/08/2023 19:13:23 WIB
79 AHMAD ZAINUDDIN	28/08/2023 19:13:25 WIB
80 ADE PUTRA WINATA	28/08/2023 19:13:29 WIB
81 H. NURDIN	28/08/2023 19:13:31 WIB
82 AHMAD RIFAI RAHAWARIN	28/08/2023 19:13:34 WIB
83 MUHAMMAD ZAINI BETAN	28/08/2023 19:13:50 WIB
84 H. MAHBUB	28/08/2023 19:13:57 WIB
85 AKHMAD FARADIS	28/08/2023 19:14:17 WIB
86 ABDUL KADIR	28/08/2023 19:14:37 WIB
87 MUHAMMAD IKHLAS	28/08/2023 19:14:51 WIB
88 TINA H. TAMHER	28/08/2023 19:14:54 WIB
89 HENDRO SULISTIYO	28/08/2023 19:14:55 WIB
90 ISKANDAR	28/08/2023

	19:14:58 WIB
91 NOVI HERIYANTO	28/08/2023 19:15:11 WIB
92 SUHARJITO	28/08/2023 19:15:11 WIB
93 MUHAMAD HASYIM	28/08/2023 19:15:13 WIB
94 SUNARDI	28/08/2023 19:15:23 WIB
95 H. ZAINUDDIN TAMBUALA	28/08/2023 19:15:44 WIB
96 AHMAD HAFIDZ	28/08/2023 19:15:45 WIB
97 IMAN HADI WALUYO	28/08/2023 19:15:54 WIB
98 MISBAKHUL MUNIR	28/08/2023 19:15:56 WIB
99 ALIMIN MUHAMMAD	28/08/2023 19:16:25 WIB
100 AL HAKIM	28/08/2023 19:16:28 WIB
101 AL HAKIM	28/08/2023 19:16:39 WIB
102 ASWAR	28/08/2023 19:17:15 WIB
103 ANANTO PRATIKNO	28/08/2023 19:17:36 WIB
104 ROHMANI	28/08/2023 19:17:53 WIB
105 FAZRIN BASALAMAH	28/08/2023 19:18:19 WIB
106 R. AKHMAD YANI SAEFUDDIN	28/08/2023

	19:18:53 WIB
107 IKA SEKAR MUTIARA	28/08/2023 19:19:22 WIB
108 H. ANDI SAMSUL BAHRI MADDUKELLENG	28/08/2023 19:19:43 WIB
109 INDRA RUKMONO	28/08/2023 19:20:22 WIB
110 SURYA YUNIZA	28/08/2023 19:20:56 WIB
111 ENDY JUNAEDY K.	28/08/2023 19:21:54 WIB
112 HENDRO KUSUMA JAYA	28/08/2023 19:22:00 WIB
113 FAUZI WAHYU MUNTORO	28/08/2023 19:22:44 WIB
114 YERMIA SILETTY	28/08/2023 19:25:27 WIB
115 ONESIMUS HELUKA	28/08/2023 19:27:28 WIB
116 JUNEFS ISMALIYANTO	28/08/2023 19:28:14 WIB
117 H. MAHBUB	28/08/2023 19:28:25 WIB
118 H. MAHBUB	28/08/2023 19:28:26 WIB
119 H. MAHBUB	28/08/2023 19:28:27 WIB
120 H. MAHBUB	28/08/2023 19:28:27 WIB
121 TAUFIQ HIDAYAT	28/08/2023 19:29:58 WIB
122 FIRDAUS RENUAT	28/08/2023

	19:30:43 WIB
123 YERMIAS PIGOME	28/08/2023 19:31:09 WIB
124 SAIFUL AHMAD	28/08/2023 19:35:27 WIB
125 KUMALASARI KARTINI	28/08/2023 19:37:41 WIB
126 YERMIAS PIGOME	28/08/2023 19:41:09 WIB
127 SYAIFUL ARIFIN	28/08/2023 19:46:02 WIB
128 ARFAN ARIFIN	28/08/2023 19:49:00 WIB
129 YERMIAS PIGOME	28/08/2023 19:50:27 WIB
130 NOVIS SUGIAWAN	28/08/2023 19:51:28 WIB
131 GUNGUN GUNAWAN	28/08/2023 19:58:55 WIB
132 ROBBY ANDRIAN	28/08/2023 20:12:53 WIB
133 RENI ANGGRAINI	28/08/2023 20:24:35 WIB
134 SIGIT FAJAR ROHMAN	28/08/2023 20:28:21 WIB
135 MUSYafa AHMAD RAHIM	28/08/2023 20:38:16 WIB
136 AGUS PURWANTO	28/08/2023 20:46:13 WIB
137 HISAN ANIS MATTA	28/08/2023 21:04:12 WIB
138 ALI IMRAN RAMADHAN	28/08/2023

139 ZADRAK ELWUAR

21:05:15 WIB

28/08/2023

21:07:14 WIB

Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	ANGGA SATRIA BIMA	29/08/2023 07:30:19 WIB
2	THARMIZI	29/08/2023 07:30:23 WIB
3	M. GUFRON SURATMAN	29/08/2023 07:31:05 WIB
4	H. JON AFRIZAL	29/08/2023 07:31:06 WIB
5	SYAMSIR	29/08/2023 07:31:22 WIB
6	EKO GUNDARTO	29/08/2023 07:31:29 WIB
7	TEGUH WIBOWO MULYONO	29/08/2023 07:31:42 WIB
8	DEDI HARYONO	29/08/2023 07:31:56 WIB
9	ZAINUDDIN	29/08/2023 07:31:58 WIB
10	UMAR ABDURRAHMAN	29/08/2023 07:32:28 WIB
11	NUR KHOSIM	29/08/2023 07:32:30 WIB
12	SYAIFUL ARIFIN	29/08/2023 07:32:39 WIB
13	MAHYUDI	

	29/08/2023 07:33:10 WIB
14 HARYANTO	29/08/2023 07:33:49 WIB
15 ZULKIFLI TAMBUNAN	29/08/2023 07:34:57 WIB
16 H. DODDY EKA PUTRA	29/08/2023 07:35:53 WIB
17 YUSWAR HIDAYATULLAH	29/08/2023 07:38:03 WIB
18 SEPTANTRI FAZLURAHMAN	29/08/2023 07:39:22 WIB
19 AHMAD SULTHONI	29/08/2023 07:39:32 WIB
20 GAZALBA	29/08/2023 07:40:19 WIB
21 AHMAD YANI	29/08/2023 07:40:28 WIB
22 JOHAN FRETS ELWARIN	29/08/2023 07:40:50 WIB
23 YUSRI ADDIN YUSUF	29/08/2023 07:40:58 WIB
24 SUDARSONO	29/08/2023 07:41:12 WIB
25 ZADRAK ELWUAR	29/08/2023 07:41:22 WIB
26 ANDHES TAN SATRISNA	29/08/2023 07:41:48 WIB
27 YUNUS KOGOYA	29/08/2023 07:42:31 WIB
28 ARIES SUPRIADI	29/08/2023 07:42:33 WIB
29 ABDUSSATAR KHALIL	

	29/08/2023 07:42:36 WIB
30 HERI GUNAWAN	29/08/2023 07:43:22 WIB
31 FAKIH ZATNIKA TAUFIK	29/08/2023 07:43:27 WIB
32 TATO TRISETYA	29/08/2023 07:43:38 WIB
33 ASTAFIED NUR ROHMAN	29/08/2023 07:44:02 WIB
34 RISWANDI	29/08/2023 07:44:13 WIB
35 HENDRO KUSUMA JAYA	29/08/2023 07:44:30 WIB
36 MUHAMMAD SUFRI	29/08/2023 07:45:06 WIB
37 MUSLIH	29/08/2023 07:45:07 WIB
38 FERDIA PRAKARSA	29/08/2023 07:45:17 WIB
39 RENI ANGGRAINI	29/08/2023 07:45:19 WIB
40 ARDIN ANGGAWIRYA KARUNDENG	29/08/2023 07:45:33 WIB
41 TALIB SOUMENA	29/08/2023 07:45:37 WIB
42 SYAFRUDIN GORAN TOKAN	29/08/2023 07:45:55 WIB
43 BUDI SANTOSO	29/08/2023 07:46:19 WIB
44 H. FUADY	29/08/2023 07:46:19 WIB
45 MUHAMMAD BASUNI	

	29/08/2023 07:46:21 WIB
46 ERLIZAR	29/08/2023 07:46:37 WIB
47 RATNO TIMUR	29/08/2023 07:46:50 WIB
48 ISKANDAR	29/08/2023 07:46:55 WIB
49 SYAMSARI	29/08/2023 07:47:32 WIB
50 JEFRY YOHANIS MAKALEGI	29/08/2023 07:47:36 WIB
51 FIRDAUS RENUAT	29/08/2023 07:48:46 WIB
52 H. BENNY JOVIAL	29/08/2023 07:49:01 WIB
53 H. RAIHAN ISKANDAR	29/08/2023 07:49:03 WIB
54 AMRIL SUDIONO	29/08/2023 07:49:34 WIB
55 HISAN ANIS MATTA	29/08/2023 07:49:44 WIB
56 MUHAMAD HASYIM	29/08/2023 07:49:50 WIB
57 AGUS PURWANTO	29/08/2023 07:49:58 WIB
58 JEFFRY LEONARD P. TOBING	29/08/2023 07:50:06 WIB
59 HENDRO SULISTIYO	29/08/2023 07:50:10 WIB
60 ASNAWI	29/08/2023 07:50:20 WIB
61 KUMALASARI KARTINI	

	29/08/2023 07:50:24 WIB
62 SUHARJITO	29/08/2023 07:50:44 WIB
63 ALIMIN MUHAMMAD	29/08/2023 07:50:51 WIB
64 R. AKHMAD YANI SAEFUDDIN	29/08/2023 07:50:54 WIB
65 FATHUR ROHIM	29/08/2023 07:50:57 WIB
66 SAMSANI SUDRADJAT	29/08/2023 07:51:03 WIB
67 M. IMRON ROSADI	29/08/2023 07:51:20 WIB
68 ACHMAD ZAIROFI	29/08/2023 07:51:20 WIB
69 SUNARDI	29/08/2023 07:51:26 WIB
70 SELAMET	29/08/2023 07:51:28 WIB
71 ARYO TYASMORO	29/08/2023 07:51:30 WIB
72 HUDZAIFAH MUHIBULLAH	29/08/2023 07:51:32 WIB
73 DICKY ARIANSYAH	29/08/2023 07:51:47 WIB
74 AL HAKIM	29/08/2023 07:52:10 WIB
75 H. MAHBUB	29/08/2023 07:52:19 WIB
76 MUH. JAFAR SODDING	29/08/2023 07:52:24 WIB
77 ZUHRIA RAUF	

	29/08/2023 07:52:29 WIB
78 RONALD ERWIN PATTIPAWAEJ	29/08/2023 07:52:43 WIB
79 ASWAR	29/08/2023 07:52:43 WIB
80 H. MAHBUB	29/08/2023 07:52:47 WIB
81 ADE PUTRA WINATA	29/08/2023 07:52:48 WIB
82 HERMAWAN TAUFIK LAMBOTOE	29/08/2023 07:52:49 WIB
83 SAIFUL AHMAD	29/08/2023 07:52:50 WIB
84 AHMAD ZAINUDDIN	29/08/2023 07:52:56 WIB
85 FRIS DWI YULIANTO	29/08/2023 07:53:09 WIB
86 ALI IMRAN RAMADHAN	29/08/2023 07:53:17 WIB
87 KOMIRUDDIN	29/08/2023 07:53:27 WIB
88 JUNEK ISMALIYANTO	29/08/2023 07:53:28 WIB
89 TAUFIQ HIDAYAT	29/08/2023 07:53:33 WIB
90 MUHAMMAD RIF'AT	29/08/2023 07:54:01 WIB
91 MUSYafa AHMAD RAHIM	29/08/2023 07:54:05 WIB
92 ROBBY ANDRIAN	29/08/2023 07:54:10 WIB
93 BAGUS ZUNTORO PUTRO	

	29/08/2023 07:54:18 WIB
94 AHMAD ZAINUDDIN	29/08/2023 07:54:21 WIB
95 JUNAIDI FAJRI	29/08/2023 07:54:51 WIB
96 H. ZAINUDDIN TAMBUALA	29/08/2023 07:55:17 WIB
97 H. NURDIN	29/08/2023 07:55:23 WIB
98 AHMADI	29/08/2023 07:55:51 WIB
99 NOVI HERIYANTO	29/08/2023 07:55:54 WIB
100 MOHAMMAD SYAHFAN BADRI S.	29/08/2023 07:56:32 WIB
101 DEDI HARYONO	29/08/2023 07:56:35 WIB
102 ONDANG SURJANA	29/08/2023 07:57:10 WIB
103 FAZRIN BASALAMAH	29/08/2023 07:57:42 WIB
104 ANDI SAPUTRO	29/08/2023 07:57:54 WIB
105 ENDY JUNAEDY K.	29/08/2023 07:58:01 WIB
106 Suryadi M Ali	29/08/2023 07:58:37 WIB
107 AHMAD RIFAI RAHAWARIN	29/08/2023 07:59:03 WIB
108 FARIED DESEMBARDI	29/08/2023 07:59:07 WIB
109 ARIF AWALUDIN	

	29/08/2023 07:59:35 WIB
110 AKHMAD FARADIS	29/08/2023 07:59:40 WIB
111 Saldi Matta	29/08/2023 07:59:50 WIB
112 EFRIZA	29/08/2023 07:59:53 WIB
113 H. ABDUL RAHMAN	29/08/2023 08:00:11 WIB
114 ABDUL KADIR	29/08/2023 08:00:22 WIB
115 DIMYATI	29/08/2023 08:01:30 WIB
116 YERMIA SILETTY	29/08/2023 08:01:32 WIB
117 IKA SEKAR MUTIARA	29/08/2023 08:01:56 WIB
118 ANANTO PRATIKNO	29/08/2023 08:02:25 WIB
119 DARWANTO	29/08/2023 08:02:32 WIB
120 MUHAMMAD IKHLAS	29/08/2023 08:02:33 WIB
121 ONESIMUS HELUKA	29/08/2023 08:03:30 WIB
122 TUMARUDDIN	29/08/2023 08:06:55 WIB
123 H. ANDI SAMSUL BAHRI MADDUKELLENG	29/08/2023 08:07:18 WIB
124 NOVIS SUGIAWAN	29/08/2023 08:08:44 WIB
125 LALU PAHRURROZI	

	29/08/2023 08:09:25 WIB
126 SLAMET	29/08/2023 08:09:37 WIB
127 MUHAMAD YAMIN NOCH	29/08/2023 08:11:00 WIB
128 IMAN HADI WALUYO	29/08/2023 08:13:35 WIB
129 ARFAN ARIFIN	29/08/2023 08:15:06 WIB
130 SIMSON PAYAGE	29/08/2023 08:16:26 WIB
131 INDRA RUKMONO	29/08/2023 08:17:45 WIB
132 AMIN TRIAWAN	29/08/2023 08:20:30 WIB
133 SIGIT FAJAR ROHMAN	29/08/2023 08:36:57 WIB
134 AHMAD HAFIDZ	29/08/2023 08:38:38 WIB
135 GUNGUN GUNAWAN	29/08/2023 08:41:39 WIB
136 SURYA YUNIZA	29/08/2023 09:00:57 WIB
137 MOHARRIADI	29/08/2023 09:03:00 WIB
138 ABQARI MUHAMMAD AL FATIH	29/08/2023 09:03:18 WIB
139 ABQARI MUHAMMAD AL FATIH	29/08/2023 09:04:03 WIB
140 SARAH AZZAHRA	29/08/2023 09:04:49 WIB
141 MISBAKHUL MUNIR	

	29/08/2023 09:06:51 WIB
142 DEDI HARYONO	29/08/2023 09:17:57 WIB
143 H. HAJRUL MALIK	29/08/2023 09:26:55 WIB
144 ROHMANI	29/08/2023 09:32:55 WIB
145 ELYAS	29/08/2023 09:34:40 WIB
146 MUHAMMAD ZAINI BETAN	29/08/2023 09:40:38 WIB
147 YASEN	29/08/2023 09:52:58 WIB
148 ANDHES TAN SATRISNA	29/08/2023 10:13:40 WIB

Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	THARMIZI	29/08/2023 10:00:52 WIB
2	DEDI HARYONO	29/08/2023 10:02:00 WIB
3	TAUFIQ HIDAYAT	29/08/2023 10:03:46 WIB
4	SUNARDI	29/08/2023 10:04:58 WIB
5	SELAMET	29/08/2023 10:05:14 WIB
6	ARFAN ARIFIN	29/08/2023 10:05:24 WIB

7 BUDI SANTOSO	29/08/2023 10:06:08 WIB
8 MUSLIH	29/08/2023 10:06:33 WIB
9 ASNAWI	29/08/2023 10:06:46 WIB
10 RATNO TIMUR	29/08/2023 10:06:54 WIB
11 HENDRO KUSUMA JAYA	29/08/2023 10:07:20 WIB
12 YUSRI ADDIN YUSUF	29/08/2023 10:07:42 WIB
13 TUMARUDDIN	29/08/2023 10:08:20 WIB
14 AHMAD YANI	29/08/2023 10:08:58 WIB
15 SEPTANTRI FAZLURAHMAN	29/08/2023 10:09:04 WIB
16 UMAR ABDURRAHMAN	29/08/2023 10:10:33 WIB
17 MUHAMMAD RIF'AT	29/08/2023 10:10:44 WIB
18 YUSWAR HIDAYATULLAH	29/08/2023 10:10:51 WIB
19 GAZALBA	29/08/2023 10:11:11 WIB
20 H. JON AFRIZAL	29/08/2023 10:11:28 WIB
21 HERMAWAN TAUFIK LAMBOTOE	29/08/2023 10:11:33 WIB
22 SYAFRUDIN GORAN TOKAN	29/08/2023 10:11:48 WIB

23 SUHARJITO	29/08/2023 10:11:52 WIB
24 NOVIS SUGIAWAN	29/08/2023 10:11:54 WIB
25 JOHAN FRETS ELWARIN	29/08/2023 10:11:56 WIB
26 AMRIL SUDIONO	29/08/2023 10:12:00 WIB
27 YERMIA SILETTY	29/08/2023 10:12:07 WIB
28 SLAMET	29/08/2023 10:12:12 WIB
29 ACHMAD ZAIROFI	29/08/2023 10:12:29 WIB
30 ANDHES TAN SATRISNA	29/08/2023 10:13:44 WIB
31 MUH. JAFAR SODDING	29/08/2023 10:14:46 WIB
32 AHMAD SULTHONI	29/08/2023 10:14:50 WIB
33 ANGGA SATRIA BIMA	29/08/2023 10:14:52 WIB
34 IKA SEKAR MUTIARA	29/08/2023 10:14:53 WIB
35 HISAN ANIS MATTA	29/08/2023 10:14:57 WIB
36 FARIED DESEMBARDI	29/08/2023 10:14:58 WIB
37 RONALD ERWIN PATTIPAWAEJ	29/08/2023 10:14:59 WIB
38 SUDARSONO	29/08/2023 10:15:03 WIB

39 H. BENNY JOVIAL	29/08/2023 10:15:03 WIB
40 MUHAMMAD BASUNI	29/08/2023 10:15:11 WIB
41 TEGUH WIBOWO MULYONO	29/08/2023 10:15:18 WIB
42 ZULKIFLI TAMBUNAN	29/08/2023 10:15:20 WIB
43 ASWAR	29/08/2023 10:15:25 WIB
44 ISKANDAR	29/08/2023 10:15:28 WIB
45 EKO GUNDARTO	29/08/2023 10:15:28 WIB
46 DARWANTO	29/08/2023 10:15:39 WIB
47 RENI ANGGRAINI	29/08/2023 10:15:42 WIB
48 ARYO TYASMORO	29/08/2023 10:15:48 WIB
49 H. MAHBUB	29/08/2023 10:15:49 WIB
50 TATO TRISETYA	29/08/2023 10:15:55 WIB
51 FIRDAUS RENUAT	29/08/2023 10:15:58 WIB
52 SIGIT FAJAR ROHMAN	29/08/2023 10:16:13 WIB
53 ONESIMUS HELUKA	29/08/2023 10:16:16 WIB
54 AKHMAD FARADIS	29/08/2023 10:16:29 WIB

55 RISWANDI	29/08/2023 10:16:38 WIB
56 YASEN	29/08/2023 10:16:55 WIB
57 SAIFUL AHMAD	29/08/2023 10:17:00 WIB
58 ABDUSSATAR KHALIL	29/08/2023 10:17:02 WIB
59 MUHAMAD HASYIM	29/08/2023 10:17:07 WIB
60 R. AKHMAD YANI SAEFUDDIN	29/08/2023 10:17:08 WIB
61 ARIF AWALUDIN	29/08/2023 10:17:12 WIB
62 JUNAIDI FAJRI	29/08/2023 10:17:12 WIB
63 GUNGUN GUNAWAN	29/08/2023 10:17:16 WIB
64 H. ANDI SAMSUL BAHRI MADDUKELLENG	29/08/2023 10:17:20 WIB
65 SARAH HANDAYANI	29/08/2023 10:17:34 WIB
66 IMAN HADI WALUYO	29/08/2023 10:17:36 WIB
67 NOVI HERIYANTO	29/08/2023 10:17:37 WIB
68 AHMAD HAFIDZ	29/08/2023 10:17:41 WIB
69 ALIMIN MUHAMMAD	29/08/2023 10:17:44 WIB
70 KUMALASARI KARTINI	29/08/2023 10:17:44 WIB

71 ADE PUTRA WINATA	29/08/2023 10:17:44 WIB
72 FERDIA PRAKARSA	29/08/2023 10:17:44 WIB
73 SURYA YUNIZA	29/08/2023 10:17:55 WIB
74 SYAMSIR	29/08/2023 10:18:13 WIB
75 H. RAIHAN ISKANDAR	29/08/2023 10:18:17 WIB
76 MAHYUDI	29/08/2023 10:18:27 WIB
77 ASTAFIED NUR ROHMAN	29/08/2023 10:18:32 WIB
78 H. HAJRUL MALIK	29/08/2023 10:18:36 WIB
79 FATHUR ROHIM	29/08/2023 10:18:41 WIB
80 AL HAKIM	29/08/2023 10:18:48 WIB
81 LALU PAHRURROZI	29/08/2023 10:19:05 WIB
82 HARYANTO	29/08/2023 10:19:15 WIB
83 MUHAMMAD SUFRI	29/08/2023 10:19:24 WIB
84 ENDY JUNAEDY K.	29/08/2023 10:19:36 WIB
85 ENDY JUNAEDY K.	29/08/2023 10:19:36 WIB
86 YUNUS KOGOYA	29/08/2023 10:19:37 WIB

87 KOMIRUDDIN	29/08/2023 10:19:44 WIB
88 ROBBY ANDRIAN	29/08/2023 10:20:13 WIB
89 MOHARRIADI	29/08/2023 10:20:25 WIB
90 H. ABDUL RAHMAN	29/08/2023 10:21:08 WIB
91 SYAMSARI	29/08/2023 10:21:14 WIB
92 MUHAMMAD ZAINI BETAN	29/08/2023 10:21:14 WIB
93 FAZRIN BASALAMAH	29/08/2023 10:21:30 WIB
94 Suryadi M Ali	29/08/2023 10:21:32 WIB
95 ROHMANI	29/08/2023 10:21:41 WIB
96 Saldi Matta	29/08/2023 10:22:17 WIB
97 EFRIZA	29/08/2023 10:22:25 WIB
98 DIMYATI	29/08/2023 10:24:20 WIB
99 AGUS PURWANTO	29/08/2023 10:24:25 WIB
100 ELYAS	29/08/2023 10:24:30 WIB
101 ABDUL KADIR	29/08/2023 10:24:30 WIB
102 M. IMRON ROSADI	29/08/2023 10:25:03 WIB

103 SYAIFUL ARIFIN	29/08/2023 10:26:15 WIB
104 H. FUADY	29/08/2023 10:26:20 WIB
105 FRIS DWI YULIANTO	29/08/2023 10:27:15 WIB
106 MUSYafa AHMAD RAHIM	29/08/2023 10:27:33 WIB
107 MUHAMAD YAMIN NOCH	29/08/2023 10:28:18 WIB
108 ANANTO PRATIKNO	29/08/2023 10:28:20 WIB
109 JUNEf ISMALIYANTO	29/08/2023 10:28:44 WIB
110 YERMIA SILETTY	29/08/2023 10:32:43 WIB
111 H. DODDY EKA PUTRA	29/08/2023 10:33:25 WIB
112 YERMIAS PIGOME	29/08/2023 10:35:54 WIB
113 DICKY ARIANSYAH	29/08/2023 10:45:01 WIB
114 TINA H. TAMHER	29/08/2023 10:45:37 WIB
115 SAMSANI SUDRADJAT	29/08/2023 10:48:26 WIB
116 Mohammad Abizar Hardianto	29/08/2023 10:48:51 WIB
117 FAKIH ZATNIKA TAUFIK	29/08/2023 10:49:29 WIB
118 AMIN TRIAWAN	29/08/2023 10:49:57 WIB

119 AHMADI	29/08/2023 10:58:46 WIB
120 M. GUFRON SURATMAN	29/08/2023 11:00:31 WIB
121 INDRA RUKMONO	29/08/2023 11:02:36 WIB
122 ZAINUDDIN	29/08/2023 11:09:40 WIB
123 AHMAD ZAINUDDIN	29/08/2023 11:14:11 WIB
124 SARAH AZZAHRA	29/08/2023 11:25:18 WIB
125 JEFFRY LEONARD P. TOBING	29/08/2023 11:26:42 WIB
126 ERLIZAR	29/08/2023 11:28:34 WIB
127 JEFRY YOHANIS MAKALEGI	29/08/2023 11:29:19 WIB
128 MOHAMMAD SYAHFAN BADRI S.	29/08/2023 11:32:00 WIB
129 TALIB SOUMENA	29/08/2023 11:43:44 WIB
130 BAGUS ZUNTORO PUTRO	29/08/2023 11:47:20 WIB
131 MISBAKHUL MUNIR	29/08/2023 11:47:39 WIB
132 HENDRO SULISTIYO	29/08/2023 11:50:53 WIB
133 AHMAD RIFAI RAHAWARIN	29/08/2023 11:52:41 WIB

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	ARFAN ARIFIN	29/08/2023 13:01:31 WIB
2	ROBBY ANDRIAN	29/08/2023 13:01:34 WIB
3	YUSWAR HIDAYATULLAH	29/08/2023 13:01:48 WIB
4	H. JON AFRIZAL	29/08/2023 13:03:37 WIB
5	SEPTANTRI FAZLURAHMAN	29/08/2023 13:03:44 WIB
6	ADE PUTRA WINATA	29/08/2023 13:04:31 WIB
7	MUHAMMAD RIF'AT	29/08/2023 13:04:38 WIB
8	NOVI HERIYANTO	29/08/2023 13:05:59 WIB
9	THARMIZI	29/08/2023 13:06:33 WIB
10	DEDI HARYONO	29/08/2023 13:06:43 WIB
11	HERI GUNAWAN	29/08/2023 13:06:46 WIB
12	H. ABDUL RAHMAN	29/08/2023 13:06:48 WIB
13	AHMAD SULTHONI	29/08/2023 13:06:56 WIB
14	JOHAN FRETS ELWARIN	29/08/2023 13:07:35 WIB
15	FIRDAUS RENUAT	29/08/2023

	13:07:43 WIB
16 ZADRAK ELWUAR	29/08/2023 13:08:09 WIB
17 R. AKHMAD YANI SAEFUDDIN	29/08/2023 13:08:15 WIB
18 AHMAD YANI	29/08/2023 13:08:19 WIB
19 TEGUH WIBOWO MULYONO	29/08/2023 13:08:29 WIB
20 ANANTO PRATIKNO	29/08/2023 13:09:31 WIB
21 H. DODDY EKA PUTRA	29/08/2023 13:10:16 WIB
22 M. GUFRON SURATMAN	29/08/2023 13:10:30 WIB
23 M. GUFRON SURATMAN	29/08/2023 13:10:30 WIB
24 HUDZAIFAH MUHIBULLAH	29/08/2023 13:10:35 WIB
25 H. RIDWAN THALIB	29/08/2023 13:10:44 WIB
26 YUSRI ADDIN YUSUF	29/08/2023 13:10:51 WIB
27 INDRA RUKMONO	29/08/2023 13:11:08 WIB
28 H. BENNY JOVIAL	29/08/2023 13:11:10 WIB
29 RISWANDI	29/08/2023 13:11:16 WIB
30 UMAR ABDURRAHMAN	29/08/2023 13:11:19 WIB
31 FRIS DWI YULIANTO	29/08/2023

	13:11:20 WIB
32 TATO TRISETYA	29/08/2023 13:11:21 WIB
33 BUDI SANTOSO	29/08/2023 13:11:24 WIB
34 M. IMRON ROSADI	29/08/2023 13:11:37 WIB
35 HENDRO SULISTIYO	29/08/2023 13:11:50 WIB
36 ASNAWI	29/08/2023 13:11:52 WIB
37 RONALD ERWIN PATTIPAWAEJ	29/08/2023 13:11:53 WIB
38 AHMAD HAFIDZ	29/08/2023 13:11:55 WIB
39 RATNO TIMUR	29/08/2023 13:11:55 WIB
40 AMRIL SUDIONO	29/08/2023 13:12:02 WIB
41 AHMADI	29/08/2023 13:12:06 WIB
42 ONESIMUS HELUKA	29/08/2023 13:12:08 WIB
43 ZULKIFLI TAMBUNAN	29/08/2023 13:12:10 WIB
44 ASTAFIED NUR ROHMAN	29/08/2023 13:12:20 WIB
45 MUHAMAD HASYIM	29/08/2023 13:12:21 WIB
46 SYAMSIR	29/08/2023 13:12:32 WIB
47 ERLIZAR	29/08/2023

	13:12:35 WIB
48 HENDRO KUSUMA JAYA	29/08/2023 13:12:40 WIB
49 HERMAWAN TAUFIK LAMBOTOE	29/08/2023 13:12:46 WIB
50 ISKANDAR	29/08/2023 13:12:53 WIB
51 IKA SEKAR MUTIARA	29/08/2023 13:13:02 WIB
52 SUHARJITO	29/08/2023 13:13:02 WIB
53 SARAH HANDAYANI	29/08/2023 13:13:15 WIB
54 FARIED DESEMBARDI	29/08/2023 13:13:31 WIB
55 MOHAMMAD SYAHFAN BADRI S.	29/08/2023 13:13:34 WIB
56 MUH. JAFAR SODDING	29/08/2023 13:13:35 WIB
57 SYAMSARI	29/08/2023 13:13:40 WIB
58 AGUS PURWANTO	29/08/2023 13:13:44 WIB
59 JUNEK ISMALIYANTO	29/08/2023 13:13:45 WIB
60 BAGUS ZUNTORO PUTRO	29/08/2023 13:14:22 WIB
61 ALI IMRAN RAMADHAN	29/08/2023 13:14:28 WIB
62 FERDIA PRAKARSA	29/08/2023 13:15:06 WIB
63 ZUHRIA RAUF	29/08/2023

	13:15:14 WIB
64 AMIN TRIAWAN	29/08/2023 13:15:28 WIB
65 SAMSANI SUDRADJAT	29/08/2023 13:16:39 WIB
66 ANDHES TAN SATRISNA	29/08/2023 13:17:11 WIB
67 HARYANTO	29/08/2023 13:17:31 WIB
68 H. FUADY	29/08/2023 13:17:33 WIB
69 SYAFRUDIN GORAN TOKAN	29/08/2023 13:17:53 WIB
70 YERMIA SILETTY	29/08/2023 13:17:58 WIB
71 Mohammad Abizar Hardianto	29/08/2023 13:18:01 WIB
72 ARIF AWALUDIN	29/08/2023 13:18:09 WIB
73 TINA H. TAMHER	29/08/2023 13:18:15 WIB
74 H. NURDIN	29/08/2023 13:18:23 WIB
75 ALIMIN MUHAMMAD	29/08/2023 13:18:23 WIB
76 H. RAIHAN ISKANDAR	29/08/2023 13:18:24 WIB
77 SUNARDI	29/08/2023 13:18:27 WIB
78 TUMARUDDIN	29/08/2023 13:18:27 WIB
79 H. ANDI SAMSUL BAHRI MADDUKELLENG	29/08/2023

	13:18:31 WIB
80 SIGIT FAJAR ROHMAN	29/08/2023 13:18:33 WIB
81 GAZALBA	29/08/2023 13:18:39 WIB
82 DIMYATI	29/08/2023 13:18:47 WIB
83 ACHMAD ZAIROFI	29/08/2023 13:18:52 WIB
84 MUSLIH	29/08/2023 13:18:57 WIB
85 Suryadi M Ali	29/08/2023 13:19:09 WIB
86 JEFRY YOHANIS MAKALEGI	29/08/2023 13:19:13 WIB
87 EKO GUNDARTO	29/08/2023 13:19:33 WIB
88 Saldi Matta	29/08/2023 13:19:35 WIB
89 TALIB SOUMENA	29/08/2023 13:19:36 WIB
90 H. MAHBUB	29/08/2023 13:19:50 WIB
91 ASWAR	29/08/2023 13:19:55 WIB
92 DARWANTO	29/08/2023 13:20:00 WIB
93 FAUZI WAHYU MUNTORO	29/08/2023 13:20:02 WIB
94 LALU PAHRURROZI	29/08/2023 13:20:05 WIB
95 AKHMAD FARADIS	29/08/2023

	13:20:09 WIB
96 ONDANG SURJANA	29/08/2023 13:20:12 WIB
97 H. MAHBUB	29/08/2023 13:20:17 WIB
98 KUMALASARI KARTINI	29/08/2023 13:20:17 WIB
99 H. MAHBUB	29/08/2023 13:20:24 WIB
100 HISAN ANIS MATTA	29/08/2023 13:20:50 WIB
101 FATHUR ROHIM	29/08/2023 13:21:08 WIB
102 ENDY JUNAEDY K.	29/08/2023 13:21:31 WIB
103 ARDIN ANGGAWIRYA KARUNDENG	29/08/2023 13:21:32 WIB
104 ANDI SAPUTRO	29/08/2023 13:21:59 WIB
105 MUHAMMAD ZAINI BETAN	29/08/2023 13:22:24 WIB
106 RENI ANGGRAINI	29/08/2023 13:23:17 WIB
107 SELAMET	29/08/2023 13:23:52 WIB
108 KOMIRUDDIN	29/08/2023 13:24:18 WIB
109 TAUFIQ HIDAYAT	29/08/2023 13:24:33 WIB
110 NUR KHOSIM	29/08/2023 13:24:39 WIB
111 SAIFUL AHMAD	29/08/2023

	13:24:51 WIB
112 ANGGA SATRIA BIMA	29/08/2023 13:25:01 WIB
113 M. AGUS AWALUS SHOIM	29/08/2023 13:25:30 WIB
114 H. HAJRUL MALIK	29/08/2023 13:27:12 WIB
115 DICKY ARIANSYAH	29/08/2023 13:27:39 WIB
116 AHMAD RIFAI RAHAWARIN	29/08/2023 13:28:40 WIB
117 MAHYUDI	29/08/2023 13:30:50 WIB
118 JEFFRY LEONARD P. TOBING	29/08/2023 13:31:20 WIB
119 ZAINUDDIN	29/08/2023 13:31:22 WIB
120 JUNAIDI FAJRI	29/08/2023 13:31:50 WIB
121 GUNGUN GUNAWAN	29/08/2023 13:32:28 WIB
122 SLAMET	29/08/2023 13:37:51 WIB
123 ROHMANI	29/08/2023 13:39:24 WIB
124 SYAIFUL ARIFIN	29/08/2023 13:39:54 WIB
125 FAKIH ZATNIKA TAUFIK	29/08/2023 13:41:25 WIB
126 ABDUL KADIR	29/08/2023 13:43:39 WIB
127 EFRIZA	29/08/2023

	13:45:37 WIB
128 ARYO TYASMORO	29/08/2023 13:46:02 WIB
129 ABQARI MUHAMMAD AL FATIH	29/08/2023 13:51:52 WIB
130 FAZRIN BASALAMAH	29/08/2023 13:52:08 WIB
131 ABQARI MUHAMMAD AL FATIH	29/08/2023 13:52:22 WIB
132 AL HAKIM	29/08/2023 13:55:00 WIB
133 SURYA YUNIZA	29/08/2023 13:55:59 WIB
134 ELYAS	29/08/2023 13:58:13 WIB
135 NOVIS SUGIAWAN	29/08/2023 13:58:39 WIB
136 SARAH AZZAHRA	29/08/2023 14:01:50 WIB
137 MUHAMMAD SUFRI	29/08/2023 14:04:15 WIB
138 H. SARWONO	29/08/2023 14:13:52 WIB
139 SIMSON PAYAGE	29/08/2023 14:16:01 WIB
140 MISBAKHUL MUNIR	29/08/2023 14:18:06 WIB
141 MOHARRIADI	29/08/2023 14:24:56 WIB
142 MUHAMAD YAMIN NOCH	29/08/2023 14:30:08 WIB
143 IMAN HADI WALUYO	29/08/2023

	14:41:09 WIB
144 AHMAD ZAINUDDIN	
	29/08/2023
	14:46:46 WIB

Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	H. JON AFRIZAL	30/08/2023 08:30:13 WIB
2	H. RAIHAN ISKANDAR	30/08/2023 08:30:53 WIB
3	MUSLIH	30/08/2023 08:31:48 WIB
4	ARFAN ARIFIN	30/08/2023 08:33:04 WIB
5	UMAR ABDURRAHMAN	30/08/2023 08:33:43 WIB
6	SEPTANTRI FAZLURAHMAN	30/08/2023 08:33:45 WIB
7	RATNO TIMUR	30/08/2023 08:34:07 WIB
8	TEGUH WIBOWO MULYONO	30/08/2023 08:34:11 WIB
9	THARMIZI	30/08/2023 08:35:19 WIB
10	MUHAMMAD RIF'AT	30/08/2023 08:35:38 WIB
11	EKO GUNDARTO	30/08/2023 08:35:58 WIB
12	Mohammad Abizar Hardianto	30/08/2023 08:36:06 WIB

13 DEDI HARYONO	30/08/2023 08:36:07 WIB
14 ANGGA SATRIA BIMA	30/08/2023 08:36:34 WIB
15 AHMAD ZAINUDDIN	30/08/2023 08:37:10 WIB
16 YUSWAR HIDAYATULLAH	30/08/2023 08:37:43 WIB
17 ROBBY ANDRIAN	30/08/2023 08:37:56 WIB
18 M. GUFRON SURATMAN	30/08/2023 08:38:41 WIB
19 HARYANTO	30/08/2023 08:38:46 WIB
20 NOVI HERIYANTO	30/08/2023 08:38:46 WIB
21 AHMAD SULTHONI	30/08/2023 08:39:18 WIB
22 BAGUS ZUNTORO PUTRO	30/08/2023 08:39:36 WIB
23 ISKANDAR	30/08/2023 08:40:31 WIB
24 ARIF AWALUDIN	30/08/2023 08:40:33 WIB
25 YUSRI ADDIN YUSUF	30/08/2023 08:40:45 WIB
26 SYAFRUDIN GORAN TOKAN	30/08/2023 08:40:54 WIB
27 RONALD ERWIN PATTIPAWAEJ	30/08/2023 08:41:00 WIB
28 SIGIT FAJAR ROHMAN	30/08/2023 08:41:03 WIB

29 SYAMSARI	30/08/2023 08:41:13 WIB
30 MUHAMAD HASYIM	30/08/2023 08:41:20 WIB
31 ARDIN ANGGAWIRYA KARUNDENG	30/08/2023 08:41:39 WIB
32 ASTAFIED NUR ROHMAN	30/08/2023 08:41:55 WIB
33 YERMIA SILETTY	30/08/2023 08:41:55 WIB
34 H. AMIN TRIAWAN	30/08/2023 08:41:57 WIB
35 ACHMAD ZAIROFI	30/08/2023 08:42:05 WIB
36 M. IMRON ROSADI	30/08/2023 08:42:09 WIB
37 JOHAN FRETS ELWARIN	30/08/2023 08:42:25 WIB
38 TAUFIQ HIDAYAT	30/08/2023 08:42:27 WIB
39 RENI ANGGRAINI	30/08/2023 08:42:33 WIB
40 ZULKIFLI TAMBUNAN	30/08/2023 08:42:36 WIB
41 HERI GUNAWAN	30/08/2023 08:42:54 WIB
42 ZUHRIA RAUF	30/08/2023 08:43:06 WIB
43 ABDUSSATAR KHALIL	30/08/2023 08:43:08 WIB
44 ASNAWI	30/08/2023 08:43:14 WIB

45 MUHAMMAD BASUNI	30/08/2023 08:43:31 WIB
46 H. FUADY	30/08/2023 08:43:38 WIB
47 NUR KHOSIM	30/08/2023 08:43:53 WIB
48 ALIMIN MUHAMMAD	30/08/2023 08:44:23 WIB
49 TATO TRISETYA	30/08/2023 08:44:25 WIB
50 HERMAWAN TAUFIK LAMBOTOE	30/08/2023 08:44:33 WIB
51 FATHUR ROHIM	30/08/2023 08:44:35 WIB
52 SELAMET	30/08/2023 08:45:01 WIB
53 MUH. JAFAR SODDING	30/08/2023 08:45:05 WIB
54 ERLIZAR	30/08/2023 08:45:05 WIB
55 INDRA RUKMONO	30/08/2023 08:45:09 WIB
56 SUHARJITO	30/08/2023 08:45:21 WIB
57 ARIES SUPRIADI	30/08/2023 08:45:21 WIB
58 ADE PUTRA WINATA	30/08/2023 08:45:23 WIB
59 FAZRIN BASALAMAH	30/08/2023 08:45:36 WIB
60 MUHAMAD YAMIN NOCH	30/08/2023 08:46:27 WIB

61 MUSYafa AHMAD RAHIM	30/08/2023 08:46:27 WIB
62 AKHMAD FARADIS	30/08/2023 08:46:27 WIB
63 ENDY JUNAEDY K.	30/08/2023 08:46:31 WIB
64 BUDI SANTOSO	30/08/2023 08:46:37 WIB
65 H. ANDI SAMSUL BAHRI MADDUKELLENG	30/08/2023 08:46:45 WIB
66 AHMAD YANI	30/08/2023 08:46:56 WIB
67 AHMAD YANI	30/08/2023 08:47:06 WIB
68 ZADRAK ELWUAR	30/08/2023 08:47:07 WIB
69 AGUS PURWANTO	30/08/2023 08:47:15 WIB
70 KOMIRUDDIN	30/08/2023 08:47:16 WIB
71 AHMAD YANI	30/08/2023 08:47:19 WIB
72 ASWAR	30/08/2023 08:47:52 WIB
73 HENDRO KUSUMA JAYA	30/08/2023 08:47:58 WIB
74 ANDHES TAN SATRISNA	30/08/2023 08:47:59 WIB
75 H. NURDIN	30/08/2023 08:48:14 WIB
76 MUHAMMAD SUFRI	30/08/2023 08:48:33 WIB

77 FARIED DESEMBARDI	30/08/2023 08:48:39 WIB
78 FAKIH ZATNIKA TAUFIK	30/08/2023 08:48:40 WIB
79 H. DODDY EKA PUTRA	30/08/2023 08:49:11 WIB
80 DICKY ARIANSYAH	30/08/2023 08:49:18 WIB
81 H. BENNY JOVIAL	30/08/2023 08:49:29 WIB
82 JUNAIDI FAJRI	30/08/2023 08:49:33 WIB
83 SUDARSONO	30/08/2023 08:49:52 WIB
84 FIRDAUS RENUAT	30/08/2023 08:50:02 WIB
85 EFRIZA	30/08/2023 08:50:31 WIB
86 Suryadi M Ali	30/08/2023 08:50:36 WIB
87 GUNGUN GUNAWAN	30/08/2023 08:50:51 WIB
88 Saldi Matta	30/08/2023 08:50:57 WIB
89 FRIS DWI YULIANTO	30/08/2023 08:50:57 WIB
90 AHMAD RIFAI RAHAWARIN	30/08/2023 08:51:11 WIB
91 SYAIFUL ARIFIN	30/08/2023 08:52:00 WIB
92 KUMALASARI KARTINI	30/08/2023 08:52:17 WIB

93 ANDI SAPUTRO	30/08/2023 08:52:37 WIB
94 H. MAHBUB	30/08/2023 08:52:41 WIB
95 IKA SEKAR MUTIARA	30/08/2023 08:53:14 WIB
96 ALI IMRAN RAMADHAN	30/08/2023 08:53:38 WIB
97 ALI IMRAN RAMADHAN	30/08/2023 08:53:42 WIB
98 SARAH AZZAHRA	30/08/2023 08:54:05 WIB
99 ONESIMUS HELUKA	30/08/2023 08:54:30 WIB
100 AMRIL SUDIONO	30/08/2023 08:54:49 WIB
101 DARWANTO	30/08/2023 08:56:16 WIB
102 FERDIA PRAKARSA	30/08/2023 08:56:23 WIB
103 MOHAMMAD SYAHFAN BADRI S.	30/08/2023 08:57:07 WIB
104 AHMADI	30/08/2023 08:57:21 WIB
105 GAZALBA	30/08/2023 08:57:24 WIB
106 H. ABDUL RAHMAN	30/08/2023 08:57:42 WIB
107 ROHMANI	30/08/2023 08:57:45 WIB
108 SAIFUL AHMAD	30/08/2023 08:57:53 WIB

109 HISAN ANIS MATTA	30/08/2023 08:58:12 WIB
110 IMAN HADI WALUYO	30/08/2023 08:59:25 WIB
111 ZAINUDDIN	30/08/2023 08:59:33 WIB
112 SAMSANI SUDRADJAT	30/08/2023 09:00:33 WIB
113 SYAMSIR	30/08/2023 09:00:36 WIB
114 SURYA YUNIZA	30/08/2023 09:01:13 WIB
115 YUNUS KOGOYA	30/08/2023 09:01:15 WIB
116 ONDANG SURJANA	30/08/2023 09:03:30 WIB
117 ONDANG SURJANA	30/08/2023 09:03:30 WIB
118 MAHYUDI	30/08/2023 09:04:51 WIB
119 ANANTO PRATIKNO	30/08/2023 09:04:58 WIB
120 ABDUL KADIR	30/08/2023 09:06:17 WIB
121 JEFRY YOHANIS MAKALEGI	30/08/2023 09:06:40 WIB
122 MOHARRIADI	30/08/2023 09:06:42 WIB
123 TALIB SOUMENA	30/08/2023 09:09:41 WIB
124 ELYAS	30/08/2023 09:14:53 WIB

125 HENDRO SULISTIYO	30/08/2023 09:15:41 WIB
126 SIMSON PAYAGE	30/08/2023 09:23:13 WIB
127 DIMYATI	30/08/2023 09:34:45 WIB
128 NOVIS SUGIAWAN	30/08/2023 09:40:34 WIB
129 ARYO TYASMORO	30/08/2023 09:41:29 WIB
130 AHMAD HAFIZ	30/08/2023 09:56:02 WIB
131 SLAMET	30/08/2023 10:03:21 WIB
132 LALU PAHRURROZI	30/08/2023 10:04:04 WIB
133 MUHAMMAD ZAINI BETAN	30/08/2023 10:04:56 WIB
134 SUNARDI	30/08/2023 10:21:11 WIB
135 TINA H. TAMHER	30/08/2023 10:22:09 WIB
136 AL HAKIM	30/08/2023 10:22:50 WIB
137 H. HAJRUL MALIK	30/08/2023 10:24:20 WIB

Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	H. JON AFRIZAL	30/08/2023

	10:03:59 WIB
2 LALU PAHRURROZI	30/08/2023 10:04:13 WIB
3 DEDI HARYONO	30/08/2023 10:04:25 WIB
4 YUSRI ADDIN YUSUF	30/08/2023 10:04:54 WIB
5 ANDHES TAN SATRISNA	30/08/2023 10:05:19 WIB
6 AHMAD YANI	30/08/2023 10:05:37 WIB
7 Suryadi M Ali	30/08/2023 10:14:19 WIB
8 Saldi Matta	30/08/2023 10:14:39 WIB
9 TEGUH WIBOWO Mulyono	30/08/2023 10:16:44 WIB
10 FARIED DESEMBARDI	30/08/2023 10:18:27 WIB
11 ZULKIFLI TAMBUNAN	30/08/2023 10:18:38 WIB
12 AHMAD HAFIZ	30/08/2023 10:19:12 WIB
13 THARMIZI	30/08/2023 10:19:26 WIB
14 H. RAIHAN ISKANDAR	30/08/2023 10:19:39 WIB
15 ASNAWI	30/08/2023 10:19:53 WIB
16 SEPTANTRI FAZLURAHMAN	30/08/2023 10:20:05 WIB
17 H. DODDY EKA PUTRA	30/08/2023

	10:20:14 WIB
18 AGUS PURWANTO	30/08/2023 10:20:51 WIB
19 SUNARDI	30/08/2023 10:21:32 WIB
20 M. IMRON ROSADI	30/08/2023 10:21:46 WIB
21 TINA H. TAMHER	30/08/2023 10:22:05 WIB
22 HARYANTO	30/08/2023 10:22:16 WIB
23 AHMADI	30/08/2023 10:22:16 WIB
24 ARIES SUPRIADI	30/08/2023 10:22:21 WIB
25 Mohammad Abizar Hardianto	30/08/2023 10:22:24 WIB
26 SYAMSIR	30/08/2023 10:22:30 WIB
27 ERLIZAR	30/08/2023 10:22:32 WIB
28 AL HAKIM	30/08/2023 10:22:57 WIB
29 ARDIN ANGGAWIRYA KARUNDENG	30/08/2023 10:22:57 WIB
30 GAZALBA	30/08/2023 10:22:59 WIB
31 HENDRO KUSUMA JAYA	30/08/2023 10:23:06 WIB
32 INDRA RUKMONO	30/08/2023 10:23:24 WIB
33 H. HAJRUL MALIK	30/08/2023

	10:24:24 WIB
34 GUNGUN GUNAWAN	30/08/2023 10:24:34 WIB
35 BUDI SANTOSO	30/08/2023 10:24:58 WIB
36 ASTAFIED NUR ROHMAN	30/08/2023 10:24:58 WIB
37 AMRIL SUDIONO	30/08/2023 10:25:13 WIB
38 IKA SEKAR MUTIARA	30/08/2023 10:25:27 WIB
39 ACHMAD ZAIROFI	30/08/2023 10:25:28 WIB
40 DARWANTO	30/08/2023 10:25:53 WIB
41 M. GUFRON SURATMAN	30/08/2023 10:26:11 WIB
42 RATNO TIMUR	30/08/2023 10:26:28 WIB
43 H. AMIN TRIAWAN	30/08/2023 10:27:15 WIB
44 AKHMAD FARADIS	30/08/2023 10:28:10 WIB
45 ARFAN ARIFIN	30/08/2023 10:29:16 WIB
46 ASWAR	30/08/2023 10:30:37 WIB
47 H. BENNY JOVIAL	30/08/2023 10:30:58 WIB
48 ABDUSSATAR KHALIL	30/08/2023 10:31:04 WIB
49 SAIFUL AHMAD	30/08/2023

	10:31:27 WIB
50 MAHYUDI	30/08/2023 10:32:55 WIB
51 FERDIA PRAKARSA	30/08/2023 10:33:02 WIB
52 SIGIT FAJAR ROHMAN	30/08/2023 10:33:07 WIB
53 H. ANDI SAMSUL BAHRI MADDUKELLENG	30/08/2023 10:33:07 WIB
54 ALI IMRAN RAMADHAN	30/08/2023 10:33:08 WIB
55 H. NURDIN	30/08/2023 10:33:08 WIB
56 ANANTO PRATIKNO	30/08/2023 10:33:09 WIB
57 MUSLIH	30/08/2023 10:33:16 WIB
58 SYAMSARI	30/08/2023 10:33:49 WIB
59 FIRDAUS RENUAT	30/08/2023 10:34:07 WIB
60 SURYA YUNIZA	30/08/2023 10:34:46 WIB
61 JEFFRY LEONARD P. TOBING	30/08/2023 10:35:41 WIB
62 ZUHRIA RAUF	30/08/2023 10:36:36 WIB
63 DICKY ARIANSYAH	30/08/2023 10:41:15 WIB
64 ELYAS	30/08/2023 10:42:57 WIB
65 MUH. JAFAR SODDING	30/08/2023

	10:44:05 WIB
66 MISBAKHUL MUNIR	30/08/2023 10:44:45 WIB
67 YUNUS KOGOYA	30/08/2023 10:45:09 WIB
68 JEFRY YOHANIS MAKALEGI	30/08/2023 10:45:30 WIB
69 ONESIMUS HELUKA	30/08/2023 10:48:07 WIB
70 ABQARI MUHAMMAD AL FATIH	30/08/2023 10:50:09 WIB
71 UMAR ABDURRAHMAN	30/08/2023 10:52:09 WIB
72 YUSWAR HIDAYATULLAH	30/08/2023 10:52:34 WIB
73 ANGGA SATRIA BIMA	30/08/2023 10:55:45 WIB
74 FRIS DWI YULIANTO	30/08/2023 10:57:02 WIB
75 JUNAIDI FAJRI	30/08/2023 11:09:46 WIB
76 EFRIZA	30/08/2023 11:11:23 WIB
77 NUR KHOSIM	30/08/2023 12:02:44 WIB
78 MUHAMMAD BASUNI	30/08/2023 12:07:19 WIB
79 AHMAD ZAINUDDIN	30/08/2023 12:48:58 WIB
80 ENDY JUNAEDY K.	30/08/2023 12:52:56 WIB
81 NOVIS SUGIAWAN	30/08/2023

	12:58:31 WIB
82 MOHARRIADI	30/08/2023 13:07:07 WIB
83 HUDZAIFAH MUHIBULLAH	30/08/2023 13:10:35 WIB
84 Mahmud Tamher	30/08/2023 13:12:43 WIB
85 SUDARSONO	30/08/2023 13:20:52 WIB
86 MUSYAFI AHMAD RAHIM	30/08/2023 13:30:48 WIB
87 SIMSON PAYAGE	30/08/2023 13:32:49 WIB
88 HENDRO SULISTIYO	30/08/2023 13:35:33 WIB
89 SYAIFUL ARIFIN	30/08/2023 13:45:52 WIB
90 HISAN ANIS MATTA	30/08/2023 13:52:18 WIB
91 JUNEFA ISMALIYANTO	30/08/2023 14:06:04 WIB
92 SAMSANI SUDRADJAT	30/08/2023 14:18:32 WIB
93 AHMAD RIFAI RAHAWARIN	30/08/2023 14:28:05 WIB
94 MUHAMMAD RIF'AT	30/08/2023 14:28:28 WIB
95 SELAMET	30/08/2023 14:31:19 WIB
96 MUHAMMAD SUFRI	30/08/2023 14:43:26 WIB
97 DIMYATI	30/08/2023

	14:44:38 WIB
98 MUHAMMAD ZAINI BETAN	30/08/2023 14:58:44 WIB
99 ABDUL KADIR	30/08/2023 15:02:55 WIB
100 FATHUR ROHIM	30/08/2023 15:11:53 WIB
101 ADE PUTRA WINATA	30/08/2023 15:12:40 WIB

Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	H. JON AFRIZAL	31/08/2023 08:01:18 WIB
2	SEPTANTRI FAZLURAHMAN	31/08/2023 08:03:14 WIB
3	TEGUH WIBOWO MULYONO	31/08/2023 08:03:54 WIB
4	UMAR ABDURRAHMAN	31/08/2023 08:04:05 WIB
5	YUSWAR HIDAYATULLAH	31/08/2023 08:04:57 WIB
6	ZUHRIA RAUF	31/08/2023 08:05:06 WIB
7	SUDARSONO	31/08/2023 08:05:13 WIB
8	SYAFRUDIN GORAN TOKAN	31/08/2023 08:05:28 WIB
9	MUHAMMAD BASUNI	31/08/2023 08:06:37 WIB
10	ASTAFIED NUR ROHMAN	

	31/08/2023 08:06:39 WIB
11 MUSLIH	31/08/2023 08:06:42 WIB
12 THARMIZI	31/08/2023 08:07:17 WIB
13 AHMAD SULTHONI	31/08/2023 08:07:26 WIB
14 ASNAWI	31/08/2023 08:08:30 WIB
15 ARFAN ARIFIN	31/08/2023 08:08:34 WIB
16 HERI GUNAWAN	31/08/2023 08:08:58 WIB
17 H. AMIN TRIAWAN	31/08/2023 08:09:17 WIB
18 GAZALBA	31/08/2023 08:09:18 WIB
19 RATNO TIMUR	31/08/2023 08:09:22 WIB
20 RATNO TIMUR	31/08/2023 08:09:22 WIB
21 HENDRO SULISTIYO	31/08/2023 08:09:40 WIB
22 NOVIS SUGIAWAN	31/08/2023 08:10:00 WIB
23 H. RAIHAN ISKANDAR	31/08/2023 08:10:09 WIB
24 H. BENNY JOVIAL	31/08/2023 08:10:43 WIB
25 H. FUADY	31/08/2023 08:10:51 WIB
26 ROBBY ANDRIAN	

	31/08/2023 08:11:03 WIB
27 ZADRAK ELWUAR	31/08/2023 08:11:12 WIB
28 ZAINUDDIN	31/08/2023 08:11:27 WIB
29 FARIED DESEMBARDI	31/08/2023 08:11:38 WIB
30 YUNUS KOGOYA	31/08/2023 08:11:58 WIB
31 RONALD ERWIN PATTIPAWAEJ	31/08/2023 08:12:00 WIB
32 HARYANTO	31/08/2023 08:12:18 WIB
33 YUSRI ADDIN YUSUF	31/08/2023 08:12:25 WIB
34 AMRIL SUDIONO	31/08/2023 08:12:42 WIB
35 ISKANDAR	31/08/2023 08:12:51 WIB
36 DICKY ARIANSYAH	31/08/2023 08:13:01 WIB
37 EKO GUNDARTO	31/08/2023 08:13:16 WIB
38 SIGIT FAJAR ROHMAN	31/08/2023 08:13:30 WIB
39 MOHAMMAD SYAHFAN BADRI S.	31/08/2023 08:14:01 WIB
40 ERLIZAR	31/08/2023 08:14:11 WIB
41 IKA SEKAR MUTIARA	31/08/2023 08:14:31 WIB
42 ABDUSSATAR KHALIL	

	31/08/2023 08:14:33 WIB
43 SYAMSIR	31/08/2023 08:14:44 WIB
44 ZULKIFLI TAMBUNAN	31/08/2023 08:14:55 WIB
45 SUNARDI	31/08/2023 08:15:13 WIB
46 AHMAD YANI	31/08/2023 08:15:35 WIB
47 MUHAMAD HASYIM	31/08/2023 08:15:42 WIB
48 SYAIFUL ARIFIN	31/08/2023 08:15:58 WIB
49 JEFRY YOHANIS MAKALEGI	31/08/2023 08:16:13 WIB
50 BUDI SANTOSO	31/08/2023 08:16:44 WIB
51 JOHAN FRETS ELWARIN	31/08/2023 08:16:56 WIB
52 NUR KHOSIM	31/08/2023 08:16:59 WIB
53 RENI ANGGRAINI	31/08/2023 08:17:03 WIB
54 ANDI SAPUTRO	31/08/2023 08:17:26 WIB
55 ADE PUTRA WINATA	31/08/2023 08:17:32 WIB
56 TAUFIQ HIDAYAT	31/08/2023 08:17:34 WIB
57 DEDI HARYONO	31/08/2023 08:17:34 WIB
58 FIRDAUS RENUAT	

	31/08/2023 08:17:49 WIB
59 MUHAMMAD RIF'AT	31/08/2023 08:17:52 WIB
60 ANANTO PRATIKNO	31/08/2023 08:18:00 WIB
61 AHMADI	31/08/2023 08:18:03 WIB
62 H. DODDY EKA PUTRA	31/08/2023 08:18:05 WIB
63 FATHUR ROHIM	31/08/2023 08:18:08 WIB
64 LALU PAHRURROZI	31/08/2023 08:18:19 WIB
65 H. NURDIN	31/08/2023 08:18:25 WIB
66 MUHAMMAD ZAINI BETAN	31/08/2023 08:18:36 WIB
67 ACHMAD ZAIROFI	31/08/2023 08:18:36 WIB
68 AHMAD HAFIZ	31/08/2023 08:18:39 WIB
69 ARIES SUPRIADI	31/08/2023 08:18:47 WIB
70 SAIFUL AHMAD	31/08/2023 08:18:58 WIB
71 HERMAWAN TAUFIK LAMBOTOE	31/08/2023 08:19:17 WIB
72 FAKIH ZATNIKA TAUFIK	31/08/2023 08:19:31 WIB
73 ALI IMRAN RAMADHAN	31/08/2023 08:19:33 WIB
74 KOMIRUDDIN	

	31/08/2023 08:19:57 WIB
75 MAHYUDI	31/08/2023 08:20:37 WIB
76 RISWANDI	31/08/2023 08:20:54 WIB
77 AKHMAD FARADIS	31/08/2023 08:21:19 WIB
78 H. MAHBUB	31/08/2023 08:21:37 WIB
79 ENDY JUNAEDY K.	31/08/2023 08:21:39 WIB
80 HISAN ANIS MATTA	31/08/2023 08:21:41 WIB
81 MUSYafa AHMAD RAHIM	31/08/2023 08:21:46 WIB
82 ANDHES TAN SATRISNA	31/08/2023 08:21:48 WIB
83 ONESIMUS HELUKA	31/08/2023 08:21:55 WIB
84 ARDIN ANGGAWIRYA KARUNDENG	31/08/2023 08:22:08 WIB
85 H. HAJRUL MALIK	31/08/2023 08:22:35 WIB
86 DIMYATI	31/08/2023 08:23:11 WIB
87 SYAMSARI	31/08/2023 08:23:26 WIB
88 HUDZAIFAH MUHIBULLAH	31/08/2023 08:23:35 WIB
89 ALIMIN MUHAMMAD	31/08/2023 08:23:35 WIB
90 Saldi Matta	

	31/08/2023 08:23:51 WIB
91 H. ABDUL RAHMAN	31/08/2023 08:24:04 WIB
92 Suryadi M Ali	31/08/2023 08:24:09 WIB
93 AGUS PURWANTO	31/08/2023 08:24:14 WIB
94 SELAMET	31/08/2023 08:24:28 WIB
95 ELYAS	31/08/2023 08:24:30 WIB
96 M. IMRON ROSADI	31/08/2023 08:24:44 WIB
97 INDRA RUKMONO	31/08/2023 08:25:01 WIB
98 FERDIA PRAKARSA	31/08/2023 08:25:09 WIB
99 MUHAMAD YAMIN NOCH	31/08/2023 08:25:22 WIB
100 FRIS DWI YULIANTO	31/08/2023 08:27:17 WIB
101 MOHARRIADI	31/08/2023 08:27:23 WIB
102 MUH. JAFAR SODDING	31/08/2023 08:27:29 WIB
103 ASWAR	31/08/2023 08:28:00 WIB
104 KUMALASARI KARTINI	31/08/2023 08:29:42 WIB
105 DARWANTO	31/08/2023 08:30:09 WIB
106 YERMIA SILETTY	

	31/08/2023 08:34:31 WIB
107 SIMSON PAYAGE	31/08/2023 08:39:19 WIB
108 ABDUL KADIR	31/08/2023 08:39:22 WIB
109 ARYO TYASMORO	31/08/2023 08:39:23 WIB
110 SAMSANI SUDRADJAT	31/08/2023 08:39:26 WIB
111 H. ZAINUDDIN TAMBUALA	31/08/2023 08:42:33 WIB
112 ANGA SATRIA BIMA	31/08/2023 08:45:07 WIB
113 M. GUFRON SURATMAN	31/08/2023 08:48:52 WIB
114 MUHAMMAD SUFRI	31/08/2023 08:51:48 WIB
115 NOVI HERIYANTO	31/08/2023 08:55:40 WIB
116 JUNEFS ISMALIYANTO	31/08/2023 08:56:05 WIB
117 MISBAKHUL MUNIR	31/08/2023 08:57:28 WIB
118 JUNAIDI FAJRI	31/08/2023 08:57:39 WIB
119 Mahmud Tamher	31/08/2023 09:01:27 WIB
120 ONDANG SURJANA	31/08/2023 09:03:48 WIB
121 GUNGUN GUNAWAN	31/08/2023 09:09:11 WIB
122 FAZRIN BASALAMAH	

		31/08/2023 09:10:31 WIB
123 EFRIZA		31/08/2023 09:12:13 WIB
124 AL HAKIM		31/08/2023 09:14:54 WIB
125 IMAN HADI WALUYO		31/08/2023 09:16:32 WIB
126 SUHARJITO		31/08/2023 09:19:22 WIB
127 SURYA YUNIZA		31/08/2023 09:21:08 WIB
128 TALIB SOUMENA		31/08/2023 09:32:46 WIB
129 AHMAD RIFAI RAHAWARIN		31/08/2023 09:34:19 WIB
130 HENDRO KUSUMA JAYA		31/08/2023 09:47:31 WIB
131 AHMAD ZAINUDDIN		31/08/2023 09:50:17 WIB
132 YERMIAS PIGOME		31/08/2023 09:54:57 WIB
133 SLAMET		31/08/2023 10:18:20 WIB
134 SLAMET		31/08/2023 10:18:37 WIB
135 TATO TRISETYA		31/08/2023 10:21:41 WIB

Penutupan Kegiatan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
----	------	-----

1 SUHARJITO	31/08/2023 10:30:11 WIB
2 H. JON AFRIZAL	31/08/2023 10:30:11 WIB
3 ARDIN ANGGAWIRYA KARUNDENG	31/08/2023 10:30:15 WIB
4 AHMAD HAFIZ	31/08/2023 10:30:37 WIB
5 ALI IMRAN RAMADHAN	31/08/2023 10:30:40 WIB
6 ISKANDAR	31/08/2023 10:31:01 WIB
7 SEPTANTRI FAZLURAHMAN	31/08/2023 10:31:10 WIB
8 JEFRY YOHANIS MAKALEGI	31/08/2023 10:31:36 WIB
9 YUNUS KOGOYA	31/08/2023 10:31:51 WIB
10 ABDUL KADIR	31/08/2023 10:32:04 WIB
11 AHMAD RIFAI RAHAWARIN	31/08/2023 10:32:09 WIB
12 FAZRIN BASALAMAH	31/08/2023 10:32:12 WIB
13 ANANTO PRATIKNO	31/08/2023 10:32:14 WIB
14 RISWANDI	31/08/2023 10:32:15 WIB
15 H. DODDY EKA PUTRA	31/08/2023 10:32:38 WIB
16 H. ANDI SAMSUL BAHRI MADDUKELLENG	31/08/2023 10:32:44 WIB

17 JEFFRY LEONARD P. TOBING	31/08/2023 10:32:54 WIB
18 NOVI HERIYANTO	31/08/2023 10:32:54 WIB
19 BAGUS ZUNTORO PUTRO	31/08/2023 10:33:00 WIB
20 SYAMSARI	31/08/2023 10:33:15 WIB
21 ANDHES TAN SATRISNA	31/08/2023 10:33:55 WIB
22 ASNAWI	31/08/2023 10:34:02 WIB
23 H. HAJRUL MALIK	31/08/2023 10:34:16 WIB
24 SIMSON PAYAGE	31/08/2023 10:34:38 WIB
25 R. AKHMAD YANI SAEFUDDIN	31/08/2023 10:34:55 WIB
26 AL HAKIM	31/08/2023 10:34:55 WIB
27 SIMSON PAYAGE	31/08/2023 10:35:18 WIB
28 AHMADI	31/08/2023 10:35:29 WIB
29 BUDI SANTOSO	31/08/2023 10:35:44 WIB
30 HERI GUNAWAN	31/08/2023 10:36:05 WIB
31 Suryadi M Ali	31/08/2023 10:36:59 WIB
32 MUSLIH	31/08/2023 10:37:49 WIB

33 EFRIZA	31/08/2023 10:37:53 WIB
34 H. NURDIN	31/08/2023 10:38:01 WIB
35 IMAN HADI WALUYO	31/08/2023 10:39:18 WIB
36 MUHAMAD HASYIM	31/08/2023 10:40:16 WIB
37 DEDI HARYONO	31/08/2023 10:40:33 WIB
38 MUHAMAD HASYIM	31/08/2023 10:40:38 WIB
39 JOHAN FRETS ELWARIN	31/08/2023 10:41:11 WIB
40 HARYANTO	31/08/2023 10:41:34 WIB
41 AHMAD YANI	31/08/2023 10:41:35 WIB
42 AHMAD YANI	31/08/2023 10:41:46 WIB
43 H. RAIHAN ISKANDAR	31/08/2023 10:43:00 WIB
44 IKA SEKAR MUTIARA	31/08/2023 10:44:12 WIB
45 YUSRI ADDIN YUSUF	31/08/2023 10:44:59 WIB
46 TAUFIQ HIDAYAT	31/08/2023 10:53:29 WIB
47 INDRA RUKMONO	31/08/2023 10:53:37 WIB
48 YUSWAR HIDAYATULLAH	31/08/2023 10:54:02 WIB

49 UMAR ABDURRAHMAN	31/08/2023 10:54:45 WIB
50 H. BENNY JOVIAL	31/08/2023 10:55:43 WIB
51 MUH. JAFAR SODDING	31/08/2023 10:56:11 WIB
52 SUNARDI	31/08/2023 10:59:02 WIB
53 ANGGA SATRIA BIMA	31/08/2023 11:01:25 WIB
54 ELYAS	31/08/2023 11:01:39 WIB
55 H. FUADY	31/08/2023 11:01:44 WIB
56 NOVIS SUGIAWAN	31/08/2023 11:01:48 WIB
57 NOVIS SUGIAWAN	31/08/2023 11:01:48 WIB
58 FIRDAUS RENUAT	31/08/2023 11:01:53 WIB
59 FIRDAUS RENUAT	31/08/2023 11:01:53 WIB
60 MUHAMMAD RIF'AT	31/08/2023 11:02:01 WIB
61 MUHAMMAD SUFRI	31/08/2023 11:02:37 WIB
62 ROBBY ANDRIAN	31/08/2023 11:03:14 WIB
63 FATHUR ROHIM	31/08/2023 11:04:49 WIB
64 LALU PAHRURROZI	31/08/2023 11:07:53 WIB

65 JUNAIDI FAJRI	31/08/2023 11:14:21 WIB
66 MUHAMMAD BASUNI	31/08/2023 11:14:50 WIB
67 MOHARRIADI	31/08/2023 11:34:11 WIB

SOAL DAN TEMPLATE PENYUSUNAN
PERMOHONAN PEMOHON DAPAT
DIUNDUH MELALUI AKUN SIMULTAN
PESERTA DENGAN *LOGIN* DI LAMAN:

pusdik.mkri.id



Username :
Pusdiklat_MKRI

password : **pusdikmk**

Username :
GK3_PUSDIKLAT

password : **pusdikmkri**

Ketentuan Tugas Praktek

- Sesi Praktek dimulai pukul 10.00 – 12.00 WIB dan 13.00 – 15.00 WIB
- Peserta Menyusun Permohonan Pemohon berdasarkan Soal yang Ditentukan
- Mengunduh Template Permohonan dimana Peserta Mengerjakan pada Template tersebut
- Tugas Individu
- Pengerjaan dan Pengumpulan Tugas Praktik merupakan salah satu syarat peserta mendapatkan sertifikat



Tugas Praktik dikirim ke e-mail:

tugasbimtek1@gmail.com

Subject e-mail:

<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ <Jenis Tugas>

Contoh: 10_Lionel Messi_Permohonan Perseorangan

Nama File Ms. Word:

<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ <Jenis Tugas>

Contoh: 10_Lionel Messi_Permohonan Partai Politik



KETENTUAN KHUSUS : e-SERTIFIKAT



**Batas Waktu
Pengumpulan Tugas
Praktik Pukul 17.00
WIB Hari Kamis,
30 Agustus 2023**

***Apabila melewati
batas waktu, kami
anggap peserta tidak
mengumpulkan**



**Tugas Praktik yg
Dikumpulkan Wajib
Orisinal
(dibuat asli oleh
Masing-Masing
Peserta) serta sesuai
dengan Soal yang
Ditentukan**



**Nilai Tugas Praktik Minimal
adalah 60, Nilai di Bawah 60
Tidak Mendapatkan Sertifikat**

***Peserta yg Tugas Praktiknya
sama (*Copy Paste*), Baik yg
Mencontek maupun yg
Dicontek, Otomatis Nilainya di
Bawah 60**

***Template Tugas Praktik
harus diisi secara lengkap,
dari Identitas sampai ke
Petitum**

Aspek yang Dinilai

- Substansi (60%)
- Sistematika Penulisan (20%)
- Teknis Penulisan: Kerapian & Typo (20%)





FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA

KELAS 1

Narasumber

: Ery Satria Pamungkas

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	1	HARYANTO, S.E.	DPW Kalimantan Selatan	70	65	70	67
2	2	TEGUH WIBOWO MULYONO, Amd.Farm.	DPW Bangka Belitung	70	70	70	70
3	4	INDRA RUKMONO, S.H., M.H., M.Kn	DPW Jawa Timur	60	60	60	60
4	8	H. YUSRI ADDIN YUSUF, S.H.I.	DPN	60	60	60	60
5	9	DIMYATI, S.Pd.	DPW Papua Tengah	70	65	70	67
6	10	ARYO TYASMORO, S.H.	DPW DKI Jakarta	75	80	65	76
7	11	ARDIN ANGGAWIRYA KARUNDENG	DPN	75	75	65	73
8	12	EKO GUNDARTO	DPW Kalimantan Barat	65	65	65	65
9	13	NOVIS SUGIAWAN, S.Sos.	DPW Banten	75	75	65	73
10	16	ONESIMUS HELUKA, S.Sos.	DPW Papua Pegunungan	70	75	70	73
11	18	AHMAD YANI, S.H.	DPW Kalimantan Timur	75	80	70	77
12	19	KOMIRUDDIN, Lc.	DPN	70	70	70	70
13	22	SYAMSIR, S.IP.	DPW Sulawesi Barat	65	60	60	61
14	23	FAZRIN BASALAMAH, S.H.	DPW Sulawesi Utara	65	65	65	65
15	28	SAMSANI SUDRADJAT, S.Pi.	DPW Lampung	65	65	65	65
16	29	SLAMET, S.H.	DPN	65	65	70	66
17	30	HERMAWAN TAUFIK LAMBOTOE, S.Si.	DPW Sulawesi Tenggara	65	65	70	66
18	31	Dr. AHMAD RIFAI RAHAWARIN, S.H., M.H.	DPW Papua	65	65	65	65
19	35	NOVI HERIYANTO, S.TP.	DPW Bengkulu	65	65	65	65
20	36	H. YUSWAR HIDAYATULLAH, S.IP., M.AP.	DPN	65	70	65	68
21	37	UMAR ABDURRAHMAN, S.H.	DPW Sumatera Selatan	65	70	65	68
22	39	Dr. ARIF AWALUDIN, S.H., M.Hum.	DPN	65	60	60	61
23	40	AHMAD SULTHONI, S.H.	DPW Bali	70	80	70	76
24	43	ERLIZAR, S.H., M.H.	DPW Aceh	80	80	75	79
25	47	SYAFRUDIN GORAN TOKAN, A.Md.	DPW Nusa Tenggara Timur	70	75	70	73
26	53	SARAH AZZAHRA	DPN				0
27	54	MUHAMMAD IKHLAS, S.H., M.H.	DPW Sumatera Barat	70	75	70	73
28	56	AGUS PURWANTO, S.H.	DPW Kepulauan Riau	75	75	70	74
29	57	ZUHRIA RAUF, S.H.	DPW Gorontalo	70	70	70	70
30	58	MUHAMAD HASYIM, S.Pd.I.	DPW Nusa Tenggara Barat	75	75	70	74
31	59	MOHARRIADI, S.T., M.Ag.	DPN				0
32	60	SYAIFUL ARIFIN	DPW Sumatera Utara	70	70	65	69
33	63	H. ZAINUDDIN TAMBUALA, Lc., M.A.	DPW Sulawesi Tengah	75	70	75	72
34	66	RONALD ERWIN PATTIPAWAEJ, A.Md.	DPW Papua Barat	75	75	65	73
35	79	RATNO TIMUR, S.H.	DPN	60	70	60	66
36	83	TALIB SOUMENA, S.T.	DPW Maluku	75	75	70	74
37	84	SEPTANTRI FAZLURAHMAN, S.H.	DPN	75	75	75	75
38	105	Drs H. MOHAMMAD SYAHFAN BADRI S.	DPN	70	70	70	70
39	107	MUHDAR HASANAT	DPW Maluku Utara	75	70	70	71
40	108	Drs. H. RIDWAN THALIB	DPN	65	70	65	68



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA

KELAS 2

Narasumber

: Irfan Nur Rachman

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	3	MUHAMMAD BASUNI, S.T.	DPW Kalimantan Selatan	80	79	79	79.2
2	6	HERI GUNAWAN	DPW Bangka Belitung	72	75	74	74.2
3	14	YERMIAS PIGOME, S.IP	DPW Papua Tengah	70	72	70	71.2
4	17	DICKY ARIANSYAH, S.H.	DPW Kalimantan Barat	60	62	60	61.2
5	20	SIMSON PAYAGE, A.Md.Kes.	DPW Papua Pegunungan				0
6	25	ZAINUDDIN, S.T.	DPW Sulawesi Barat	79	78	79	78.4
7	27	Pdt. ZADRAK ELWUAR, S.Th., M.H.	DPW Papua Selatan	70	72	70	71.2
8	33	HENDRO KUSUMA JAYA, S.H., M.Kn.	DPW Sulawesi Tenggara	85	85	85	85
9	34	ANDHES TAN SATRISNA, S.H., M.H.	DPW Lampung	75	78	75	76.8
10	42	RENI ANGGRAINI, A.Md.	DPW Sumatera Selatan	75	78	76	77
11	44	H. FUADY, S.T., M.Si.	DPW Aceh	70	75	70	73
12	52	IKA SEKAR MUTIARA, S.H.	DPW Bali	78	79	77	78.4
13	61	ABDUSSATAR KHALIL, M.A.	DPW Nusa Tenggara Barat	68	65	67	66
14	69	NUR KHOSIM, S.H.	DPW Sumatera Utara	70	75	70	73
15	70	SUDARSONO	DPW Sulawesi Tengah	80	80	80	80
16	73	H. JON AFRIZAL, S.Pd., M.A.P.	DPW Sumatera Barat	74	73	74	73.4
17	75	Ir. FARIED DESEMBARDI, S.T., M.T.	DPW Papua Barat Daya	75	77	74	76
18	77	M. GUFRON SURATMAN, S.Sos.	DPW Gorontalo	70	74	70	72.4
19	90	FAKIH ZATNIKA TAUFIK, S.H., M.H.	DPW Jawa Barat	79	80	78	79.4
20	93	MAHYUDI, S.P.	DPW Jambi	70	73	70	71.8
21	97	BUDI SANTOSO, S.Sos.	DPW Kalimantan Tengah	77	78	77	77.6
22	99	AL HAKIM, S.Pd.	DPW Kalimantan Utara	77	778	78	497.8
23	102	ISKANDAR, S.Si.	DPW Riau	77	78	77	77.6
24	109	H. MAHBUB	DPN	65	65	65	65
25	110	HENDRO SULISTIYO	DPN	70	70	70	70
26	111	ENDY JUNAEDY K., S.E.	DPN	77	77	78	77.2
27	112	ROHMANI, M.A.	DPN	65	65	65	65
28	113	Dr. SAIFUL AHMAD, M.Si.	DPW Maluku Utara	80	80	80	80
29	117	Ir. AKHMAD FARADIS	DPN	78	78	77	77.8
30	118	AHMAD ZAINUDDIN, Lc., ME	DPN	79	78	77	78
31	119	ACHMAD ZAIROFI	DPN	77	78	78	77.8
32	122	M. AGUS AWALUS SHOIM, S.H., M. PHIL.	DPN	67	68	68	67.8
33	123	Dr. H. RAIHAN ISKANDAR, L.C., M.M.	DPN	80	80	79	79.8
34	125	TINA H. TAMHER, S.H., M.H.	DPN	70	72	70	71.2
35	126	HISAN ANIS MATTA, B.A., M.A.	DPN	75	74	74	74.2
36	127	MUSYafa AHMAD RAHIM, Lc., M.A.	DPN	70	72	70	71.2
37	128	ASTAFIED NUR ROHMAN, S.H.	DPW Jawa Tengah	50	50	50	50
38	130	GUNGUN GUNAWAN	DPN	80	79	78	79
39	135	ASWAR, S.H.I., M.H.	DPW Sulawesi Selatan	78	80	78	79.2
40	137	TAUFIQ HIDAYAT, S.KOM., M.B.A.	DPW DI Yogyakarta	80	80	80	80



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA

KELAS 3

Narasumber

: Syamsudin Noer

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	5	RISWANDI, S.IP.	DPW Kalimantan Selatan				0
2	7	TATO TRISETYA, S.H., M.Kn.	DPW Bangka Belitung	80	85	80	83
3	15	H. DODDY EKA PUTRA, S.T., M.M.	DPW Jawa Timur	80	80	80	80
4	21	H. ABDUL RAHMAN, S.E.	DPW Papua Tengah	75	80	75	78
5	26	YUNUS KOGOYA, S.Sos.	DPW Papua Pegunungan				0
6	38	ABDUL KADIR	DPW Sulawesi Utara	80	80	80	80
7	41	JOHAN FRETS ELWARIN, S.Pi.	DPW Papua Selatan	80	80	75	79
8	45	MUHAMMAD SUFRI, M.Pd.	DPW Aceh	80	80	80	80
9	46	AMRIL SUDIONO, S.T.	DPW Sumatera Selatan	80	80	80	80
10	49	Dr. MUHAMAD YAMIN NOCH, S.E., M.SA.	DPW Papua	80	80	80	80
11	50	TUMARUDDIN, S.Si., Apt.	DPW Sulawesi Tenggara				0
12	64	BAGUS ZUNTORO PUTRO, S.H.	DPW Bali	80	80	80	80
13	65	H. SARWONO, S.P., M.M.	DPW Kalimantan Timur				0
14	67	SUHARJITO, S.H., M.Si.	DPW Nusa Tenggara Timur	75	80	75	78
15	71	CHARLOS CHRISTOFOR MARYEN	DPW Papua Barat	75	80	75	78
16	72	THARMIZI, S.Sos.	DPW Bengkulu	75	80	75	78
17	78	MUHAMMAD RIF'AT, S.T.	DPW Sulawesi Tengah	75	80	75	78
18	80	IMAN HADI WALUYO, S.Pd.	DPW Gorontalo	75	80	80	79
19	82	DARWANTO, ST	DPW Papua Barat Daya	80	80	80	80
20	88	FATHUR ROHIM, S.H., M.H.	DPW Kepulauan Riau	75	80	75	78
21	89	YASEN, S.H.	DPW Banten	75	80	75	78
22	91	Dr. ONDANG SURJANA, Drs., S.H., M.Si., M.H., QIA.	DPW Jawa Barat	75	80	75	78
23	95	ARIES SUPRIADI, S.Pt.	DPW Jambi				0
24	98	ASNAWI, S.P.	DPW Kalimantan Tengah	80	89	75	84.4
25	100	GAZALBA, S.H.	DPW Kalimantan Utara	80	80	80	80
26	104	AMIN TRIAWAN	DPW Riau	75	80	75	78
27	114	YERMIA SILETTY, S.H.	DPW Maluku	75	80	80	79
28	120	ALIMIN MUHAMMAD	DPW Maluku Utara	80	80	80	80
29	121	SELAMET	DPW DKI Jakarta	80	80	80	80
30	129	H. AHMADI, S.E.	DPW Jawa Tengah	80	80	80	80
31	131	Dr. JUNEFA ISMALIYANTO, A.Pi., ME.	DPN				0
32	133	AMIN FAHRUDIN, S.H., M.H.	DPN	75	80	80	79
33	134	ANGGA SATRIA BIMA, S.Kom.	DPN				0
34	136	Drs. MUH. JAFAR SODDING	DPW Sulawesi Selatan	75	80	75	78
35	138	ANDI SAPUTRO, S.H.	DPN	80	80	80	80
36	139	HUDZAIFAH MUHIBULLAH	DPN	80	75	75	76
37	140	R. AKHMAD YANI SAEFUDDIN, S.SIT.	DPN				0
38	141	KUMALASARI KARTINI	DPN	80	80	75	79
39	142	FAUZI WAHYU MUNTORO	DPN				0
40	143	ABQARI MUHAMMAD AL FATIH, M.H.	DPN	80	85	80	83



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA

KELAS 4

Narasumber

: M. Lutfi Chakim

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	24	MISBAKHUL MUNIR, S.Pd.I., M.M.	DPW Jawa Timur	70	75	70	73
2	32	MUSLIH, S.P.	DPW Kalimantan Barat	70	65	65	66
3	48	JEFRY YOHANIS MAKALEGI, S.T.	DPW Sulawesi Utara				0
4	51	ARFAN ARIFIN, S.H., M.H.	DPW Papua	60	65	60	63
5	55	ALI IMRAN RAMADHAN, S.T.	DPW Papua Selatan	70	70	70	70
6	62	M. IMRON ROSADI, S.E.	DPW Lampung	65	65	65	65
7	68	ALFIAN, BCHK., S.H.	DPW Kalimantan Timur				0
8	74	DEDI HARYONO, S.T.	DPW Bengkulu	65	70	65	68
9	76	MUHAMMAD ZAINI BETAN, S.Pd.	DPW Nusa Tenggara Timur	60	60	60	60
10	81	ZULKIFLI TAMBUNAN, S.H., M.Kn.	DPW Sumatera Utara	65	60	60	61
11	85	H. HAJRUL MALIK, S.Ag., M.Pd.	DPW Sulawesi Barat	65	65	65	65
12	86	Ir. H. ANDI SAMSUL BAHRI MADDUKELLENG, S.P., M.H.	DPW Papua Barat Daya	65	60	65	62
13	87	LALU PAHRURROZI, S.T., MIE.	DPW Nusa Tenggara Barat	65	60	60	61
14	92	JEFFRY LEONARD P. TOBING, M.H., M.Pd.	DPW Jawa Barat	60	60	60	60
15	94	H. BENNY JOVIAL, SP.	DPW Sumatera Barat	65	60	60	61
16	96	FERDIA PRAKARSA, S.H.	DPW Jambi	65	65	65	65
17	101	SURYA YUNIZA, S.E.	DPW Kalimantan Utara	70	65	70	67
18	103	ELYAS, S.Pi.	DPW Kalimantan Tengah	65	60	65	62
19	106	H. NURDIN, S.E., Ak., M.M.	DPW Riau	65	60	65	62
20	115	FIRDAUS RENUAT, S.H.	DPW Maluku	65	60	65	62
21	116	ADE PUTRA WINATA, S.H.	DPW Kepulauan Riau	65	60	65	62
22	124	SUNARDI	DPW DKI Jakarta	65	60	60	61
23	132	FRIS DWI YULIANTO, S.Pi., M.H.	DPW Jawa Tengah	65	65	65	65
24	144	AHMAD HAFIDZ, S.H.	DPN	65	65	60	64
25	145	JUNAIDI FAJRI, S.E., M.M.	DPW Banten				0
26	146	ANANTO PRATIKNO	DPN	65	60	65	62
27	147	Dr. SYAMSARI, S.Pt., M.M.	DPW Sulawesi Selatan				0
28	148	Saldi Matta	DPN				0
29	149	SIGIT FAJAR ROHMAN, S.H., M.A.P.	DPW DI Yogyakarta	70	65	75	68
30	150	ROBBY ANDRIAN, S.H., M.H.	DPW DI Yogyakarta	70	70	70	70
31	156	EFRIZA, S.H., M.H.Li.	DPN				0
32	157	Edwin Fadly Entjo Saputra	DPN				0
33	158	Fauzan Fadly F	DPN				0
34	159	Fadli Borut	DPN				0
35	160	Rafiq	DPN				0
36	162	Dr. SARAH HANDAYANI, SKM., M.Kes.	DPN				0
37	163	Mohammad Abizar Hardianto	DPN	60	60	60	60
38	164	Muhamad Adam Rizki Uar	DPN				0
39	165	Suryadi M Ali	DPW Maluku Utara	70	75	70	73
40							0

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI GELORA

Sesi I	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Narasumber	1. YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, SH., M.Hum 2. YM. Dr. Wahiduddin Adams, SH., MA
Moderator	Ardiansyah Salim

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Gasalba_Kalimantan Utara : seberapa penting keterangan ahli di persidangan MK?

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BAGI PARTAI GELORA

Sesi II	Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
Narasumber	Dr. Fajar Laksono
Moderator	Bangkit Panji

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Tato_Bangka Blitung : MK memiliki kewenangan untuk menguji Undang undang terhadap undan undang dasar dan salah satu putusannya menyatakan In Konstitusional, Apakah tidak ada kekosongan hukum , Bagai mana cara cara MK agar kita menghindari kekosogan hukum dan bagai manakah langkah langkahnya?
2.	Andestan_Lampung : terkait isu presiden 3 periode, bagaimana dlm hal ini MK wewenang dlm menangani apabila ada para pihak yg berkeberatan dg aturan yg di buat DPR?
3.	Sapandri_Bogor : Kenapa kita tidak pernah ada kodipikasi hukum acara di MK? Terkait dg uji materi, Apakah MK tdk membuat satgas untuk mepending tanpa harus menapsirkan sendiri masyarakat?

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI GELORA

Sesi III	Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Narasumber	Dr. Wiryanto, SH., M.Hum.
Moderator	Santhy Kustrihardiani

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Ikhsan : Apakah dlm sidang Dismisal ini ada perbaikan perbaikan nanti yg di minta Hakim Konstitusi atau di nyatakan di sidang Pleno?
2.	: untuk sengketa DPRD itu pemilihannya oleh KPUD apakah itu ikut menjadi turut termohon atau bagaimana, trus hukum acaranya apakah bisa dipakai seperti hukum acara perdata?
3.	Handoko_Sulawesi Tenggara : Terkait Perbaikan, Apakah yg di maksud perbaikan ini terkait cuman identitas atau sudah masuk di dlm posita atau petitum yg akan diajukan?
4.	: persetujuan tertulis dari Ketum dan Sekjen itu apakah dilampirkan pd saat pengajuan permohonan atau pd saat pemeriksaan persiapan?
5.	: Terkait ke aktifan Hakim dlm persidangan, Jadi ada pihak lain yg harus dilibatkan dlm pembuktian perkara apakah itu bisa dimintakan oleh pihak pemohon atau bagaimana?
6.	Ahmad paradis : kalau seandainya ada sengketa yg tdk secara langsung kita menjadi pihak terkait tapi atas keputusan MK dg memenangkan pihak yg mengajukan keberatan membuat posisi kita jadi tergeser, bagai mana dan usaha apa dg partai yg tergeser ini?





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Tata Tertib Peserta


Bimbingan Teknis


Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

 Selalu memakai kartu tanda peserta (**ID Card**) selama berada di lingkungan Pusdik


 **Tepat waktu** dalam mengikuti setiap kegiatan/ sesi materi


 Mengisi **Presensi** pada akun **SIMULTAN**


 Peserta menyiapkan perangkat (HP/*Laptop*) yang terhubung dengan **koneksi internet**


 Tidak mengaktifkan nada dering selama mengikuti pembelajaran dalam aula/kelas

 Tidak merokok dalam kamar

 Tidak menerima tamu dalam kamar, dipersilakan menerima tamu di lobby max pukul 21.00 WIB

 Tidak diperkenankan keluar area pusdik di atas pukul 22.00 WIB

 Jika ada keperluan mendesak harus meninggalkan Pusdik sebelum penutupan, harus mendapatkan izin panitia DPP yang bertugas di Pusdik

 Dalam mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki prinsip **Positif dan Kolaboratif**



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

ALUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN SECARA *OFFLINE* DI PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

PRA REGISTRASI

1



Pusdik melaksanakan rapat koordinasi dengan organisasi pihak ketiga secara *online*

2



Pusdik mengirimkan surat pemanggilan peserta (terlampir ketentuan peserta, jadwal kegiatan, dan draft data peserta)

3



Organisasi pihak ke-3 memberikan data peserta kepada Pusdik Pancasila dan Konstitusi

4



Pusdik menginput data peserta di laman e-pusdik

5



Peserta mendapatkan Surat Tugas yang diterbitkan oleh organisasi pihak ke-3

6



Peserta datang ke kampus Pusdik (wajib membawa surat tugas)

7



- Jika **suhu tubuh normal**, maka peserta akan diarahkan menuju ruang registrasi
- Jika **suhu tubuh tidak normal** (di atas $37,5^{\circ}\text{C}$), maka peserta akan diarahkan beristirahat sejenak di Pos *Security* untuk nanti diperiksa suhu tubuh kembali

Seluruh peserta, narasumber dan pegawai akan diperiksa suhu tubuhnya sebelum memasuki kampus Pusdik Pancasila dan Konstitusi

8



Seluruh peserta wajib menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum masuk ke dalam area Pusdik Pancasila dan Konstitusi

9



Seluruh tas peserta akan dibersihkan menggunakan desinfektan

REGISTRASI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

10



Peserta melakukan registrasi dan diarahkan untuk tertib antri dengan jarak minimal 1-2 meter antar peserta registrasi

11



Peserta di *chek* suhu tubuh sebelum memasuki ruang aula

12



Peserta melakukan absensi melalui akun Simultan masing-masing peserta.

13



Peserta duduk di tempat yang telah ditentukan dengan jarak 1-2 meter antar peserta pendidikan

14



Peserta mengisi soal *Pre Test* di akun SIMULTAN masing-masing

15



Peserta mengikuti rangkaian kegiatan pendidikan (pembukaan dan kegiatan pembelajaran)

16



Narasumber memberikan materi kepada peserta

17



Peserta dapat langsung mengacungkan tangan jika ingin bertanya

18



Moderator mengatur jalannya diskusi

19



Narasumber selesai memberikan materi

20



Peserta mengisi kuesioner evaluasi narasumber, kuesioner evaluasi kegiatan, dan soal *Post Test* di akun **SIMULTAN** masing-masing

21



Peserta mengikuti acara penutupan

22



Peserta yang memenuhi syarat akan mendapatkan e-sertifikat

23



Uang transport peserta (jika ada) akan dilaksanakan dengan mekanisme transfer

24



Peserta kembali ke daerah tempat asal masing-masing

PASCA PENDIDIKAN

25



Seluruh peralatan dan lingkungan
Pusdik akan dibersihkan dengan
menggunakan disinfektan

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA DARI PANITIA PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA/
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM**

NO.	UTUSAN DPP/ DPW PROV.	NAMA + GELAR	JENIS KELAMIN	JENJANG PENDIDIKAN TERAKHIR (SMA/S1/S2/S3)	JABATAN
1	ACEH	H. FUADY, ST., M.SI	L	MAGISTER	KETUA DPW
2	ACEH	MUHAMMAD SUFRI, M.PD	L	MAGISTER	WAKIL SEKRETARIS DPW
3	ACEH	ERLIZAR, SH., MH	L	MAGISTER	KABID HUKUM DPW
4	SUMUT	SYAIFUL ARIFIN	L	SMA	WAKIL SEKRETARIS DPW
5	SUMUT	ZULKIFLI TAMBUNAN, SH., M.KN.	L	MAGISTER	KABID HUKUM DAN HAM DPW
6	SUMUT	NUR KHOSIM, SH.	L	SARJANA	SEKRETARIS DPD SERDANG BEDAGAI
7	SUMBAR	H. BENNY JOVIAL, SP	L	SARJANA	KETUA DPW
8	SUMBAR	H. JON AFRIZAL, S.Pd., M.A.P.	L	MAGISTER	SEKRETARIS DPW
9	SUMBAR	MUHAMMAD IKHLAS, SH., MH.	L	MAGISTER	KABID. HUKUM DPW
10	RIAU	H. NURDIN SE AK MM	L	MAGISTER	KETUA DPW
11	RIAU	ISKANDAR	L	SARJANA	SEKRETARIS DPW
12	RIAU	AMIN TRIAWAN	L	SARJANA	KABID. KADERISASI DPW
13	JAMBI	MAHYUDI, SP	L	SARJANA	KETUA DPW
14	JAMBI	ARIES SUPRIADI, S.PT	L	SARJANA	SEKRETARIS DPW
15	JAMBI	FERDIA PRAKARSA, SH	L	SARJANA	KETUA BAPILU DPW
16	SUMSEL	AMRIL SUDIONO, ST	L	SARJANA	SEKRETARIS DPW
17	SUMSEL	RENI ANGGRAINI, A.MD	P	DIPLOMA	BENDAHARA DPW
18	SUMSEL	UMAR ABDURRAHMAN, SH	L	SARJANA	KABID. HUKUM DPW
19	BENGKULU	DEDI HARYONO, ST	L	SARJANA	KETUA DPW
20	BENGKULU	NOVI HERIYANTO, S.TP	L	SARJANA	SEKRETARIS DPW
21	BENGKULU	THARMIZI, S.SOS	L	SARJANA	KABID. TERITORI
22	LAMPUNG	SAMSANI SUDRADJAT, S.PI	L	SARJANA	KETUA DPW
23	LAMPUNG	M IMRON ROSADI, SE	L	SARJANA	SEKRETARIS DPW
24	LAMPUNG	ANDHES TAN SATRISNA, SH.,MH.	L	MAGISTER	KABID HUKUM DPW
25	BABEL	TEGUH WIBOWO MULYONO, AMD. FARM	L	DIPLOMA	SEKRETARIS DPW
26	BABEL	TATO TRISETYA, SH., M.KN.	L	MAGISTER	BIDANG HUKUM DPW
27	BABEL	HERI GUNAWAN	L	SMA	KABID. GAHORA DPW
28	KEPRI	AGUS PURWANTO, SH. MH.	L	MAGISTER	SEKRETARIS DPW
29	KEPRI	FATHUR ROHIM, SH., MH.	L	MAGISTER	KABID. LH DPW
30	KEPRI	ADE PUTRA WINATA, SH	L	SARJANA	FUNGSIONARIS DPW
31	BANTEN	NOVIS SUGIAWAN, S.SOS	L	SARJANA	WAKIL KETUA DPW
32	BANTEN	JUNAIDI FAJRI, SE, MM	L	MAGISTER	SEKRETARIS DPW
33	BANTEN	YASEN, SH	L	SARJANA	BIDANG HUKUM DPW
34	JAKARTA	SELAMET	L	SMA	WAKIL SEKRETARIS DPW
35	JAKARTA	SUNARDI	L	SMA	WAKIL BENDUM DPW
36	JAKARTA	ARYO TYASMORO, SH.	L	SARJANA	KABID. HUKUM DPW
37	JABAR	DR.ONDANG SURJANA, DRS.,S.H., M.SI.,M.H.,QIA	L	DOKTOR	KABID. HUKUM DAN HAM DPW
38	JABAR	FAKIH ZATNIKA TAUFIK, SH, MH	L	MAGISTER	WAKABID HUKUM DAN HAM DPW
39	JABAR	JEFFRY LEONARD P TOBING., M.H., M.PD.	L	MAGISTER	BID. HUKUM DAN HAM DPW
40	JATENG	AHMADI, SE	L	SARJANA	KETUA DPW
41	JATENG	FRIS DWI YULIANTO, S.PI, MH	L	MAGISTER	SEKRETARIS DPW
42	JATENG	ASTAFIED NUR ROHMAN, SH	L	SARJANA	KABID HUKUM DAN ADVOKASI DPW
43	DIY	SIGIT FAJAR ROHMAN., S.H., M.A.P	L	MAGISTER	FUNGSIONARIS DPW
44	DIY	TAUFIQ HIDAYAT, S.KOM, M.B.A	L	MAGISTER	FUNGSIONARIS DPW

45	DIY	ROBBY ANDRIAN, SH, MH	L	MAGISTER	FUNGSIONARIS DPW
46	JATIM	MISBAKHUL MUNIR, S.PD., MM	L	MAGISTER	SEKRETARIS DPW
47	JATIM	H. DODDY EKA PUTRA, ST, MM.	L	MAGISTER	BANGDA
48	JATIM	INDRA RUKMONO SH	L	SARJANA	FUNGSIONARIS DPW
49	BALI	AHMAD SULTHONI, SH	L	SARJANA	KABID HUKUM DAN ADVOKASI
50	BALI	IKA SEKAR MUTIARA, SH	P	SARJANA	FUNGSIONARIS DPW
51	BALI	BAGUS ZUNTORO PUTRO, S.H.	L	SARJANA	FUNGSIONARIS DPW
52	NTB	LALU PAHRURROZI, ST., MIE	L	MAGISTER	KETUA DPW
53	NTB	ABDUSSATAR KHALIL, M.A.	L	MAGISTER	WAKIL SEKRETARIS DPW
54	NTB	MUHAMAD HASYIM, S.PD.I	L	SARJANA	KABID REKRUTMEN DPW
55	NTT	SUHARJITO. SH., M.SI.	L	MAGISTER	KETUA DPW
56	NTT	SYAFRUDIN GORAN TOKAN, A.MD.	L	DIPLOMA	SEKRETARIS DPW
57	NTT	MUHAMMAD ZAINI BETAN, S.Pd	L	SARJANA	BIDANG HUKUM DPW
58	KALBAR	MUSLIH, SP.	L	SARJANA	KETUA DPW
59	KALBAR	EKO GUNDARTO	L	SMA	BENDAHARA DPW
60	KALBAR	DICKY ARIANSYAH, SH	L	SARJANA	KABID HUKUM & ADVOKASI DPW
61	KALTENG	ELYAS, S. PI	L	SARJANA	KETUA DPW
62	KALTENG	ASNAWI	L		WAKIL KETUA DPW
63	KALTENG	BUDI SANTOSO, S.SOS	L	SARJANA	SEKRETARIS DPW
64	KALSEL	RISWANDI, S.IP	L	SARJANA	KETUA DPW
65	KALSEL	HARYANTO, SE	L	SARJANA	WAKIL KETUA DPW
66	KALSEL	MUHAMMAD BASUNI, ST	L	SARJANA	KETUA BAPPILU DPW
67	KALTIM	H. SARWONO, SP., MM	L	MAGISTER	SEKRETARIS DPW
68	KALTIM	ALFIAN, BCHK., SH	L	SARJANA	BIDANG HUKUM DPW
69	KALTIM	AHMAD YANI, SH	L	SARJANA	BIDANG HUKUM DPW
70	KALTARA	SURYA YUNIZA, SE	L	SARJANA	KETUA DPW
71	KALTARA	AL HAKIM, S.PD	L	SARJANA	SEKRETARIS DPW
72	KALTARA	GAZALBA, SH	L	SARJANA	BIDANG ADVOKASI & HUKUM DPW
73	SULUT	JEFRY YOHANIS MAKALEGI, ST	L	SARJANA	KETUA DPW
74	SULUT	FAZRIN BASALAMAH, SH	L	SARJANA	SEKRETARIS DPW
75	SULUT	ABDUL KADIR	L		FUNGSIONARIS DPW
76	SULTENG	H. ZAINUDDIN TAMBUALA, LC., MA	L	MAGISTER	KETUA DPW
77	SULTENG	SUDARSONO	L	DIPLOMA	SEKRETARIS DPW
78	SULTENG	MUHAMMAD RIF'AT. ST	L	SARJANA	SEKRETARIS DPD PALU
79	SULSEL	DR. SYAMSARI, S.PT, MM	L	DOKTOR	KETUA DPW
80	SULSEL	MUH. JAFAR SODDING	L	SARJANA	KOORDAPIL SULSEL 3
81	SULSEL	ASWAR, S.H.I., M.H	L	MAGISTER	FUNGSIONARIS BIDKUM DPW
82	SULTRA	TUMARUDDIN, S.SI., APT.	L	SARJANA	KETUA DPW
83	SULTRA	HERMAWAN TAUFIK LAMBOTOE, S.SI	L	SARJANA	SEKRETARIS DPW
84	SULTRA	HENDRO KUSUMA JAYA,SH.,M.KN	L	MAGISTER	BIDANG HUKUM DPW
85	GORONTALO	IMAN HADI WALUYO, S.SI	L	SARJANA	KETUA DPW
86	GORONTALO	M. GUFRON SURATMAN, S.SOS	L	SARJANA	SEKRETARIS DPW
87	GORONTALO	ZUHRIA RAUF, SH	P	SARJANA	KABID HUKUM DPW
88	SULBAR	H. HAJRUL MALIK, S.AG, M.PD	L	MAGISTER	KETUA DPW
89	SULBAR	SYAMSIR, S.IP	L	SARJANA	SEKRETARIS DPW
90	SULBAR	ZAINUDDIN, ST.	L	SARJANA	BIDANG HUKUM DPW
91	MALUKU	TALIB SOUMENA, ST	L	SARJANA	KETUA DPW
92	MALUKU	YERMIA SILETTY, S.H.	L	SARJANA	KABID HUKUM DAN HAM DPW
93	MALUKU	FIRDAUS RENUAT, SH	L	SARJANA	WAKIL SEKRETARIS DPW

94	MALUT	ALIMIN MUHAMMAD, S.PD	L	SARJANA	KETUA DPW
95	MALUT	DR. SAIFUL AHMAD, M.SI	L	DOKTOR	SEKRETARIS DPW
96	MALUT	MUHDAR HASANAT, SE	L	SARJANA	BENDAHARA DPW
97	PAPUA	DR. MUHAMAD YAMIN NOCH, SE., M.SA	L	DOKTOR	KETUA DPW
98	PAPUA	DR. AHMAD RIFAI RAHAWARIN, SH.MH	L	DOKTOR	SEKRETARIS DPW
99	PAPUA	ARFAN ARIFIN, SH.,M.H	L	MAGISTER	BAPPILU
100	PABAR	CHARLOS CHRISTOFOR MARYEN	L	SMA	KETUA DPW PAPUA BARAT
101	PABAR	RONALD ERWIN PATTIPAWAEJ, A.M.D	L	DIPLOMA	SEKRETARIS DPW
102	PABAR	SIRAJUDIN, SH., M.SI	L	MAGISTER	
103	PABARDA	IR. H. ANDI SAMSUL BAHRI MADDIKELLENG S.P. MH	L	MAGISTER	KETUA DPW
104	PABARDA	IR. FARIED DESEMBARDI. ST, MT.	L	MAGISTER	FUNGSIONARIS DPW
105	PABARDA	DARWANTO	L		BENDAHARA DPW
106	PAGUN	ONESIMUS HELUKA S.SOS	L	SARJANA	KETUA DPW
107	PAGUN	SIMSON PAYAGE A.MD,KES	L	DIPLOMA	KETUA DPD YAHUKIMO
108	PAGUN	YUNUS KOGOYA, S.SOS	L	SARJANA	FUNGSIONARIS DPW
109	PASEL	Pdt. ZADRAK ELWUAR. S. TH, MH	L	MAGISTER	KETUA DPW
110	PASEL	ALI IMRAN RAMADHAN, ST	L	SARJANA	SEKRETARIS DPW
111	PASEL	JOHAN FRET S ELWARIN, S.PI	L	SARJANA	FUNGSIONARIS DPW
112	PATENG	H. ABDUL RAHMAN, SE	L	SARJANA	KETUA DPW
113	PATENG	DIMYATI, S.PD	L	SARJANA	SEKRETARIS DPW
114	PATENG	YERMIAS PIGOME, S.IP	L	SARJANA	FUNGSIONARIS DPW
115	DPN	MOHAMMAD SYAHFAN BADRI. S	L	SARJANA	KABANGTER, KOORDAPIL JAMBI
116	DPN	ACHMAD ZAIROFI	L	SARJANA	KABANGTER, KOORDAPIL JABAR VII
117	DPN	AHMAD ZAINUDDIN	L	MAGISTER	KABANGTER, KOORDAPIL JATIM VII
118	DPN	H. ROFI' MUNAWAR, LC	L	SARJANA	KABANGTER, KOORDAPIL NTB II
119	DPN	IR. AKHMAD FARADIS	L	SARJANA	KABANGTER, KOORDAPIL SULTENG
120	DPN	DR. H. RAIHAN ISKANDAR, MM.	L	DOKTOR	KOORDAPIL DKI JAKARTA III
121	DPN	RICO MARBUN, M.SC.	L	MAGISTER	KETUA BAPPILU/KOORDAPIL JABAR I
122	DPN	ANANTO PRATIKNO	L		KOORDAPIL JABAR III
123	DPN	DR. SARAH HANDAYANI, SKM, M.KES	P	DOKTOR	KOORDAPIL JABAR IV
124	DPN	HISAN ANIS MATTA, BA., MA.	P	MAGISTER	SEKBID POLPEM/KOORDAPIL JABAR V
125	DPN	R. AKHMAD YANI SAEFUDDIN, S.SIT	L	SARJANA	KOORDAPIL JABAR XI
126	DPN	MUSYafa AHMAD RAHIM, LC., MA.	L	MAGISTER	KABID KADERISASI/KOORDAPIL JATENG II
127	DPN	DR. ARIF AWALUDIN SH, M.HUM	L	DOKTOR	KOORDAPIL JATENG VII
128	DPN	HENDRO SULISTYO	L	SARJANA	KOORDAPIL JATENG VI
129	DPN	ROHMANI, M.A.	L	MAGISTER	KOORDAPIL JATENG IX
130	DPN	H. MAHBUB	L	SMA	KOORDAPIL JATENG X
131	DPN	ENDY JUNAEDY K, SE	L	SARJANA	KOORDAPIL JATIM IV
132	DPN	HUDZAIFAH MUHIBULLAH	L	SMA	KOORDAPIL JABAR X
133	DPN	DR. JUNEF ISMALIYANTO, A.PI, ME	L	DOKTOR	KOORDAPIL JATIM VIII
134	DPN	SLAMET, SH.	L	SARJANA	KOORDAPIL JATIM IX
135	DPN	GUNGUN GUNAWAN	L	SMA	KOORDAPIL JATIM VI
136	DPN	ARDIN ANGGAWIRYA KARUNDENG	L	SMA	WAKIL KOORDAPIL BANTEN III
137	DPN	KUMALASARI KARTINI	P	SARJANA	KABID ORBY DPN
138	DPN	DRS. H. RIDWAN THALIB	L	SARJANA	KOORDAPIL BABEL
139	DPN	KOMIRUDDIN, LC	L	SARJANA	KOORDAPIL LAMPUNG II
140	DPN	YUSWAR HIDAYATULLAH, S.IP, M.AP.	L	MAGISTER	KOORDAPIL SUMSEL I
141	DPN	MOHARRIADI, ST, M.AG	L	MAGISTER	KOORDAPIL ACEH I
142	DPN	RATU RATNA DAMAYANTI, SOS	P	SARJANA	KOORDAPIL JABAR VI
143	DPN	AMIN FAHRUDIN SH., MH.	L	MAGISTER	KABID HUKUM, KOORDAPIL JATENG VII
144	DPN	TINA H. TAMHER SH., MH.	P	MAGISTER	WAKA BIDKUM DPN
145	DPN	YUSRI ADDIN YUSUF, SHI	L	SARJANA	KABIRO BIDKUM DPN
146	DPN	M AGUS AWALUS SHOIM, SH., M. PHIL	L	MAGISTER	KABIRO BIDKUM DPN
147	DPN	RAHMAD LUBIS, SH., MH.	L	MAGISTER	FUNGSIONARIS BIDKUM DPN
148	DPN (PANITIA)	ABQARI MUHAMMAD AL FATIH, MH.	L	MAGISTER	SEKRETARIS BIDKUM DPN

149	DPN (PANITIA)	AHMAD HAFIDZ, SH	L	SARJANA	FUNGSIONARIS BIDKUM DPN
150	DPN (PANITIA)	EFRIZA, SH., MHLI	L	MAGISTER	FUNGSIONARIS BIDKUM DPN
TAMBAHAN					
151	DPN NON KUOTA	ANDI SAPUTRO	L	SARJANA	KABIRO BIDKUM DPN
152	DPN NON KUOTA	RATNO TIMUR, SH	L	SARJANA	FUNGSIONARIS BIDKUM DPN
153	DPN NON KUOTA	SEPTANTRI FAZLURAHMAN, SH	L	SARJANA	FUNGSIONARIS BIDKUM DPN
154	DPN NON KUOTA	FAUZI WAHYU MUNTORO	L	SMA	KOORDAPIL JATENG
155	DPN NON KUOTA	ANGGA SATRIA BIMA, S.KOM	L	SARJANA	
156	DPN NON KUOTA				
157	DPN NON KUOTA	RUSDI J. ABBAS, PH.D	L	DOKTOR	
158	DPN NON KUOTA	SARAH AZZAHRA, S.SOS	P	SARJANA	KOORDAPIL BANTEN III

Data Peserta Kegiatan**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	INSTANSI	ASAL	Pendidikan
1	HARYANTO, S.E.	Laki-laki	DPW Kalimantan Selatan	KALIMANTAN SELATAN	S1
2	TEGUH WIBOWO MULYONO, Amd.Farm.	Laki-laki	DPW Bangka Belitung	BANGKA BELITUNG	DIII
3	MUHAMMAD BASUNI, S.T.	Laki-laki	DPW PARTAI GELORA INDONESIA KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN SELATAN	S1
4	INDRA RUKMONO, S.H., M.H., M.Kn	Laki-laki	DPW Jawa Timur	JAWA TIMUR	S1
5	RISWANDI, S.IP.	Laki-laki	DPW Kalimantan Selatan	KALIMANTAN SELATAN	S1
6	HERI GUNAWAN	Laki-laki	DPW Bangka Belitung	BANGKA BELITUNG	SMA
7	TATO TRISETYA, S.H., M.Kn.	Laki-laki	DPW Bangka Belitung	BANGKA BELITUNG	S2
8	H. YUSRI ADDIN YUSUF, S.H.I.	Laki-laki	DPN	D.K.I. JAKARTA	S1
9	DIMYATI, S.Pd.	Laki-laki	DPW Papua Tengah	PAPUA TENGAH	S1
10	ARYO TYASMORO, S.H.	Laki-laki	DPW DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	S1
11	ARDIN ANGGAWIRYA KARUNDENG	Laki-laki	DPN	BANTEN	SMA
12	EKO GUNDARTO	Laki-laki	DPW Kalimantan Barat	KALIMANTAN BARAT	S1
13	NOVIS SUGIAWAN, S.Sos.	Laki-laki	DPW Banten	BANTEN	S1
14	YERMIAS PIGOME, S.IP	Laki-laki	DPW Papua Tengah	PAPUA TENGAH	S1
15	H. DODDY EKA PUTRA, S.T., M.M.	Laki-laki	DPW Jawa Timur	JAWA TIMUR	S2

16	ONESIMUS HELUKA, S.Sos.	Laki-laki	DPW Papua Pegunungan	PAPUA PEGUNUNGAN	S1
17	DICKY ARIANSYAH, S.H.	Laki-laki	DPW Kalimantan Barat	KALIMANTAN BARAT	S1
18	AHMAD YANI, S.H.	Laki-laki	DPW Kalimantan Timur	KALIMANTAN TIMUR	S1
19	KOMIRUDDIN, Lc.	Laki-laki	DPN	LAMPUNG	S1
20	SIMSON PAYAGE, A.Md.Kes.	Laki-laki	DPW Papua Pegunungan	PAPUA PEGUNUNGAN	DIII
21	H. ABDUL RAHMAN, S.E.	Laki-laki	DPW Papua Tengah	PAPUA TENGAH	S1
22	SYAMSIR, S.IP.	Laki-laki	DPW Sulawesi Barat	SULAWESI BARAT	S1
23	FAZRIN BASALAMAH, S.H.	Laki-laki	DPW Sulawesi Utara	SULAWESI UTARA	S1
24	MISBAKHUL MUNIR, S.Pd.I., M.M.	Laki-laki	DPW Jawa Timur	JAWA TIMUR	S2
25	ZAINUDDIN, S.T.	Laki-laki	DPW Sulawesi Barat	SULAWESI BARAT	S1
26	YUNUS KOGOYA, S.Sos.	Laki-laki	DPW Papua Pegunungan	PAPUA PEGUNUNGAN	S1
27	Pdt. ZADRAK ELWUAR, S.Th., M.H.	Laki-laki	DPW Papua Selatan	PAPUA SELATAN	S2
28	SAMSANI SUDRADJAT, S.Pi.	Laki-laki	DPW Lampung	LAMPUNG	S1
29	SLAMET, S.H.	Laki-laki	DPN	JAWA BARAT	S1
30	HERMAWAN TAUFIK LAMBOTOE, S.Si.	Laki-laki	DPW Sulawesi Tenggara	-	S1
31	Dr. AHMAD RIFAI RAHAWARIN, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Papua	PAPUA	S3
32	MUSLIH, S.P.	Laki-laki	DPW Kalimantan Barat	KALIMANTAN BARAT	S1
33	HENDRO KUSUMA JAYA, S.H., M.Kn.	Laki-laki	DPW Sulawesi Tenggara	SULAWESI TENGGARA	S2
34	ANDHES TAN SATRISNA, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Lampung	LAMPUNG	S2
35	NOVI HERIYANTO, S.TP.	Laki-laki	DPW Bengkulu	BENGKULU	S1

36	H. YUSWAR HIDAYATULLAH, S.IP., M.AP.	Laki-laki	DPN	SUMATERA SELATAN	S2
37	UMAR ABDURRAHMAN, S.H.	Laki-laki	DPW Sumatera Selatan	SUMATERA SELATAN	S1
38	ABDUL KADIR	Laki-laki	DPW Sulawesi Utara	SULAWESI UTARA	S1
39	Dr. ARIF AWALUDIN, S.H., M.Hum.	Laki-laki	DPN	JAWA TENGAH	S3
40	AHMAD SULTHONI, S.H.	Laki-laki	DPW Bali	BALI	S1
41	JOHAN FRETS ELWARIN, S.Pi.	Laki-laki	DPW Papua Selatan	PAPUA SELATAN	S1
42	RENI ANGGRAINI, A.Md.	Perempuan	DPW Sumatera Selatan	SUMATERA SELATAN	DIII
43	ERLIZAR, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Aceh	ACEH	S2
44	H. FUADY, S.T., M.Si.	Laki-laki	DPW Aceh	ACEH	S2
45	MUHAMMAD SUFRI, M.Pd.	Laki-laki	DPW Aceh	ACEH	S2
46	AMRIL SUDIONO, S.T.	Laki-laki	DPW Sumatera Selatan	SUMATERA SELATAN	S1
47	SYAFRUDIN GORAN TOKAN, A.Md.	Laki-laki	DPW Nusa Tenggara Timur	NUSA TENGGARA TIMUR	DIII
48	JEFRY YOHANIS MAKALEGI, S.T.	Laki-laki	DPW Sulawesi Utara	SULAWESI UTARA	S1
49	Dr. MUHAMAD YAMIN NOCH, S.E., M.SA.	Laki-laki	DPW Papua	PAPUA	S3
50	TUMARUDDIN, S.Si., Apt.	Laki-laki	DPW Sulawesi Tenggara	SULAWESI TENGGARA	S1
51	ARFAN ARIFIN, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Papua	PAPUA TENGAH	S2
52	IKA SEKAR MUTIARA, S.H.	Perempuan	DPW Bali	BALI	S1
53	SARAH AZZAHRA	Perempuan	DPN	D.K.I. JAKARTA	S1
54	MUHAMMAD IKHLAS, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Sumatera Barat	SUMATERA BARAT	S2
55	ALI IMRAN RAMADHAN, S.T.	Laki-laki	DPW Papua Selatan	PAPUA SELATAN	S1
56	AGUS PURWANTO, S.H.	Laki-laki	DPW Kepulauan Riau	KEPULAUAN RIAU	S1
57	ZUHRIA RAUF, S.H.	Perempuan	DPW Gorontalo	GORONTALO	S1

58	MUHAMAD HASYIM, S.Pd.I.	Laki-laki	DPW Nusa Tenggara Barat	NUSA TENGGARA BARAT	S1
59	MOHARRIADI	Laki-laki	DPN	ACEH	S2
60	SYAIFUL ARIFIN	Laki-laki	DPW Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	SMA
61	ABDUSSATAR KHALIL, M.A.	Laki-laki	DPW Nusa Tenggara Barat	NUSA TENGGARA BARAT	S2
62	M. IMRON ROSADI, S.E.	Laki-laki	DPW Lampung	-	S1
63	H. ZAINUDDIN TAMBUALA, Lc., M.A.	Laki-laki	DPW Sulawesi Tengah	SULAWESI TENGAH	S2
64	BAGUS ZUNTORO PUTRO, S.H.	Laki-laki	DPW Bali	BALI	S1
65	H. SARWONO, S.P., M.M.	Laki-laki	DPW Kalimantan Timur	KALIMANTAN TIMUR	S2
66	RONALD ERWIN PATTIPAWAEJ, A.Md.	Laki-laki	DPW Papua Barat	PAPUA BARAT	DIII
67	SUHARJITO, S.H., M.Si.	Laki-laki	DPW Nusa Tenggara Timur	NUSA TENGGARA TIMUR	S2
68	ALFIAN, BCHK., S.H.	Laki-laki	DPW Kalimantan Timur	KALIMANTAN TIMUR	S1
69	NUR KHOSIM, S.H.	Laki-laki	DPW Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	S1
70	SUDARSONO	Laki-laki	DPW Sulawesi Tengah	SULAWESI TENGAH	S1
71	CHARLOS CHRISTOFOR MARYEN, S.H	Laki-laki	DPW Papua Barat	PAPUA BARAT	S1
72	THARMIZI, S.Sos.	Laki-laki	DPW Bengkulu	BENGKULU	S1
73	H. JON AFRIZAL, S.Pd., M.A.P.	Laki-laki	DPW Sumatera Barat	SUMATERA BARAT	S2
74	DEDI HARYONO, S.T.	Laki-laki	DPW Bengkulu	BENGKULU	S1
75	Ir. FARIED DESEMBARDI, S.T., M.T.	Laki-laki	DPW Papua Barat Daya	PAPUA BARAT	S2
76	MUHAMMAD ZAINI BETAN, S.Pd.	Laki-laki	DPW Nusa Tenggara Timur	NUSA TENGGARA TIMUR	S1
77	M. GUFRON SURATMAN, S.Sos.	Laki-laki	DPW Gorontalo	GORONTALO	S1

78	MUHAMMAD RIF'AT, S.T.	Laki-laki	DPW Sulawesi Tengah	SULAWESI TENGAH	S1
79	RATNO TIMUR, S.H.	Laki-laki	DPN	JAWA BARAT	S1
80	IMAN HADI WALUYO, S.Pd.	Laki-laki	DPW Gorontalo	GORONTALO	S1
81	ZULKIFLI TAMBUNAN, S.H., M.Kn.	Laki-laki	DPW Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	S2
82	DARWANTO, ST	Laki-laki	DPW Papua Barat Daya	PAPUA BARAT	S1
83	TALIB SOUMENA, S.T.	Laki-laki	DPW Maluku	MALUKU	S1
84	SEPTANTRI FAZLURAHMAN, S.H.	Laki-laki	DPN	JAWA BARAT	S1
85	H. HAJRUL MALIK, S.Ag., M.Pd.	Laki-laki	DPW Sulawesi Barat	SULAWESI BARAT	S2
86	Ir. H. ANDI SAMSUL BAHRI MADDUKELLENG, S.P., M.H.	Laki-laki	DPW Papua Barat Daya	PAPUA BARAT	S2
87	LALU PAHRURROZI, S.T., MIE.	Laki-laki	DPW Nusa Tenggara Barat	NUSA TENGGARA BARAT	S1
88	FATHUR ROHIM, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Kepulauan Riau	KEPULAUAN RIAU	S2
89	YASEN, S.H.	Laki-laki	DPW Banten	BANTEN	S1
90	FAKIH ZATNIKA TAUFIK, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Jawa Barat	JAWA BARAT	S2
91	Dr. ONDANG SURJANA, Drs., S.H., M.Si.,M.H.,QIA.	Laki-laki	DPW Jawa Barat	JAWA BARAT	S3
92	JEFFRY LEONARD P. TOBING, M.H., M.Pd.	Laki-laki	DPW Jawa Barat	JAWA BARAT	S2
93	MAHYUDI, S.P.	Laki-laki	DPW Jambi	JAMBI	S1
94	H. BENNY JOVIAL, SP.	Laki-laki	DPW Sumatera Barat	SUMATERA BARAT	S1
95	ARIES SUPRIADI, S.Pt.	Laki-laki	DPW Jambi	JAMBI	S1
96	FERDIA PRAKARSA, S.H.	Laki-laki	DPW Jambi	JAMBI	S1
97	BUDI SANTOSO, S.Sos.	Laki-laki	DPW Kalimantan Tengah	KALIMANTAN TENGAH	S1
98	ASNAWI, S.P.	Laki-laki	DPW Kalimantan Tengah	KALIMANTAN TENGAH	S1

99	AL HAKIM, S.Pd.	Laki-laki	DPW Kalimantan Utara	KALIMANTAN UTARA	S1
100	GAZALBA, S.H.	Laki-laki	DPW Kalimantan Utara	KALIMANTAN UTARA	S1
101	SURYA YUNIZA, S.E.	Laki-laki	DPW Kalimantan Utara	KALIMANTAN UTARA	S1
102	ISKANDAR, S.Si.	Laki-laki	DPW Riau	RIAU	S1
103	ELYAS, S.Pi.	Laki-laki	DPW Kalimantan Tengah	KALIMANTAN TENGAH	S1
104	H. AMIN TRIAWAN, S.Si.	Laki-laki	DPW Riau	RIAU	S1
105	Drs H. MOHAMMAD SYAHFAN BADRI S.	Laki-laki	DPN	JAWA BARAT	S1
106	H. NURDIN, S.E., Ak., M.M.	Laki-laki	DPW Riau	RIAU	S2
107	MUHDAR HASANAT	Laki-laki	DPW Maluku Utara	MALUKU UTARA	SMA
108	Drs. H. RIDWAN THALIB	Laki-laki	DPN	BANGKA BELITUNG	S1
109	H. MAHBUB	Laki-laki	DPN	-	S1
110	HENDRO SULISTIYO	Laki-laki	DPN	JAWA BARAT	S1
111	ENDY JUNAEDY K., S.E.	Laki-laki	DPN	D.K.I. JAKARTA	S1
112	ROHMANI, M.A.	Laki-laki	DPN	D.K.I. JAKARTA	S2
113	Dr. SAIFUL AHMAD, M.Si.	Laki-laki	DPW Maluku Utara	MALUKU UTARA	S3
114	YERMIA SILETTY, S.H.	Laki-laki	DPW Maluku	MALUKU	S1
115	FIRDAUS RENUAT, S.H.	Laki-laki	DPW Maluku	MALUKU	S1
116	ADE PUTRA WINATA, S.H.	Laki-laki	DPW Kepulauan Riau	KEPULAUAN RIAU	S1
117	Ir. AKHMAD FARADIS	Laki-laki	DPN	D.K.I. JAKARTA	S1
118	AHMAD ZAINUDDIN, Lc., ME	Laki-laki	DPN	JAWA BARAT	S1
119	ACHMAD ZAIROFI	Laki-laki	DPN	D.K.I. JAKARTA	S1
120	ALIMIN MUHAMMAD	Laki-laki	DPW Maluku Utara	MALUKU UTARA	S1
121	SELAMET	Laki-laki	DPW DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	SMA
122	M. AGUS AWALUS SHOIM, S.H., M. PHIL.	Laki-laki	DPN	JAWA BARAT	S2
123	Dr. H. RAIHAN ISKANDAR, L.C., M.M.	Laki-laki	DPN	D.K.I. JAKARTA	S3
124	SUNARDI	Laki-laki	DPW DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	SMA
125	TINA H. TAMHER, S.H., M.H.	Perempuan	DPN	JAWA BARAT	S2
126	HISAN ANIS MATTA, B.A., M.A.	Perempuan	DPN	D.K.I. JAKARTA	S2

127	MUSYafa AHMAD RAHIM, Lc., M.A.	Laki-laki	DPN	D.K.I. JAKARTA	S2
128	ASTAFIED NUR ROHMAN, S.H.	Laki-laki	DPW Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S1
129	H. AHMADI, S.E.	Laki-laki	DPW Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S1
130	GUNGUN GUNAWAN	Laki-laki	DPN	JAWA BARAT	S1
131	Dr. JUNEF ISMALIYANTO, A.Pi., ME.	Laki-laki	DPN	D.K.I. JAKARTA	S3
132	FRIS DWI YULIANTO, S.Pi., M.H.	Laki-laki	DPW Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S2
133	AMIN FAHRUDIN, S.H., M.H.	Laki-laki	DPN	JAWA BARAT	S2
134	ANGGA SATRIA BIMA, S.Kom.	Laki-laki	DPN	D.K.I. JAKARTA	S1
135	ASWAR, S.H.I., M.H.	Laki-laki	DPW Sulawesi Selatan	SULAWESI SELATAN	S2
136	Drs. MUH. JAFAR SODDING	Laki-laki	DPW Sulawesi Selatan	SULAWESI SELATAN	S1
137	TAUFIQ HIDAYAT, S.KOM., M.B.A.	Laki-laki	DPW DI Yogyakarta	D.I. YOGYAKARTA	S2
138	ANDI SAPUTRO, S.H.	Laki-laki	DPN	BANTEN	S1
139	HUDZAIFAH MUHIBULLAH	Laki-laki	DPN	JAWA BARAT	SMA
140	R. AKHMAD YANI SAEFUDDIN, S.SIT.	Laki-laki	DPN	JAWA BARAT	S1
141	KUMALASARI KARTINI	Perempuan	DPN	D.K.I. JAKARTA	S1
142	FAUZI WAHYU MUNTORO	Laki-laki	DPN	D.K.I. JAKARTA	SMA
143	ABQARI MUHAMMAD AL FATIH, M.H.	Laki-laki	DPN	JAWA BARAT	S2
144	AHMAD HAFIZ, S.H.	Laki-laki	DPN	JAWA BARAT	S1
145	JUNAIDI FAJRI, S.E., M.M.	Laki-laki	DPW Banten	BANTEN	S2
146	ANANTO PRATIKNO	Laki-laki	DPN	D.K.I. JAKARTA	S1
147	Dr. SYAMSARI, S.Pt., M.M.	Laki-laki	DPW Sulawesi Selatan	SULAWESI SELATAN	S3
148	Saldi Matta	Laki-laki	DPN	D.K.I. JAKARTA	S1
149	SIGIT FAJAR ROHMAN, S.H., M.A.P.	Laki-laki	DPW DI Yogyakarta	D.I. YOGYAKARTA	S2
150	ROBBY ANDRIAN, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW DI Yogyakarta	D.I. YOGYAKARTA	S2
151	Rizky Radianto Fajri	Laki-laki	DPN	D.K.I. JAKARTA	-
152	Andon Tegar Pribadi	Laki-laki	DPN	D.K.I. JAKARTA	-
153	Tubagus Bani Rizqi	Laki-laki	DPN	D.K.I. JAKARTA	-

154	Eko Prabowo	Laki-laki	DPN	D.K.I. JAKARTA	-
155	Alif Fadilah	Laki-laki	DPN	D.K.I. JAKARTA	-
156	EFRIZA, S.H., M.H.Li.	Laki-laki	DPN	D.K.I. JAKARTA	S2
157	Edwin Fadly Entjo Saputra	Laki-laki	DPN	D.K.I. JAKARTA	-
158	Fauzan Fadly F	Laki-laki	DPN	D.K.I. JAKARTA	-
159	Fadli Borut, S.Sos.	Laki-laki	DPW	MALUKU	S1
160	Rafiq	Laki-laki	DPN	D.K.I. JAKARTA	-
161	Mahmud Tamher	Laki-laki	DPN	D.K.I. JAKARTA	-
162	Dr. SARAH HANDAYANI, SKM., M.Kes.	Perempuan	DPN	JAWA BARAT	S3
163	Mohammad Abizar Hardianto, S.H.	Laki-laki	DPN	JAWA BARAT	S1
164	Muhamad Adam Rizki Uar	Laki-laki	DPN	D.K.I. JAKARTA	-
165	Suryadi M. Ali, SKM., M.Kes	Laki-laki	DPW Maluku Utara	MALUKU UTARA	S2